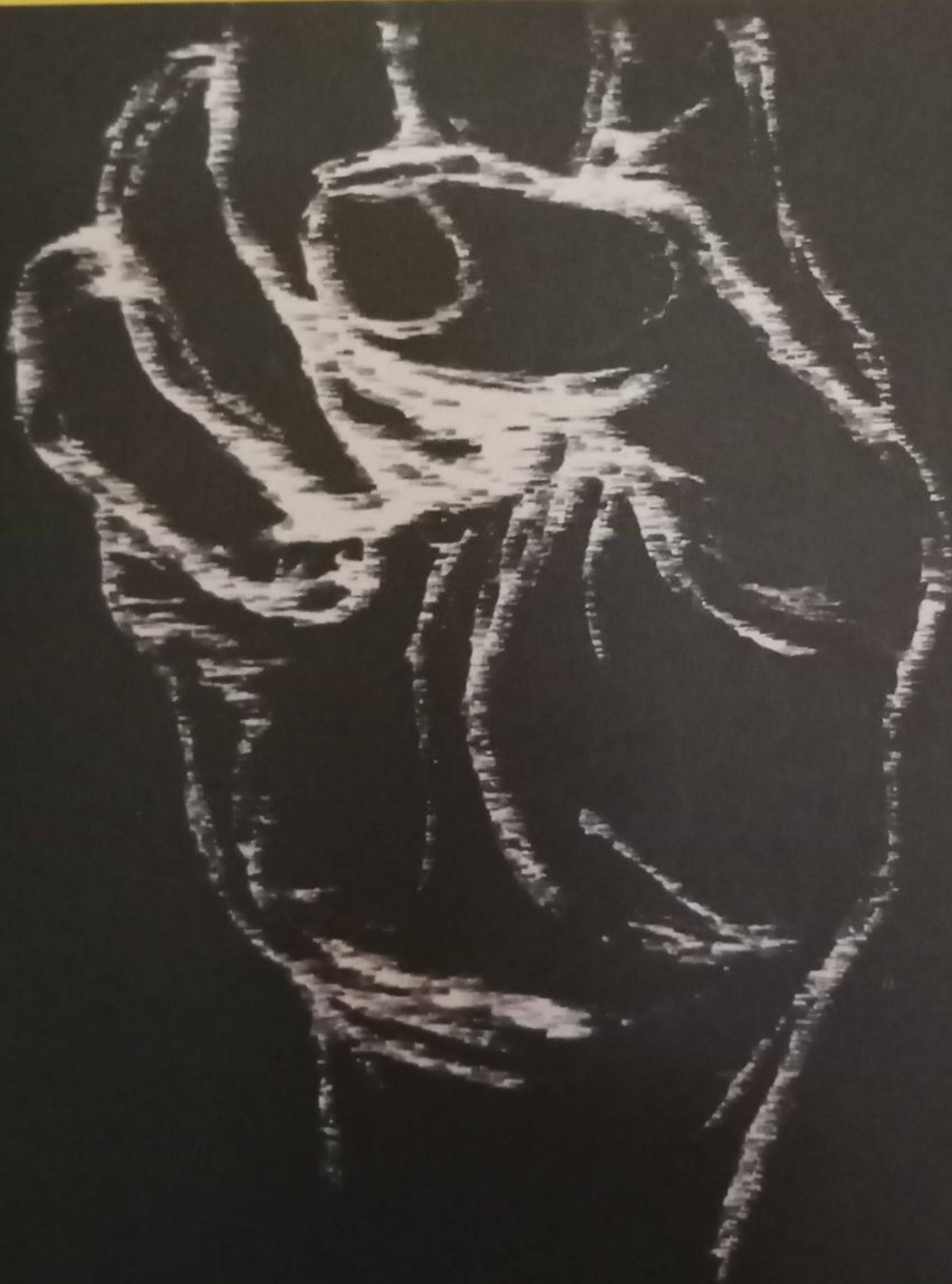




KONSEP DAN TEORI

GERAKAN SOSIAL



♦ Oman Sukmana ♦

KONSEP DAN TEORI GERAKAN SOSIAL

Oman Sukmana

Intrans Publishing
Malang

KONSEP DAN TEORI GERAKAN SOSIAL

Copyright © Juli, 2016

Pertama kali diterbitkan di Indonesia dalam Bahasa Indonesia oleh Intrans Publsihing. Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Ukuran: 15,5 cm X 23 cm ; Hal : i - ; 1 -

ISBN: 978-979-3580-95-1

Penulis:

Oman Sukmana

Cover: Dino Sanggrha Irnanda

Lay Out: Kamilia Sukmawati

Diterbitkan atas kerjasama:

Intrans Publishing

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341-573650. Fax. 0341-588010

email redaksi: redaksi.intrans@gmail.com

pemasaran: intrans_malang@yahoo.com

web: www.intranspublishing.com

Anggota IKAPI

dengan

Dewan Pengurus Daerah Jawa Timur

Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI)

dpdipspi_jawatimur@yahoo.com

Distributor:

Cita Intrans Selaras

PENGANTAR PENULIS

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan nikmat-Nya, sehingga penulis memiliki kekuatan, kemampuan, dan motivasi untuk bisa menulis buku berjudul: *“Konsep dan Peta Teori Gerakan Sosial”* ini.

Buku ini hadir sebagai respons atas kebutuhan referensi akademik, khususnya bagi mahasiswa, yang secara khusus mengkaji aspek teoritik tentang studi gerakan sosial. Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, seperti di Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Program Studi Sosiologi, terdapat mata kuliah Gerakan Sosial dan Advokasi Sosial. Sumber referensi gerakan sosial yang ada selama ini lebih banyak mengkaji dan menganalisis kasus-kasus aksi gerakan sosial secara praktis yang terjadi di beberapa tempat. Oleh karena itu tujuan utama penerbitan buku ini adalah untuk menyediakan bahan referensi teoritik bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah Gerakan Sosial dan Advokasi Sosial. Namun demikian, materi buku ini juga dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan praktisi yang tertarik untuk mengkaji fenomena gerakan sosial di masyarakat.

Materi buku ini penulis persiapkan sejak tahun 2012 melalui skema program penulisan buku ajar periode XV, berdasarkan Surat Tugas Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Nomor: E.6.f/306/BAA-UMM/III/2012, tertanggal, 15 Maret 2012. Selama 3 tahun, yakni tahun 2013, 2014, dan 2015, materi buku ini terus disempurnakan dengan menambah beberapa kajian. Baru pada tahun 2016, akhirnya buku ini bisa diterbitkan oleh Intrans Publishing.

Dalam kesempatan ini izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah memberikan dukungan atas terbitnya buku ini. Pertama, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Kedua, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Intrans Publishing yang telah bersedia bekerjasama dalam penerbitan buku ini. Ketiga, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan atas substansi buku ini. Terakhir, penulis

menyampaikan ucapan terimakasih kepada para penulis buku gerakan sosial sebagaimana yang penulis cantumkan di daftar pustaka buku ini.

Secara khusus, buku ini penulis persembahkan buat keluarga, yakni istri tercinta Teti Rohaeti, yang dengan penuh kesabaran, keikhlasan, pengertian dan kasihn sayangnya menemani penulis, serta anak-anak tersayang: AA, Ade, dan Kaka, serta mbak Anggi. Keluarga adalah segalanya. Terimakasih atas dukungan dan doanya.

Penulis menyadari bahwa materi buku ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, masukan, dan kritik dari para pembaca semuanya sangat penulis harapkan demia perbaikan materi buku ini.

Penulis

Oman Sukmana

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit

Pengantar Penulis

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Bagan

BAB I: KONSEP DAN PETA TEORITIK GERAKAN SOSIAL

- A. Konsep tentang Gerakan Sosial
- B. Kerangka Pemetaan Teori Gerakan Sosial
- C. Tipologi Gerakan Sosial
- D. Resistensi terhadap Gerakan Sosial
- E. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan dan Kegagalan Gerakan Sosial
- F. Tahap-Tahap dalam Gerakan Sosial
- G. Gerakan Sosial dan Tindakan Perlawanan (Resistensi)

BAB II: KONSEP TENTANG PERILAKU KOLEKTIF (*COLLECTIVE BEHAVIOR*)

- A. Konsep Tentang Perilaku Kolektif
- B. Sejarah Perkembangan Studi tentang Perilaku Kolektif
- C. Bentuk-Bentuk Perilaku Kolektif
- D. Perilaku Kolektif dan Tindakan Kolektif

BAB III: TEORI-TEORI PERILAKU KOLEKTIF

- A. Contagion Theory (Teori Penularan)
- B. The Emergent-Norm Theory (Teori Kemunculan Norma)
- C. The SBI/Sociocybernetic Theory
- D. The Individualist Theories (Teori Individualis)

BAB IV: TEORI GERAKAN SOSIAL LAMA (*OLD SOCIAL MOVEMENTS*)

- A. Mass Society Theory (Teori Masyarakat Massa)
- B. Relative Deprivation Theory (Teori Deprivasi Relatif)
- C. The Value-Added Theory (Teori Nilai Tambah)
- D. Teori Dominasi Kelas dan Teori Korporatokrasi

BAB V: KONSEP DAN TEORI GERAKAN SOSIAL BARU (*NEW SOCIAL MOVEMENT*)

- A. Konsep tentang Gerakan Sosial Baru
- B. Karakteristik Gerakan Sosial Baru
- C. Pandangan Umum Beberapa Teoritisi tentang Gerakan Sosial Baru
- D. Tipologi Teori Gerakan Sosial Baru
- E. Perspektif Teori Identitas

BAB VI: TEORI MOBILISASI SUMBERDAYA DAN TEORI PELUANG POLITIK

- A. Teori Mobilisasi Sumberdaya (*Resource Mobilization Theory*)
- B. Teori Proses Politik (*Political Process Theory*)

BAB VII: PERSPEKTIF KOMPREHENSIF TEORI GERAKAN SOSIAL

- A. Peluang/Kesempatan Politik (*Political Opportunity*)
- B. Struktur Mobilisasi (*Mobilizing Structure*)
- C. Pembingkai Kultural (*Culturang Framings*)
- D. Kerangka Berpikir (Kerangka Konseptual)

BAB VIII: MASYARAKAT SIPIL DAN GERAKAN SOSIAL

- A. Konsep tentang Masyarakat Sipil (*Civil Sosciety*)
- B. Perkembangan Masyarakat Sipil (*Civil Society*)
- C. Pengertian Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)
- D. Gerakan Sosial dan Masyarakat Sipil (Civil Society)
- E. Hubungan antara Negara, Pasar, dan Masyarakat Sipil (Civil Society)

BAB IX : MOZAIK GERAKAN SOSIAL

- A. Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial di Papua
- B. Gerakan Sosial Rakyat Porsea, Toba Samosir
- C. Gerakan Sosial Masyarakat Stren Kali, Surabaya
- D. Gerakan Sosial Lokal Perempuan
- E. Gerakan Sosial Korbab Bencana Lumpur Lapindo
- F. Gerakan Sosial Petani Kalibakar
- G. Gerakan Perlawanan Orang-Orang Tertindas

Daftar Pustaka
Daftar Indeks
Tentang Penulis

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. 1. : Perbedaan Antara Bentuk Sosial movement dan Bentuk <i>Collective Behavior</i> yang lainnya.....	3
Tabel 1. 2. : Peta Ciri-ciri Gerakan Sosial Berdasarkan Perspektif Beberapa Teoritis.	7
Tabel 1. 3. : Tipe-Tipe Gerakan Sosial.	9
Tabel 1. 4. : Tipe <i>Social Movement</i> Menurut Pendapat Para Sosiolog.	12
Tabel 1. 5. : Tahap-Tahap dalam Kehidupan Gerakan Sosial.	20
Tabel 1. 6. : Klasifikasi Teoritis Studi Gerakan Sosial.	29
Tabel 1. 7. : Empat Tradisi Analisis Gerakan Sosial.	30
Tabel 5. 1. : Versi Politik dan Kultural tentang Teori Gerakan Sosial Baru.	136
Tabel 6. 1. : Dimensi-Dimensi Peluang Politik dari Beberapa Ahli.	181
Tabel 7.1. : Dimensi Struktur Mobilisasi.....	

DAFTAR BAGAN

	Hal
Bagan 2. 1. : Model Analisis Tindakan Kolektif Menurut Perspektif Marxian.	56
Bagan 2. 2. : Model Analisis Tindakan Kolektif Menurut Perspektif Durkhemian.	56
Bagan 2. 3. : Model Analisis Tindakan Kolektif Menurut Perspektif Millian.	57
Bagan 2. 4. : Model Analisis Tindakan Kolektif Menurut Perspektif Weberian.	57
Bagan 2. 5. : Model Analisis Tindakan Kolektif Menurut Perspektif Charles Tilly.	58
Bagan 3. 1. : <i>Blumer`s Interpretive Interaction versus Circular Reaction.</i>	67
Bagan 3. 2. : <i>Blumer`s Development of Collctive Behavior.</i>	67
Bagan 3. 3. : Perkembangan Perilaku Kolektif Menurut Perpektif <i>The Emergent Norm Theory.</i>	53
Bagan 3. 4. : Tahap-Tahap Tindakan Kolektif Menurut Perspektif Perakitan.	81
Bagan 3. 5. : <i>A Cybernetic (Self-Regulating) Sistem.</i>	82
Bagan 3. 6. : <i>A Cybernetic Model of Human Behavior.</i>	84
Bagan 3. 7. : <i>The General Convergence Model of Collective Behavior.</i>	85

Bagan 3. 8.	: <i>Miller and Dollard`s Model of Collective Behavior. . .</i>	88
Bagan 3. 9.	: <i>Hogg and Abrams` Model of Collective Behavior.</i>	89
Bagan 4. 1.	: Perkembangan Perilaku Kolektif (<i>Collective Behavior</i>) menurut Perspektif <i>Value-Added Theory.</i>	106
Bagan 6. 1.	: <i>Synthetic Model of Resource Mobilizationby Local Communities for Organized Action.</i>	174

BAB I

KONSEP DAN PETA

TEORITIK GERAKAN SOSIAL

A. Konsep tentang Gerakan Sosial

Menurut Sujatmiko (Triwibowo, 2006: xv), membahas suatu konsep, seperti Gerakan Sosial (*Social Movement*), perlu dimulai dengan kejelasan konsep tersebut sehingga dapat diperoleh batasan dan koridor yang dimaksud dari konsep tersebut.

Sebagaimana dikatakan Macionis (1999: 607) gerakan sosial (*social movement*) merupakan tipe paling penting dari perilaku kolektif (*collective behavior*). Beberapa sosiolog menyebut gerakan sosial lebih sebagai suatu bentuk dari tindakan kolektif (*collective action*) daripada sebagai bentuk perilaku kolektif (*collective behavior*). Mereka berpendapat bahwa gerakan sosial (*social movement*) berbeda dengan bentuk-bentuk perilaku kolektif (*collective behavior*). Sementara, terdapat juga sosiolog yang mengelompokkan gerakan sosial sebagai salah satu bentuk dari *collective behavior* (Locher, 2002: 232). Sedangkan menurut Crossley (2002: 10), perilaku kolektif merupakan salah satu dimensi dari studi Gerakan Sosial yang berkembang di Eropa.

Tindakan kolektif (*collective action*) didefinisikan sebagai setiap tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan status, kekuasaan, atau pengaruh dari seluruh kelompok, bukan untuk seorang atau beberapa orang (Zomeren, 2009: 646). Mengacu kepada konsep Olson, maka inti dari konsep tindakan kolektif adalah adanya kepentingan umum atau kepentingan bersama (*public goods*) yang diusung di antara kelompok (Oliver, 1993: 272). Menurut Weber, suatu tindakan dikatakan terjadi ketika individu melekatkan makna subjektif dalam tindakan mereka (Ritzer & Goodman, 2009: 136-137). Kondisi seperti ini tidak muncul dalam konteks perilaku kolektif (*collective behavior*).

Locher (2002: 233) menyatakan bahwa perbedaan gerakan sosial dari bentuk perilaku kolektif yang lainnya, seperti: *crowd* (kerumunan), *riot* (kerusuhan) dan

rebel (penolakan, pembangkangan), dapat dilihat dari tiga aspek, yakni: (a) Pengorganisasian (*Organized*); (b) Pertimbangan (*Deliberate*); dan (c) Daya tahan (*Enduring*). Penjelasan ketiga aspek tersebut adalah sebagai berikut:

(a) Aspek Pengorganisasian (*Organized*).

Gerakan sosial (*social movements*) adalah suatu aktivitas yang terorganisir, sementara suatu perilaku kolektif (*collective behavior*) pada umumnya muncul atau terjadi tidak terorganisir. Misalnya, para partisipan suatu kerusuhan (*riot participants*) mungkin saja diantara mereka melakukan kerjasama untuk jangka waktu yang singkat dalam suatu waktu tertentu, namun keterlibatan partisipan dalam peristiwa kerusuhan tersebut bersifat bebas, sementara, dan bukan merupakan kejadian yang secara hati-hati diorganisir. Tipikal partisipan dan pemimpin dari suatu perilaku kolektif (*collective behavior*) datang dan pergi dengan cepat. Dalam suatu perilaku kolektif, tidak ada tugas-tugas khusus yang harus dilakukan oleh partisipan, sementara dalam suatu gerakan sosial para partisipan seringkali diberikan tugas-tugas khusus untuk ditampilkan, dimana mereka juga secara hati-hati merancang suatu taktik dan strategi aksi. Dalam gerakan sosial, para pemimpin (*leaders*) seringkali menciptakan dan merancang pekerjaan dan tugas-tugas khusus bagi para partisipan gerakan.

(b) Aspek Pertimbangan (*deliberate*).

Suatu gerakan sosial (*social movements*) juga terjadi karena adanya pertimbangan. Sebagian besar peristiwa perilaku kolektif (*collective behavior*) terjadi tanpa adanya perencanaan apapun dari mereka menyangkut waktunya. Sementara gerakan sosial (*social movements*), secara intensif sengaja dimunculkan dan para partisipan secara hati-hati memutuskan apakah ikut atau tidak ikut terlibat dalam suatu gerakan. Keterlibatan para partisipan seringkali didorong oleh janji-janji dan dorongan keanggotaan (*membership drives*), gerakan sosial (*social movement*) mencari publisitas dan berupaya untuk menarik sebanyak mungkin orang-orang untuk mendukung gerakan. Pertimbangan perencanaan ini tidak terjadi pada sebagian besar bentuk dari perilaku kolektif (*collective behavior*).

(c) Aspek Daya Tahan (*Enduring*).

Aksi Gerakan sosial (*social movement*) pada umumnya bertahan dalam waktu yang cukup lama (*long-lasting*) atau memiliki daya tahan (*enduring*). Sementara, suatu perilaku kolektif (*collective behavior*) terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Misalnya, suatu kerusuhan (*riots*) mungkin terjadi hanya beberapa menit, beberapa jam, atau beberapa hari saja; suatu *fads* (demam mode; fashion) mungkin terjadi untuk beberapa bulan saja. Sementara, aksi gerakan sosial (*social movements*) eksis untuk beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade.

Gambaran perbedaan antara *social movements* dan bentuk *collective behavior* yang lainnya berdasarkan ketiga aspek tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1. :
Perbedaan antara Bentuk *Social Movement*
dan Bentuk *Collective Behavior* yang lainnya

Aspek	Bentuk Perilaku Kolektif (<i>Collective Behavior</i>)	
	Gerakan Sosial (<i>Social movements</i>)	Bentuk Lainnya (<i>Crowd, Riot, Rebel, Fads</i>)
<i>Organized</i> (Pengorganisasian)	Diorganisir dengan baik; Terdapat pembagian tugas, Strategi dirancang dengan hati-hati; Ada pemimpin (<i>leaders</i>) yang jelas.	Sebagian besar tidak diorganisir dengan baik; Kerjasama antar partisipan hanya bersifat sesaat; Pemimpin (<i>leaders</i>) tidak jelas.
<i>Deliberate</i> (Pertimbangan)	Atas dasar pertimbangan; Keterlibatan partisipan didasarkan atas pertimbangan dan kesadaran; Adanya dorongan keanggotaan; Melakukan publisitas dan berusaha mencari dukungan dari banyak orang.	Terjadi tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu; Tidak ada pertimbangan dan kesadaran penuh dari partisipan atas keterlibatannya.
<i>Enduring</i> (Daya Tahan)	Waktunya relative lama.	Waktunya sangat singkat.

Sumber: Locher (2002: 233-234), diolah kembali

Untuk memperjelas konsep tentang gerakan sosial, selanjutnya dikemukakan berbagai definisi tentang gerakan sosial dari beberapa ahli sebagai berikut:

Macionis (1999: 607) menyatakan bahwa *social movement* adalah aktivitas yang diorganisasikan yang ditujukan untuk mendorong atau menghambat suatu perubahan sosial (*encourages or discourages social change*). Dari definisi gerakan sosial sebagaimana yang dikemukakan Macionis tersebut, maka dapat digarisbawahi dua hal ciri utama dari gerakan sosial, yakni: adanya aktivitas yang diorganisir dan adanya tujuan yang berkaitan dengan suatu perubahan sosial.

Senada dengan Macionis, Spencer (1982: 504) menyatakan bahwa yang dimaksud *social movement* adalah upaya kolektif yang ditujukan untuk suatu perubahan tatanan kehidupan yang baru. Ciri utama dari pandangan Spencer adalah adanya upaya kolektif (bersama) dan upaya tersebut diarahkan untuk terjadinya perubahan suatu tatanan yang lebih baik lagi dari tatanan yang ada.

Sementara, Locher (2002: 231) berpendapat bahwa ketika sekelompok orang mengatur (mengorganisir) diri dalam upaya untuk mendorong atau menolak beberapa jenis perubahan sosial, maka mereka sedang menciptakan sebuah gerakan sosial. Orang-orang dengan sedikit atau banyak kekuatan politik yang dimilikinya, kemudian mereka bergabung secara bersama-sama untuk mendapatkan atau memperjuangkan beberapa hal, yakni suatu perubahan sosial, maka mereka sedang melakukan gerakan sosial. Menurut Locher, sebagian besar teoritisasi perilaku kolektif (*collective behavior*) memandang gerakan sosial (*social movements*) sebagai suatu tipe dari perilaku kolektif (*collective behavior*), tetapi banyak dari teoritisasi gerakan sosial (*social movements*) memandang bahwa gerakan sosial (*social movements*) merupakan fenomena yang terpisah dari perilaku kolektif (*collective behavior*).

Klandermans (Quah & Sales, 2000: 236), menyitir pendapat Tarrow yang menyatakan bahwa *social movement* adalah penentangan kolektif oleh orang-orang yang memiliki solidaritas dan tujuan yang sama dalam proses interaksi yang terus-menerus dengan pihak elit, pihak lawan dan pihak yang berwenang. Dari pendapat Tarrow ini, maka dapat dielaborasi bahwa:

- (1) suatu gerakan adalah tindakan penentangan terhadap elit, otoritas, dan terhadap aturan kelompok dan budaya mapan lainnya;

- (2) suatu gerakan dilakukan atas nama klaim yang sama terhadap pihak lawan, pihak berwenang, dan elit;
- (3) suatu gerakan didasari oleh rasa solidaritas dan identitas kolektif; dan
- (4) untuk meneruskan arah tujuan tindakan kolektif, maka bentuk pertarungan diubah ke dalam suatu gerakan sosial.

Greene (2002: 591) menyatakan bahwa gerakan sosial (*social movement*) adalah bentuk perilaku kolektif yang bertahan cukup lama, terstruktur, dan rasional. Beberapa karakteristik dari gerakan sosial menurut Greene, meliputi:

- (1) sejumlah orang,
- (2) tujuan umum untuk mendukung atau mencegah suatu perubahan sosial,
- (3) adanya struktur dengan kepemimpinan yang diakui umum, dan
- (4) adanya suatu aktivitas yang dipertahankan dalam waktu yang cukup lama.

Gerakan sosial relatif lebih permanen dan terorganisir dibandingkan dari tipe perilaku kolektif yang lainnya.

Stolley (2005: 188), dengan mengutip pendapat Tarrow, menyatakan bahwa Gerakan Sosial adalah upaya pencapaian tujuan tertentu melalui tindakan yang menentang status quo, wewenang dan budaya yang sudah mapan. Orang-orang yang melakukan suatu gerakan membangun perasaan identitas kolektif, yakni membagi perasaan bersama tentang penyebab dan membantu usaha-usaha mereka dengan mempertahankan suatu gerakan. Beberapa gerakan berjalan dengan singkat dan kemudian berhenti, bisa gagal atau berhasil mencapai tujuannya. Beberapa gerakan yang lainnya, berjalan melalui waktu yang lama dan memiliki pendukung yang memberikan dukungan sepanjang kehidupannya. Untuk mengetahui mengapa dan syarat-syarat apa yang memunculkan suatu gerakan sosial, Freeman (Stolley, 2005: 188) melakukan penelitian yang menganalisis empat bentuk gerakan sosial yang terjadi antara tahun 1960-1970, yaitu: *the civil rights*, *student protests*, *welfare rights*, dan *women's liberation movements*. Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa untuk terjadinya suatu gerakan sosial harus terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) ada suatu jaringan komunikasi; yang dapat,

- (2) memberikan pilihan dalam membantu penyebaran ide-ide gerakan; bersamaan dengan,
- (3) adanya krisis sebagai penyebab keterlibatan; dan,
- (4) adanya upaya untuk mengorganisasi kelompok-kelompok yang tertarik (*interested groups*) ke dalam suatu gerakan.

Sujatmiko (Triwibowo, 2006: xv), menyatakan bahwa gerakan sosial diartikan sebagai sebarang aksi kolektif dengan orientasi konflikual yang jelas terhadap lawan sosial dan politik tertentu, dilakukan dalam konteks jejaring lintas kelembagaan yang erat oleh aktor-aktor yang diikat rasa solidaritas dan identitas kolektif yang kuat melebihi bentuk-bentuk ikatan dalam koalisi dan kampanye bersama. Definisi ini mengacu kepada pandangan M. Diani dan I. Bison yang dipublikasikan di Universitas Trento, pada tahun 2004. Definisi ini tidak jauh berbeda dengan yang dijumpai dalam kepustakaan sosiologi, misalnya: “*Social movements have traditionally been defined as organized effort to bring about social change*” (Secara tradisional, gerakan sosial dapat didefinisikan sebagai upaya yang terorganisir untuk menciptakan suatu perubahan sosial). Selain itu, terdapat pula definisi lain, yakni: “*Social movements are described most simply as collective attempts to promote or resist change in a society or a group*” (Secara sederhana, gerakan sosial sebagai upaya kolektif yang bertujuan mempromosikan atau menolak suatu perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau kelompok). Demikian pula definisi yang “populer” gerakan sosial adalah: “*...a type of group action. They are large informal groupings of individuals and/or organization focused on specific political or social issues, in other words, on carrying out, resisting or undoing a social change*” (Suatu tipe dari tindakan kelompok. Mereka adalah pengelompokan informal atas individu dan/atau kelompok yang difokuskan secara khusus kepada isu-isu politik atau sosial, dengan kata lain, dalam melaksanakan, menolak, atau menggagalkan suatu perubahan sosial).

Soenyono (2008: 16-17) membuat peta tentang ciri-ciri gerakan sosial (*social movements*) berdasarkan aspek: bentuk, tujuan, lingkup, metode, dan sifatnya. Peta tentang ciri-ciri gerakan sosial (*social movements*) tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2. :
Peta Ciri-Ciri Gerakan Sosial (*Social Movements*)
Berdasarkan Perspektif Beberapa Teoritisi

No	Teoritisi	Ciri-Ciri Gerakan sosial				
		Bentuk	Tujuan	Lingkup	Metode	Sifat
1.	Wilson	Kolektivitas yang terorganisir.	Berusaha melakukan perubahan.	Ruang lingkup wilayah yang luas	Menggunakan jalur non-institusional.	Tidak membatasi orang
2.	Fainstein	Kelompok bentukan	Membawa inovasi.	-	-	-
3.	Herper	1. Salah satu proses dasar yang menghasilkan perubahan sosial; 2. Sebagai sumber atau membawa inovasi, khususnya dalam bidang non-teknis.	-	-	-	-
4.	Di Renzo	Sebagai perilaku sebagian anggota masyarakat.	-	-	-	-
5.	Cook, dkk.	Suatu organisasi atau sekelompok organisasi.	-	-	-	-
6.	Shiraishi	Alat ekspresi politik rakyat.	-	-	-	-
7.	Baldrige	Perilaku kolektif yang terdiri atas kelompok orang yang memiliki dedikasi dan terorganisasi.	-	-	Melalui aktivitas politik atau pendidikan.	Memiliki struktur organisasi yang jelas, serta mempunyai suatu ideologi yang berorientasi pada perubahan.
8.	Killian	Perilaku kolektif.	-	-	-	Punyai nilai, antar anggota

						diikat oleh kesadaran diri, punya norma, dan struktur yang mengenal pembagian tugas antara pemimpin dan pengikut.
9.	McAdam	Perilaku Kolektif.	-	Melampaui batas wilayah Negara.	Melalui aktivitas politik.	Dipengaruhi oleh peluang politik, struktur mobilisasi, dan bingkai kultural.

Sumber: Soenyono, 2008: 16-17, dimodifikasi.

B. Kerangka Pemetaan Teori Gerakan Sosial

Kerangka pemetaan teoritik studi Gerakan Sosial paling tidak dapat diletakkan atas dua perspektif, yakni yang dikembangkan oleh Rajendra Singh dan Nick Crossley.

1. Pemetaan Teoritik Gerakan Sosial Menurut Rajendra Singh

Pada umumnya, studi-studi tentang Gerakan Sosial, khususnya di Indonesia, meletakkan pemetaan kerangka analisis teoritiknya kepada pandangan Singh (2001). Menurut Singh (2001: 111), secara umum tradisi teoritis studi tentang Gerakan Sosial dapat diklasifikasikan ke dalam tiga klasifikasi, yakni: (1) Klasik; (2) Neo-Klasik, dan (3) Gerakan Sosial Baru (Kontemporer).

Selanjutnya, Singh (2010: 111) menjelaskan bahwa tradisi klasik meliputi sebagian besar studi-studi dalam perilaku kolektif seperti: *crowd* (kerumunan), *riot* (kerusuhan), dan *rebel* (penolakan, pembangkangan), utamanya oleh para psikolog sosial Barat dan para sejarawan dari sebelum tahun 1950-an. Dalam tradisi klasik, akar konseptual studi Gerakan sosial dan tindakan kolektif sebagian terletak dalam

tradisi psikolog sosial klasik. Kontribusi dari para psikolog seperti karya Gabriel Tarde tentang *Laws and Imitation* (1903), karya Gustave Le Bon tentang *The Crowd* (1909), karya William McDougall tentang *The Group Mind* (1920), serta karya E. D. Martin tentang *The Behavior of Crowd* (1929) dapat membantu untuk memaparkan fondasi teoritis dalam studi perilaku kolektif. Sementara, karya W. Trotters tentang *Animal Behavior in Peace and War* (1920), yang merupakan sebuah studi tentang perilaku kelompok dalam situasi-situasi ekstrem pada kehidupan binatang, memberikan suatu paradigma yang berpengaruh untuk studi serupa yang menekankan pada stres dan dampaknya pada perilaku kelompok manusia dalam ilmu sosial. Paradigma klasik dan neo-klasik pada tindakan kolektif, khususnya neo-klasik, tetap dominan hingga 1970-an, baik yang merujuk pada studi tentang *crowd*, suatu kolektifitas yang liar (*collectifies riotous*), sebagaimana menurut para psikolog klasik, maupun studi dalam Gerakan Sosial Lama dalam tradisi sosiolog neo-klasik.

Sementara tradisi neo-klasik dihubungkan dengan tradisi utama dalam studi Gerakan Sosial Lama (*Old Social Movements*). Kebanyakan tulisan dalam tradisi neo-klasik dipublikasikan setelah tahun 1950-an. Tradisi ini dibagi lagi dalam dua model Gerakan Sosial Lama, yaitu fungsional dan dialektika Marxis. Tidak seperti studi gerakan sosial dalam tradisi klasik, studi gerakan sosial pada tradisi neo-klasik menghadirkan kontribusi sosiolog dari Barat maupun India.

Sedangkan perspektif ketiga dari studi Gerakan Sosial, yakni perspektif Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*; NSMs) atau Gerakan Sosial Kontemporer, muncul sekitar era tahun 1960-an dan 1970-an terutama di kalangan masyarakat Eropa dan Amerika (Singh, 2001: 96). Masyarakat Eropa dan Amerika saat itu menyaksikan munculnya gerakan skala besar sekitar isu-isu yang mendasarkan pada aspek humanis (*humanist*), kultural (*cultural*), dan non-materialistik (*non-materialistic*). Tujuan-tujuan dan nilai-nilai dari gerakan ini secara esensial bersifat universal, yakni diarahkan untuk memberikan perlindungan dan mempertahankan kondisi kehidupan manusia ke arah yang lebih baik. Berbeda dengan model Gerakan Sosial Lama (Klasik dan Neo-klasik), maka model Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*; NSMs) tidak terjebak ke dalam diskursus ideologi seperti anti-kapitalisme (*anticapitalism*), revolusi kelas (*class revolution*), dan perjuangan kelas (*class struggle*). Dengan demikian, Gerakan Sosial Baru tidak tertarik dengan ide

revolusi, termasuk melakukan gerakan revolusi untuk menggulingkan sistem pemerintahan Negara. Namun demikian, strategi dan tujuan dari Gerakan Sosial Baru (GSB) memiliki sedikit kesamaan dengan model Gerakan Sosial Lama, yaitu dalam memperjuangkan untuk isu-isu seperti: peningkatan upah buruh industri, menentang ketidakadilan ekonomi dan eksploitasi kelas (*class exploitation*).

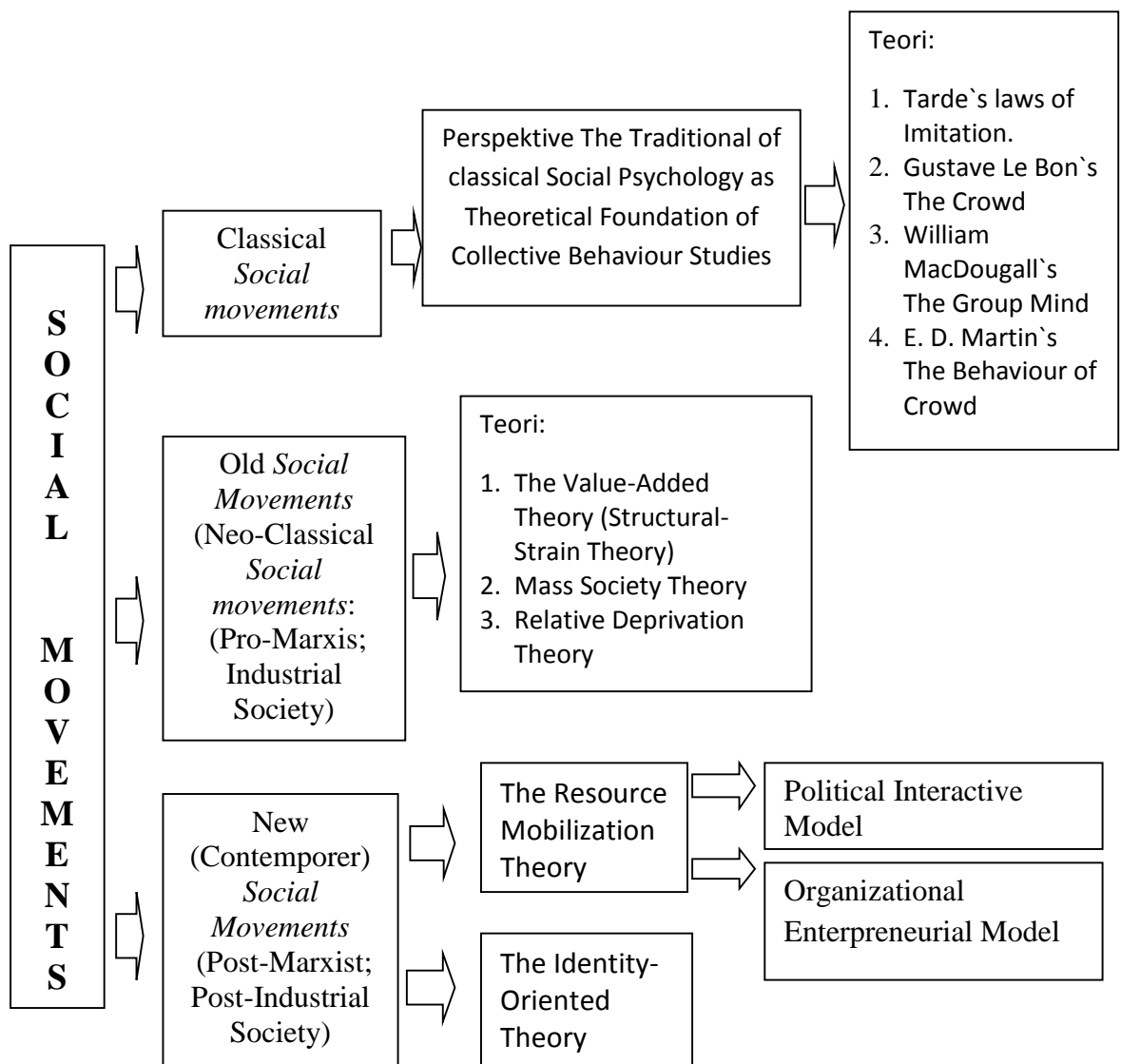
Pada dasarnya, Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*; NSMs) bersifat plural. Menurut Melucci (1980), Cohen (1985), Slater (1985) dan Touraine (1985), ekspresi Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*; NSMs) bergerak dari anti-rasialisme (*anti-racism*), anti-nuklirisme (*anti-nuclearism*), perlucutan senjata (*disarmament*), feminisme (*feminism*), lingkungan (*environmentalism*), regionalisme dan etnisitas (*regionalism and ethnicity*), kebebasan sipil (*civil libertarianism*), dan sebagainya, hingga ke isu-isu kebebasan personal dan perdamaian. Perkembangan masyarakat dari masyarakat modernitas (*modernist society*) menuju masyarakat pasca modernitas (*post modernist-post society*) merefleksikan terjadinya perubahan bentuk dari Gerakan sosial (*Social movements*), yakni dari bentuk Gerakan Sosial Lama (klasik dan neo-klasik) kepada bentuk Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*). Dengan kata lain, terjadinya perubahan bentuk masyarakat berhubungan dengan terjadinya perubahan bentuk dari Gerakan Sosial (Singh, 2001: 97).

Mengacu kepada perspektif Singh, berdasarkan klasifikasi studi teoritis tentang tindakan kolektif dan gerakan sosial, maka teori-teori yang termasuk di dalamnya meliputi sebagai berikut:

1. *Classical Social movements* (Gerakan Sosial Klasik), teori-teorinya meliputi antara lain: (1) *Tarde's laws of Imitation*; (2) *Gustave Le Bon's The Crowd*; (3) *William MacDougall's The Group Mind*; dan (4) *E. D. Martin's The Behaviour of Crowd*;
2. *Old Social movements/Neo-Classical Social movements* (Gerakan Sosial Lama/Gerakan Sosial Neo-Klasik), teori-teorinya meliputi antara lain: (1) *The Value-Added Theory (Structural-Strain Theory)*; (2) *Mass Society Theory*; dan (3) *Relative Deprivation Theory*; dan

3. *New Social Movements/Contemporer Social Movements* (Gerakan Sosial Baru/Gerakan Sosial Kontemporer), teori-teorinya meliputi antara lain: (1) *The Resource Mobilization Theory*; dan (2) *The Identity-Oriented Theory*.

Tabel 1. 6. :
Klasifikasi Teoritis Studi Gerakan Sosial



Sumber: Rekonstruksi berdasarkan hasil kajian pustaka

2. Pemetaan Teoritik Gerakan Sosial Menurut Nick Crossley

Berbeda dengan pandangan Singh, Crossley (2001: 10-13) membagi tradisi analisis studi Gerakan Sosial berdasarkan dimensi waktu dan setting wilayah. Dalam dimensi waktu, tradisi studi Gerakan Sosial dapat dikelompokkan ke dalam dua dimensi yakni sebelum tahun 1970-an dan setelah tahun 1970-an. Sementara dalam setting wilayah, studi Gerakan Sosial dapat dilihat dalam konteks setting Eropa dan Amerika Serikat. Selanjutnya, Crossley menggambarkan peta teoritik studi Gerakan Sosial tersebut dalam sebuah tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 7. :
Empat Tradisi Analisis Gerakan Sosial

	Amerika Serikat	Eropa
Sebelum Era 1970	Perilaku Kolektif (<i>Collective Behaviour</i>)	Marxisme (<i>Marxism</i>)
Setelah Era 1970	Mobilisasi Sumberdaya/ Proses Politik (<i>Resource Mobilization/ Political Process</i>)	Gerakan Sosial Baru (<i>New Social Movements</i>)

Sumber: Crossley, 2002: 10

Mengacu kepada pandangan Crossley sebagaimana digambarkan dalam tabel 2, maka di Amerika Serikat sebelum era tahun 1970-an, tradisi analisis studi Gerakan Sosial lebih diwarnai oleh pemikiran perspektif perilaku kolektif. Sementara di era setelah tahun 1970-an, tradisi studi Gerakan Sosial analisisnya lebih banyak diwarnai oleh perspektif mobilisasi sumberdaya atau proses politik. Berbeda dengan perkembangan di Amerika, di Eropa sebelum era tahun 1970-an analisis studi Gerakan Sosial diwarnai tradisi Marxis, dan setelah era 1970-an analisis Gerakan

sosial lebih banyak diwarnai oleh tradisi perpektif Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*).

Studi Gerakan sosial yang berkembang di Amerika pada era sebelum tahun 1970-an meletakkan analisisnya pada pendekatan perilaku kolektif (*collective behavior*). Crossley (2002: 11), mengacu kepada pandangan dari beberapa ahli seperti Oberschall (1973), Tilly (1979; McAdam (1982), Jenkins (1983), dan McAdam et. al. (1988), menjelaskan bahwa pendekatan perilaku kolektif: (a) Menggambarkan munculnya gerakan sebagai refleksi respons atas keluhan-keluhan (*grievances*), kekurangan (*deprivations*), ketidakpastian (*anomie*), ketegangan struktural (*structural strains*) atau bentuk-bentuk penderitaan lainnya. Stereotip dari teoritisi perilaku kolektif meyakini bahwa adanya berbagai kesulitan (*hardship*) secara obyektif merupakan penyebab munculnya bentuk protes dan gerakan; (b) Menggambarkan bahwa protes dan gerakan yang dipicu oleh suatu penderitaan merupakan respons psikologis irasional, sebagai manifestasi dari psikologi massa (*mob psychology*) atau hysteria kolektif (*collective hysteria*); (c) Menggambarkan bahwa mereka yang terlibat dalam suatu massa (*mobs*) adalah sebagai individu-individu yang terisolasi yang tidak dapat berintegrasi secara baik dengan masyarakat; dan (d) Gerakan sosial menggumpal bersama dengan berbagai macam bentuk perilaku kolektif lainnya, seperti mode (*fashions*), kegilaan dan panic (*crazes and panics*), tanpa mempertimbangkan keunikan mereka dan kebenaran alaminya.

Berbeda dengan di Amerika Serikat, studi Gerakan Sosial di kawasan Eropa pada era sebelum tahun 1970-an lebih diwarnai oleh tradisi Marxist (Hegelian) tentang filsafat sejarah (*philosophy of history*). Tipe perdebatan di Eropa lebih banyak berkisar pada kemunculan gerakan modern dalam relasi antara gerakan tersebut dengan masyarakat dan “peran sejarah” di dalamnya, Tradisi Marxist berasumsi bahwa kunci dari suatu masyarakat ditandai oleh konflik (pertentangan) dan kontradiksi, dan konflik ini membangun (melahirkan) suatu gerakan dalam masyarakat. Para sarjana Eropa mempertanyakan tentang: Apa konflik utama di dalam kehidupan? Dan siapa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut?

Berbagai kritik muncul terhadap kedua tradisi ini, yakni tradisi perilaku kolektif (*collective behavior*) di Amerika Serikat dan tradisi Marxisme (*Marxism*) di Eropa.

Beberapa hasil studi yang dilakukan para ahli, seperti Snyder dan Tilly (Crossley, 2002: 12), memberikan kritik terhadap cara pandang tradisi perilaku kolektif (*collective behavior*) dalam analisis Gerakan Sosial. Menurut hasil studi tersebut, secara objektif ditemukan bahwa meningkatnya berbagai kesulitan (*hardship*) tidak menyebabkan meningkatnya aksi protes dan aktivitas gerakan. Dalam kenyataannya, aksi protes seringkali juga terjadi selama periode waktu dalam kondisi reformasi dan kemajuan ekonomi. Sementara itu, kritik terhadap tradisi Marxis yang berkembang di Eropa menyatakan bahwa sesungguhnya ketegangan dan konflik (*strains and conflicts*) merupakan faktor tetap (konstan) dalam kehidupan sosial (*social life*) dan tidak dapat ditemukan dalam protes dan gerakan, baik kejadian maupun intensitasnya. Sebagai contoh, konflik struktural dan ketegangan yang terjadi antara warga kulit hitam dan kulit putih di Amerika Serikat telah terjadi jauh sebelum munculnya gerakan hak sipil (*civil rights movements*). Hasil studi juga telah gagal menunjukkan bahwa partisipan suatu gerakan direkrut dari anggota-anggota yang tidak berintegrasi secara baik dengan masyarakat. Sebaliknya, suatu gerakan seringkali tampak karena adanya suatu jaringan. Sebagai contoh, gerakan hak sipil kulit Hitam di Amerika Serikat dibentuk di sekitar lingkungan Gereja dan di luar lingkungan Gereja. Para teoritis Gerakan sosial mendapatkan tantangan dan kesulitan untuk memahami bahwa perilaku gerakan dan keyakinan (*belief*) sebagai hal yang irasional. Suatu aktivitas gerakan hanya dapat dipahami jika kita berasumsi bahwa perilaku aktivis sebagai sesuatu yang rasional. Pandangan ini bertentangan dengan pendekatan perilaku kolektif (*collective behavior approach*) dimana lebih berorientasi normatif.

Setelah era tahun 1970-an, para teoritis Gerakan Sosial mulai meninggalkan cara berpikir tradisi perilaku kolektif (*collective behavior*) dan tradisi Marxis dalam menganalisis gerakan sosial dengan memunculkan cara pandang baru. Sejak era tahun 1970-an hingga dewasa ini, di kawasan Eropa berkembang tradisi baru dalam menganalisis studi Gerakan Sosial, yakni tradisi Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*). Tradisi Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*) mulai dibangun sejak era tahun 1960-an yang berkembang di masyarakat barat (*western societies*), termasuk gerakan lingkungan (*environmentalism*), gerakan perdamaian (*peace movement*), feminisme gelombang kedua (*second-wave feminism*), hak-hak binatang

(*animal rights*), dan sebagainya. Pandangan Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*) ini merupakan pandangan pos-Marxis (*post-Marxist notion*). Sebagian besar teori sosial dan sosiologi politik di Eropa hingga pertengahan abad ke dua puluh didominasi oleh perdebatan pemikiran Marx, seperti tentang revolusi proletarian (*proletarian revolution*). Pandangan teoritik Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*) di luar kerangka pemikiran model masyarakat kapitalistik yang disarankan Marx, menolak prioritas atas konsep tentang perjuangan kelas (*class struggle*) dan konsep kelas sebagai agen dari perubahan sejarah (*historical change*). Para teoritis Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*) berusaha untuk melakukan identifikasi tentang inti dari konflik dan gerakan dalam era yang baru.

Apabila di Eropa setelah era tahun 1970-an analisis studi Gerakan sosial diletakkan atas kerangka perspektif teori Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*), maka di Amerika Serikat analisis studi Gerakan Sosial diwarnai oleh pemikiran tradisi perspektif mobilisasi sumberdaya (*resource mobilization*) atau proses politik (*political process*). Munculnya paradigma baru sebagai pengganti cara pandang paradigma lama ditandai oleh beberapa perkembangan. Pada perkembangan awal ditandai oleh dua elemen kunci, yakni: (1) model aktor rasional dari agen sosial telah disesuaikan bersamaan dengan fokus ekonomi atas relasi pertukaran (*exchange relations*) dalam kehidupan sosial, serta pengaruh gerakan atas sumberdaya antar agen; dan (2) model jaringan struktural dari relasi sosial (*social relations*) dan kehidupan sosial (*social life*) telah diadopsi. Melalui dua elemen ini para teoritis gerakan dalam pendekatan mobilisasi sumberdaya telah mampu menguji keseimbangan dari biaya (*cost*), hadiah (*rewards*), dan insentif (*incentive*) yang mampu mendorong motivasi agen untuk terlibat dalam perjuangan.

Pendekatan mobilisasi sumberdaya berkembang sebagai basis utama dalam menganalisis gerakan di Amerika Serikat. Namun mulai tahun 1980-an, selain pendekatan mobilisasi sumberdaya, muncul pula pendekatan yang lainnya yakni pendekatan proses dan sistem politik (*political systems and processes*) yang mendorong terbuka dan tertutupnya peluang untuk terjadinya aktivitas protes. Menurut perspektif pendekatan proses dan sistem politik (*political systems and processes*), aktor rasional cenderung melakukan aksi manakala terdapat peluang (*opportunity*) yang besar. Pandangan ini memberikan basis kerangka berpikir dalam

perkembangan paradigma baru yang kemudian disebut sebagai pendekatan proses politik (*the political process approach*).

C. Tipologi Gerakan Sosial

Menurut Aberle, Cameron, dan Blumer (Macionis, 1999: 617), para sosiolog mengelompokkan gerakan sosial ke dalam beberapa tipe. Pengelompokkan tipe Gerakan sosial ini didasarkan atas berbagai aspek, yakni berdasarkan aspek tujuan gerakan dan metode yang digunakan dalam mencapai tujuan. Blumer (Stolley, 2005: 189), mengelompokkan gerakan sosial ke dalam dua tipe, yakni: (1) Gerakan Sosial Umum (*General Social Movements*); dan (2) Gerakan Sosial Khusus (*Specific Social Movements*). Gerakan Sosial Umum (*General Social Movements*), yaitu gerakan dalam perubahan nilai-nilai di masyarakat, misalnya: upaya gerakan perempuan (*women's movement*) yang melakukan gerakan perubahan tentang status dan pandangan terhadap kaum perempuan. Sedangkan, gerakan sosial khusus (*specific social movements*) adalah gerakan yang memiliki fokus yang lebih jelas (spesifik), misalnya: Gerakan anti-aborsi (*anti-abortion movement*).

Berdasarkan dimensi sasaran perubahan (*who is changed*) dan dimensi jumlah besarnya (tingkat) perubahan (*how much changed*), maka gerakan sosial (*social movements*) dapat dikelompokkan ke dalam empat tipe, yakni: (1) Gerakan Sosial Alternatif (*Alternative Social Movements*); (2) Gerakan Sosial Pembebasan (*Redemptive Social Movements*); (3) Gerakan Sosial Reformasi (*Reformative Social Movements*); dan (4) Gerakan Sosial Revolusi (*Revolutionary Social Movements*).

Pengelompokkan tipe gerakan sosial berdasarkan kedua dimensi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut (Macionis, 1999: 617):

Tabel 1. 3. :
Tipe-Tipe Gerakan Sosial (*Social Movements*)

		How Much Changed? (Tingkat Perubahan)	
		Limited (Terbatas)	Radical (Menyeluruh)
Who is Changed? (Sasaran Perubahan)	Specific Individuals (Khusus Individu)	Alternatif Sosial Movement (Gerakan Sosial Alternatif)	Redemptive Sosial Movement (Gerakan Sosial Pembebasan)
	Everyone (Semua Orang)	Reformative Sosial Movement (Gerakan sosial Reformasi)	Revolutionary Sosial Movement (Gerakan sosial Revolusi)

Sumber: Macionis (1999: 617)

Selanjutnya, penjelasan tentang keempat tipe *social movement* tersebut adalah sebagai berikut (Macionis, 1999; Locher, 2002):

- (1) *Alternative Social Movement* (Gerakan Sosial Alternatif), yaitu gerakan sosial yang tingkat ancamannya terhadap *status quo* sangat kecil karena sasaran dari Gerakan sosial ini adalah suatu perubahan yang terbatas terhadap hanya sebagian dari populasi. Sebagai contoh, gerakan sosial *Promise Keepers*, yang ditujukan untuk mendorong agar laki-laki pemeluk Kristen lebih taat dan lebih memperhatikan keluarga mereka.
- (2) *Redemptive Social Movement* (Gerakan Sosial Pembebasan), yaitu suatu tipe Gerakan sosial yang memiliki fokus selektif, tetapi ditujukan terhadap perubahan yang radikal (lebih mengakar) pada individu. Sebagai contoh,

Alcoholics Anonymous, adalah sebuah organisasi yang membantu orang-orang yang mengalami kecanduan alkohol agar mereka sembuh dan mampu untuk hidup lebih baik.

- (3) *Reformative Social Movement* (Gerakan Sosial Reformasi), yaitu tipe gerakan sosial yang ditujukan hanya untuk suatu perubahan sosial yang terbatas terhadap setiap orang. *Reformative Social Movement*, umumnya terjadi dalam suatu sistem politik. Tipe gerakan ini bisa bersifat progresif (mempromosikan pola sosial yang baru) dan bisa bersifat reaktif (*countermovements* yang mencoba mempertahankan *status quo*). Sebagai contoh, *Multiculturalism*, adalah sebuah gerakan politik dan pendidikan yang melakukan advokasi terhadap orang-orang dari seluruh ras dan etnis tentang persamaan ras (*racial equality*).
- (4) *Revolutionary Social Movements* (Gerakan Sosial Revolusi), merupakan suatu tipe gerakan sosial yang paling keras (ekstrem) dibandingkan tipe gerakan sosial yang lainnya, berjuang untuk sebuah transformasi dasar dari seluruh masyarakat.

Dengan penyebutan yang sedikit agak berbeda, berdasarkan basis tujuan ideologinya, Zanden (1988: 575) juga mengelompokkan gerakan sosial ke dalam empat tipe, yakni:

- (1) *Revolutionary Movements* (Gerakan Revolusi). Tipe *revolutionary movements* ditujukan untuk menggantikan nilai-nilai yang sudah ada;
- (2) *Reform Movements* (Gerakan Reformasi). Tipe *reform movements*, suatu gerakan yang ditujukan untuk mengadakan perubahan agar nilai-nilai yang ada bisa diterapkan/diimplementasikan lebih kuat lagi.
- (3) *Resistance Movements* (Gerakan Perlawanan). Tipe *resistance movements*, yaitu gerakan yang ditujukan untuk mencegah (menolak) suatu perubahan atau mengeliminasi (menghilangkan) perubahan sebelum dilembagakan; dan
- (4) *Expressive Movements* (Gerakan Ekspresif). Tipe *expressive movements* adalah tipe perubahan yang kurang memperhatikan perubahan kelembagaan, tetapi lebih memperhatikan adanya perubahan dari dalam dengan cara melakukan renovasi atau pembaharuan.

Spencer (1982: 506), menyebutkan bahwa berdasarkan tujuannya, terdapat tujuh tipe dari gerakan sosial, yakni:

- (1) *Revolutionary Movement* (Gerakan Revolusi), merupakan tipe gerakan yang dramatis, yang berusaha menggulingkan otoritas yang sudah mapan, apabila diperlukan bisa saja menggunakan kekerasan, misalnya gerakan bersenjata;
- (2) *Reform Movement* (Gerakan Reformasi), ditujukan untuk mengoreksi atau memperbaiki persoalan-persoalan yang muncul, misalnya gerakan perempuan dan hak-hak sipil;
- (3) *Reactionary Movement* (Gerakan Reaksi), suatu gerakan yang menginginkan situasi kehidupan dikembalikan kepada tatanan masa lalu, menganggap bahwa tatanan lama lebih baik daripada tatanan yang sekarang;
- (4) *Conservative Movement* (Gerakan Konservatif), suatu gerakan yang sederhana yang ditujukan untuk mempertahankan dan menjaga nilai-nilai tata cara kehidupan mereka, misalnya gerakan kelompok konservatif untuk mempertahankan bangunan lama dan memperlambat laju pertumbuhan dan perubahan kota besar;
- (5) *Utopian Movement* (Gerakan Utopia), suatu gerakan yang bertujuan jangka panjang, menginginkan suatu tipe baru dari suatu masyarakat yang berbeda dengan saat ini;
- (6) *Religious Movement* (Gerakan Religius), suatu gerakan yang mempunyai tujuan religius, misalnya gerakan mistik, dsb. ; dan
- (7) *Ethnic or nationalistic movement* (Gerakan Etnis/Nasionalis), tipe gerakan yang sangat penting dewasa ini dalam membuat suatu perubahan di seluruh dunia. Misalnya: *The Chikano, Black, and American Indian Movements*.

Untuk lebih memperjelas berbagai pendapat tentang tipe-tipe dari *Social movement* sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan dalam bentuk bagan berikut ini:

Tabel 1. 4. :

Tipe Social movement Menurut Pendapat Para Sosiolog

Tipe Social Movement		Sosiolog			
		Macdonis	Zanden	Spencer	Locher
		Sasaran & Tingkat Perubahan	Basis Tujuan Idologis	Tujuan Perubahan	Sasaran & Aspek Perubahan
1.	<i>Alternative/ Expressive/ Conservative</i>	Perubahan terbatas, hanya kepada sebagian populasi.	Melakukan perbaikan atau memperbaharui nilai-nilai dari dalam individu.	Menjaga/ mempertahankan nilai-nilai cara hidup.	Perubahan pikiran & perilaku spesifik tertentu beberapa orang.
2.	<i>Redemptive/ Resistance/ Reaction</i>	Perubahan yang lebih radikal (mendasar), pada fokus yang terbatas (selektif).	Mencegah suatu perubahan & mengeliminasi suatu perubahan sebelum dilembagakan.	Kembali ke tatanan nilai masa lalu.	Perubahan kehidupan beberapa orang melalui transformasi lengkap.
3.	<i>Reformative</i>	Perubahan sosial yang terbatas, dengan target setiap orang.	Perubahan yang ingin mengimplemen tasikan sistem nilai/ideologi secara lebih kuat lagi.	Memperbaiki Problem yang terjadi.	Perubahan sikap masyarakat terhadap topik atau isu yang terbatas, tidak ingin merubah atau mengganti pemerintah yang ada.
4.	<i>Revolutionary</i>	Paling ekstrim, melakukan transformasi dasar terhadap masyarakat.	Perubahan yang ingin mengganti nilai/ideologi secara fundamental.	Menggulingkan Kekuasaan/ Kewenangan yang sudah mapan.	Melakukan transformasi total dari masyarakat, menghancurkan tatanan lama dan digantikan dengan tatanan yang baru.
5.	<i>Utopian</i>	-	-	Membentuk masyarakat tipe baru yang berbeda dengan kenyataan saat ini.	-
6.	<i>Religious</i>	-	-	Membentuk	-

				masyarakat yang lebih religious.	
7.	<i>Ethnic/Nationalistic</i>	-	-	Membangun kesadaran etnis.	-

Sumber: Konstruksi Penulis

D. Resistensi Terhadap Gerakan Sosial

Setiap peristiwa gerakan sosial (*social movements*), selain ada pihak yang mendukung, juga tidak akan lepas dari adanya pihak yang menentang atau menolak. Menurut Locher (2002: 238), mengingat bahwa semua peristiwa gerakan sosial (*Social movements*) menginginkan adanya suatu perubahan atau untuk menjaga sesuatu agar tidak berubah, maka di dalamnya akan ada orang atau pihak yang tidak menginginkan suatu gerakan sosial (*social movements*) berhasil. Perlawanan atau penolakan yang paling besar terhadap suatu gerakan sosial (*social movements*) biasanya berasal dari mereka yang diuntungkan apabila gerakan tersebut mengalami kegagalan, umumnya politisi atau pemimpin sosial (*political and social leaders*).

Selanjutnya, Locher (Locher, 2002: 239-243) menyebutkan terdapat Empat bentuk resistensi terhadap suatu gerakan sosial (*social movements*), yakni: (1) *Ridicule* (Ejekan); (2) *Co-option* (Kooptasi); (3) *Formal Social Control* (Kontrol Sosial Formal); dan (4) *Violence* (Kekerasan). Penjelasan masing-masing bentuk resistensi terhadap Gerakan sosial tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Ridicule* (Ejekan):

Ridicule (ejekan) bisa menjadi cara yang sangat efektif dalam menolak atau melawan suatu gerakan sosial (*social movements*). Mengejek pemimpin gerakan, pengikut, dan atau tujuan gerakan, dengan cara melecehkan gerakan di mata orang lain dalam suatu masyarakat atau komunitas. *Talk show*, komedi, kartun politik, dan komentator, semuanya bisa menjadi media ejekan terhadap gerakan sosial yang dilakukan oleh mereka yang tidak menyukai gerakan tersebut. Penggunaan ejekan (*ridicule*) bukanlah suatu hal yang kebetulan, akan tetapi secara hati-hati digunakan untuk merusak suatu gerakan.

Ejekan (*ridicule*) atas suatu isu sosial bisa melalui dua cara, yakni: para pengikut dan pendukung seringkali mengejek pihak lawan mereka dalam rangka upaya untuk melawan hilangnya harga diri mereka. Sementara di sisi lain, para pemimpin dan para pengikut (*leaders and followers*) yang menentang gerakan seringkali mengejek yang lainnya dengan tujuan untuk merusak gerakan itu sendiri.

2. *Co-Opting* (Kooptasi):

Mengkooptasi sesuatu berarti mengambil sesuatu untuk suatu tujuan diri sendiri atau untuk menarik lawan ke dalam sisi sendiri. Dalam kasus gerakan sosial (*social movements*), *Co-Opting* (Kooptasi) mengacu kepada bagaimana membentuk suatu kelompok yang relatif kuat tampak seperti bekerjasama dalam suatu gerakan sosial, atau menjadikan suatu organisasi gerakan sosial menjadi organisasi yang netral. Upaya ini bisa melalui dua cara, yakni: Pertama, suatu kelompok dapat membentuk sebuah organisasi yang memiliki nama sama dengan organisasi gerakan sosial yang sudah ada, dan kemudian merilis pernyataan press; Kedua, kelompok yang kuat sewaktu-waktu bisa disuap atau mencoba membujuk para pemimpin gerakan untuk bergabung dengan mereka.

Pembentukan organisasi (*forming organizations*) dengan nama yang sama dengan organisasi gerakan sosial yang sudah ada bertujuan untuk membingungkan publik. Publik akan bingung mana yang harus dipercaya, apakah pernyataan yang dikeluarkan oleh organisasi gerakan sosial atau pernyataan yang dikeluarkan oleh organisasi oposisi gerakan. Sedangkan cara yang kedua yakni dengan mengajak pemimpin gerakan untuk bergabung dengan oposisi, mungkin seorang pemimpin gerakan sosial didorong oleh rasa kebenaran tetapi mereka mungkin juga sebenarnya sedang mencari kekayaan (*wealth*), ketanaran (*fame*), atau kemuliaan (*glory*). Motivasi pemimpin (*leaders*) yang seperti ini, maka akan mudah dipersuasi (dibujuk) untuk bergabung dengan pihak oposisi, mereka bisa diberi status pekerjaan yang lebih baik dalam organisasi, perusahaan, atau birokrasi.

3. **Formal Sosial Control (Kontrol Sosial Formal):**

Gerakan sosial (*social movements*) seringkali menghadapi resistensi dari pihak yang berwenang karena tujuan Gerakan sosial tersebut adalah menginginkan terjadinya suatu gerakan sosial yang justru tidak diinginkan oleh para pemimpin sosial dan politik (*social and political leaders*). Terdapat beberapa cara yang berbeda bagaimana kontrol sosial formal melalui legitimasi wewenangnya digunakan dalam menentang Gerakan sosial. Secara umum, ada dua kategori dari kontrol sosial formal (*formal social control*); yakni: *legitimate force* (legitimasi kekuatan) dan *laws and ordinances* (hukum dan peraturan). *Legitimate force* dapat berupa Polisi, Anggota Keamanan Nasional, dan tentara, semuanya bisa diperintahkan oleh atasan mereka untuk menggunakan *legitimate force* (legitimasi kekuatan) dalam rangka meredam aktivitas publik. *Laws and ordinances* (hukum dan peraturan); umumnya penggunaan *formal social control* tidak berupa bentuk fisik, akan tetapi berupa penegakan atas hukum dan peraturan yang ada

4. **Violence (Kekerasan):**

Physical Violence (kekerasan fisik) adalah bentuk yang paling ekstrim dari berbagai bentuk resistensi terhadap gerakan sosial. Kadang-kadang, *violence* merupakan pilihan terakhir, akan tetapi seringkali menjadi garis pertahanan utama dalam menentang gerakan sosial. Kekerasan terhadap para pemimpin gerakan sosial atau para pengikut gerakan sosial, bisa berasal dari individu, bias berasal dari organisasi gerakan sosial yang lainnya, atau bias berasal dari pemerintah (*government*).

E. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan dan Kegagalan Gerakan Sosial

Menurut Locher (2002: 271) terdapat beberapa faktor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu gerakan sosial. Menurutnya, mengacu kepada sejarah pola gerakan sosial di Amerika, maka ditemukan Lima faktor (karakteristik) yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu gerakan sosial, yaitu:

- (1) *Leadership: Effective Leadership* (Kepemimpinan: Kepemimpinan yang Efektif)

Syarat keberhasilan suatu gerakan sosial adalah harus memiliki pemimpin yang efektif (*effective leaders*), yaitu individu-individu yang memahami sistem hukum dan politik yang berfungsi efektif dalam diri mereka. Para pemimpin gerakan sosial memusatkan perhatian kepada tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari kelompok. Mereka mengartikulasikan untuk menjelaskan kepada pihak-pihak luar (*outsiders*) tentang rasionalitas dan tujuan kelompok. Hal yang paling penting dari pemimpin gerakan sosial adalah kemampuannya dalam memberikan inspirasi kepada orang lain untuk bertindak. Mereka harus memiliki kemampuan untuk mengajak orang-orang untuk mengikuti aksi gerakan sosial mereka dan berbuat sebagaimana yang harus dilakukan. Kepemimpinan yang efektif mampu meningkatkan peluang bahwa setiap gerakan sosial akan berhasil dalam mencapai beberapa tujuan yang diinginkan.

(2) *Image: Positive Image* (Citra: Citra Positif)

Keberhasilan gerakan sosial adalah apabila dihargai (mendapatkan respek). Mereka berusaha untuk meyakinkan semua pihak termasuk para politisi dan pemegang otoritas bahwa mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur yang hanya menginginkan suatu kebenaran. Citra publik tentang kelompok dan pemimpin kelompok gerakan harus positif. Kondisi seperti ini akan memudahkan untuk mendapatkan dukungan keyakinan publik (pengamat) bahwa gerakan tersebut bersifat rasional dan mulia.

(3) *Tactics: Socially Accepted Tactics* (Taktik: Taktik yang Dapat Diterima secara Sosial)

Suatu gerakan sosial akan berhasil apabila menggunakan taktik-taktik yang dapat diterima secara sosial. Bahwa taktik dan strategi yang dipilih dapat diyakini akan mampu dan efektif dalam rangka mencapai tujuan gerakan. Kondisi *Socially Accepted Tactics* akan memberikan dampak terhadap pembentukan rasa hormat dan citra positif dari publik.

(4) *Goals: Socially Acceptable Goals* (Tujuan: Tujuan yang Dapat Diterima Secara Sosial)

Suatu gerakan sosial akan berhasil apabila pihak luar (*outsiders*) merasa yakin bahwa tujuan utama gerakan sosial adalah hanya untuk kepentingan masyarakat,

dan tidak bermaksud merugikan kepentingan mereka. Para aktor gerakan sosial harus berusaha meyakinkan pihak pengamat (*bystanders*) bahwa seluruh masyarakat akan mendapatkan keuntungan jika gerakan sosial berhasil mendapatkan sebagaimana yang diinginkan. Persuasi seperti ini akan menjaga pengamat (*bystanders*) yang netral dari kemungkinan berubah dan masuk menjadi lawan (*opponents*) gerakan sosial, dan juga dapat meyakinkan mereka bahwa mereka memiliki kepentingan atau keuntungan yang positif dalam keberhasilan sebuah gerakan sosial.

Gerakan sosial yang berhasil memiliki tujuan khusus jangka pendek (*short-term*) dan jangka panjang (*long-term*). Suatu gerakan sosial mungkin berbicara tentang “membuat masyarakat lebih baik” (*making a better society*) atau “meningkatkan kehidupan” (*improving life*), akan tetapi upaya mereka sehari-hari difokuskan kepada tahap-tahap nyata terhadap tujuan-tujuan spesifik. Semakin sesuai tujuan-tujuan ini dengan ideologi sosial yang dominan, semakin memungkinkan orang luar (*outsiders*) memahami tujuan-tujuan ini sebagai sesuatu yang rasional. Sebagai contoh, jika suatu gerakan sosial dapat meyakinkan pihak luar (*outsiders*) bahwa tujuan politik khusus dari gerakan sosial sesuai dengan kondisi ideal warga Amerika seperti: kebebasan (*freedom*), kemerdekaan (*liberty*), dan persamaan (*equality*), maka besar kemungkinannya gerakan sosial tersebut untuk mendapatkan dukungan dari pihak pengamat (*bystander*). Masyarakat umum Amerika mungkin akan mendukung suatu gerakan sosial karena didasarkan atas perasaan keadilan (*justice*) dan demokrasi (*democracy*).

- (5) *Support: Cultivated Financial and Political Support* (Dukungan: Pembudayaan Dukungan Politik dan Finansial).

Kebanyakan kelompok-kelompok Gerakan sosial memperoleh dukungan politik dan dana dari jaringan kelompok, organisasi, dan institusi yang lainnya. Kebanyakan gerakan sosial yang berhasil, memadukan teknik dan pesan mereka untuk menghindari keterasingan dari pendukung politik dan finansial potensial yang memungkinkan. Sementara gerakan sosial yang gagal (*unsuccessful*), di lain pihak, menyerang secara membabi buta semua orang termasuk pendukung

potensial, baik politik maupun finansial. Hal ini seringkali menyebabkan penguatan oposisi dan penarikan (*withdrawal*) dukungan dari para *supporters* (partisipan).

Selanjutnya, Manuel Castells (Hannigan, 1985: 444) mengemukakan tentang beberapa faktor determinan yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu gerakan sosial. Castells berpendapat bahwa keberhasilan suatu gerakan sosial, khususnya gerakan masyarakat kota (*urban movements*), tergantung pada kemampuannya dalam mengartikulasi tiga tujuan dasar (*three basic goals*), yakni: (1) Kemampuan meningkatkan konsumsi kolektif (*improved collective consumption*); (2) Kemampuan menciptakan budaya masyarakat yang mandiri/otonom (*the creation of an autonomous community culture*); dan (3) Kemampuan dalam mengelola politik sendiri (*political self-management*). Gerakan sosial perkotaan yang sempurna akan menghasilkan perubahan pada tiga level, yakni: perubahan kota (*urban*), perubahan kultur (*culture*), dan perubahan politik (*political*). Jika suatu gerakan menghasilkan perubahan kota dan kultur kota tetapi secara mendasar tidak menghasilkan perubahan pada sistem politik, maka hasil gerakan ini menurut Castells disebutnya sebagai *Urban Utopia*. Jika suatu gerakan hanya menghasilkan efek pada perubahan kota (*the urban effects*) saja, maka dikatakan sebagai *Urban Corporatism*. Jika gerakan semata-mata sebagai arena politik bagi anggota organisasi dan gagal menghasilkan efek positif pada kota dan kultur kota, maka disebut sebagai *Urban Shadows*. Namun apabila suatu gerakan dilakukan sebagai sebuah tuntutan kebutuhan segera dari kota tanpa memodifikasi sistem kota (*the urban system*), dan meningkatkan jaringan lingkungan sosial kota tanpa meredefinisi kultur kota, maka kemudian disebut sebagai *Urban Reform* (Castells, 1983; dalam Hannigan, 1985: 445).

Touraine (Hannigan, 1985: 445) memberikan formulasi yang lebih realistic yang didasarkan pada karakteristik dari otonomi dan identitas (*autonomy and identity*). Menurut Touraine, secara spesifik suatu gerakan sosial memiliki tiga dimensi, yakni:

- (1) dimensi identitas (*identity: I*), yaitu suatu keadaan dimana aktor gerakan sosial mendefinisikan dirinya;
- (2) dimensi oposisi (*opposition: O*), yaitu suatu definisi tentang lawan (musuh); dan

(3) dimensi totalitas (*totality*: T), yakni keuntungan atas gerakan dan lawan (musuh) yang berada dalam konflik.

Selanjutnya, formula Tourine ini disebut sebagai formula: *I-O-T (the I-O-T formula)*. Semakin terintegrasi erat antara ketiga dimensi tersebut, maka semakin besar kemungkinannya suatu gerakan dibangkitkan. Menurut formula I-O-T, agar aksi gerakan bersifat efektif, maka tiga dimensi ini harus terintegrasi. Dengan kata lain, apabila tiga dimensi ini dipisahkan, maka suatu gerakan akan lemah.

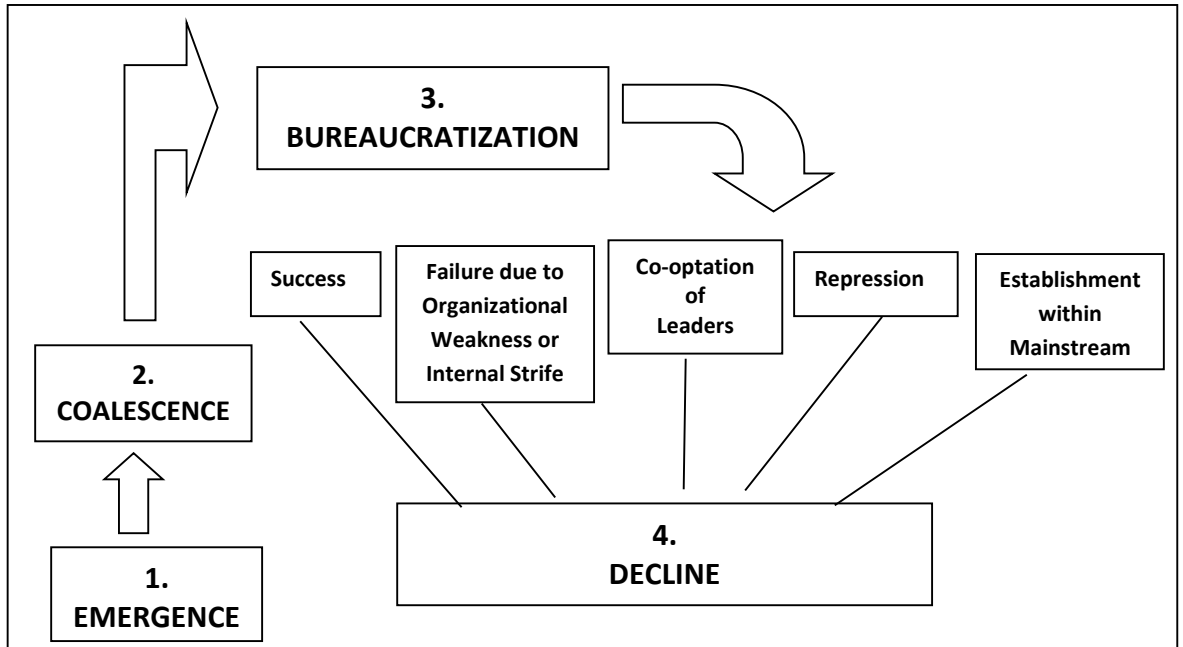
F. Tahap-Tahap dalam Gerakan Sosial

Menurut Macionis (1999: 623), dari hasil kajian beberapa peneliti, seperti Blumer (1969), Mauss (1975), dan Tilly (1978), dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 tahapan dalam proses gerakan sosial, yakni:

- (1) *Emergence* (tahap kemunculan);
- (2) *Coalescence* (tahap penggabungan) ;
- (3) *Bureaucratization* (tahap Birokratisasi); dan
- (4) *Decline* (tahap Kemunduran/Penurunan).

Selanjutnya tahap-tahap gerakan sosial tersebut digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Bagan 1. 5. :
Stages in the Lives of Social Movements
(Tahap-Tahap dalam Kehidupan Gerakan Sosial)



Sumber: Macionis, 1999: 623.

Penjelasan dari tahap-tahap sebagaimana digambarkan pada Bagan 12 adalah sebagai berikut:

(1) *Emergence* (Tahap Kemunculan).

Gerakan sosial didorong oleh suatu persepsi bahwa segalanya tidak baik (*all is not well*). Beberapa gerakan perempuan dan hak asasi sipil, misalnya, muncul karena penyebaran ketidakpuasan (*spread dissatisfaction*). Sementara gerakan-gerakan yang lainnya muncul sebagai kesadaran yang dipelopori oleh kelompok-kelompok kecil tentang beberapa isu tertentu. Misalnya, aktivis Gay yang melakukan inisiatif kepedulian publik akan bahaya ancaman AIDS, dan sebagainya.

(2) *Coalescence* (Tahap Penggabungan).

Setelah kemunculan, suatu gerakan sosial harus mendefinisikan dirinya sendiri dan mengembangkan strategi untuk “menuju publik” (*going public*). Pemimpin

(*leader*) harus menentukan kebijakan, memutuskan suatu taktik, membangun moral, dan melakukan rekrutmen keanggotaan baru. Dalam tahap ini, gerakan mungkin terlibat dalam tindakan kolektif (*collective action*) seperti demonstrasi untuk menarik perhatian media massa dan perhatian publik. Gerakan juga dimungkinkan membentuk aliansi dengan organisasi yang lainnya untuk mendapatkan sumberdaya yang diperlukan.

(3) *Bureaucratization* (Tahap Birokratisasi).

Agar menjadi sebuah kekuatan politik (*a political force*), suatu gerakan sosial harus memiliki sifat-sifat birokrasi (*bureaucratization traits*). Dengan demikian, gerakan akan menjadi mapan (*established*), ketergantungan terhadap charisma pemimpin akan sedikit menurun karena akan digantikan oleh staf yang mumpuni (*capable staff*). Apabila suatu gerakan sosial tidak menjadi mapan (*established*) maka akan berisiko mudah hilang (*dissolving*).

(4) *Stage 4: Decline* (Tahap Penurunan/Kemunduran).

Pada akhirnya, suatu gerakan sosial akan kehilangan pengaruhnya. Ada lima alasan mengapa suatu gerakan sosial mengalami kemunduran (Macdonis, 1999: 623), yakni:

- (1) Aktivitas suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena dianggap telah berhasil dalam mencapai tujuannya (*success*);
- (2) Suatu gerakan sosial mengalami kegagalan karena adanya kelemahan atau pertentangan dalam internal organisasi (*failure due to organizational weakness or internal strife*);
- (3) Suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena adanya kooptasi atas para pemimpin gerakan (*cooptation of leaders*);
- (4) Suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena adanya tekanan (*repression*), terutama dari pihak eksternal; dan
- (5) Suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena gerakan tersebut terbentuk ke dalam pengarusutamaan (*establishment within mainstream*). Beberapa gerakan dapat diterima ke dalam bagian dari suatu sistem, sehingga tidak ada tantangan atas *status quo*.

Menurut Hiller (1975: 343), dari berbagai hasil studi awal tentang gerakan sosial yang dilakukan oleh beberapa ahli seperti Dawson dan Getty, Smelser, dan King`s, menempatkan proses pengorganisasian atau proses institusionalisasi sebagai bagian dari tahap dalam proses dan dinamika gerakan sosial. Misalnya Dawson dan Getty (1951) menyebutkan tahap-tahap suatu gerakan sosial meliputi: (1) *preliminary stage of social unrest* (tahap awal kerusuhan sosial); (2) *popular stage of collective excitement* (tahap populer dari semangat kolektif); (3) *stage of formal organization* (tahap dari pengorganisasian formal); dan (4) *institutionalization* (tahap institusioanlisasi). Kemudian Smelser (1963) menyebutkan tiga fase dalam gerakan sosial, yaitu: (1) *incipient* (pase awal); (2) *enthusiastic mobilization* (mobilisasi antusias); dan (3) *institutionalization and organization* (institusionalisasi dan pengorganisasian). Sementara King`s (1956) menyebutkan tiga tahap dari gerakan sosial, yaitu: (1) *incipient* (tahap awal); (2) *organizational* (tahap pengorganisasian); dan (3) *stable* (tahap stabil).

G. Gerakan Sosial dan Tindakan Perlawanan (Resistensi)

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa masyarakat sipil (*civil society*) memiliki kekuatan berupa *social power* (kekuatan sosial), dan bentuk dari *social power* ini adalah *social movement* (gerakan sosial). Klandermans (Quah & Sales, 2000: 236), menyitir pendapat Tarrow yang menyatakan bahwa gerakan sosial adalah penentangan/perlawanan kolektif oleh orang-orang yang memiliki solidaritas dan tujuan yang sama dalam proses interaksi yang terus-menerus dengan pihak elit, pihak lawan dan pihak yang berwenang. Dari pendapat Tarrow ini, maka dapat dielaborasi bahwa: (1) suatu gerakan adalah tindakan penentangan/perlawanan terhadap elit, otoritas, dan terhadap aturan kelompok dan budaya lainnya; (2) suatu gerakan dilakukan atas nama klaim yang sama atas pihak lawan, pihak berwenang, dan elit; (3) suatu gerakan didasari oleh rasa solidaritas dan identitas kolektif; dan (4) untuk meneruskan arah tujuan tindakan kolektif, maka bentuk pertarungan diubah ke dalam suatu gerakan sosial.

Menurut Singh (2010: 20-21), gerakan-gerakan sosial mengekspresikan usaha-usaha kolektif masyarakat untuk menuntut kesetaraan dan keadilan sosial, dan mencerminkan perjuangan-perjuangan masyarakat untuk membela identitas-identitas dan warisan-warisan kultural mereka. Gerakan sosial dan aksi kolektif telah menjadi sebuah kekuatan universal dari lembaga dan aksi historis dalam masyarakat. Oleh karena itu, gerakan sosial dan aksi sosial tidak hadir begitu saja dalam masyarakat, tetapi kemunculannya seiring dengan adanya suatu konflik dan pergulatan-pergulatan di seputar persoalan ketimpangan, dominasi, kebebasan dan keadilan sosial. Lebih lanjut, Singh menyatakan bahwa situasi-situasi ketimpangan dan dominasi sosial, jika dijalankan dan dipertahankan oleh institusi-institusi dan lembaga-lembaga sosial, maka pada gilirannya akan menghasilkan sebuah situasi balik dimana terjadi perlawanan, penolakan, dan pemberontakan menentang sistem-sistem dominasi tersebut. Bagi Singh, struktur-struktur sosial dikonseptualisasikan sebagai sebuah arena pertemuan yang intens dan tidak terhitung jumlahnya dari berbagai kelompok pendominasi dan kolektivitas-kolektivitas sosial yang terdominasi. Struktur-struktur masyarakat merupakan sebuah medan pergulatan yang terus-menerus di antara berbagai kelompok, strata, dan lapisan sosial yang saling bersaing.

Para sarjana menggunakan terminologi perlawanan (*resistance*) untuk menjelaskan tentang berbagai variasi dari tindakan dan tingkah laku pada semua tingkatan kehidupan sosial manusia (individu, kolektifitas, dan institusi) dan dalam berbagai seting yang berbeda, termasuk sistem politik, hiburan dan sastra, dan tempat kerja (Hollander & Einwohner, 2004: 534). Dalam hal ini, semua hal dari revolusi hingga gaya rambut telah dijelaskan sebagai suatu perlawanan (resistensi). Perlawanan sangat beragam menurut tingkah laku dan seting. Namun, secara umum dapat disebutkan bahwa modus dari perlawanan adalah bisa dalam bentuk fisik atau materi (*material or physical*), termasuk menggunakan badan atau objek-objek material yang lainnya. Perlawanan sangat siap untuk terjadinya gerakan sosial atau aksi protes dan ketegangan politik, sehingga banyak aktivitas-aktivitas secara tradisional dihubungkan dengan fenomena ini, seperti pawai, tindak pencegahan, dan pembentukan organisasi, termasuk dalam kategori ini. Tindakan lainnya dari perlawanan fisik meliputi tingkah laku sedramatis kekerasan atau sehalus bekerja

lambat, pura-pura sakit, mengenakan jenis pakaian tertentu, atau mencuri dari satu pemberi kerja.

Di luar materi dan fisik, beberapa penulis telah menjelaskan resistensi yakni yang diwujudkan dalam bentuk bahasa dan tingkah laku simbolik, misalnya ketika perempuan Hawaii mempublikasikan cerita-cerita tradisional di surat kabar, berbicara dengan menggunakan bahasa asli mereka, dan melakukan tarian dalam rangka melakukan perlawanan atas aneksasi terhadap suku Hawaii. Para penulis lainnya menjelaskan bahwa aksi diam (*silence*) juga dapat dikategorikan sebagai bentuk dari perlawanan (resistensi).

Skala resistensi juga bervariasi, tindakan resistensi mungkin bisa menjadi individual atau kolektifitas, luas atau terbatas secara lokal. Terkait dengan skala adalah level dari koordinasi (*level of coordination*) antara pihak-pihak yang melawan (*resisters*), yaitu sejauh mana mereka sengaja melakukan tindakan secara bersama-sama. Sementara revolusi dan aktivitas protes terorganisir lainnya secara jelas mensyaratkan koordinasi, tindakan perlawanan lainnya (seperti pilihan gaya rambut atau konfrontasi di tempat kerja) tidak begitu memerlukan adanya koordinasi antar aktor. Target dari perlawanan juga bervariasi, dari individual kepada kelompok, bisa juga dari organisasi kepada institusi dan struktur sosial.

Sumber perbedaan yang lainnya adalah tentang arah dan tujuan (*direction or goals*) dari perlawanan. Sementara perlawanan seringkali dipahami ditujukan untuk mencapai beberapa perubahan jangka pendek, dalam beberapa kasus perilaku yang digambarkan sebagai perlawanan bertujuan untuk mengurangi perubahan. Sebagai contoh, perlawanan kultural (*cultural resistance*) pada komunitas minoritas bertujuan untuk mempertahankan budaya minoritas terhadap asimilasi dengan budaya lokal. Lebih lanjut, perubahan dengan tuntutan resistensi sering dianggap menjadi progresif atau setidaknya prososial, sebagai bentuk penolakan dominasi dari atas. Sementara, sejumlah penulis mencatat bahwa perlawanan dapat juga berasal dari mereka yang memiliki kekuasaan lebih atau yang memiliki tingkatan kedudukan yang lebih tinggi. Perlawanan bisa juga berupa perlawanan Kanan (*Right*) dan perlawanan Kiri (*Left*), antisosial, kekerasan rasial, dan bahkan pemerkosaan.

Terakhir, ketika perlawanan secara umum dipahami sebagai tindakan politik (*political action*), beberapa penulis menjelaskan bahwa perlawanan dapat juga menjadi berbasis-identitas (*identity-based*). Howe (1988) menyatakan tentang strategi diskursif digunakan oleh pria pengangguran jangka panjang di Belfast untuk menolak dicap sebagai pengemis atau penipu, dalam hal apa yang ditolak bukan hanya kondisi politik atau kondisi sosial akan tetapi juga para penentang dikaitkan dengan identitas.

Holander dan Einwohner (2004: 539) menyatakan bahwa secara umum ada dua elemen inti dalam perlawanan, yakni: (1) tindakan (*action*); dan (2) oposisi (*opposition*). Tindakan (*action*) dipahami dalam konteks yang lebih luas, yakni mengacu tingkah laku aktif (*active behavior*), apakah itu bersifat verbal, kognitif, maupun fisik. Sementara oposisi (*opposition*) mengacu pula kepada istilah-istilah lain, seperti: membalas (*counter*), bertentangan (*contradict*), perubahan sosial (*social change*), penolakan (*reject*), tantangan (*challenge*), subversif (*subversive*), dan kerusakan dan/atau gangguan (*damage and/or disrupt*). Rubin (1996: 245) menyatakan bahwa perlawanan adalah tindakan yang melibatkan kesadaran, aksi kolektif, dan penentangan langsung terhadap struktur kekuasaan. Dengan demikian perlawanan meliputi aktivitas dimana aktivitas tersebut terjadi sebagai kebalikan (oposisi) atas seseorang atau sesuatu yang lainnya.

Perlawanan dikelompokkan dalam beberapa tipe (Holander & Einwohner, 2004: 544-547). Tipe-tipe perlawanan meliputi:

1. Perlawanan terbuka (*Overt resistance*), adalah tingkah laku yang terlihat dan mudah dikenali baik oleh target (*targets*) dan pengamat (*observers*) sebagai perlawanan. Kategori ini meliputi tindakan-tindakan kolektif termasuk seperti gerakan sosial dan revolusi, maupun tindakan individu untuk melakukan penolakan seperti perlawanan perempuan dalam menolak pekerjaan rumah tangga, atau melawan secara fisik terhadap kekerasan seksual;
2. Perlawanan tertutup (*Covert resistance*), mengacu kepada tindakan yang disengaja akan tetapi tidak diketahui oleh target, meskipun mereka diakui sebagai perlawanan oleh orang lain. Sebagai contoh dari bentuk perlawanan tertutup adalah gosip (*gossip*), omelan (*bitching*), dan subversi halus di tempat kerja;

3. Perlawanan tidak disadari (*Unwitting resistance*), tipe ini tidak dimaksudkan sebagai perlawanan oleh aktor dan belum dirasakan sebagai ancaman oleh target. Tipe ini merupakan suatu tindakan yang tidak disengaja dan tidak memiliki terget khusus tertentu. Titik poinnya adalah mungkin ada beberapa orang yang merasa keberatan atau terancam; terlepas dari apakah aktor bermaksud untuk melakukan provokasi atau tidak;
4. Perlawanan target-tetap (*Target-defined resistance*), yakni perlawanan yang hanya satu orang yang mengakui suatu tingkah laku sebagai perlawanan. Misalnya, suami yang kasar bisa menilai tingkah laku istriya sebagai resistensi;
5. Perlawanan eksternal (*External-defined resistance*), yakni tindakan-tindakan perlawanan yang tidak dimaksudkan atau diakui sebagai perlawanan oleh aktor (pelaku) atau target mereka, tetapi diberi label perlawanan oleh pihak ketiga;
6. Perlawanan terjawab (*Missed resistance*), yakni bentuk tindakan-tindakan perlawanan yang diakui oleh target sebagai perlawanan meskipun oleh pihak ketiga tidak diakui sebagai perlawanan; dan
7. Perlawanan berusaha (*Attempted resistance*), yakni mengacu kepada tindakan-tindakan aktor yang ditujukan untuk perlawanan namun tidak diakui sebagai tindakan perlawanan baik oleh target (*targets*) maupun para pengamat (*observers*).

BAB II

KONSEP TENTANG PERILAKU KOLEKTIF **(*COLLECTIVE BEHAVIOR*)**

A. Konsep tentang Perilaku Kolektif

Menurut Locher (2002: 1), secara umum perilaku kolektif (*collective behavior*) diartikan sebagai setiap peristiwa di mana sekelompok orang terlibat dalam perilaku yang tidak biasanya (*unusual behavior*), yakni peristiwa yang tidak diharapkan, tidak biasa (tidak lazim) dilakukan saat keadaan normal, dan tidak biasa (tidak lazim) dilakukan pada orang-orang yang normal pada umumnya. Perilaku kolektif berada di luar situasi yang normatif dan di luar situasi yang diharapkan oleh orang-orang yang terlibat dalam perilaku kolektif (partisipan). Perilaku kolektif bertentangan dengan standar-standar perilaku atau harapan sosial dari kelompok tertentu atau masyarakat. Perilaku kolektif adalah bentuk perilaku menyimpang (*deviant behavior*) dari kelompok. Perilaku ekspresi kolektif (*the expression collective behavior*) pertama kali digunakan oleh Robert E. Park, dan digunakan secara definitif oleh Herbert Blumer, yakni merujuk kepada proses sosial dan peristiwa yang tidak mencerminkan struktur yang ada (hukum, konvensi, dan lembaga), yang muncul secara spontan.

Para ahli memberikan definisi yang beragam tentang apa yang dimaksud dengan perilaku kolektif. Pada awalnya, perilaku kolektif disebut sebagai perilaku massa (*mob behavior*) atau histeria massa (*mass hysteria*), dimana perilaku kolektif diyakini terjadi ketika orang-orang kehilangan kemampuan mereka untuk berpikir dan menjadi “gila” sesaat (Locher, 2002: 2). Semua bentuk dari perilaku kolektif melibatkan kelompok orang-orang untuk melakukan sesuatu, dimana hal ini tidak akan dilakukan oleh orang-orang tersebut dalam keadaan normal.

Sementara itu, Spencer (1982: 491) menyatakan bahwa perilaku kolektif (*collective behavior*) dapat didefinisikan sebagai tindakan spontanitas, sifatnya sementara, dan tidak terlembagakan secara kelompok. Sedangkan Macionis (1999: 607) berpendapat bahwa perilaku kolektif (*collective behavior*) adalah aktivitas yang dilakukan oleh sejumlah anggota manusia yang jumlahnya cukup banyak, seringkali

bersifat spontanitas, dan biasanya bersifat penentangan terhadap norma yang sudah mapan (*established norms*). Bentuk-bentuk dari *collective behavior* adalah *crowds, mobs and riots, rumor and gossip, public opinion, panic and mass hysteria*, dan *fashions and fads*.

Semua bentuk dari perilaku kolektif (*collective behavior*) melibatkan tindakan dari beberapa kolektifitas manusia, yakni sejumlah besar orang-orang yang interaksinya minim, terjadi karena tidak adanya norma-norma konvensional yang didefinisikan dengan baik. Macionis (1999: 608), mengutip pendapat Weller dan Quarantelli serta pendapat Turner dan Killian, menyatakan bahwa sifat dari kolektifitas (*collectivity*), meliputi:

- (1) Kolektifitas didasarkan atas interaksi sosial yang terbatas (*Collectivity are based on limited social interaction*);
- (2) Kolektifitas tidak memiliki batasan yang jelas (*Collectivity have no clear social boundaries*); dan
- (3) Kolektifitas menghasilkan norma yang lemah dan inkonvensional (*Collectivity generate weak and unconventional norms*).

Menurut Zanden (1988: 566), perilaku kolektif (*collective behavior*) dipandang sebagai cara berpikir (*thinking*), merasa (*feeling*) dan bertindak (*acting*) yang berkembang di antara sejumlah orang, yang relatif baru dan tidak didefinisikan dengan baik. Sejarah kehidupan manusia (*human history*) diwarnai oleh episode yang dinamakan sebagai kekejangan kolektif (*collective seizures*), ledakan kelompok (*group outbursts*), khayalan massa (*mass delusions*), dan penyakit kelompok (*group pathologies*). Berdasarkan catatan awal masa lalu, orang-orang telah banyak melibatkan diri ke dalam berbagai tipe dari perilaku massa (*mass behavior*), termasuk kerusuhan sosial (*social unrest*), kerusuhan (*riots*), kegilaan (*manias*), keisengan (*fads*), panic (*panics*), aliran masaa (*mass flights*), hukuman mati tanpa pengadilan (*lynchings*), kebangkitan agama (*religious revival*), dan pemberontakan (*rebellions*).

Lebih lanjut, Zanden (1988: 566) menyatakan bahwa munculnya perilaku kolektif (*collective behavior*) seringkali berlangsung pada saat terjadinya perubahan sosial yang cepat (*rapid social change*). Pada gilirannya, perilaku kolektif (*collective*

behavior) memberikan dorongan terhadap suatu perubahan sosial. Seperti halnya perilaku kolektif (*collective behavior*), gerakan sosial (*social movement*) sebagai suatu upaya yang kurang-lebih bersifat gigih dan terorganisir dari sebagian orang-orang yang jumlahnya banyak, juga terjadi dalam rangka untuk membawa atau menolak suatu perubahan. Baik perilaku kolektif (*collective behavior*) maupun gerakan sosial (*social movement*) terjadi di luar kerangka institusional kehidupan sehari-hari, dan melanggar jaringan tatanan harapan yang lazim. Meskipun gerakan sosial (*social movement*) dan perilaku kolektif (*collective behavior*) keduanya memiliki kemiripan, namun sesungguhnya keduanya juga memiliki perhatian yang berbeda. Suatu perilaku kolektif (*collective behavior*) ditandai oleh spontanitas dan lemahnya struktur internal, sementara gerakan sosial (*social movement*) memiliki keteraturan internal yang tinggi dan tindakan yang lebih terarah.

Menurut Stolley (2005: 179), perilaku kolektif (*collective behavior*) berkaitan dengan proses perubahan sosial. Para sosiolog memberikan perhatian yang cukup besar terhadap kajian tentang perubahan sosial (*social change*). Dalam mengkaji perubahan sosial (*social change*), maka salah satu fokus yang dikaji adalah tentang perilaku kolektif (*collective behavior*). Selanjutnya, Stolley menyatakan bahwa perilaku kolektif (*collective behavior*) adalah semua aktivitas spontanitas yang melibatkan orang banyak yang melanggar bangunan norma yang ada. Perilaku tersebut terjadi ketika orang-orang bereaksi terhadap sesuatu yang baru atau sesuatu yang asing (*unfamiliar*).

B. Sejarah Perkembangan Studi tentang Perilaku Kolektif

Perilaku kolektif (*collective behavior*) telah terjadi sejak adanya kelompok orang-orang. Namun, para ilmuwan baru memfokuskan perhatian terhadap perilaku kolektif (*collective behavior*) sekitar satu abad terakhir atau lebih. Sejak saat itu, beberapa perspektif yang berbeda dan teori-teori spesifik tentang perilaku kolektif (*collective behavior*) telah dikembangkan (Locher, 2002: 5). Sejarah perkembangan studi tentang perilaku kolektif (*collective behavior*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Mass Hysteria*: Sebagai Studi Awal tentang Perilaku Kolektif

Menurut Locher (2002: 5), tulisan yang aslinya diterbitkan pada tahun 1841 yang berjudul *Charles Mackay's Extraordinary Popular & The Madness of Crowds*, dianggap sebagai hasil kerja modern yang memfokuskan terhadap perilaku kolektif (*collective behavior*). Mackay bukan seorang ilmuwan sosial, pendekatan tulisannya lebih sebagai sejarawan dan jurnalis. Tulisan Mackay menyajikan apa yang tampaknya baik dan akurat untuk diteliti dalam mengkaji perilaku kolektif (*collective behavior*), tetapi Mackay tidak secara serius bertujuan untuk menggali mengapa perilaku kolektif (*collective behavior*) terjadi.

Pada tahun 1895, Gustave Le Bon menerbitkan sebuah buku yang berjudul *The Crowd: A Study of the Popular Mind*. Buku ini secara sungguh-sungguh bertujuan menghasilkan eksplanasi teoritis tentang terjadinya kekerasan massa yang mengerikan di Perancis selama dan setelah revolusi Perancis. Le Bon, seorang psikolog, mencoba menggali bagaimana warga biasa bisa terlibat dalam suatu peristiwa “perilaku haus darah” (*bloodthirsty behavior*) dan kemudian mereka kembali ke dalam kehidupan yang normal. Le Bon kemudian melahirkan apa yang disebut dengan *Contagion Theory* (Locher, 2002: 5). Premis dasar dari *Contagion Theory* (Teori Penularan) adalah bahwa suatu peristiwa kekerasan massa (*mob violence*), kerusuhan (*riots*), hukuman gantung tanpa pengadilan (*lynching*), dan sebagainya, didorong oleh insting binatang (*animal instincts*). LeBon meyakini bahwa desakan animalistik ini mempercepat terhadap “kejengkelan massa” (*maddening crowd*) seperti sebuah infeksi. Para anggota dari suatu *mob* atau *crowd* semuanya turun ke level yang lebih keras dan animalistik melalui suatu penularan (*contagion*).

The Crowd (kerumunan) sangat dibebani oleh pandangan sosial dan politik dari LeBon. Sehingga, studi tentang perilaku kolektif (*collective behavior*) yang dilakukan para sosiolog dan psikolog di Amerika Serikat banyak dipengaruhi oleh ide-ide dari LeBon. Sebagai hasilnya, beberapa cabang yang berbeda dari teori penularan (*contagion theory*) telah berkembang dalam beberapa decade terakhir. Misalnya, Robert Park, seorang warga Amerika yang belajar di Jerman, telah menulis disertasinya tentang perilaku kerumunan (*crowd behavior*) pada tahun 1904.

Karya Park, terakhir dipublikasikan dalam berbagai koleksi, melucuti sebagian besar pandangan politik LeBon, namun tetap mempertahankan wawasan besar dari LeBon ke dalam *mob behavior* (perilaku massa). Selanjutnya pada tahun 1921, Park bersama dengan Ernest Burgess memunculkan *Contagion Theory* dalam *Introduction to the Science of Sociology*, dimana terminologi tentang perilaku kolektif (*collective behavior*) pertama kali digunakan. Park dan Burgess kemudian memasukkan tentang *social unrest* (keresahan sosial), *crowds* (kerumunan), *publics* (publik), *sects* (sekte), *social contagion* (penularan sosial), *mass movements* (gerakan massa), *the crowd mind* (pikiran massa), *propaganda* (propaganda), dan *fashion* (mode), sebagai perilaku kolektif (*collective behavior*) (Stolley, 2002: 6).

Herbert Blumer (Stolley, 2002: 6), seorang sosiolog yang belajar di bawah Park, memadukan ide LeBon dan Park ke dalam versinya sendiri tentang *Contagion Theory* pada tahun 1939. Kunci dari pandangan Blumer adalah aksi kerumunan (*acting crowd*), semangat kelompok yang berubah menuju suatu tujuan. Selanjutnya, Blumer mengidentifikasi tentang lima tahap yang merubah suatu kumpulan individu menjadi suatu kerumunan (*crowd*) yang aktif, yakni tahap: *social unrest* (keresahan sosial), *exciting event* (luapan peristiwa), *milling* (berdesakkan), *common object of attention* (perhatian terhadap objek yang sama), dan *common impulse* (dorongan bersama).

2. “Kematian” Histeria Massa (*The death of Mass Hysteria*).

Contagion theory (teori penularan) berasumsi bahwa individu kehilangan kemampuan beralasan dan berpikir rasional selama peristiwa kolektif berlangsung. Ketika asumsi ini diterapkan kepada kekerasan massa (*mob violence*), maka dapat dipahami mengapa para peserta kolektifitas bersifat histeris (*hysterical*), kegilaan temporal (*temporarily insane*), atau terhipnotis (*hypnotized*). Perspektif ini memungkinkan suatu peristiwa dipandang sebagai penyimpangan temporal (*temporary aberrations*), dan dimungkinkan pula untuk menemukan suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya perilaku irasional ini.

Namun demikian, para sosiolog mulai menyadari bahwa tidak semua perilaku kolektif (*collective behavior*) berkaitan dengan aspek irasional (*irrational*), histeris

(*hysterical*), atau perilaku merusak (*violent behavior*) (Stolley, 2001: 6). Para sosiolog menyadari pula bahwa diperlukan berbagai perspektif teoritik baru yang dapat menjelaskan tentang perilaku kolektif (*collective behavior*). Maka kemudian, hysteria massa (*mass hysteria*) sebagai kajian utama dalam studi tentang perilaku kolektif (*collective behavior*) mulai ditinggalkan yang kemudian disebutnya sebagai suatu “Kematian Histeria Massa” (*The death of Mass Hysteria*). Setelah “Kematian Histeria Massa” (*The death of Mass Hysteria*), selanjutnya muncul berbagai perspektif teoritik baru dalam mengkaji tentang perilaku kolektif (*collective behavior*), seperti: (1) *The Emergent Norm Perspective*; (2) *The Value-Added Theory*; (3) *The SBI/Sociocybernetic Perspective*; dan (4) *The Individualist Theories*.

3. Pandangan *The Emergent Norm Perspective* (Perspektif Kemunculan Norma).

Pada tahun 1957, Ralph Turner dan Lewis Killian (Locher, 2002: 6) memperkenalkan apa yang mereka sebut sebagai *The Emergent Norm Perspective* dalam perilaku kolektif (*collective behavior*). Premis dasar dari *The Emergent Norm Perspective* sebenarnya sangat sederhana, yakni: Sebagian besar orang-orang mengikuti norma-norma dalam setiap situasi pada umumnya. Namun, ketika suatu kelompok dari individu berhadapan dengan situasi dimana mereka tidak mengetahui apa yang harus dilakukan, maka mereka harus menciptakan norma-norma baru (*new norms*) atas situasi yang terjadi. Setelah semua orang yakin mereka mengetahui tentang perilaku apa yang sesuai, maka kemudian mereka ikut serta dalam perilaku mereka. Proses ini bersifat rasional dan logis.

Tidak semua perilaku individu yang terlibat dalam suatu perilaku kolektif (*collective behavior*) memiliki kategori alasan yang sama. Turner dan Killian mencatat tentang skema klasifikasi partisipan suatu perilaku kolektif kedalam beberapa kategori yang berbeda yang didasarkan atas alasan-alasan mereka mengambil bagian dalam suatu peristiwa perilaku kolektif. Kategori-kategori tersebut meliputi: (1) *ego-involved* (keterlibatan ego), yakni individu yang betul-betul melibatkan ego mereka dalam perilaku kolektif; (2) *concerned* (prihatin), yakni

individu-individu yang ikut terlibat dalam perilaku kolektif karena mereka merasa ikut prihatin; (3) *insecure* (tidak aman), yakni individu-individu yang ikut terlibat dalam suatu perilaku kolektif karena mereka merasa tidak aman apabila tidak terlibat; (4) *curious spectators* (penonton penasaran), yakni individu-individu yang hanya mengamati atau menonton suatu perilaku kolektif karena didorong oleh perasaan penasaran; dan (5) *exploiters* (mengeksplorasi), yakni individu-individu yang terlibat dalam suatu perilaku kolektif dengan tujuan untuk mencari atau mengeksplorasi apa yang sesungguhnya terjadi.

4. Pandangan *The Value-added Theory* (Teori Nilai-Tambah).

Pada tahun 1962, Neil Smelser mempublikasikan *Theory of Collective Behavior*. Seperti halnya Turner dan Killian, Smelser juga tidak mengkarakteristikan perilaku kolektif (*collective behavior*) sebagai histeria massa (*mass hysteria*) atau perilaku massa yang irasional (*irrational mob behavior*). Smelser berpendapat bahwa perilaku kolektif (*collective behavior*) adalah sebagai reaksi terhadap kondisi dan keadaan sosial yang menyebabkan perilaku yang tidak biasa (*unusual behavior*). Perilaku ini tampaknya rasional bagi partisipan pada saat itu.

Selanjutnya Smelser (Locher, 2002: 7), memandang bahwa perilaku kolektif (*collective behavior*) sebagai perilaku kelompok (*group behavior*) yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan sosial (*social strain*). Para partisipan adalah rasional dan bijaksana (*rational and sane*). Mereka menyadari penuh tentang apa yang harus mereka lakukan dan hal apa yang mungkin bisa dilakukan, jadi ada alasan yang logis-rasional menurut keyakinan yang diterima secara umum dalam suatu situasi terjadinya peristiwa perilaku kolektif (*collective behavior*). Perilaku kolektif (*collective behavior*) hanya dipandang sebagai hal yang irasional bagi *outsiders* (pihak luar) yang tidak menerima keyakinan umum (*generalized belief*) ini.

5. *The SBI/Sociocybernetic Perspective*

Sejak awal tahun 1970-an, Clark McPhail (Locher, 2002: 8) telah merumuskan suatu hasil kerjanya yang berpusat pada perspektif interaksionisme simbolik (*the*

Symbolic Behaviorist/Interactionist; the SBI) atau perspektif Sibernetika Sosial (*Sociocybernetic perspective*). McPhil menggunakan pendekatan behaviorisme dalam arti memfokuskan pada organisasi dari perilaku berkumpul. Sedangkan pendekatan interaksionis digunakan dalam arti bahwa perilaku berkumpul dipandang sebagai hasil dari makna interpretasi atau instruksi atas respons yang diberikan oleh para partisipan dan orang-orang lainnya. Perspektif ini memfokuskan pada cara dimana orang-orang mengatur perilaku mereka sendiri, dan juga melihat bagaimana orang-orang secara langsung mempengaruhi perilaku orang lainnya.

Selanjutnya, bagi McPhil perilaku kolektif (*collective behavior*) merupakan bentuk lain dari suatu perilaku kelompok (*group behavior*). Perspektif McPhil mengacu kepada definisi perilaku kolektif (*collective behavior*) yang luas yang di dalamnya meliputi perilaku rutin dan perilaku ritual (*routine and ritual behavior*). Atas dasar ini, maka sebagian besar studi SBI memfokuskan pada kejadian-kejadian yang oleh para sosiolog lainnya tidak dipertimbangkan sebagai perilaku kolektif (*collective behavior*). Lebih lanjut, analisisnya banyak ditempatkan pada bagaimana orang datang secara bersama-sama untuk berkerumun, berperilaku, dan menyebar. Teori *The SBI/Sociocybernetic* sangat berguna dalam mendeskripsikan dan menganalisis (*description and analysis*), bukan hanya sekedar memahami dan memprediksi (*understanding and prediction*) suatu perilaku ritual (*routine and ritual behavior*).

6. Pandangan *The Individualist Theories* (Teori-Teori Individualis)

Perkembangan terakhir dalam studi tentang perilaku rutin dan ritual (*routine and ritual behavior*) adalah munculnya *The Individualist Theories*. Perspektif *The Individualist Theories* berasumsi bahwa munculnya perilaku kolektif (*collective behavior*) berasal dari dalam individu. Perilaku kolektif (*collective behavior*) menunjukkan kecenderungan bawaan (*innate tendencies*), pola perilaku yang dipelajari (*learned patterns of behavior*), atau dorongan basis identitas (*identity-based learnings*) yang kurang lebih merasuki individu sebelum memasuki kepada suatu peristiwa kolektif. Perilaku kolektif (*collective behavior*) dipandang bukan sebagai orang normal melakukan hal-hal yang abnormal, akan tetapi sebagai potensi orang-

orang abnormal mengekspresikan dorongan-dorongan atau kecenderungan-kecenderungan dalam diri (*inner tendencies or desires*).

Beberapa teoritis yang termasuk ke dalam kelompok perspektif *The Individualist Theories*, seperti: Floyd Allport yang menulis tentang *Social Psychology* (1924), Neil Miller dan John Dollard tentang *Social learning and Imitation* (1941), serta Michael Hogg dan Dominic Abrams yang menerbitkan tentang *Social Identifications: A Social Psychology of Intergroup Relations and Group Processes* (1988).

Setelah munculnya perspektif *The Individualist Theories* dalam studi tentang Perilaku kolektif (*collective behavior*), maka kemudian berkembang kajian tentang *social movements* (gerakan sosial). Bahasan tentang *social movements* (gerakan sosial) akan diuraikan dalam bagian tersendiri.

C. Bentuk-Bentuk Perilaku Kolektif

Perilaku kolektif (*collective behavior*) memiliki berbagai bentuk (Stolley, 2005: 180). Menurut Turner dan Killin (Macionis, 1999: 608), perilaku kolektif (*collective behavior*) dibagi menjadi dua jenis, yakni:

- (1) *Localized collectivity* (Kolektifitas Terbatas), yakni bentuk dari perilaku kolektif yang mengacu kepada orang-orang yang memiliki kedekatan fisik antara yang satu dengan lainnya. Tipe perilaku kolektif (*collective behavior*) yang termasuk ke dalam jenis *localized collectivity* antara lain: *crowds* (kerumunan) dan *riots* (kerusuhan); dan
- (2) *Dispersed collectivity or mass behavior* (Kolektifitas Luas atau Perilaku Massa), yakni bentuk perilaku kolektif yang melibatkan orang-orang yang saling mempengaruhi satu sama lain walaupun mereka dipisahkan oleh jarak yang jauh. Tipe *collective behavior* yang termasuk ke dalam jenis *dispersed collectivity or mass behavior* antara lain: *rumors* (isu), *public opinion* (opini publik), dan *fashion* (mode).

Stolley (2005: 180) menyebutkan bentuk-bentuk dari perilaku kolektif meliputi: *fashions and fads*, *rumors*, *urban legends*, *mass hysteria*, dan *crowds*. Selanjutnya,

berbagai bentuk dari perilaku kolektif (*collective behavior*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Fashions and Fads* (Gaya Busana dan Mode)

***Fashion* (gaya);** adalah pola sosial (*social pattern*) dari perilaku atau penampilan dari sejumlah orang untuk jangka waktu yang cukup lama (Stolley: 2005: 180). Meskipun pakaian mungkin dianggap oleh banyak orang sebagai unsur utama dari *fashions* (gaya busana), namun *fashions* (gaya busana) sebenarnya mencakup lebih dari sekedar pakaian yang dikenakan. *Fashions* di dalamnya meliputi juga mobil (*automobiles*), gaya arsitektur dan dekorasi (*architectural and decorating styles*), perabotan rumah (*home furnishings*), pertunjukan (*entertainment*), praktek medis (*medical practice*), manajemen bisnis (*business management*), politik (*politics*), seni (*the arts*), bahasa (*language*), dan bahkan nama (*even names*). *Fashions* selalu berubah, satu preferensi akan menggantikan preferensi yang lainnya, demikian seterusnya.

Menurut Macionis (1999: 615), *fashion* (feysen) adalah suatu pola sosial yang disukai oleh sejumlah banyak orang-orang (*fashion is a social pattern favored by a large number of people*). Beberapa fashion berakhir untuk beberapa tahun, sementara yang lainnya berubah setelah beberapa bulan saja bertahan. Sebuah karya seni (seperti lukisan, music, drama, dan literatur), bentuk bangunan, mode pakaian, model mobil, gaya bahasa yang digunakan, dan opini publik semuanya berubah sebagai ide yang masuk dan keluar dalam konteks *fashion*.

Herbert Blumer (Stolley, 2005: 180) memandang *fashion* sebagai bentuk dari kehidupan sosial kolektif modern. Banyak analisa tentang *fashion* difokuskan terhadap peran kepentingan komersial (termasuk produsen dan penjual produk) dalam mengatur suatu fashion. Sementara Georg Simmel (Stolley, 2005: 180) telah melakukan studi sosiologi tentang *fashion* pada masa abad yang lalu. Simmel memandang bahwa orang kaya (*the wealthy*) sebagai trendsetter *fashion*, dijadikan contoh dimana orang lain menirunya. Selanjutnya, Thorstein Veblen (Stolley, 2005: 180) menyatakan bahwa beberapa orang membeli barang-barang yang mahal untuk menunjukkan bahwa mereka termasuk orang yang mampu. Veblen menyebut situasi ini sebagai konsumsi menyolok (*conspicuous consumption*). Sedangkan Pierre

Bourdieu (Stolley, 2005: 180) melihat bahwa pilihan akan suatu produk berkaitan, dan memperkuat, posisi sosial (*social position*).

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana dan mengapa *fashion* berubah dari waktu ke waktu, Stanley Lieberman (Stolley, 2005: 180) melakukan studi tentang selera *fashion* dengan memfokuskan kepada nama anak pertama. Tidak seperti pakaian, tidak ada upaya komersial yang dibuat untuk mempengaruhi pilihan nama. Nama memberikan kesempatan untuk dipelajari yang oleh Lieberman disebutnya sebagai mekanisme murni tentang *fashion* (*pure mechanisms of fashion*). Lieberman menemukan bahwa terdapat dua hal yang memengaruhi selera, yakni: (1) *external social forces* (kekuatan sosial eksternal), seperti komersialisme; dan (2) *internal taste mechanism* (mekanisme selera internal). Mekanisme internal (*internal mechanism*) bekerja untuk menghasilkan perubahan *fashion* karena rasa bosan dengan sesuatu yang lama dan menemukan hal-hal yang lebih menarik dibandingkan yang lainnya. Lieberman juga menemukan bahwa kecepatan perubahan *fashion* tergantung atas harga dan daya tahan (*price and durability*). *Fashion* dengan harga pakaian yang murah dan mudah aus akan berubah dengan cepat, sementara *fashion* dengan harga produk yang mahal, seperti furniture, akan berubah dengan lambat (*slowly*).

Fads (Mode). *Fashions* dibedakan dari *fads* (mode). Menurut Stolley (2005: 181), *Fads* (mode) biasanya dipandang sebagai perilaku yang relatif baru yang muncul secara tiba-tiba, menyebar dengan cepat, secara antusias dipeluk oleh sejumlah besar orang untuk periode waktu yang cukup singkat, dan kemudian sebagian besar menghilang (memudar). Robert Park dan Ernest Burgess telah menulis tentang *Fads* sejak tahun 1924. Tidak seperti *fashions* yang dimodifikasi dan dibangun atas preferensi sebelumnya, maka *fads* (mode) muncul, menyebar dengan cepat, dan kemudian umumnya menghilang.

Menurut Locher (2002: 99), suatu *fads* muncul ketika sejumlah orang yang cukup banyak secara antusias membentuk pola perilaku, dalam jangka waktu yang cukup singkat, dan kemudian dengan menghilangkannya. *Fads* (mode) dapat disamakan dengan “kegilaan” berbelanja atau membeli sesuatu. Namun, para partisipan suatu *Fads* (mode) yang membeli sesuatu tidak melakukannya karena keserakahan, atau untuk tujuan mencari keuntungan, tetapi mereka membeli sesuatu

karena mereka menginginkannya, sebagaimana orang-orang lain juga menginginkannya. Tidak semua *Fads* (mode) berkaitan dengan aspek pembelian (*purchases*) sesuatu, tetapi bisa juga berkaitan dengan berbagai aktivitas yang lainnya, misalnya aktivitas dansa, music, dan sebagainya.

Sementara Macionis (1999: 615), menyebutkan bahwa *fads* adalah suatu pola sosial inkonvensional yang dianut oleh orang-orang dengan antusias meskipun berlangsung secara singkat (*A fad is an unconventional social pattern that people embrace briefly but enthusiastically*). Menurut Macionis, *fad* seringkali disebut sebagai *crazes* (kegilaan), yakni kebiasaan pada masyarakat industri yang kaya dimana banyak orang yang memiliki uang dan membelanjakannya untuk membeli produk-produk secara “membabi-butu” (tidak terkontrol).

2. *Rumors and Gossip* (Desas-Desus dan Gosip)

Para sosiolog sejak lama memiliki interest terhadap kajian tentang *rumors* (desas-desus). Menurut Allport dan Postman (Stolley, 2005: 181), *rumors* (desas-desus) adalah penyebaran informasi melalui interaksi sosial informal (*informal social interaction*), dan seringkali berasal dari sumber-sumber yang tidak diketahui. *Rumors* (desas-desus) berkembang dengan subur ketika subjek dianggap penting dan ketika akurasi dan kepercayaan tentang suatu informasi bersifat ambigu (tidak jelas).

Pada umumnya, topik *rumors* (desas-desus) meliputi beberapa aspek tentang kehidupan sehari-hari. Sehingga menjadikan topik *rumors* (desas-desus) dianggap relevan dengan orang banyak. Berbagai topik *rumors* (desas-desus) bisa saja benar dan juga bisa salah, atau mungkin sebagian dari topik *rumors* (desas-desus) memiliki unsur kebenaran. Miller (Stolley, 2005: 182) menyimpulkan berbagai variasi *rumors* (desas-desus) yang berhubungan dengan produk yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari (seperti kualitas atau isi dari produk makanan), bencana (adanya situasi bahaya), dan kejahatan (seperti aksi perang). Miller mencatat bahwa internet merupakan fasilitas yang telah menyediakan bagi tumbuh suburnya suatu *rumors* (desas-desus) dan juga menjadikan *rumors* (desas-desus) berkembang dan menyebar dengan cepat.

Banyak dari *rumors* (desas-desus) mati secara alami karena publik merasa lelah atau karena suatu kejadian (peristiwa) bisa dieliminir. Sebagian besar *rumors* (desas-desus) karena menjadi tidak relevan lagi atau dibantah, atau menghilang dengan sendirinya (Rosnow & Fine; dalam Stolley, 2005: 183). Namun, beberapa dari *rumors* (desas-desus) tidak mengalami kematian, bahkan telah menjadi bagian dari kultur populer, misalnya *rumors* (desas-desus) tentang kematian Presiden John F. Kennedy yang berkaitan dengan jumlah penembak, siapa yang bertanggung jawab, dan kemungkinan keterlibatan beberapa politisi lainnya.

Menurut Locher (2002: 101), yang dimaksud *rumors* adalah setiap bagian dari informasi yang tidak jelas atau tidak dapat diverifikasi. Jika seseorang yang mendengar sebuah informasi yang baru dan dianggap sebagai hal yang benar tanpa adanya verifikasi, maka itulah *rumor*. Sementara Macionis (1999: 612) menyatakan bahwa suatu *rumor* dimaksudkan sebagai informasi yang tidak berdasar yang menyebar secara informal dari mulut ke mulut (*unsubstantiated information spread informally, often by word of mouth*). Selanjutnya, Macionis menyebutkan ada tiga karakteristik dasar (*essential characteristics*) tentang *rumors*, yakni:

- (1) Rumor akan tumbuh subur dalam suatu iklim ambiguitas (*Rumor thrives in a climate of ambiguity*);
- (2) Rumor bersifat labil (*Rumor is unstable*); dan
- (3) Rumor sulit untuk dihentikan (*Rumor is difficult to stop*).

Sedangkan gossip (gossip) oleh Macionis diartikan sebagai rumor tentang affair pribadi seseorang (*gossip is rumor about people's personal affairs*). Menurut Cooley (Macionis, 1999: 612), rumor meliputi suatu isu yang menjadi perhatian banyak audien, sementara gosip isunya hanya menarik bagi sebagian orang-orang saja yang mengetahui secara personal orang yang menjadi objek gosip. Dengan demikian, suatu rumor akan menyebar dengan cepat dan meluas, sementara gosip cenderung lebih terlokalisir.

3. *Urban Legends* (Legenda Perkotaan)

Menurut Stolley (2005, 183), *Urban Legends* (Legenda Perkotaan) adalah suatu cerita realistik tetapi tidak benar yang menceritakan beberapa kejadian yang baru diduga (*urban legends are realistic but untrue stories that recount some alleged recent event*). Mereka biasanya mengelola suatu cerita yang ironis dan luar biasa yang telah terjadi diantara beberapa teman-teman. Sumber berita *Urban Legends* sulit untuk dilacak dan diverifikasi. Seperti halnya *rumors* (desas-desus), maka *Urban Legends* (Legenda Perkotaan) berkembang dalam ambiguitas. *Urban Legends* (Legenda Perkotaan) bisa jadi merupakan bentuk yang lebih gigih dari suatu *rumors* (desas-desus).

Menurut Brunvand (Stolley, 2005: 183), *Urban Legends* (Legenda Perkotaan) merupakan bentuk modern dari tradisi cerita rakyat kuno, dan beberapa diantaranya dapat ditelusuri kembali kepada cerita-cerita rakyat tersebut. Selain sebagai cerita rakyat kuno yang mengandung ajaran tentang moral, *Urban Legends* (Legenda Perkotaan) juga mengandung unsur peringatan terhadap masyarakat masyarakat.

4. *Panic and Mass Hysteria* (Panik dan Histeria Massa)

Panic (panic) adalah bentuk perilaku kolektif dimana orang-orang bereaksi terhadap ancaman atau stimulus yang lainnya secara irasional, dan seringkali bersifat merusak. Contoh ilustrasi klasik dari kondisi panik adalah arus orang-orang yang keluar gedung teater sesaat setelah ada orang yang berteriak: “api”, “kebakaran” (Macionis, 1999: 614).

Sementara *Mass Hysteria* (Histeria Massa) terjadi sebagai respons terhadap peristiwa nyata atau khayalan (*imagined*). Suatu peristiwa, atau persepsi tentang peristiwa, memicu reaksi dimana orang menjadi bersemangat menuju ke suatu titik kehilangan kemampuan berpikir kritis dan bertindak rasional (Stolley, 2005: 184). Teori-teori tentang *mass hysteria* telah menekankan bahwa suatu reaksi sirkular (*circular reaction*) terjadi dimana emosi dan ketakutan membakar emosi-emosi orang lain, sehingga mempercepat terjadinya histeria. Sejalan dengan pandangan Stolley, Macionis (1999: 614) juga menyatakan bahwa histeria massa (*mass hysteria*) adalah bentuk dari perilaku kolektif yang menyebar dimana orang-orang bereaksi

terhadap kejadian baik yang nyata maupun imajinasi secara irasional, panic, dan seringkali menyakiti diri sendiri (*self-destruction behavior*).

Locher (2002: 101) menyebut *Mass Hysteria* (Histeria Massa) dengan istilah *Collective Hysteria* (Histeria Kolektif). Menurut Locher, secara umum *Collective Hysteria* (Histeria Kolektif) didefinisikan sebagai situasi dimana kelompok orang-orang meyakini (percaya) bahwa sesuatu terjadi padahal sebenarnya tidak. Hal ini bisa meliputi: (1) meyakini sesuatu yang sesungguhnya tidak benar (*believing things that are not true*); (2) bertindak seolah-olah sesuatu terjadi padahal tidak (*acting as if something is happening that is not*); dan (3) menunjukkan simptom-sismtom fisik yang tidak memiliki penyebab psikologis (*exhibiting physical symptonms that have no physiological cause*).

Menurut Schwall (1998: 284), terminologi histeria dapat digunakan dalam tiga hal, yakni: (1) *Hysteria* dalam arti klinis (*clinical sense*) yang membantu diagnose *nosology*; (2) *Hysteria* memiliki fungsi dalam konteks sosial (*social context*); dan (3) *Hysteria* digunakan di dalam konteks filsafat, mendefinisikan dasar-dasar tentang perilaku manusia (*human behavior*).

5. Crowds (Kerumunan)

Stolley (2005: 184) menyatakan bahwa *crowds* (Kerumunan) adalah kumpulan sementara dari orang-orang dalam kedekatan fisik yang berinteraksi dan memiliki fokus umum (*a crowd is a temporary collection of people in physical proximity who interact and have a common focus*).

Menurut Blumer (Stolley, 2005: 184), para peneliti telah mengindetifikasi berbagai tipe dari *crowds* (Kerumunan). Secara umum, terdapat tiga jenis tipe dari *crowds* (kerumunan), yakni:

- (1) *Casual crowd* (kerumunan sederhana), yakni orang-orang yang secara kebetulan berkumpul di tempat yang sama dalam waktu yang sama. Sebagai contoh: orang-orang berkumpul ketika melihat suatu peristiwa kecelakaan tabrakan mobil.

- (2) *Conventional crowd* (kerumunan konvensional), yakni sengaja berkumpul dan terikat oleh norma-norma perilaku. Contoh *conventional crowd* (kerumunan konvensional): para tamu yang hadir pada acara resepsi perkawinan, penonton konser musik, atau para pendengar dalam acara pembacaan puisi, dsb.
- (3) *Expressive crowd* (kerumunan ekspresif), yakni suatu bentuk khusus seputar suatu kejadian yang melibatkan makna emosi dari para anggotanya, misalnya: turnamen basket, kebangkitan agama, atau pawai politik (*political rally*).

Para sosiolog merumuskan beberapa *stereotype* dari tindakan kerumunan (*acting crowd*), yang meliputi (Couch, 1968: 312-320):

- (1) *Suggestibility* (Sugesti);

Secara umum, disepakati bahwa suatu kerumunan (*crowds*) mengandung unsur sugesti yang tinggi. Para anggota dari suatu kerumunan (*crowds*) sangat rentan terhadap sugesti dari pihak lain, terutama pihak yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi. Anggota dari suatu sistem sosial yang dilembagakan secara teratur mengikuti arahan dari anggota yang lainnya. Misalnya, para pekerja secara umum akan mengikuti arahan dari majikannya.

- (2) *Destructiveness* (Merusak);

Tindakan kerumunan (*crowds acting*) adalah suatu tindakan yang biasanya menentang suatu sistem wewenang yang mapan sebagai bagian dari gerakan umum untuk merubah struktur wewenang tersebut. Konflik akan melahirkan kerusakan, suatu tindakan kerumunan (*crowds*) akan melakukan penghancuran terhadap properti dan kehidupan manusia.

- (3) *Irrationality* (Bersifat Irasional);

Konsep tentang rasional dan irasional (*rationality and irrationality*) telah dibatasi penggunaannya untuk analisis sosiologis. Konsep ini mengacu kepada karakteristik alami tentang gagasan atau keyakinan (*ideas or beliefs*) yang mengarahkan cara-cara perhatian dari proses-proses sosial. Perilaku kerumunan

dianggap irasional apabila ditujukan untuk mencapai hasil yang diinginkan individu.

(4) *Emotionality* (Emosional);

Unsur yang sama antara perilaku kerumunan dan perilaku manusia (*human behavior*) yang lainnya adalah adanya aspek emosi. Namun, sejalan dengan kondisi irasional, suatu tindakan kerumunan ditandai oleh sifat emosional yang kuat dari para anggotanya.

(5) *Mental Disturbances* (Gangguan jiwa);

Beberapa pakar mencatat bahwa terdapat kesamaan antara keyakinan anggota kerumunan (*the beliefs of crowd members*) dan kebanyakan bentuk dari penyakit mental (*mental illness*). Menurut Martin, kemiripan antara pikiran kerumunan (*crowd-mind*) dan *psychoneurosis* (gangguan jiwa) adalah adanya khayalan dan penyiksaan.

(6) *Lower-class Participation* (Partisipasi Kelas Bawah);

Anggota suatu kerumunan cenderung berasal eselon (lapisan) bawah dari suatu masyarakat. Komposisi para anggota dari kerumunan (*members of the crowd*) tidak berasal dari posisi kekuasaan (*power*), wewenang (*authority*), atau bentuk kebijakan (*policy formation*). Pada umumnya, peristiwa kerumunan (*crowd*) adalah tindakan perlawanan atas relasi sosial (*social relationships*) yang diformulasikan oleh pembuat keputusan (*policymakers*).

(7) *Spontaneity* (Tindakan Spontanitas);

Suatu kerumunan (*crowds*) berkembang ketika sejumlah individu secara tiba-tiba (*suddenly*) dan terus-menerus (*simultaneous*) menyerang beberapa kondisi ketidakpuasan (*grievous*). Bentuk dari tindakan kerumunan atau tindakan protes kolektif yang lainnya tergantung atas kesamaan pengalaman dari ketidakpuasan.

(8) *Creativity* (Kreativitas);

Terdapat pernyataan yang kontras antara pendapat bahwa kerumunan (*crowd*) bergerak dalam level intelektual sederhana. Sementara yang lainnya menyatakan

bahwa suatu kerumunan (*crowds*) adalah kreatif. Namun sebenarnya, suatu kerumunan secara khusus tidak menciptakan sistem sosial.

(9) *Lack of self-control* (Kehilangan control);

Para peserta suatu kerumunan (*crowds*) biasanya berperilaku tanpa memperhatikan orang lain, tidak sebagaimana bila perilaku tersebut muncul dalam keadaan normal.

6. *Mobs dan Riots*

Mobs dan *Riots* merupakan bentuk lebih lanjut dari *expressive crowd* (kerumunan ekspresif). Apabila emosi dari suatu *expressive crowd* (kerumunan ekspresif) meningkat semakin intensif, maka perilaku yang muncul akan menjadi destruktif dan agresif sehingga bisa menjadi bentuk *mob* dan *riot* (kerusuhan). Menurut Stolley (2005: 185), *mobs* adalah *crowds* yang mengambil tindakan untuk suatu tujuan yang digerakkan secara emosional. Menurut Massey dan Myers (Stolley, 2005: 185), contoh dari *mobs* adalah hukuman gantung tanpa proses pengadilan (*lynching*).

Sementara Locher (2002: 90), menyatakan bahwa terminologi *mob violence* (kekerasan massa) di dalamnya menggambarkan setiap kejadian dimana kerumunan orang-orang secara normal tanpa kekerasan menyerang individu-individu dengan tujuan menyakitinya atau membunuhnya. Kadang-kadang suatu *mobs* didorong oleh rasa takut (*fear*), rasa kebencian (*hatred*), dan rasa marah (*anger*). Penggantungan (*lynchings*) merupakan salah satu bentuk dari *mob violence*.

***Riots* (keusuhan).** Suatu *riots* (kerusuhan) meliputi gangguan publik (*public disorder*) yang kurang terarah dan durasinya lebih lama dibandingkan dengan *mob*. Suatu *riots* (kerusuhan) meletus sebagai hasil dari suatu emosi yang intensif atas suatu peristiwa yang terjadi dalam waktu yang pendek (*short term event*). Contoh, para pendukung sepakbola tumpah-ruah di jalanan setelah menyaksikan pertandingan sepakbola, mereka mendobrak pintu, membakar mobil, dan melakukan berbagai aksi merusak lainnya. Menurut Stolley (2005, 185), suatu *riots* (kerusuhan) kadang-

kadang terjadi sebagai respons terhadap beberapa fakta tentang ketidakadilan (*injustice*).

Menurut Locher (2002, 92), suatu *riots* (kerusuhan) adalah meletusnya kekerasan kolektif (*collective violence*) secara tiba-tiba. *Riots* (kerusuhan) lebih umum daripada kekerasan massa (*mob violence*). Dalam *riots* (kerusuhan), para partisipan perasaan mereka secara kurang terfokus dibandingkan dalam suatu *mob violence*.

Tidak semua *riots* (kerusuhan) berbahaya bagi partisipan. Misalnya, suatu perayaan kerusuhan (*celebration riots*), dimana kerusuhan ini biasanya menyangkut tindakan merusak property akan tetapi para partisipan tidak bermaksud untuk menyakiti sesama partisipan yang lainnya, dan secara umum hanya untuk uji coba kekuatan dalam melawan polisi.

7. *Public Opinion and Propaganda* (Propaganda dan Opini Publik)

Macionis (1999: 612) menyebutkan bentuk lainya dari perilaku kolektif yang menyebar (*dispersed collective behavior*) yakni opini publik dan propaganda. Opini publik dipandang sebagai sikap yang menyebar tentang isu-isu kontroversial. Siapa yang dimaksud publik akan tergantung pada karakteristik isu yang muncul. Sedangkan propaganda dimaksudkan sebagai informasi yang disajikan dengan tujuan mempengaruhi opini publik.

Daugherty (Effendy, 1998: 164) mengemukakan terdapat tiga jenis dari propaganda, yakni:

- (1) *White propaganda* (propaganda putih), adalah propaganda yang diketahui sumbernya. Oleh karena itu, propaganda jenis ini dinamakan juga *overt propaganda* (propaganda terbuka). Propaganda yang dilakukan secara terang-terangan itu dapat diketahui dengan mudah, terutama dari media massa, baik dalam ajang kemiliteran, politik maupun ekonomi. Lazimnya dalam propaganda terbuka, terjadi *counter propaganda* atau propaganda balasan.
- (2) *Blac propaganda* (Propaganda hitam), adalah propaganda yang menunjukkan sumbernya, tetapi bukan sumber yang sebenarnya. Karena itu, *black*

propaganda ini sering pula disebut *covert propaganda* (propaganda terselubung).

- (3) *Gray propaganda* (Propaganda kelabu), Di antara para ahli ada yang menambahkan jenis propaganda tersebut di atas dengan jenis ketiga yang mereka sebut sebagai *gray propaganda* (propaganda kelabu). Pihak yang melancarkan propaganda jenis ini menghindari identifikasi, baik sebagai sumber yang bersahabat, maupun sebagai sumber yang mempunyai sikap permusuhan. Ada ahli lain yang menganggap propaganda jenis ini tidak lebih dari propaganda hitam atau propaganda terselubung yang kurang mantap.

Dengan mengutip publikasi dari *The Fine Art of Propaganda* yang memuat tulisan tentang *The Devices of Propaganda* (Muslihat Propaganda), secara umum paling tidak terdapat tujuh jenis propaganda (Effendy, 1998: 165-166), yakni:

- (1) *Name calling* (Penggunaan nama ejekan)

Merupakan suatu cara dengan jalan memberikan ejekan kepada suatu ide, kepercayaan, jabatan, kelompok bangsa, ras, dan lain-lain, agar khalayak menolak atau mencercanya tanpa mengkaji kebenarannya. Misalnya: plin-plan, antek imperialis, penjilat, dsb.

- (2) *Glittering generally* (Penggunaan kata-kata muluk)

Sebagai kebalikan dari *name calling*, teknik *glittering generally* menggunakan kata-kata muluk (*virtue words*) dengan tujuan agar khalayak menerima dan menyetujui tanpa upaya memeriksa kebenarannya. Misalnya: Demi kepentingan rakyat, demi bangsa dan Negara, dsb.

- (3) *Transfer* (Pengalihan)

Teknik transfer adalah cara propaganda dengan menggunakan otoritas atau prestise yang mengandung nilai kehormatan yang dialihkan kepada sesuatu dengan tujuan agar khalayak menerimanya. Misalnya: Gambar Kabah digunakan untuk lambing Partai Politik, dsb.

(4) *Testimonial* (Pengutipan)

Adalah cara melancarkan propaganda dengan mengutip kata-kata orang terkenal tentang baik atau tidaknya suatu idea tau produk, dengan tujuan agar khalayak mengikutinya.

(5) *Plain Folks* (Perendahan diri)

Suatu cara yang digunakan oleh seseorang untuk meyakinkan bahwa ia dan gagasannya itu baik karena “demi kepentingan orang banyak”. Teknik ini banyak digunakan dalam politik untuk memikat khalayak.

(6) *Card Stacking* (Pemalsuan)

Secara harfiah, *card stacking* berarti “penumpukkan kartu”, secara maknawi berarti upaya menutupi hal-hal yang faktual atau sebenarnya seraya mengemukakan bukti-bukti palsu sehingga khalayak dibuat terkecoh.

(7) *Bandwagon* (Hura-Hura)

Istilah *bandwagon* secara harfiah berarti “kereta musik”, yakni kendaraan yang mengangkut rombongan musik. Dalam teknik propaganda, istilah *bandwagon* berarti ajakan kepada khalayak untuk secara beramai-ramai menyetujui suatu gagasan atau program, dengan terlebih dahulu meyakinkan mereka bahwa “kawan-kawan” yang lainnya kebanyakan telah menyetujuinya.

D. Perilaku Kolektif dan Tindakan Kolektif

Konsep tentang Perilaku Kolektif (*collective behavior*) sebagaimana dikembangkan oleh Park dan Blummer memiliki pengertian yang relatif sama dengan konsep Tindakan Kolektif (*Collective Action*) dalam perspektif Marxian, Durkhemian, Millian, Weberian, dan Tilly.

Aktivitas (tindakan) kolektif didefinisikan sebagai setiap tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan status, kekuasaan, atau pengaruh dari seluruh kelompok, bukan untuk seorang atau beberapa orang individu (Zomeren, 2009: 646). Mengacu kepada konsep Olson, maka inti dari konsep tindakan kolektif (*collective action*) adalah adanya kepentingan umum atau kepentingan bersama (*public goods*)

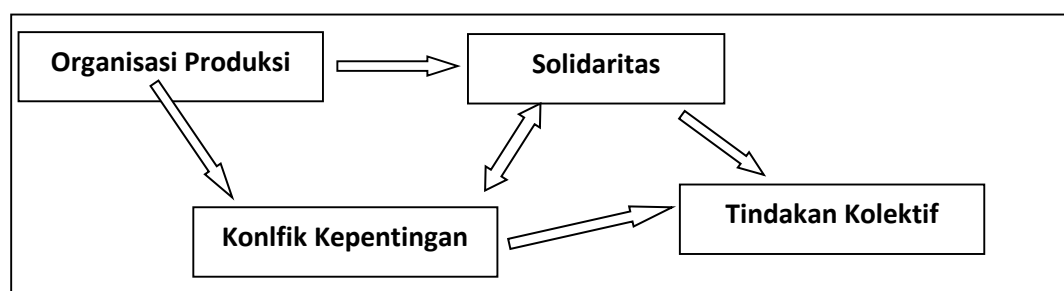
yang diusung di antara kelompok orang-orang (Oliver, 1993: 272). Menurut Weber, suatu tindakan dikatakan terjadi ketika individu melekatkan makna subjektif dalam tindakan mereka tersebut (Ritzer & Goodman, 2009: 136-137).

Menurut Wahyudi (2005: 24), secara sederhana dapat dikatakan bahwa aksi atau tindakan kolektif itu diawali dari sekelompok orang yang berkumpul, kemudian mereka melakukan aksi atau tindakan secara bersama-sama. Tempat “berkumpul” dimaksud dapat berupa: kelompok, asosiasi, organisasi, institusi, jaringan, dan semacamnya yang sudah *well defined* atau tempat-tempat di luar kategori semua itu. Sementara, Wright (1990) menyatakan bahwa aksi kolektif secara tradisional didefinisikan sebagai setiap tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kelompok (seperti status atau kekuasaan), yang disahkan oleh perwakilan kelompok. Konsep ini memiliki formulasi dan teori dalam berbagai bidang ilmu-ilmu sosial termasuk psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi.

Berbagai studi terdahulu yang menganalisis tentang bagaimana proses tindakan kolektif itu terjadi telah banyak dilakukan. Dalam hal ini, setidaknya dapat dikemukakan tentang model analisis yang diberikan oleh Marxian, Durkhemian, Millian, Weberian, dan Tilly (Wahyudi, 2005: 25).

Analisis Marxian umumnya menempatkan permasalahan tindakan kolektif kembali pada aspek solidaritas yang berada di dalam kelompok dan konflik kepentingan diantara kelompok. Mereka menganggap solidaritas dan konflik kepentingan itu saling menguatkan dimana kedua persoalan ini dipengaruhi oleh kondisi *the organization of production* (Tilly, 1978; dalam Wahyudi, 2005: 26).

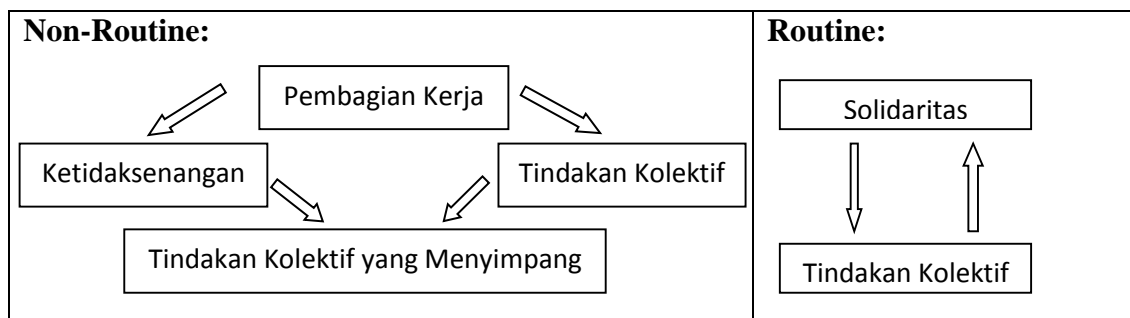
Diagram 2. 1. :
Model Analisis Tindakan Kolektif
Menurut Perspektif Marxian



Sumber: Tilly, 1978; Wahyudi, 2005

Sedangkan menurut pandangan Durkhemian, suatu tindakan kolektif muncul sebagai reaksi (respons) langsung terhadap integrasi dan disintegrasi yang terjadi di dalam masyarakat. Durkhemian mengelompokkan tindakan kolektif ke dalam dua bentuk, yakni yang bersifat rutin dan yang tidak rutin. Bentuk yang tidak rutin muncul dari adanya ketidaksenangan (*discontent*) dan pengejaran interes individu yang dihasilkan oleh adanya disintegrasi pembagian kerja. Sementara itu, bentuk yang rutin, menegaskan bahwa tindakan kolektif dipengaruhi oleh solidaritas yang dalam gilirannya akan memperkuat kembali solidaritas yang ada.

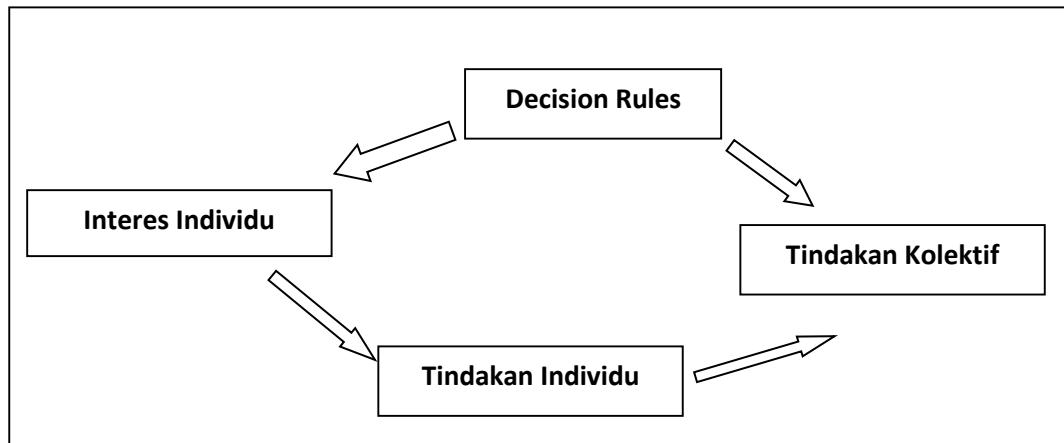
Bagan 2. 2. :
Model Analisis Tindakan Kolektif
Menurut Perspektif Durkhemian



Sumber: Tilly, 1978; Wahyudi, 2005

Selanjutnya, analisis Millian meletakkan persoalan tindakan kolektif sebagai kalkulasi yang dibuat oleh individu dalam mengejar interenesnya. Menurut kalangan Millian, berbagai macam *decision rules* telah mengarahkan interes individu ke dalam tindakan individu, kemudian agregat dari tindakan individu tersebut akan menjadi tindakan kolektif.

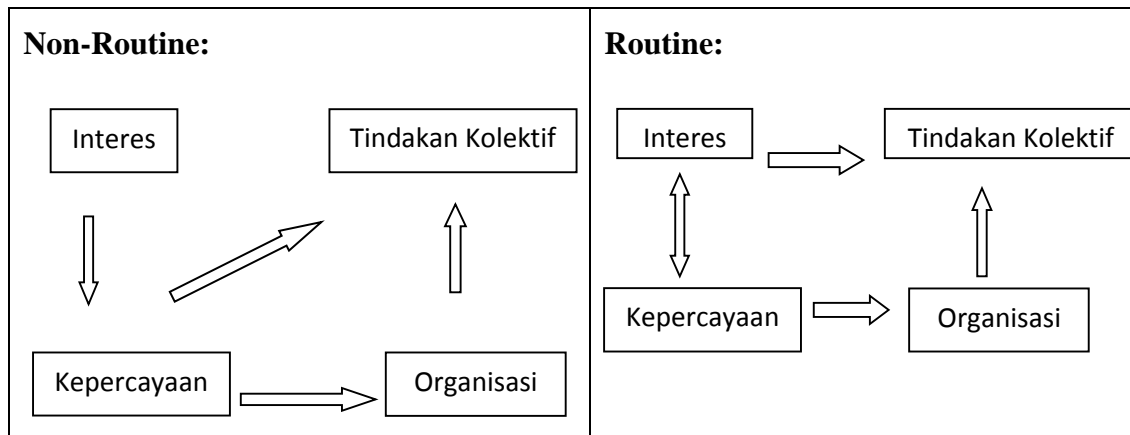
Bagan 2. 3. :
Model Analisis Tindakan Kolektif
Menurut Perspektif Millian



Sumber: Tilly, 1978; Wahyudi, 2005

Sementara itu, Weberian menganggap tindakan kolektif sebagai hasil pertumbuhan atau perkembangan komitmen ke dalam sistem kepercayaan tertentu. Weberian juga membagi tindakan kolektif ke dalam dua bentuk, yakni yang bersifat tidak rutin dan rutin. Dalam bentuk yang tidak rutin, andil kepercayaan dari kelompok memiliki dampak yang kuat dan langsung terhadap tindakan kolektif kelompok. Sedangkan dalam bentuk rutin, ada dua hal yang terjadi, yakni organisasi berperan untuk memperantari antara kepercayaan dan tindakan, serta bahwa interest kelompok memainkan peran yang besar dan langsung dalam tindakan kolektif.

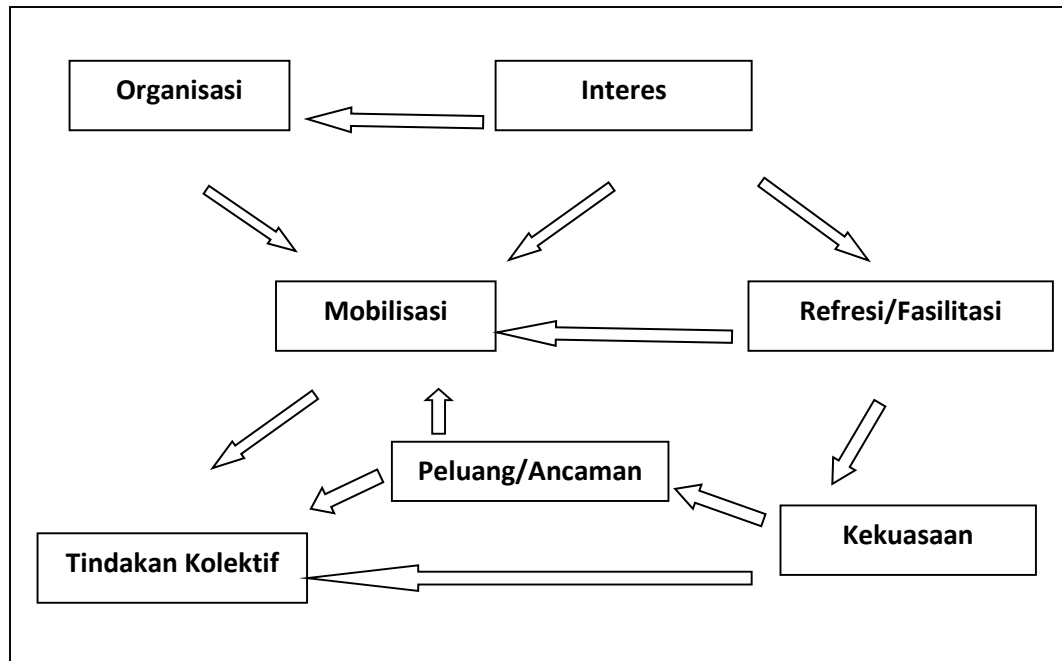
Bagan 2. 4. :
Model Analisis Tindakan Kolektif
Menurut Perspektif Weberian



Sumber: Tilly, 1978; Wahyudi, 2005

Terakhir, Charles Tilly mengembangkan model mobilisasi dengan tindakan kolektif, menyatakan bahwa *the main determinant* dari mobilisasi kelompok meliputi: organisasi, interes, peluang atau ancaman, dan kemampuan kelompok dalam menyikapi represi atau fasilitasi. Tindakan kolektif yang dilakukan *contender* (pembangkang, penentang) merupakan *resultante* dari aspek-aspek kekuasaan (*power*), mobilisasi, peluang (*opportunity*), dan ancaman yang saling berhadapan dengan interes yang ada.

Bagan 2. 5. :
Model Analisis Tindakan Kolektif
Menurut Perspektif Charles Tilly



Sumber: Tilly, 1978; Wahyudi, 2005

BAB III

TEORI PERILAKU KOLEKTIF

(*COLLECTIVE BEHAVIOR*)

Menurut Locher (2002: 6-8), terdapat beberapa perspektif teoritis yang bisa dijadikan dasar dalam menjelaskan tentang perilaku kolektif (*collective behavior*). Beberapa perspektif teoritis tersebut adalah: *The Social Contagion Theory*; *The Emergent Norm Perspective*; *The Sociocybernetic Perspective*; dan *The Individualist Theories*. Sedangkan menurut Stolley (2005: 185), teori-teori tentang perilaku kolektif (*collective behavior*) meliputi: *Contagion theory*, dan *Emergent-Norm Theory*.

Dari pendapat Locher dan Stolley tersebut, maka paling tidak terdapat Empat teori tentang Perilaku Kolektif (*collective behavior*). Ke-Empat teori Perilaku Kolektif (*collective behavior*) tersebut, meliputi:

- (a) *Social Contagion theory*;
- (b) *The Emergent Norm Theory*;
- (c) *The Symbolic Interactionist (SBI)/Sociocybernetic Theory*; dan
- (d) *The Individualist Theories*.

A. *Contagion Theory* (Teori Penularan)

Menurut Locher (2002: 11), *Contagion Theory* (Teori Penularan) mengkaji peristiwa-peristiwa sosial (*social events*) dan kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya perilaku kerumunan (*crowd behavior*). Teori ini terkait erat dengan tiga penulis, yakni: (1) Gustave LeBon; (2) Robert Park; dan (3) Herbert Blumer.

LeBon memfokuskan pada faktor-faktor situasional yang bekerja dalam setting kerumunan (*crowds*). Meskipun LeBon bukan seorang ilmuwan, akan tetapi dia seorang sejarawan dan filosof, namun LeBon telah meletakkan dasar bagi sosiologi yang pertama kali dalam membangun teori tentang Perilaku Kolektif (*collective behaviors*). Sementara Park, seorang sosiolog terlatih, menyajikan kembali ide-ide

yang telah dikembangkan LeBon yang lebih bernuansa psikologi sosial dan mencoba menggali lebih dalam lagi tentang bagaimana terjadinya proses peniruan sosial dalam dinamika suatu kelompok. Beberapa tahun kemudian, Blumer memperluas lagi studi yang telah dilakukan oleh Park, dan menerapkan konsep penularan terhadap perilaku sosial. Tiga bentuk *Contagion Theory* dari LeBon, Park, dan Blumer ini memberikan premis dasar bahwa orang-orang bisa menjadi “gila” secara temporer, menjadi irasional, atau menjadi tidak logis (*illogical*) ketika berada dalam suatu kerumunan (*crowds*), dan mereka akan kembali menjadi normal sesaat setelah mereka meninggalkan suasana kerumunan (*crowds*) tersebut.

Selanjutnya penjeleasan terkait pemikiran Gustave LeBon, Robert Park, dan Herbert Blumer adalah sebagai berikut:

1. Gustave LeBon:

Pada tahun 1895, Gustave LeBon menerbitkan sebuah buku yang berjudul: “*The Crowd: A Study of the Popular Mind in France*”. Buku ini menggambarkan secara menyeluruh tentang bagaimana perubahan struktur sosial yang telah terjadi di Perancis. Buku ini sangat penting bagi tahap pertama dari perkembangan teori tentang perilaku kolektif (*collective behaviors*), dengan beberapa alasan, yakni:

Pertama, LeBon memandang perilaku kolektif (*collective behaviors*) dari berbagai arah. Dia bertujuan untuk menggali tentang mengapa peristiwa kerumunan (*crowd*) terjadi, bukan hanya sekedar memfokuskan pada kajian bahwa perilaku kolektif (*collective behaviors*) sebagai peristiwa yang unik.

Kedua, LeBon memasukkan faktor-faktor sosial dan psikologi sosial ke dalam tulisannya. Dia tidak berasumsi bahwa anggota suatu kerumunan (*crowd*) secara psikologis mengalami gangguan atau abnormal sebelum mereka mengambil bagian dalam peristiwa kerumunan. Dengan demikian, LeBon memfokuskan kepada faktor-faktor yang terjadi di dalam setiap kerumunan (*crowd*) yang memungkinkan orang-orang yang sebelumnya normal melibatkan diri ke dalam suatu perilaku yang tidak normal atau peristiwa barbarian.

Ketiga, meskipun LeBon mendiskusikan politik dengan panjang lebar, namun sebagian besar dia tidak mempertimbangkan hal ini sebagai bagian penting dari analisisnya. Kebanyakan penulis sebelum LeBon memusatkan seluruhnya kepada

peristiwa-peristiwa khusus secara mendetil, menyalahkan peristiwa pada kondisi politik yang unik sebelum peristiwa kerumunan terjadi, atau karena “riasan wajah” psikologis dari kerumunan (*crowd*) itu sendiri.

Contagion theory (teori Penularan) merupakan teori awal tentang perilaku *crowd* (kerumunan) yang dikembangkan oleh Gustave Le Bon (Stolley, 2005: 186). Gustave LeBon dipandang sebagai bapak perilaku kolektif (*the father of collective behavior*). Karya LeBon kemudian disempurnakan lagi oleh Herbet Blumer pada tahun 1969. Menurut *Contagion theory* (teori Penularan) dari LeBon, bahwa *crowd* menghasilkan efek hipnotis yang mempengaruhi individu. Kepribadian personal, keinginan personal, kecerdasan, dan pengendalian, semuanya digantikan oleh perilaku ketidaksadaran dan insting (*unconscious and instinctual behavior*) yang menggambarkan kekuatan dari sentiment dan anonimitas tentang *crowd* (kerumunan). Dalam bahasa LeBon: “dalam suatu *crowd* setiap sentimen dan tindakan adalah penularan, dan penularan sedemikian rupa sehingga seorang individu bersedia mengorbankan kepentingan pribadinya demi kepentingan kolektif”. Sifat ini bertentangan dengan sifat aslinya, dimana seseorang hampir tidak mampu melakukannya kecuali dia berada dan menjadi bagian dari *crowd* (kerumunan).

Namun, para peneliti akhir-akhir ini seperti McPhail (Stolley, 2005: 186) berpendapat bahwa pernyataan LeBon terlalu sederhana (*overly simplistic*). Meskipun *crowd* (kerumunan) berpengaruh terhadap apa yang akan dilakukan orang-orang, namun orang-orang yang ada dalam *crowd* (kerumunan) adalah tidak rasional (*irrationally*) dan dalam keadaan tidak sadar (*unconsciously*). *Crowd* (kerumunan) digolongkan ke dalam tipe perilaku “kawanan” (*herd-type behavior*). Proses penularan itu sendiri tidak dapat ditemukan dalam semua perilaku kolektif dan perilaku yang beralasan dan rasional.

LeBon yang juga merupakan pelopor psikologi massa menyatakan bahwa massa itu merupakan suatu kumpulan orang banyak berjumlah ratusan atau mungkin ribuan, yang berkumpul dan mengadakan hubungan untuk sementara waktu, karena minat atau kepentingan bersama yang sementara pula. Misalnya, orang melihat pertandingan sepakbola, dan sebagainya. (Gerungan, 1996). Menurut LeBon, suatu massa seakan-akan mempunyai suatu jiwa tersendiri yang berlainan sifatnya dari

sifat-sifat jiwa individu satu persatu yang termasuk dalam massa itu. Jadi seorang individu yang termasuk dalam massa itu, sebagai anggota massa akan berlainan dibandingkan dengan pengalaman dan tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari sebagai individu. Beberapa sifat yang berlainan antara jiwa massa dan jiwa individu. Misalnya, jiwa massa itu lebih impulsif, lebih mudah tersinggung, ingin bertindak dengan segera dan nyata, lebih mudah terbawa-bawa oleh sentimen, kurang rasional, lebih mudah dipengaruhi (*suggestible*), lebih mudah mengimitasi daripada jiwa individu satu persatu orang-orang yang sama tetapi dalam situasi kehidupan sehari-hari yang bukan situasi massa itu. Jadi menurut LeBon sebenarnya terdapat dua macam jiwa, yaitu jiwa massa dan jiwa individu yang masing-masing berlainan sifatnya.

2. Teori Penularan dari LeBon (*LeBon`s Contagion Theory*):

LeBon meyakini bahwa setiap saat suatu kerumunan (*crowd*) dari orang-orang bisa saja akan terbentuk, setiap anggota dari suatu kerumunan (*crowd*) mungkin akan menjadi berkurang tingkat kecerdasannya, menjadi lebih buruk, atau menjadi lebih kasar (Locher, 2002: 13). Dalam bahasa lain, orang-orang akan bertindak berbeda ketika mereka berada dalam suatu kerumunan (*crowd*). LeBon menyebut situasi ini sebagai “aktivitas yang tidak disadari dari kerumunan” (*unconscious activity of crowds*), dan diyakini sebagai sesuatu yang melampaui kontrol individu (*beyond individual control*). LeBon berpendapat bahwa suatu kerumunan (*crowd*) dikendalikan oleh emosi, bukan dikendalikan oleh suatu alasan yang disadari atau oleh suatu ide yang fair (objektif).

LeBon mencatat bahwa sebenarnya secara psikologis suatu *crowd* bisa dibentuk oleh orang-orang dimana mereka tidak berada di tempat yang sama dalam waktu yang sama. Namun demikian, dia tidak mengkaji bagaimana hal ini bisa terjadi. Dia juga tidak bisa memberikan contoh yang spesifik tentang hal ini. LeBon lebih banyak mendiskusikan tentang kerumunan (*crowd*) dengan fokus pada kelompok orang-orang yang berkumpul secara bersama-sama pada tempat dan waktu yang sama.

Menurut LeBon (Locher, 2002: 14), proses psikologis untuk menjadi bagian dari suatu kerumunan (*crowd*) meliputi tiga komponen, yakni: (1) Individu merasa berani

dan tidak mengetahui siapa dirinya (*the individuals feel invincible and anonymous*); (2) Peniruan terjadi (*contagion occurs*); dan (3) Para anggota kelompok memasuki keadaan sugesti (*members of the group enter a state of suggestibility*).

Penjelasan ketiga komponen untuk menjadi bagian dari suatu kerumunan (*crowd*) tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama; Individu merasa berani dan tidak mengetahui siapa dirinya (*the individuals feel invincible and anonymous*). Hal ini memungkinkan orang-orang untuk terlibat dalam perilaku, dimana rasa takut dan kesadaran diri (*fear and self consciousness*) mereka secara normal ditekan. Sementara, anonimitas (*anonymity*) memungkinkan hilangnya kekhawatiran atas konsekuensi-konsekuensi dari perilaku yang terjadi. Aspek-aspek ini menyebabkan munculnya keberanian (*brave*), dan munculnya perasaan memiliki kekuatan (*power*) bersama. Mereka yang biasanya dalam keadaan normal patuh terhadap hukum dan aturan kemudian berani melanggarnya dan tidak merasa khawatir bahwa mereka akan ditangkap atau diberi sanksi hukum.

Kedua; Terjadinya Peniruan (*Contagion Occurs*). Dalam kondisi “fenomena hipnotis” (*hypnotic phenomenon*), setiap sentimen dan tindakan akan menular secara meluas kepada individu yang lainnya, dimana kepentingan personal (*personal interest*) dikorbankan menjadi kolektif interes (*interest collective*).

Ketiga; Kelompok masuk ke dalam sugestibilitas (*The group enters into suggestibility*). Dalam kondisi seperti ini, orang-orang tidak menyadari perilaku mereka sendiri. Perhatian mereka difokuskan kepada peristiwa atau objek yang sama (*the same object or event*). Orang-orang yang tidak setuju dengan dorongan-dorongan dari *crowd* tidak mampu untuk menolaknya karena merasa kalah jumlah (*outnumbered*). Bahkan, apabila mencoba untuk menolak maka mereka akan diabaikan oleh orang-orang pada umumnya, kecuali mereka dapat menawarkan suatu alternatif yang menarik dan memuaskan. Para anggota suatu kerumunan (*crowd*) melakukan tindakan tanpa melalui proses berpikir kritis dan mungkin juga ingin merasakan suatu perilaku heroik (*heroic behavior*), yang dalam situasi normal mereka takut untuk melakukannya. LeBon, kemudian, berpendapat bahwa dalam setiap perilaku dalam kerumunan (*crowd*) selalu bersifat merusak (*destructive*).

3. Robert Park:

Kurang dari sepuluh tahun setelah publikasi *The Crowd* dari LeBon, Robert Park seorang warga Amerika yang sedang belajar di Jerman mempublikasikan hasil disertasinya yang berjudul *The Crowd and the Public (Masse und Publikum 1904)*. Pemikiran Park kemudian disempurnakan lagi dalam “*Collective Behavior*” yang merupakan bagian pembahasan dari “*Introduction to the Science of Sociology*” dimana Park sebagai penulis pendamping bersama Ernest Burgess, pada tahun 1921. Park menyajikan kembali poin-poin kunci dari ide LeBon, dimana analisisnya lebih empiris dan lebih bersifat psikologi sosial. LeBon meyakini bahwa orang-orang sungguh-sungguh telah tertular oleh “penyakit mental” (*mental illness*) dari orang-orang lainnya, dan mengklaim bahwa “telah banyak dokter yang tertular oleh penyakit gila karena dia bekerja dengan pasien yang sakit gila”. Park menolak pemikiran LeBon seperti ini, dan mengembangkan penelitian sosiologis tentang bagaimana sebuah ide menyebar secara cepat melalui suatu *crowd* (kerumunan). Bagi Park, orang-orang ternyata melakukan imitasi dan saling memperkuat setiap perilaku satu sama lainnya, dan adanya reaksi sirkular (*circular reaction*) yang merupakan efek dari proses peniruan sosial (*social contagion*).

4. Teori Penularan dari Park (*Park's Contagion Theory*):

Park mendasarkan teorinya pada interaksi yang muncul (*emergent interaction*). Park berpendapat bahwa orang-orang terlibat dalam situasi “interaksi intensif” (*intense interaction*) ketika mengalami stres atau gangguan. Melalui *emergent interaction* ini, individu menjadi lebih aktif untuk menyelaraskan dirinya dengan individu yang lainnya, dibandingkan yang terjadi dalam situasi normal pada umumnya. Perilaku mereka adalah sosial karena pikiran dan perilaku mereka dipengaruhi oleh setiap tindakan dari anggota yang lainnya dalam suatu *crowd* (kerumunan). Perilaku mereka juga kolektif karena tindakan setiap orang berada di bawah pengaruh dari suasana hati kelompok (*group's mood*). Mereka berperilaku sesuai dengan norma-norma, dan semua anggota secara tidak sadar menerima dan saling memperkuat satu sama lainnya. Efek interaktif pada masing-masing anggota oleh semua anggota yang lainnya mengarahkan individu untuk berpikir dan bertindak

sama. Apabila salah seorang bertindak secara meyakinkan, maka yang lainnya akan menirunya. Penguatan perilaku ini, membuat orang pertama (*the first person*) meyakini bahwa tindakan mereka telah benar dan secara simultan telah meyakinkan orang-orang lain juga. Dengan cepat, setiap anggota suatu *crowd* (kerumunan) telah mengadopsi perilaku. Reaksi sirkulasi seperti ini menghasilkan peniruan. Orang-orang saling memperkuat perilaku yang lainnya melalui peniruan (*mimicking*), sehingga setiap orang menunjukkan perilaku yang sama. Mereka semuanya meyakini bahwa hal ini merupakan hal yang benar atau merupakan perilaku yang diinginkan, karena hal ini juga dilakukan oleh orang yang lainnya.

Robert Park (Locher, 2002: 17), merupakan orang pertama yang menyebutkan bahwa perilaku kolektif (*collective behavior*) sebagai disiplin khusus yang berbeda dalam sosiologi. Namun sayangnya, definisi Park tentang perilaku kolektif (*collective behavior*) dalam buku *Introduction to the Science of Sociology* tidak begitu jelas: “*Collective behavior* sebagai Perilaku individu di bawah impuls-impuls kolektif dan umum, dengan kata lain merupakan hasil dari suatu interaksi sosial”. Atas dasar definisi ini, maka semua perilaku sosial (*social behavior*) merupakan perilaku kolektif (*collective behavior*). Misalnya, sebagian besar orang-orang memutuskan untuk pergi ke pantai karena cuaca panas, sebagian sosiolog berpendapat bahwa fenomena ini sebagai perilaku kolektif (*collective behavior*) karena dipandang sebagai perilaku yang didasarkan atas impuls (dorongan) yang sama. Dalam bukunya yang sama, Park mendefinisikan ulang perilaku kolektif (*collective behavior*), yakni: Perilaku kolektif sebagai proses dimana masyarakat dilebur ke dalam elemen-elemen yang menyusunnya dan proses dimana elemen-elemen ini dibawa secara bersama-sama ke dalam hubungan baru untuk membentuk suatu organisasi dan masyarakat baru (*Collective behavior as the processes by which societies are disintegrated into their constituent elements and the processes by which these elements are brought together again into new relations to form new organizations and new societies*) (Locher, 2002: 17).

5. Herbert Blumer:

Seperti halnya Park, Blumer adalah seorang sosiolog Amerika pertama yang tertarik dengan interaksi kelompok kecil (*small-group interaction*). Konsepsi Blumer tentang perilaku kolektif (*collective behavior*) lebih spesifik dibandingkan Park, yang di dalamnya meliputi: *crowds, mobs, panics, manias, dancing crazes, stampedes, mass behavior, public opinion, propaganda, fashion, fads, social movements, revolution, dan reforms*. Meskipun masih sedikit belum terfokus, Blumer memberikan pengayaan ide tentang bentuk-bentuk dari perilaku kolektif (*collective behavior*). Pandangan Blumer mengenai perilaku kolektif (*collective behavior*) memiliki kesamaan dengan perspektif penularan (*contagion*): Kelompok orang-orang melakukan sesuatu yang biasanya tidak normal dilakukan karena mereka tidak berpikir dengan jelas. Apa yang dilakukan oleh perilaku kolektif (*collective behavior*) secara fundamental berbeda dari aktivitas kelompok yang normal (*normal group activity*).

Namun sayangnya, tulisan Blumer sedikit membingungkan sebagian besar pembaca. Misalnya, dia menggunakan terminologi perilaku kolektif (*collective behavior*) untuk merujuk kepada perilaku kelompok normal (*normal group behavior*) dan perilaku kolektif (*collective behavior*). Dalam lapangan tentang perilaku kolektif (*collective behavior*), perilaku kelompok normal (*normal group behavior*) disebut sebagai perilaku kolektif (*collective behavior*), dan perilaku kerumunan (*crowd behavior*) mengacu kepada perilaku kolektif (*collective behavior*), perilaku kolektif spontan (*spontaneous collective behavior*), dan terakhir disebutnya sebagai perilaku kolektif elementer (*elementary collective behavior*). Blumer selanjutnya menggunakan terminologi Perilaku kolektif (*collective behavior*) untuk mengacu kepada studi tentang berbagai tipe dari perilaku. Teori Blumer sebenarnya merupakan penjabaran dari teori Park.

6. Teori Penularan Blumer (*Blumer's Contagion Theory*):

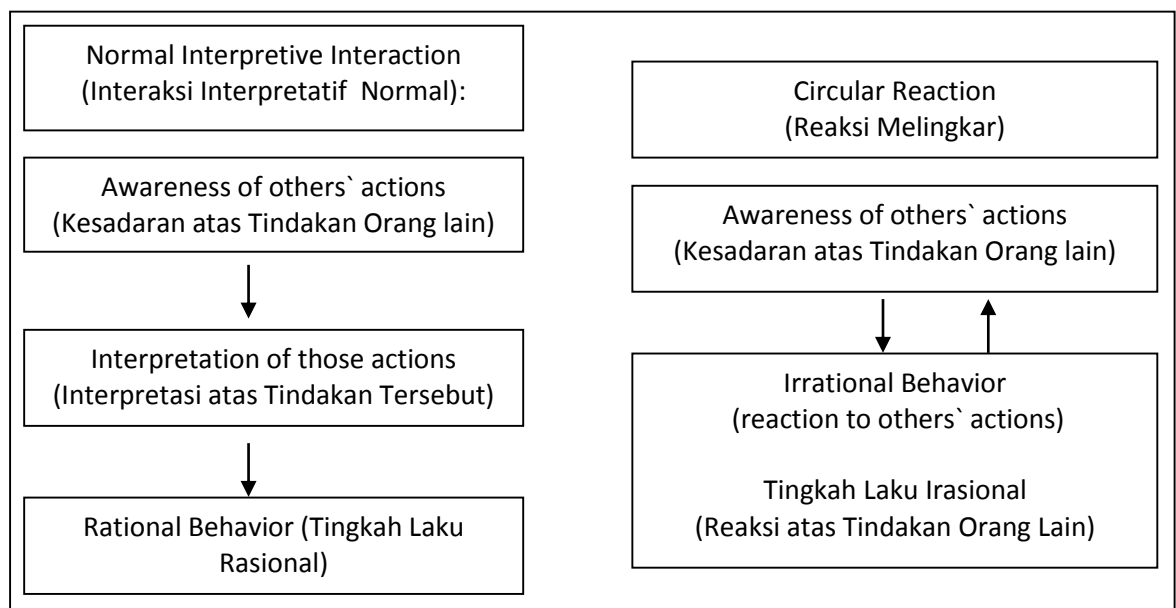
Teori Penularan dari Blumer merupakan teori yang paling maju dibandingkan teori-teori penularan yang lainnya (Locher, 2002: 19). Dari perspektif Blumer, hal yang paling penting adalah tentang mekanisme yang memungkinkan orang-orang

secara bersama-sama “menerobos” aturan rutin dan sudah ditetapkan. Dalam keadaan normal, orang-orang terlibat dalam apa yang disebut oleh Blumer sebagai *interpretive interaction*. Mereka menginterpretasi kata-kata (*words*) dan atau tindakan (*actions*) dari orang lain dan mendasarkan perilaku mereka pada hasil interpretasi tersebut. Sementara, di dalam situasi kerumunan (*crowd*) orang-orang terlibat dalam suatu *circular reaction* (reaksi sirkular), dimana mereka bereaksi tanpa adanya proses berpikir atau proses interpretasi. Seperti halnya LeBon dan Park, Blumer juga berasumsi bahwa individu mencapai titik dimana mereka berhenti untuk berpikir rasional tentang perilaku mereka. Mekanisme yang memungkinkan hal ini terjadi adalah meliputi: proses *milling* (penyatuan/menggiling), *collective excitement* (kegembiraan kolektif), dan *social contagion* (penularan sosial).

Bagan 3. 1. :

Interaksi Interpretif Blumer vs Reaksi Sirkular

(*Blumer's Interpretive Interaction versus Circular Reaction*)



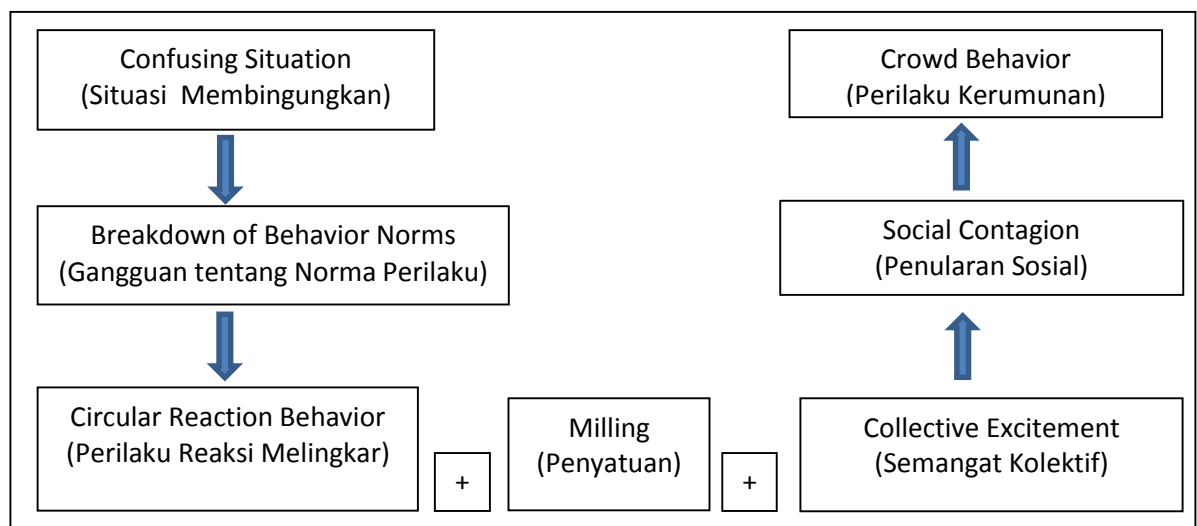
Sumber: Locher, 2002: 19.

Bagan 3. 1. menunjukkan bagaimana perbedaan antara *normal interpretive interaction* (interaksi interpretatif yang normal) dan *circular reaction* (reaksi melingkar) dalam memunculkan perilaku. *Normal interpretive interaction* (interaksi interpretatif yang normal) akan melahirkan *rational behavior* (tingkah laku

rasional), sementara *circular reaction* (reaksi melingkar) akan melahirkan *irrational behavior* (tingkah laku irasional).

Dalam kaitannya dengan mekanisme munculnya perilaku kerumunan (*crowd behavior*), Blumer menawarkan mekanisme yang melibatkan tiga aspek sebagaimana yang sudah dikemukakan di atas, yakni: mekanisme *milling* (penyatuan/menggiling), *collective excitement* (kegembiraan kolektif), dan *social contagion* (penularan sosial).

Bagan 3. 2. :
Blumer`s Development of Collective Crowd Behavior



Sumber: Locher, 2002: 20.

Konsepsi Blumer tentang *milling* (penyatuan/penggilingan) jauh lebih berkembang dibandingkan dengan terminologi yang digunakan Park. Blumer meyakini bahwa setiap peristiwa kolektif dimulai ketika orang-orang berperilaku tanpa memiliki tujuan dan dilakukan secara acak (sporadis). Perhatian mereka telah ditarik oleh semacam kegembiraan, yang menyebabkan kegembiraan di dalam kerumunan (*crowd*). Selama *milling* (penyatuan/penggilingan), orang-orang menjadi sangat sensitif dan responsif terhadap satu sama lainnya, semakin sibuk satu dengan yang lainnya, dan terjadi penurunan respons terhadap rangsangan eksternal biasa. Dengan kata lain, mereka terlalu banyak memberikan perhatian terhadap satu sama lain dengan mengabaikan keadaan dunia luar. Mereka memberikan respons kepada

satu sama lain secara cepat dan tanpa disadari (*quickly and unwittingly*), tetapi tidak merespons kepada seluruh orang-orang luar (*outsiders*). Proses milling (penggilingan) ini mengantarkan orang-orang untuk bertindak kolektif (*act collectively*).

Tahap berikutnya adalah *collective excitement*, yakni bentuk yang lebih intens dari *milling* (penyatuan/penggilingan). Adanya semangat perilaku dari orang lain menyebabkan individu menjadi sulit untuk berpikir tentang sesuatu yang lain, dan mengatur untuk masuk ke tahap perilaku penularan (*contagious behavior*). Orang-orang menjadi emosional (*emotionally*), terangsang (*aroused*), labil (*unstable*), tidak responsif terhadap logika (*unresponsive to logic*), dan tidak bertanggung jawab (*irresponsible*).

Pada titik ini, peniruan sosial (*social contagion*) menjadi lebih dominan. Blumer mendefinisikan peniruan (*contagion*) sebagai percepatan (*rapid*) penyebaran suasana hati yang irasional (*irrational dissemination of a mood*), dorongan (*impulse*), atau perilaku (*behavior*), tanpa disadari (*unwitting*). Orang-orang menjadi begitu menggelora (*worked up*), emosional (*emotional*) dan bingung (*distracted*) sehingga mereka tidak mampu untuk berpikir jernih. Sebagai gantinya, mereka meniru perilaku orang-orang di sekitar mereka. Mereka kehilangan resistensi sosial (*social resistance*) karena mereka kehilangan kesadaran akan diri sendiri (*self-consciousness*). Mereka juga kehilangan kemampuan untuk menginterpretasi tindakan-tindakan orang lain. Bukannya menafsirkan (*interpreting*), berpikir (*thinking*), dan kemudian bertindak (*acting*), namun justru mereka dengan cepat dan membabi buta bereaksi terhadap apapun yang terjadi di sekitar mereka. Mereka lebih cenderung mengikuti dorongan-dorongan (*impulses*). Perilaku menyebar seperti api di seluruh kerumunan (*crowd*). Fokus perhatian umum terjadi, dan seperangkat keyakinan terbentuk.

Blumer (Locher, 2002: 20) juga mengusulkan konsep tentang massa (*the mass*) sebagai tipe unik dari kelompok sosial kolektif (*collective social group*). Hal ini sama sekali berbeda dari konsep yang digunakan LeBon yang mengacu kepada kewargaan umum (*general citizenry*) dari suatu wilayah. Bagi Blumer, suatu massa berbeda dengan kerumunan (*crowd*) karena massa terdiri atas individu-individu yang

tidak jelas (*anonymous individuals*) yang tidak berinteraksi secara langsung satu sama lainnya. Tidak seperti halnya kerumunan (*crowd*), para anggota suatu massa cenderung memiliki kesadaran diri (*self conscious*).

B. *The Emergent-Norm Theory* (Teori Kemunculan Norma)

1. Perilaku Kolektif Perspektif *The Emergent-Norm Theory*:

Menurut Turner dan Killian (Stolley, 2005: 186), *Emergent-Norm Theory* (Teori Kemunculan Norma) menerapkan pandangan interaksi sosial terhadap perilaku kerumunan (*crowd behavior*). Menurut *Emergent-Norm Theory* (Teori Kemunculan Norma) suatu norma baru berkembang (muncul) karena suatu peristiwa terjadi. Perkembangan norma ini tergantung pada isyarat dan komunikasi di antara para anggota *crowd* (kerumunan). Hal ini diarahkan oleh pemimpin (*leaders*) yang muncul ketika situasi berlangsung. Perilaku pemimpin (*leaders*) berfungsi sebagai panduan bagi tindakan para anggota suatu *crowd* (kerumunan). Para peserta kerumunan (*crowd participants*) menginterpretasikan suatu kejadian (*interpret events*), meredefinisi situasi (*redefine the situation*), mengikuti norma yang dikonstruksi oleh pemimpin (*leaders*), dan membentuk perilaku situasional (*establish "situational" behavior*).

Dikatakan oleh Aguirre, Wenger, dan Vigo (Stolley, 2005: 186), bahwa *Emergent-Norm Theory* (Teori Kemunculan Norma) seringkali digunakan dalam mempelajari perilaku bencana (*disaster behavior*). Misalnya, sesaat setelah terjadinya pengeboman *World Trade Center* (WTC) di Amerika Serikat pada tahun 1993, sebagian besar orang dievakuasi secara kelompok, setelah mereka berhamburan beberapa saat untuk mencari informasi dan saran dari orang lain. Mereka berdiskusi tentang apa yang terjadi dan tingkat bahaya yang ditimbulkan sebelum mereka meninggalkan lokasi kejadian.

Pada tahun 1957, Ralph Turner dan Lewis Killian (Locher, 2002: 24), mempublikasikan apa yang mereka sebut sebagai teori tentang perilaku kolektif (*theory of collective behavior*), meskipun mereka menganggapnya masih belum lengkap. Turner dan Killian kemudian menawarkan suatu teori tentang perilaku kolektif (*collective behavior*) yang disebut dengan *the Emergent Norm Theory*.

Turner dan Killian mencoba menggambarkan perilaku kolektif (*collective behavior*) dari perspektif psikologi sosial (*social psychology perspective*). Perspektif *the Emergent Norm Theory* didasarkan pada premis bahwa perilaku kolektif (*collective behavior*) bersifat rasional.

Secara singkat, pandangan *the Emergent Norm Theory* (Teori Kemunculan Norma) dapat diringkas sebagai berikut:

- (1) Perilaku kolektif (*collective behavior*) dapat terjadi bilamana orang-orang menemukan diri mereka dalam suatu situasi kebingungan atau tidak tahu apa yang harus dilakukan.
- (2) Ketika orang-orang tidak mengetahui apa yang harus dilakukan, lantas mereka mengamati sekitarnya untuk melihat apa yang dilakukan oleh orang lain.
- (3) Dengan cepat, setiap anggota dari suatu kelompok terlibat dalam setiap perilaku. Semua anggota kelompok lainnya menunggu untuk memantau apa yang akan terjadi. Apabila tidak terjadi reaksi negatif terhadap perilaku, mereka semua kemudian mengasumsikan bahwa perilaku tersebut dapat diterima (*acceptable*) dalam kelompok dan menjadi memungkinkan untuk terlibat dalam diri mereka sendiri. Melalui proses penguatan sirkular (*circular reinforcement*), kemudian norma kelompok baru muncul (*new group norms emerge*).
- (4) Karena sebagian besar orang-orang sudah sesuai dengan norma yang muncul di lingkungan (kelompok) sekitar mereka sepanjang waktu, kemudian mereka ingin mengikuti kelompok baru, maka norma muncul. Mereka terlibat dalam perilaku yang tidak biasa (*unusual behavior*) bukan dikarenakan kecacatan mental (*mental deficiency*) akan tetapi lebih dipandang sebagai sesuatu yang benar untuk dilakukan dalam situasi seperti ini.

Selanjutnya, Turner dan Killian (Locher, 2002: 25) mengawali definisi perilaku kolektif (*collective behavior*) yang ditandai oleh sifat berubah (ketimbang stabil), ketidakpastian (ketimbang peramalan), dan disorganisasi (ketimbang struktur yang stabil). Kemudian pada tahun 1987, Turner dan Killian menguraikan lagi definisi

perilaku kolektif (*collective behavior*) sebagai semua bentuk dari perilaku sosial (*social behavior*) dimana kesepakatan yang lazim berhenti membimbing tindakan sosial dan orang-orang secara kolektif melampaui, memotong (*bypass*), atau menumbangkan (*subvert*) struktur dan pola institusi yang sudah mapan. Menurut Turner dan Killian, kehidupan sosial biasanya beroperasi secara lancar, tetapi kondisi kadang-kadang muncul dimana standar norma tidak bisa diterapkan. Dalam kondisi seperti ini, maka akan muncul norma baru (*new norms emerge*). Orang-orang mengikuti norma yang tiba-tiba muncul (*emergent norms*) ini hanya karena mereka biasanya mereka mengikuti norma-norma sosial. Pernyataan ini merupakan dasar dari perspektif *the emergent norm*, yakni: Secara umum, orang-orang menyesuaikan dengan norma-norma dari setiap situasi tertentu dan ketika situasi mengundang untuk munculnya norma baru, mereka secara sederhana mengikuti pedoman-pedoman baru ini. Turner dan Killian mengganti fokus mereka ke dalam proses yang memungkinkan aturan-aturan perilaku baru berkembang dengan cepat.

Emergent Norm Theory (Teori Kemunculan Norma) berakar dalam Interaksionisme Simbolik (*Symbolic Interactionism*), yakni suatu perspektif psikologi sosial (*social psychology perspective*) yang memfokuskan pada pentingnya makna dan interpretasi (*meaning and interpretation*) sebagai kekuatan pendorong (*driving forces*) di belakang perilaku manusia. Menurut Interaksionisme Simbolik (*Symbolic Interactionism*), kita semua menginterpretasi lingkungan sekitar dan mendasarkan perilaku kepada apapun pemaknaan kita tentang sekitarnya. Ketika kita berada di sekitar orang lain, kita semua bekerja bersama untuk mendefinisikan secara sosial apa yang akan terjadi. Definisi tentang situasi sangat penting karena dapat menentukan suatu perilaku.

2. *The Emergent Norm Process* (Proses Munculnya Norma):

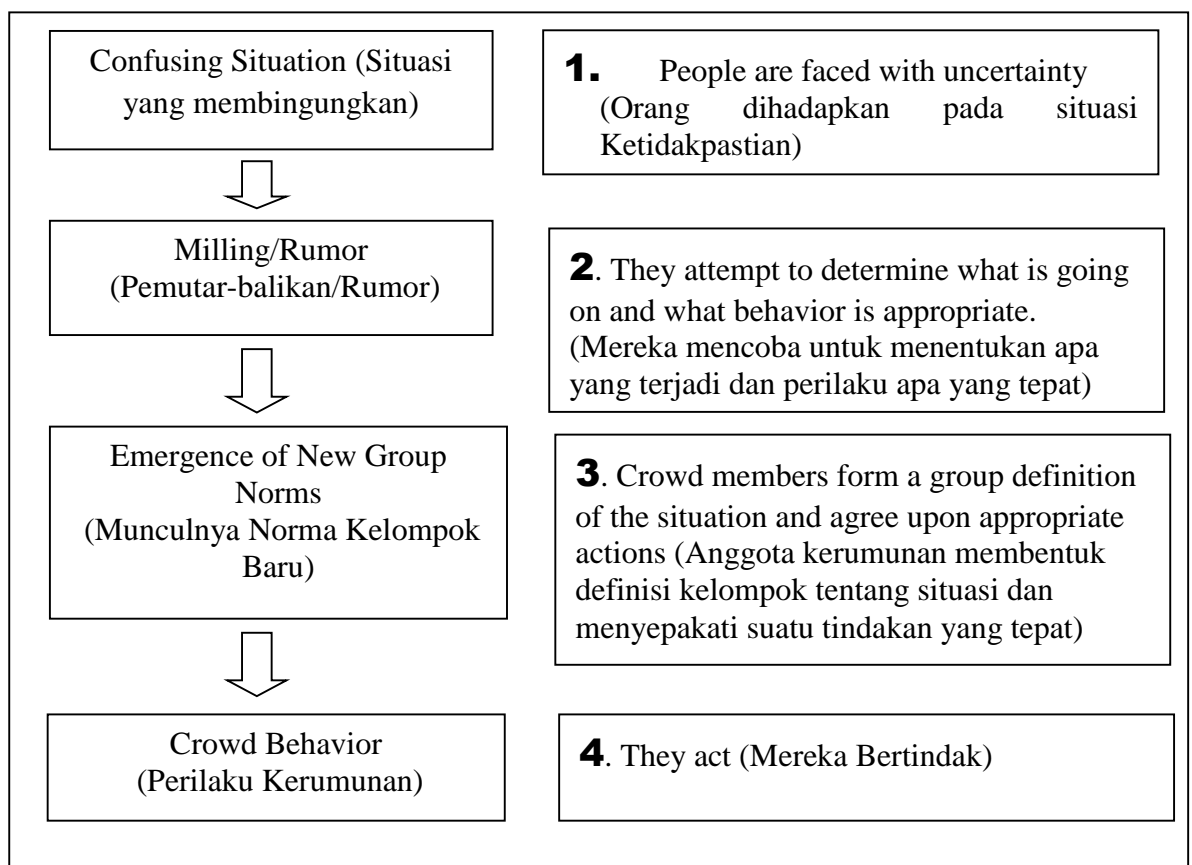
Turner dan Killian (Locher, 2002: 26) mendefinisikan perilaku kolektif (*collective behavior*) sebagai contoh spesifik dimana norma-norma dan atau pola-pola perilaku tampaknya tidak cukup memadai atau tidak pantas bagi orang-orang yang ada dalam suatu situasi. Kunci atas konsepsi perilaku kolektif ini adalah apa yang oleh Turner dan Killian disebut sebagai *crowds* (kerumunan), yakni singkat

(*short-lived*), longgar (*loosely knit*), dan kolektifitas yang tidak teratur (*disorder collectivities*). *Crowds* (kerumunan) diperlukan untuk syarat terjadinya perilaku kolektif (*collective behavior*). Kolektivitas telah membentuk norma baru yang bertentangan (*contradict*) dan penafsiran kembali (*reinterpret*) norma-norma dan atau organisasi dari masyarakat yang baru muncul. Oleh karena itu, studi Turner dan Killian tentang perilaku kolektif (*collective behavior*) merupakan studi tentang kolektivitas (*collectivities*).

Selanjutnya, Turner dan Killian merumuskan formulasi tentang perkembangan perilaku kolektif menurut perspektif *The Emergent Norm Theory*, sebagai berikut:

Bagan 3. 3:

Perkembangan Perilaku Kolektif Menurut Perspektif *The Emergent Norm Theory*



Sumber: Locher, 2002: 26

Berdasarkan perspektif kemunculan norma (*the Emergent Norm Perspective*), maka dapat dijelaskan bahwa adanya suatu situasi yang tidak jelas dan membingungkan bagi individu-individu dalam suatu komunitas akan memunculkan merebaknya suatu rumor yakni individu-individu mencoba untuk mencari-cari kira-kira perilaku apa yang pantas untuk dilakukan. Selanjutnya, mereka membentuk definisi sendiri tentang situasi dan menyepakati atas suatu tindakan yang sesuai, dan kemudian mereka melakukan suatu tindakan sehingga muncullah suatu perilaku kerumuman (*crowd behavior*).

Meskipun Turner dan Killian tidak membangun ide teoritiknya dalam suatu gambaran yang jelas, namun mereka mencoba menguraikan tentang tujuh kondisi penting untuk perkembangan dan munculnya suatu *crowd* (kerumunan), yakni:

- 1) Ketidakpastian dari partisipan potensial atas perilaku yang sesuai dalam suatu situasi (*uncertainty of potential participants as to appropriate behavior within the situation*);
- 2) Mendesak; perasaan bahwa sesuatu harus dilakukan, segera (*urgency; a feeling that something must be done, soon*);
- 3) Komunikasi dalam suasana hati dan perbandingan dalam kerumunan (*communication of mood and imagery within crowd*);
- 4) Membatasi; Perasaan bahwa seseorang harus sesuai dengan norma dari kerumunan (*constrain; the sense that one should conform to the norms of the crowd*);
- 5) Sugesti selektif individu; penerimaan individu tentang suasana hati dan perbandingan konsisten dengan kerumunan (*selective individual suggestibility; individual acceptance of mood and imagery consistent with the crowd*); dan
- 6) Permisif; sikap dan perilaku yang dalam keadaan normal dihambat dalam masyarakat, dalam kerumunan dimungkinkan untuk dimunculkan (*permissiveness; attitudes and behaviors that are normally inhibited in society may be expressed within the crowd*).

Turner dan Killian (Locher, 2002: 29) dalam kaitannya dengan terjadinya perilaku kolektif (*collective behavior*) kemudian menjelaskan konsep tentang: (a) *uncertainty*; (b) *urgency*; (c) *communication of mood and imagery*; (d) *constraint*; (e) *selective individual suggestibility*; dan (f) *permissiveness*.

a. *Uncertainty* (Ketidakjelasan);

Turner dan Killian berpendapat bahwa orang-orang tidak menyukai kebingungan (*confusion*) dan dalam kondisi yang serba tidak jelas, maka orang akan lebih mudah mempercayai sesuatu yang negatif atau tidak benar. Di saat situasi ketidakpastian (*uncertainty*), sebagian besar orang-orang membutuhkan arahan tentang apa yang seharusnya dilakukan, mereka membutuhkan panduan dan pedoman dalam meredakan kebingungan, keraguan, dan kecemasan yang diakibatkan oleh suatu situasi. Untuk mendukung hal ini, Turner dan Killian mendiskusikan studi sebelumnya tentang konformitas (*conformity*) yang telah dilakukan oleh Sherif, yang menunjukkan bahwa orang-orang, yang dihadapkan dengan suatu pertanyaan yang jawabannya tidak memungkinkan untuk diketahui, maka mereka akan menyesuaikan jawabannya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Semua orang berasumsi bahwa jawaban kelompok merupakan jawaban yang lebih baik, lebih tepat, dibandingkan dengan jawabannya sendiri (*people all assume that the group answer is better than their own*). Eksperimen ini menggambarkan bahwa Turner dan Killian memandang hal krusial dalam memahami perilaku kolektif, yakni: semakin tidak pasti suatu situasi, maka semakin mudah sugesti orang lain (*more uncertainty leads to more suggestibility from others*). Orang akan sangat tergantung kepada penilaian orang lain dalam situasi dimana respons yang dianggap benar tidak begitu jelas (*unclear*). Orang akan memasuki suatu ketidakpastian (*uncertainty*) ketika dibingungkan oleh keadaan di sekitar mereka. Maka apabila ada seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan penuh percaya diri, ia akan dengan cepat masuk ke dalam posisi pemimpin.

Untuk memahami tentang apa yang terjadi ketika orang-orang berhadapan dengan situasi baru atau situasi yang membingungkan (*new or confusing*

situation), maka para psikolog sosial mengembangkan suatu konsep tentang pengaruh informasi (*information influence*). Mereka mendasarkan perilakunya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kecenderungan dasar dari manusia adalah mencari di sekitarnya untuk melihat apa yang dilakukan oleh orang lain. Mereka menggunakan orang lain sebagai sumber informasi, dimana kata-kata dan perilaku orang lain tersebut dijadikan sebagai pedoman atas pandangan dan tindakannya.

b. Urgency (urgensi);

Proses ini tentang konstruksi rumor, yang dimungkinkan karena kelompok tidak berhenti untuk bertindak ketika kebingungan muncul. Lebih dari itu, malahan mereka mencari tahu tentang apa yang akan dilakukan berikutnya. Ketidakadaan ide tentang apa yang akan dilakukan berikutnya menghasilkan arti urgensi: semakin lama mereka tidak melakukan sesuatu, maka mereka akan semakin kewalahan dalam arti bahwa mereka perlu segera mengambil suatu tindakan. Kesepakatan dan solidaritas (*agreement and solidarity*) tentang kolektivitas tidak secara tiba-tiba muncul, hal ini berkembang secara sosial di dalam suatu kelompok.

c. Communication of Mood and Imagery (Komunikasi tentang Citra dan Suasana Hati);

Komunikasi dalam suatu kerumunan (*crowd*) mengindikasikan terhadap setiap anggota apa yang sedang terjadi, apa yang mungkin akan terjadi berikutnya, dan apa tindakan dan sikap yang tepat. Melalui rumor, peserta suatu kerumunan akan memungkinkan untuk mencapai konsensus. Komunikasi ini memungkinkan untuk setiap individu membentuk definisi yang sama (*similar definition*) tentang situasi. Adanya suatu komunikasi juga mengindikasikan tentang sikap dan perilaku apa yang mungkin dapat diterima di dalam suatu kerumunan dan siapa yang akan menolak. Tanpa adanya komunikasi di antara para anggota, individu akan terisolasi satu sama lain, sehingga suatu kerumunan tidak akan terjadi. Anggota kerumunan memahami bahwa setiap anggota kelompok lain sebagai sumber informasi potensial. Peningkatan kesadaran dan perhatian (*awareness and attention*)

terhadap orang lain merupakan alasan yang kuat mengapa anggota kerumunan begitu cepat untuk menjadi peniru (*imitate*) perilaku dari kelompok lain.

d. *Constraint* (Ketegangan);

Gagasan partisipan tentang apa yang akan diterima dan tidak diterima oleh orang lain dalam kelompok secara keseluruhan mungkin bisa salah. Namun demikian, mereka jauh lebih memungkinkan untuk terlibat dalam perilaku yang mereka yakini mungkin ditolak. Ketegangan terjadi jika berbagai anggota kerumunan memunculkan berbagai perilaku yang tidak sesuai dimana satu sama lain tidak saling menerima. Penting diperhatikan bahwa hanya beberapa pola perilaku saja yang akan diterima oleh anggota-anggota kerumunan. Tekanan kelompok (*group pressure*) untuk menyesuaikan berbagai perilaku anggotanya adalah melalui tekanan memaksa (*powerful force*), dan hal ini berlaku di Negara dimana kesadaran kelompoknya tinggi, dimana anggota-anggota kerumunan menemukan diri mereka di dalamnya. Di dalam kelompok, suatu perilaku secara sosial akan diterima, diberi sanksi, dan didorong. Orang-orang akan merasa takut jika tidak melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan kelompoknya.

e. *Selective Individual Suggestibility* (Sugestibilitas individu yang selektif);

Mengacu kepada kecenderungan individu untuk menjadi lebih sesuai, dan lebih terpolarisasi, dengan sikap nyata yang dipegang oleh para anggota yang lain dalam suatu kerumunan. Mereka menjadi lebih memungkinkan untuk menerima beberapa isyarat perilaku, informasi dan keyakinan yang sesuai dengan suasana hati (*mood*) dari orang banyak. Mereka juga meningkatkan kemungkinan untuk menolak setiap bentuk baru yang tidak sesuai dengan kerangka pikir ini. Oleh karena itu, anggota menjadi semakin lebih selaras dengan sugesti spesifik dan isyarat perilaku. Jika suatu kerumunan nampak menjadi marah, maka individu menjadi mungkin untuk menerima sugesti bagi munculnya perilaku kekerasan atau merusak (*violent or destructive behavior*).

f. *Permissiveness* (permisif);

Dalam situasi kelompok, makna permisif mengacu kepada adanya peluang yang memungkinkan munculnya sikap dan perilaku yang pada setting lain tidak bisa diterima. Kebanyakan bentuk dari perilaku kolektif memberikan kemungkinan bagi partisipan untuk terlibat dalam perilaku yang mereka inginkan, meskipun secara sosial perilaku tersebut tidak bisa diterima.

3. Klasifikasi partisipan (*Classification of Participants*):

Turner dan Killian sangat terkenal (*well known*) dan sering dikutip berkaitan dengan skema klasifikasi untuk partisipan perilaku kolektif (*collective behavior participants*). Turner dan Killian (Locher, 2002: 33) membagi partisipan perilaku kolektif ke dalam lima kategori. Pembagian kategori ini didasarkan atas dua faktor, yakni: (1) motivasi individu untuk bergabung dalam peristiwa; dan (2) perilaku individu selama peristiwa.

Selanjutnya, kelima kategori dari klasifikasi partisipan perilaku kolektif tersebut meliputi:

(1) *The Ego-involve/Committed* (Keterlibatan Ego/Komitemen);

Yakni partisipan (peserta) yang terlibat secara mendalam dan pribadi dalam suatu peristiwa. Dia dimotivasi oleh perasaan bahwa beberapa tindakan tersebut dibutuhkan. Individu-individu ini mungkin sedih, takut, atau gembira. Setiap emosi yang intens dihubungkan dengan peristiwa akan membuat individu secara pribadi merasa terlibat. Mereka mendefinisikan situasi sebagai situasi yang menuntut tindakan segera (*immediate action*). Orientasi yang ada sebelumnya membimbing mereka menuju tindakan yang spesifik. Mereka secara emosional terlibat dalam peristiwa tersebut dan akan mengambil posisi kepemimpinan yang kuat, jika diperlukan, dalam rangka untuk mencapai tujuan mereka. Misalnya, mereka yang paling marah pada ketidakadilan sosial sangat mungkin kemudian melontarkan cacian atau melemparkan batu kepada Polisi.

(2) *The Concerned* (Prihatin);

Partisipan yang prihatin (*concerned participants*) adalah peserta yang secara pribadi tidak terlibat seperti halnya pada kategori *the ego-involved/committed*. Mereka juga memiliki sikap yang kurang jelas. Mereka meyakini bahwa sesuatu harus dilakukan, akan tetapi mereka tidak cukup terlibat secara personal untuk meyakini tentang keputusan apa, kapan, dan bagaimana suatu tindakan harus dilakukan. Mereka prihatin tentang isu-isu di seputar peristiwa, namun tidak sedalam seperti halnya partisipan dengan kategori *the ego-involved/committed*.

(3) *The Insecure* (Partisipan karena merasa tidak aman);

Partisipan karena merasa tidak aman (*the insecure participant*) berasal dari harapan langsung dari partisipan di dalam suatu kerumunan (*crowd*), tanpa memperhatikan keadaan. Hal ini meliputi perasaan kekuasaan, perasaan memiliki, atau perasaan identitas dimana partisipan tertarik dalam peristiwa ini. Mereka mungkin tidak mengetahui apa yang menjadi isu dan tidak terlalu peduli. Terdapat dua faktor yang menggambarkan partisipan yang tidak aman (*insecure participants*) dalam kerumunan (*crowd*). *Pertama*, rasa kekuasaan (*sense of power*) dan kebulatan suara (*unanimity*) yang datang dari bergabungnya dengan suatu kelompok yang besar. Suatu kerumunan (*crowd*) membuat anggota yang tidak aman (*insecure members*) merasa memiliki kekuatan secara fisik, penting secara sosial, dan mungkin merasa paling penting, bagian dari sesuatu. *Kedua*, “kebenaran” (*righteousness*) dari kerumunan (*crowd*) itu sendiri adalah menarik untuk individu-individu tidak aman (*insecure individuals*). Kita cenderung mendasarkan standar benar dan salah pada norma kelompok dimana kita mengidentifikasikannya. Dalam situasi munculnya norma (*emergent norm situation*), tidak seorang pun dalam kelompok yang bertentangan dengan norma baru. Kepastian bahwa seseorang melakukan hal yang benar dan bahwa setiap orang secara umum setuju artifisial dibuat dalam kerumunan (*crowd*). Hal ini memberikan rasa aman yang luar biasa kepada individu yang secara sosial tidak aman.

(4) *Spectators* (Penonton);

Spectators (Penonton) seringkali mengacu kepada tipe dari episode kolektif yang ingin mengetahui suatu kerumunan (*crowd*) itu sendiri. Mereka mungkin berkumpul untuk melihat kelompok kecil dari individu yang terlibat dalam perilaku iseng (*fad behavior*). Mereka bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan biasanya relatif tidak aktif. Sebagai contoh, dalam suatu protes politik, jumlah penonton bisa jadi lebih banyak daripada peserta protes yang sebenarnya. *Spectators* (penonton) merupakan bagian penting dari banyak tipe perilaku kolektif karena memiliki tiga alaan, yakni: **Pertama**, *Spectators* (penonton) penting karena jumlah resmi mereka seringkali menyatu (*lump*) dengan peserta aktif; **Kedua**, *Spectators* (penonton) menyediakan anggota kerumunan (*crowd*) melalui audien untuk setiap perilaku (*any behavior*); dan **Ketiga**, *Spectators* (penonton) penting karena mereka kadang-kadang ditarik ke dalam peristiwa dan menjadi partisipan (peserta) yang aktif.

(5) *The Ego-detached/Exploiters* (Pemeran);

The Ego-detached (Ego-terpisah), yang juga sering disebut sebagai *exploiters* (pemeran), adalah mereka yang hanya berpikir untuk kepentingan dirinya sendiri. Mereka bekerjasama dalam suatu peristiwa apabila hal ini sesuai dengan tujuan mereka, dan bahkan mereka memanipulasi peristiwa semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan mereka.

C. *The SBI/Sociocybernetic Theory*

Sejak tahun 1960-an, Clark McPhail (Locher, 2002: 55) telah ikut serta secara aktif dalam dokumentasi pertama tentang kumpulan publik (*public gatherings*). Bersama kolega dan mahasiswanya, McPhail secara hati-hati melakukan observasi terhadap ratusan, bahkan ribuan peristiwa seperti: demonstrasi publik, aksi protes, dan even olah raga. Berdasarkan hasil observasinya, McPhail kemudian mengembangkan suatu pendekatan terhadap perilaku kolektif (*collective behavior*) yang berbeda secara fundamental dari para teoritis yang lainnya. McPhail memandang bahwa perilaku kolektif (*collective behavior*) adalah setiap organisasi

atau koordinasi dari aktivitas individual (*individual activity*). Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang seringkali datang untuk berkumpul bersama-sama dan membentuk kelompok temporer (perkumpulan sesaat), dimana mereka mengkoordinasikan perilaku mereka untuk memungkinkan setiap orang menyatukan tujuan-tujuan mereka. McPhail tertarik untuk mengetahui tentang bagaimana proses-proses dalam merakit pertemuan dan melakukan koordinasi perilaku bisa dicapai. Tidak seperti halnya pada umumnya teoritisasi tentang perilaku kolektif (*collective behavior*), McPhail tidak melakukan penelitian tentang tipe-tipe dari perilaku kolektif (*collective behavior*), seperti: *fads*, *crazes*, *riots*, atau *lynching*, tetapi dia melakukan upaya untuk mengkonstruksi suatu teori yang dapat menjelaskan semua perilaku kelompok (*all group behavior*). Oleh karena itu, McPhail memfokuskan perhatiannya kepada perilaku kelompok (*group behavior*) yang memiliki sifat: khas (*typical*), rutin (*routine*), dan ritual (*ritualized*).

Perspektif McPhail ini memiliki sebutan yang beragam, namun seringkali disebut sebagai perspektif *The Social Interactionist/Behaviorist (SBI)*, karena akar dari teori ini adalah *Symbolic Interactionism* (Interaksionisme simbolik) dan juga *Psychological Behaviorism* (Behaviorisme Psikologi). Behaviorisme memandang perilaku manusia dari perspektif mekanis (*mechanical perspective*), diturunkan dari pikiran (*thoughts*), perasaan (*feelings*), dan perilaku (*behavior*) ke dalam serangkaian keputusan dan aktivitas. Pendekatan McPhail yang lainnya adalah apa yang disebut dengan *Assembly Perspective* (perspektif perakitan) karena McPhail secara intensif memfokuskan kajiannya terhadap pola-pola dimana orang-orang menyatu ke dalam suatu pertemuan (*gatherings*). Kemudian, McPhail mengembangkan teorinya yang disebut sebagai *the Sociocybernetic Theory* (Teori Sibernetika Sosial).

Selanjutnya, McPhail menyatakan bahwa:

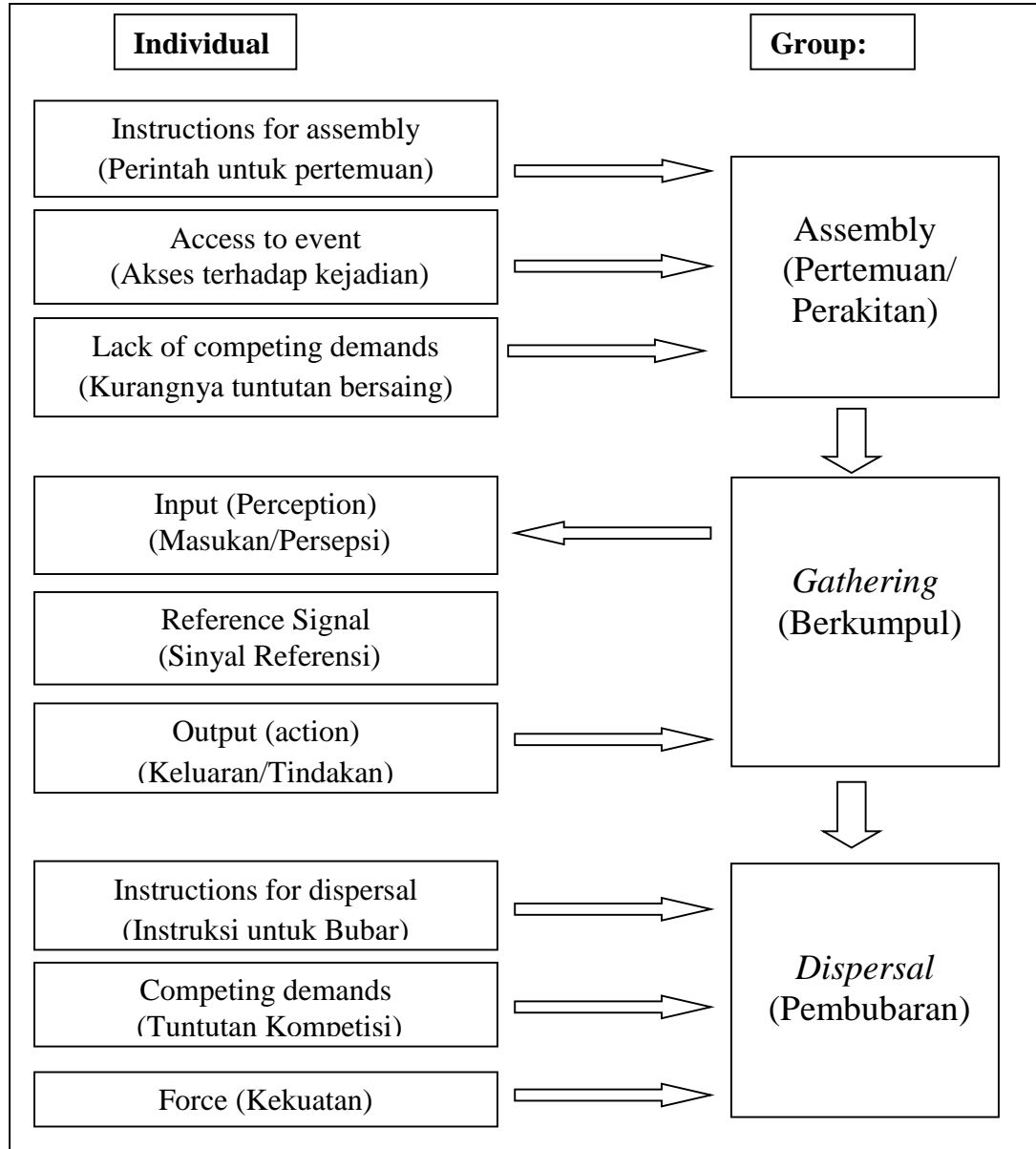
- (1) Individu tidak didorong oleh *crowds*, dan tidak kehilangan kontrol kognitif (*cognitive control*) selama peristiwa kelompok (*group events*).
- (2) Individu tidak dipaksa untuk berpartisipasi dalam perilaku kolektif oleh beberapa “kegilaan yang sama (*madness-in-common*). Tidak ada kondisi psikologis (*psychological condition*), gaya kognitif (*cognitive style*), atau perbedaan predisposisi partisipan dari non-partisipan.

- (3) Mayoritas perilaku dalam kerumunan (*crowds*) adalah tidak bersifat universal dalam setiap kelompok. Sebagian besar ketika orang-orang datang secara bersama-sama dalam suatu pertemuan besar (*large gatherings*), mereka benar-benar terlibat secara normal, suatu perilaku yang diharapkan.

1. Tahap-Tahap Tindakan Kolektif (*The Stage of Collective Action*):

McPhil (Locher, 2002: 57) mengembangkan suatu model tahap-tahap tindakan kolektif (*the stages of collective action*) menurut perspektif perakitan (*assembly perspective*). Tahap-tahap tindakan kolektif tersebut adalah sebagai berikut:

Bagan 3. 4. :
Tahap-Tahap Tindakan Kolektif menurut Perspektif Perakitan
(The Stages of Collective Action according to the Assembly Perspective)



Sumber: Locher, 2002: 57

Mengacu kepada bagan di atas, maka menurut McPhail, suatu tindakan kolektif (*collective action*) terjadi melalui tahap-tahap: *Assembly*, *Gathering*, dan *Dispersal*.

Assembling Processes (Proses Perakitan); merupakan tahap pertama dari setiap berkumpulnya orang. Dalam rangka mengambil bagian di dalam setiap perkumpulan, partisipan harus menerima intruksi (perintah) untuk bertemu, memiliki akses kepada lokasi kejadian, dan tidak akan dibelokkan atau diganggu dari tujuannya untuk mengambil bagian dari suatu peristiwa.

Gathering (Berkumpul); McPhail memiliki cara pandang yang berbeda tentang perilaku kerumunan (*crowd behavior*) dengan para teoritis sosial sebelumnya. McPhail berpendapat bahwa perilaku kerumunan (*crowd behavior*) hampir tidak pernah dikoordinasikan atau sepakat. Mayoritas perkumpulan melibatkan kelompok-kelompok kecil yang satu sama lain saling mengenal dan berkumpul di tempat dan waktu yang sama dalam rangka menjadi bagian dari perilaku kelompok yang lebih besar. Semua anggota perkumpulan jarang menunjukkan perilaku yang sama persis, dan biasanya perhatian mereka terhadap sesama anggota lainnya sama besarnya dengan perhatian terhadap peristiwa perkumpulan itu sendiri.

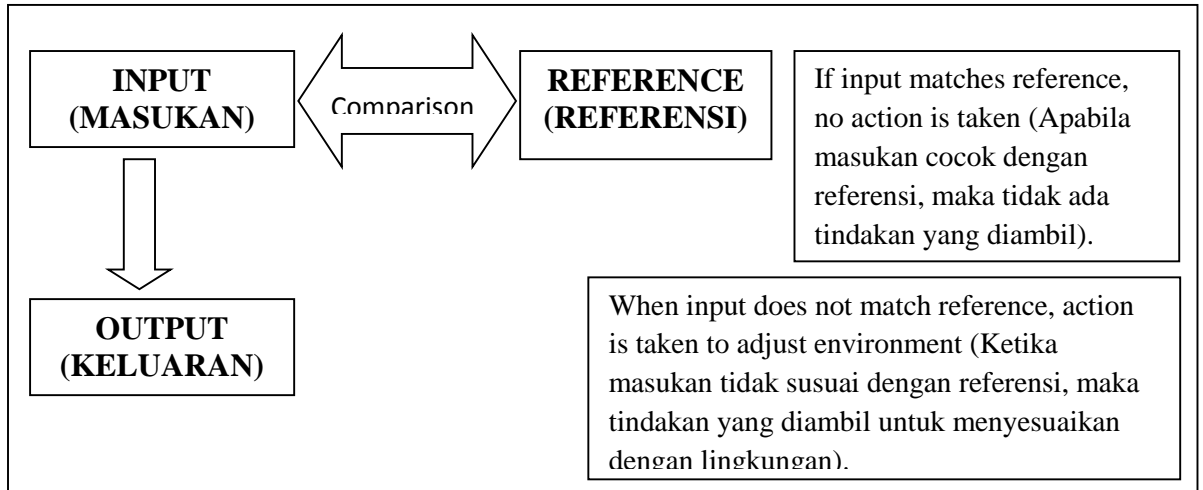
Dispersal Processes (Proses Pembubaran); McPhail menunjukkan, umumnya suatu perkumpulan (pertemuan) rutin membubarkan diri sebagai respons terhadap instruksi orang lain (*instructions for dispersal*), karena adanya tuntutan persaingan (*competing demands*), atau karena adanya kekuatan (*force*).

2. *The Sociocybernetic Process (Proses Sosio-sibernetika):*

Kata *cybernetic* berarti “mengatur diri sendiri” (*self-governing*). Sebagai contoh, tungku Termostat (*a furnace thermostat*) menerapkan prinsip-prinsip “mengatur diri sendiri” (*self-governing*). Ketika temperature (suhu) turun di bawah level yang ditentukan, maka secara otomatis tungku Termostat akan menyala. Ketika temperatur mencapai level yang ditentukan, maka tungku akan menutup. Termostat (*Thermostat*) dan Tungku (*furnace*) merupakan bagian dari “sistem mengatur diri sendiri” (*a self-governing system*). Termostat membandingkan kondisi temperatur ruangan saat ini (input) terhadap pengaturan temperatur yang diinginkan (*reference point*), dan memutuskan apakah tungku perlu dijalankan atau tidak.

Bagan 3. 5. :

A Cybernetic (Self-Regulating) System



Sumber: Diadopsi dari Locher, 2002: 62.

Model kerja *cybernetic* ini kemudian oleh McPhail diadopsi untuk menjelaskan tentang perilaku manusia (*human behavior*). McPhail menjelaskan bahwa:

“The basic idea is that human-beings are purposive actors and that, unless physically constrained (a phenomenon that sometimes occurs in very dense crowds), they control their own behavior by means of self-instructions regarding the achievement of their goals and objectives”.

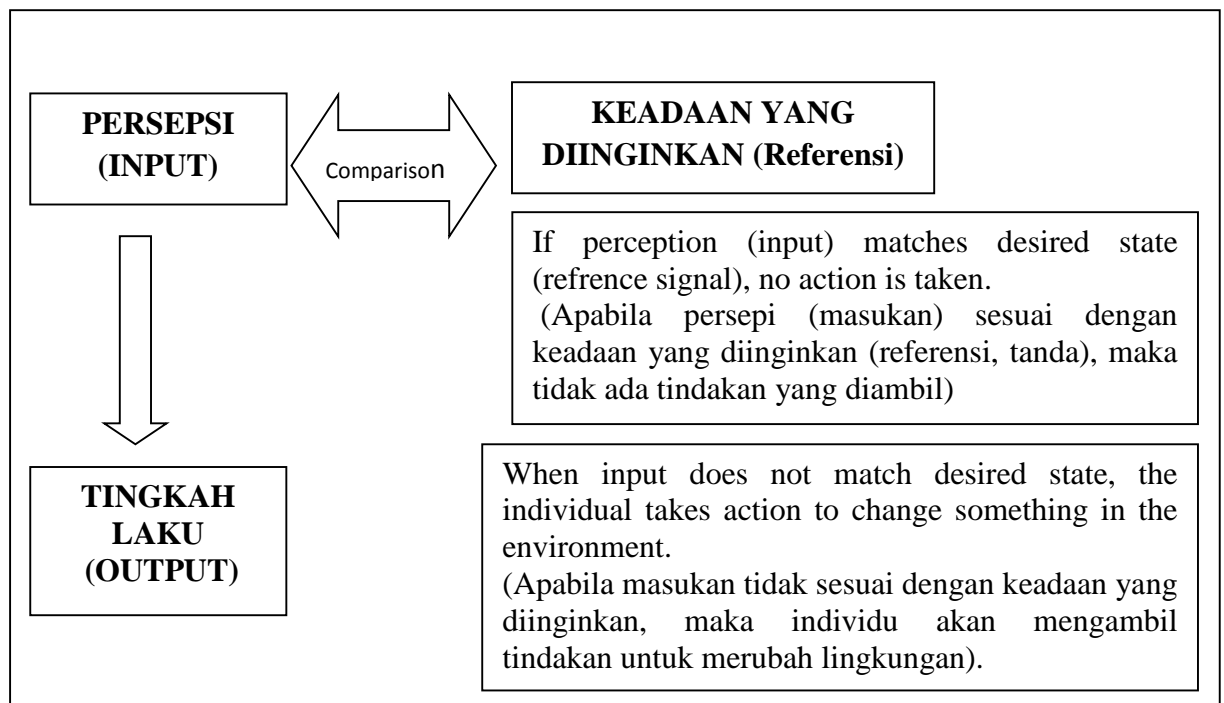
(Ide dasarnya adalah bahwa manusia adalah aktor untuk tujuan tertentu dan bahwa, kecuali secara fisik dibatasi (fenomena yang kadang-kadang terjadi dalam suatu kerumunan yang padat), mereka mengontrol perilaku mereka sendiri melalui cara “instruksi-sendiri” mengenai pencapaian tujuan dan sasaran).

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa: orang-orang memiliki harapan dan preferensi (*people have expectations and preferences*). Bagi McPhail, harapan-harapan (*expectations*) ini merupakan referensi yang mengukur kondisi kita secara terus-menerus. Perilaku manusia (*human behavior*) dipandang sebagai proses-proses yang konstan dalam menyesuaikan diri dalam perilaku (*output*), dalam rangka

menyesuaikan persepsi kita (*input*) terhadap keadaan yang diinginkan (*reference signal*). Sebagai contoh, jika seseorang haus, maka tujuan dia adalah menghilangkan rasa haus, jika dia ada di rumah, maka kemungkinannya dia mengambil air minum di kulkas lalu minum. Apabila dia berada di restoran, maka dia mungkin meminta tolong kepada pelayan restoran untuk mengambilkan air minum.

McPahil kemudian menyusun suatu model cibernetika (*cybernetic*) untuk menjelaskan tentang perilaku manusia (*human behavior*), sebagai berikut:

Bagan 3. 6. :
The Cybernetic Model of Human Behavior



Sumber: Diadopsi dari Locher, 2002: 62.

D. *The Individualist Theories* (Teori Individualis)

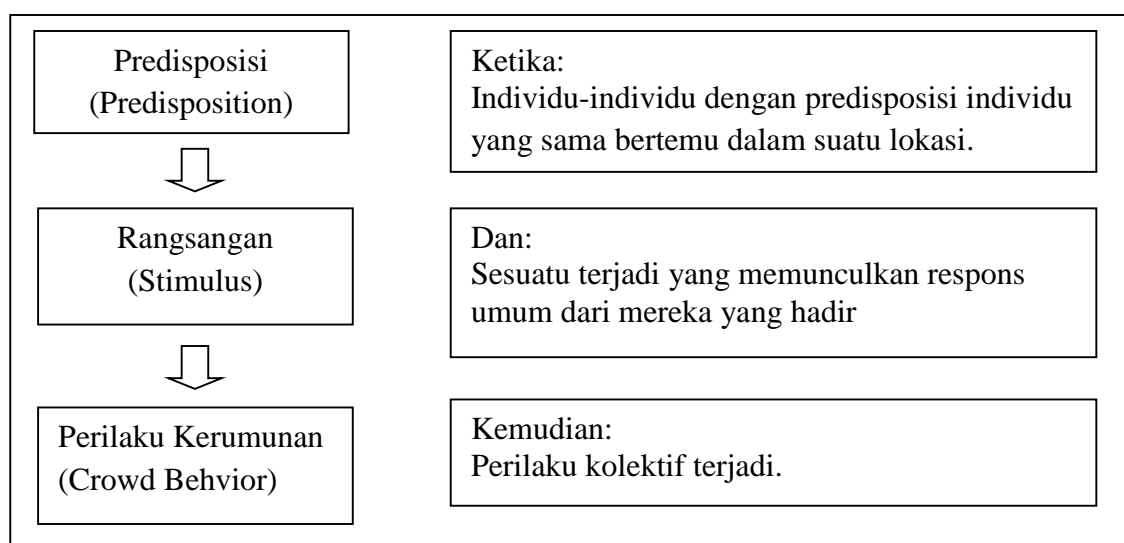
The Individualist Theories (teori-teori Individualis) disebut juga *Convergence Theories* (teori-teori Konvergensi). *Convergence Theories* memusatkan kajiannya kepada karakteristik-karakteristik dan dorongan-dorongan individual yang menyebabkan individu terlibat dalam suatu kerumunan (*crowds*). Menurut Locher (2002: 71), *Convergence Theories* berpendapat bahwa orang-orang yang ada dalam

suatu kerumunan (*crowds*) terlibat karena adanya predisposisi (kecenderungan) individual. *Convergence Theories* (teori-teori Konvergensi) juga berpendapat bahwa individu-individu yang ada dalam suatu kerumunan (*crowds*) masih tetap sebagai individu, dan apabila mereka menunjukkan aksi “gila”, itu hanya dikarenakan oleh kehadiran orang lain yang memungkinkan mereka untuk melakukan hal sama.

Perilaku kolektif (*collective behaviors*) memungkinkan orang-orang untuk mengikuti perasaan yang dianggap benar, yang dalam keadaan normal justru akan dianggap menindas atau bertentangan dengan masyarakat. Penjelasan ini adalah bersifat individualis dalam arti bahwa posisi dorongan untuk perilaku kolektif (*collective behaviors*) berada dalam diri individu. Bukan situasi yang menciptakan perilaku kolektif (*collective behaviors*), akan tetapi individu. Ketika kekerasan individu berkumpul, maka kekerasan kelompok akan cenderung terjadi. Perilaku kolektif (*collective behaviors*) lebih ditentukan oleh kecenderungan-kecenderungan individual (*individual tendencies*) daripada oleh keadaan-keadaan kerumunan (*crowds*). *Convergence Theories* (teori-teori Konvergensi) lebih banyak memusatkan kajiannya kepada tindakan kekerasan massa (*mob*), seperti *riots* dan *lynchings*.

Locher selajutnya menggambarkan suatu konvergensi umum (*the general Convergence model*) tentang perilaku kolektif (*collective behaviors*), sebagai berikut:

Bagan 3. 7. :
The General Convergence Model
Of Collective Behavior



Sumber: Diadopsi dari Locher, 2002: 72

Teori Konvergensi (*Convergence Theory*) dimulai dari Floyd Allport pada tahun 1924. Miller dan Dollard pada tahun 1941 juga memopulerkan teori ini dalam bentuk yang berbeda. Mereka menekankan pada faktor-faktor sosial (*social factors*) dan ide-ide yang menarik tentang sifat-sifat manusia (*human nature*).

Premis dasar (*the basic premises*) dari perspektif konvergensi dapat disimpulkan sebagai berikut (Locher, 2002: 73):

- (1) Orang tidak didorong menjadi “gila” atau diubah oleh suatu kerumunan (*a crowd*). Individu mempertahankan ciri-ciri kepribadian inti mereka.
- (2) Bahwa dalam situasi kerumunan (*crowd*) orang berperilaku dalam cara-cara yang sesuai dengan predisposisi masing-masing. Sebagai contoh, orang-orang yang memiliki kecenderungan kekerasan maka akan cenderung untuk terlibat dalam perilaku kekerasan, sementara orang-orang yang memiliki kecenderungan damai tidak akan melibatkan diri dalam perilaku kekerasan tersebut.
- (3) Orang-orang dengan kecenderungan tertentu, maka akan cenderung berkumpul dalam acara-acara tertentu pula, atau pada waktu dan tempat yang khusus. Hal ini berarti bahwa anggota-anggota suatu kerumunan (*crowd*) cenderung memiliki berbagai hal yang sama dengan yang lainnya.
- (4) Perilaku kolektif (*collective behavior*) tidak lebih dari pelepasan massa (*mass release*) dari aspek internal mereka (*those internal*), kecenderungan-kecenderungan individu (*individual tendencies*), atau predisposisi individu (*individual predispositions*). Kecenderungan-kecenderungan ini dapat dibawa keluar atau di dorong oleh keadaan-keadaan (*cimcurstances*), tetapi tidak ada individu yang ingin terlibat dalam perilaku dimana individu tersebut tidak memiliki kecenderungan ke arah itu. Individu-individu tidak diubah oleh kerumunan (*crowd*), meskipun mereka mungkin terprovokasi.

Floyd Allport. Di awal tahun 1900-an, Floyd Allport (Locher, 2002: 74) mulai memformulasikan eksplanasinya tentang perilaku kolektif (*collective behavior*) yang merupakan kebalikan dari para teoritis penularan (*contagion*). Pendekatan Allport tentang perilaku kolektif (*collective behavior*) lebih berperspektif psikologis dibandingkan dengan para teoritis perilaku kolektif (*collective behavior*)

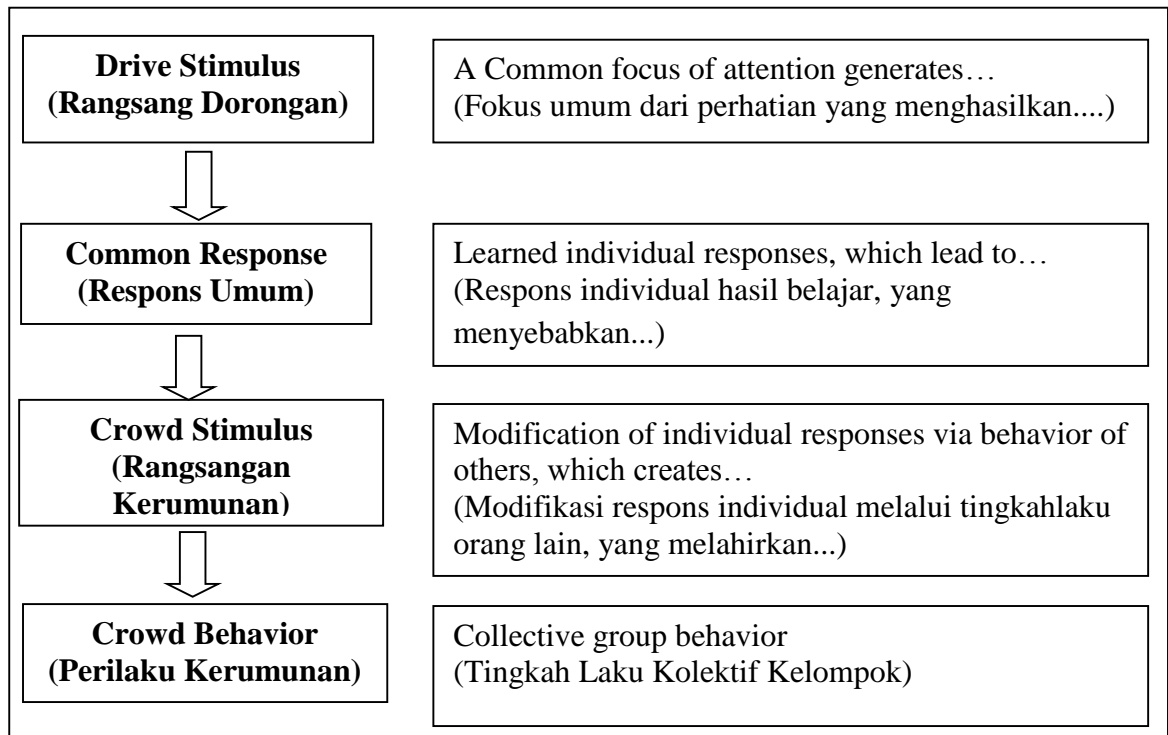
yang lainnya. Allport meyakini bahwa individu selalu bertanggung jawab terhadap perilaku mereka, termasuk dalam setting kerumunan (*crowd*). Berbeda dengan LeBon, Allport meyakini bahwa orang-orang normal tidak akan pernah melakukan perilaku yang terlepas dari keadaan. Dia berpendapat bahwa anggota kerumunan (*crowd*) secara mental tidak terganggu oleh orang-orang di sekitar mereka. Dari perspektif teori konvergensi (*convergence theory perspective*), suatu kerumunan (*the crowd*) tidak mendorong orang “waras” (*sane*) untuk menjadi “gila” (*madness*). Suatu kerumunan “gila” didorong oleh orang-orang yang memiliki kecenderungan-kecenderungan anti-sosial (*anti-social tendencies*) yang sama.

Neil Miller dan John Dollard. Neil Miller, seorang psikolog, dan John Dollar, seorang antropolog sosial (*social anthropologist*), pada tahun 1941 mengembangkan suatu teori yang disebut teori belajar sosial dan peniruan (*social learning and imitation theory*). Dalam penerapan yang lebih spesifik dari prinsip-prinsip psikologi terhadap perilaku manusia (*human behavior*), mereka menciptakan apa yang mereka sebut sebagai Teori Belajar (*Learning Theory*). Meskipun Teori Belajar (*Learning Theory*) secara eksklusif tidak memfokuskan pada perilaku kolektif (*collective behavior*), namun Miller dan Dollard banyak melakukan analisis tentang perilaku kerumunan (*crowd behavior*), termasuk juga hukuman gantung (*lynching*), dalam bukunya.

Teori Belajar dari Miller dan Dollard (*Miller and Dollard's Learning Theory*). Menurut Miler dan Dollard, dalam belajar maka seseorang pasti menginginkan sesuatu (dorongan; *drive*), melihat sesuatu (isyarat atau rangsangan; *cue or stimuli*), melakukan sesuatu (*response*), dan mendapatkan sesuatu (hadiah; *reward*). Mereka berpendapat bahwa perilaku kerumunan (*crowd behavior*) adalah tidak lebih dari respons umum terhadap suatu rangsangan (*stimuli*). Dalam kata lain, ketika anggota kerumunan melakukan tindakan yang sama (*act the same*), hal ini dikarenakan mereka memiliki respons yang sama terhadap keadaan mereka. Individu telah belajar berbagai respons (*various responses*) terhadap berbagai stimuli (*various stimuli*), karena mereka telah tumbuh di dalam masyarakat. Ketika dihadapkan dengan suatu isyarat (*cue*), orang-orang secara otomatis merespons sebagaimana yang telah mereka pelajari.

Selanjutnya Miller dan Dollard merumuskan suatu model perilaku kolektif (collective behavior model), sebagai berikut:

Bagan 3. 8. :
Miller and Dollard's Model of Collective Behavior



Sumber: Locher, 2002: 78.

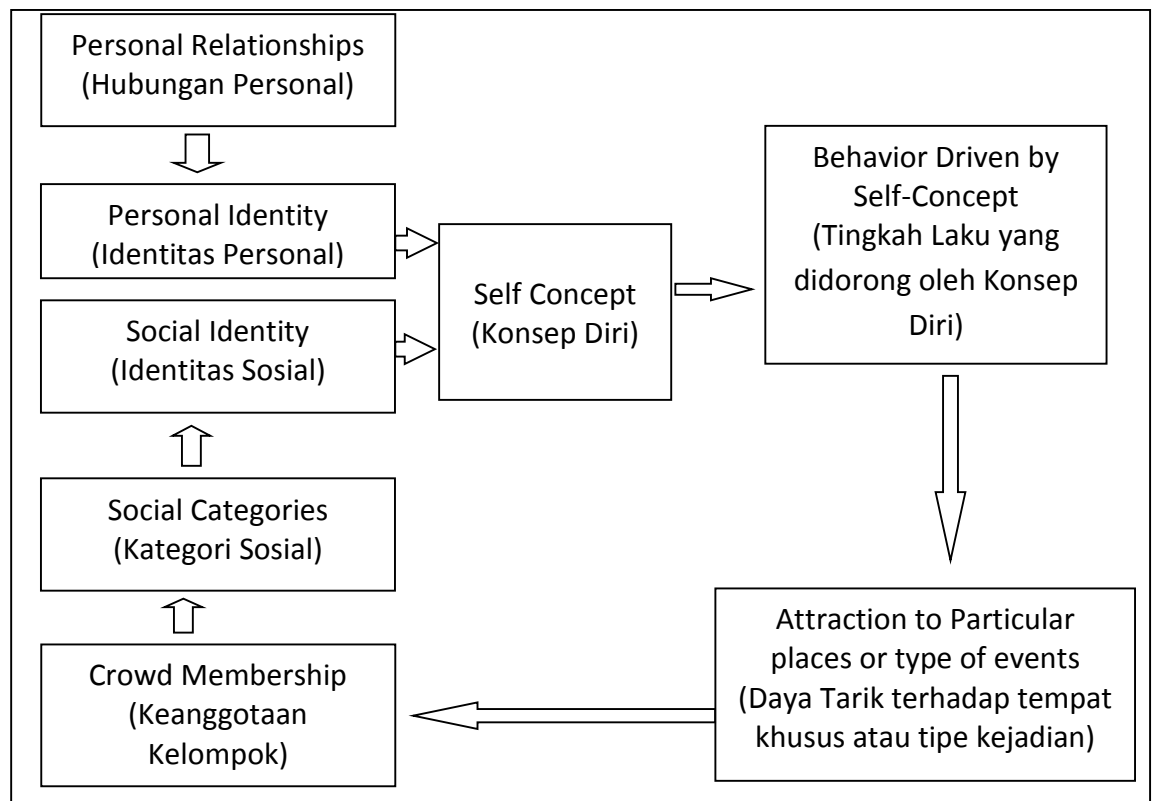
Michael Hogg dan Dominic Abrams. Pada tahun 1980, Hogg dan Abrams menghidupkan kembali pendekatan individualis terhadap perilaku kolektif. Mereka mengembangkan suatu teori yang disebutnya sebagai Teori Identitas Sosial (*Social Identity Theory*). Menurut pandangan Teori Identitas Sosial (*Social Identity Theory*), kebanyakan dari apa yang kita kerjakan didorong oleh “gambaran diri kita” (*our self-images*). Gambaran diri (*self-images*) ini eksis dalam relasi dengan peranan sosial (*social roles*) yang kita tempati. Di dalam setiap situasi, apapun identitas disebut perhatian untuk menentukan bagaimana kita berperilaku. Kemudian Hogg dan Abrams menerapkan Teori Identitas Sosial (*Social Identity Theory*) mereka terhadap perilaku kolektif (*collective behavior*).

Teori Identitas Sosial dari Hogg dan Abrams (*Hogg and Abrams`Social Identity Theory*). Hogg dan Abrams berusaha menggali bagaimana kelompok individu (*group of individuals*) dapat bertindak secara kolektif. Mereka mulai dengan asumsi tertentu tentang sifat-sifat alami masyarakat (*the nature of society*) dan sifat-sifat alami dari orang-orang (*the nature of people*), dan antar-relasi (*interrelationship*) antara orang-orang dan masyarakat.

Hogg dan Abrams menandai masyarakat sebagai “jendela tentang kategori-kategori sosial” (*a web of social categories*). Setiap kategori sosial ini memiliki level kekuasaan dan status relatif terhadap orang lain. Kategori-kategori sosial meliputi: nasionalitas (*nationality*), ras (*race*), kelas (*class*), pekerjaan (*occupation*), jenis kelamin (*sex*), agama (*religion*), dan sebagainya. Kategori-kategori ini hanya eksis dalam relasi dengan orang lain.

Selanjutnya, Hogg dan Abrams membuat suatu model perilaku kolektif (*collective behavior*), sebagai berikut:

Bagan 3.9.:
Hogg and Abrams` Model of Collective Behavior



Sumber: Locher, 2002: 83

BAB IV

TEORI GERAKAN SOSIAL LAMA (*OLD SOCIAL MOVEMENT*)

A. *Mass Society Theory* (Teori Masyarakat Massa)

1. Konsep tentang *Mass Society Theory*

Mass society theory (teori masyarakat Massa) dikembangkan oleh William Kornhauser (Locher, 2002: 249). Pada tahun 1959, Kornhauser menerbitkan sebuah tulisan yang diberi judul *The Politics of Mass Society*. Kornhauser melalui *Mass society theory* berpandangan bahwa organisasi suatu masyarakat menyebabkan kategori perilaku tertentu dari anggota dan pemimpin. Suatu masyarakat dimana banyak dari warganya merasa terasing (*alienated*)—yang banyak memiliki pengaruh langsung atas para elit dan para pemimpinnya—memiliki potensi untuk menjadi *mass society* (masyarakat massa). Suatu *mass society* akan menyebabkan terjadinya gerakan massa (*mass movements*). Suatu gerakan massa (*mass movements*) adalah anti-demokrasi dan bertujuan untuk merusak atau melakukan transformasi secara total suatu masyarakat. Para anggota dari gerakan massa (*mass movements*) biasanya meyakini bahwa mereka sedang menciptakan masyarakat yang sempurna (*perfect society*).

Mass society theory memfokuskan perhatiannya terhadap gerakan massa (*mass movement*) yakni suatu gerakan populer yang beroperasi di luar dan terhadap suatu tatanan sosial. Gerakan massa ini cenderung mengkonsumsi seluruh masyarakat (*tend to consume an entire society*). Perilaku mereka dapat menjadi merusak (*destructive*). Suatu masyarakat massa (*mass society*) adalah rentan terhadap gerakan politik destruktif yang bertujuan untuk menghilangkan kebebasan.

Suatu *mass society* memiliki beberapa karakteristik khusus, dimana beberapa karakteristik ini memungkinkan terjadinya gerakan massa (*mass movements*). Beberapa karakteristik dari *mass society* adalah meliputi:

1) *Atomization* (Atomisasi):

Atomisasi mengacu kepada orang-orang yang merasa terisolir secara sosial dan merasa tidak berdaya dalam masyarakat. Sebagian besar sosiolog menyebut istilah *atomization* dengan *alienation* (keterasingan). Perasaan terasing dari masyarakat membuat orang-orang lebih memungkinkan untuk terlibat dalam perilaku yang dimaksudkan untuk menghancurkan, melakukan revolusi, atau perilaku ingin mengubah suatu masyarakat.

2) *Access* (Akses):

Menurut Kornhauser, *access* dimaksudkan sejumlah pengaruh langsung yang dimiliki oleh warga negara yang melebihi para pemimpinnya. Kornhauser berpendapat bahwa terlalu banyak akses (*access*) atau pengaruh langsung dari warga Negara menyebabkan situasi dimana elit merasa terlalu dipaksa untuk mengikuti keinginan warga daripada memimpin mereka. Dalam suatu masyarakat dimana terlalu besar pengaruh langsung dari warga negara, maka pemimpin dalam membuat keputusan harus sesuai dengan apa yang diinginkan warga. Dalam kondisi seperti ini, maka pemimpin menjadi tidak rasional.

3) *Availability* (Ketersediaan):

Adalah kesiapan (ketersediaan) warga untuk dipengaruhi oleh para pemimpin. Warga yang terlalu banyak memiliki kemampuan untuk dipengaruhi oleh pemimpin maka sangat mudah untuk dimanipulasi. Hal ini sangat potensial untuk dimanipulasi dalam suatu masyarakat dimana pemimpin individual memiliki kemampuan untuk menarik perhatian dan aktivitas dari keseluruhan populasi (masyarakat). Karena itu, *mass society* akan menjadi eksis. *Mass society*, adalah sistem sosial dimana elit bisa dipengaruhi oleh non-elit (*the accessibility of elites*), dan non-elit siap untuk dimobilisasi oleh elit (*the availability of citizens*).

4) *Intermediate Groups* (Kelompok Menengah):

Kornhauser berpendapat bahwa dalam keadaan lemahnya kekuatan, maka kelompok mediasi (*intermediate groups*) mempunyai kecenderungan memperbesar karakteristik ini. Contoh dari *intermediate groups* adalah Organisasi Masyarakat (*Community Organizations*), Kelompok Politik baik lokal maupun regional (*Local or regional political groups*), dan sebagainya. Tujuan utama dari *intermediate groups* adalah menghubungkan perasaan individu dengan orang lain dan masyarakat. Maka, *mass society* cenderung ditandai oleh individu yang tidak menjadi bagian dari organisasi di luar keluarga. Selanjutnya, Kornhauser menyebutkan bahwa *mass society* adalah sejumlah orang yang tidak terintegrasi dalam kelompok sosial.

5) *Mass Movements* (Gerakan Massa):

Suatu masyarakat yang ditandai oleh adanya *atomization, access, availability*, dan *intermediate groups* adalah termasuk *mass society*. Selanjutnya, *mass society* akan cenderung melahirkan *mass movements* (gerakan massa). Perlu dipahami bahwa tidak semua gerakan sosial (*social movement*) adalah gerakan massa (*mass movement*). *Mass movements* bersifat ekstrim dalam tujuannya dan mungkin tidak rasional dengan menggunakan metode kekerasan. *Mass movements* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- (1) Lebih memberikan perhatian terhadap peristiwa-peristiwa nasional dan internasional daripada peristiwa-peristiwa personal dan lokal,
- (2) Respons bersifat langsung, menginginkan solusi dengan segera diimplementasikan, tidak memberikan toleransi terhadap lobi dan diskusi,
- (3) Bersifat labil (*unstable*), dimana keanggotaan suatu *mass movements* cenderung plin-plan (berubah-ubah), dan
- (4) Diorganisir dengan suatu tujuan dan kontinuitas. Tanpa organisasi, maka anggota massa hanyalah sekelompok orang yang terisolasi.

6) *Crisis Politics* (Krisis Politik):

Kornhauser menyatakan bahwa perspektif masyarakat massa (*mass society perspective*) sangat tepat digunakan dalam menganalisis respons ekstrim terhadap krisis politik. Gerakan massa (*mass movements*) tidak terjadi dalam suatu masyarakat yang sehat yang ditandai oleh kondisi-kondisi yang normal. Dengan demikian, gerakan massa akan terjadi pada waktu munculnya krisis, ketika kondisi masyarakat dalam keadaan *chaos*.

7) *Culture and Personality* (Kepribadian dan Kultur):

Faktor-faktor kultur dan kepribadian individu keduanya merupakan faktor penting dalam perkembangan suatu gerakan massa (*mass movement*), karena legitimasi kultur (*cultural legitimacy*) dan dukungan psikologis (*psychological support*) memberikan kekuatan terhadap idé dan gerakan. Dengan demikian, terdapat dua aspek dari faktor kultur dan kepribadian (*cultural and personality*), yakni: *cultural legitimacy* (legitimasi kultur) dan *psychological support* (dukungan psikologis).

8) *Cultural legitimacy* (Legitimasi kultur):

Standar massa bersifat umum dan dapat dengan cepat berubah tanpa alasan yang jelas. Ketika nilai-nilai kultur dari massa menguasai individu, maka semua orang dituntut harus dapat menyesuaikan dengan kehendak massa. Menurut Kornhauser, kultur yang seragam lebih memungkinkan untuk melahirkan suatu gerakan massa (*mass movements*).

9) *Psychological support* (Dukungan psikologis):

Kornhauser melihat bahwa kurangnya koneksitas dari *intermediate groups* menyebabkan orang-orang merasa tidak memiliki kemampuan untuk bisa partisipasi dalam dunia sosial mereka. Hal ini mengarah kepada citra buruk karena individu merasa terpisah dari masyarakatnya, sehingga menjadikan individu lebih

bersemangat untuk mencari solusi atas kecemasan yang disebabkan oleh keterasingannya.

Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan masyarakat massa? Konsep masyarakat massa (*mass society*) menyatakan bahwa masyarakat kontemporer memiliki karakteristik sebagai berikut (Abercrombie, Hill & Turner, 2010: 335):

- 1) Kebanyakan individu serupa, setara dan tidak terdiferensiasi, menunjukkan tidak ada individualitas;
- 2) Pekerjaan rutin dan mengasingkan;
- 3) Agama telah kehilangan pengaruhnya dan tidak ada nilai-nilai moral yang dipegang teguh, meskipun massa cenderung pada fanatisme ideologis;
- 4) Hubungan antar individu lemah dan sekuler, ikatan kekeluargaan tidak penting;
- 5) Massa apatis secara politik dan mudah dimanipulasi oleh kediktatoran dan birokrasi; dan
- 6) Kebudayaan (seni, sastra, filsafat dan ilmu pengetahuan) telah menjadi budaya massa, yaitu direduksi ke tingkat selera terendah.

Penulis yang menggambarkan masyarakat dengan istilah-istilah itu menggunakan konsep masyarakat massa secara peyoratif (merendahkan) dan menyalahkan penyebab kerusakan masyarakat pada kapitalisme atau industrialisasi. Beberapa dari topik ini hadir dalam karya teoritis sosial abad kesembilan belas, seperti misalnya Tocqueville dan Tonnies. Topik itu juga dalam dikotomi yang sangat umum antara masyarakat pra-industri dan masyarakat industri pada saat itu. Namun, teori khusus tentang masyarakat massa dikembangkan antara tahun 1920 dan 1960 dalam tiga arah utama, yakni:

- 1) Sejumlah penulis di Inggris terutama kritikus sastra seperti T. S. Eliot dan F. R. Leavis membahas hilangnya keunggulan dalam sastra dan kebudayaan secara umum serta hilangnya kesantunan publik. Pada dasarnya, reaksi mereka konservatif terhadap masyarakat kapitalis. Pendapat mereka dipungut oleh sejumlah sosiolog, terutama Mannheim;

- 2) Anggota Mazhab Frankfut (Frankfurt School), khususnya setelah pelarian mereka dari Jerman masa Hitler ke Amerika Serikat, lebih menganalisa aspek politik, dan bukan budaya, masyarakat massa. Argumen mereka adalah bahwa dengan memproduksi masyarakat massa, kapitalisme menciptakan kondisi bagi manipulasi politik massa oleh elit yang berkuasa. Pemikiran ini menunjukkan respons yang agak sosialis terhadap masalah sosial dan internasional pada periode antar-perang; dan
- 3) Dalam memanfaatkan konsep masyarakat massa, beberapa penulis Amerika melihatnya secara lebih positif. Menurut E. Shils (1962), misalnya, massa sedang terseret ke dalam partisipasi politik, sehingga membuat politik elitis lebih sulit.

Beberapa penelitian awal mengenai media massa dipengaruhi oleh teori masyarakat massa, terutama dari Mazhab Frankfurt: bahwa penonton dianggap relatif terdiferensiasi dan mudah dipengaruhi (atau dimanipulasi) oleh program-program. Namun, saat ini konsep masyarakat massa tidak terlalu berpengaruh dalam sosiologi, karena: (1) masyarakat kontemporer tidak dianggap sebagai massa yang terdiferensiasi melainkan dianggap tersusun oleh kelompok-kelompok yang bersaing; (2) Kelas-kelas yang subordinat tidak dimanipulasi oleh elit. Mereka mampu menunjukkan ketidaksepakatan; dan (3) Belum ada kerusakan dalam hubungan keluarga dan komunitas (Abercrombie, Hill & Turner, 2010: 335).

Menurut Macdonald (2009: 496), masyarakat massa (*mass society*) adalah suatu masyarakat dimana kemakmuran dan birokrasi telah melemahkan ikatan sosial tradisional. Masyarakat massa (*mass society*) yakni suatu gambaran yang dihubungkan dengan masyarakat modern, masyarakat era industri (*industrial era*). Tonnies, Durkheim, dan Weber menggambarkan ide tentang pemahaman modernitas sebagai kemunculan masyarakat massa melalui pendekatan fungsionalisme-struktural (*the structural-functional approach*). Gambaran masyarakat sebagai massa diambil dari bentuk dalam abad ke-19, yang mengacu kepada periode revolusi industri (*the industrial revolution*) dengan kecenderungan meratakan dan merusak tatanan nilai-nilai tradisional dan aristokratis (*traditional and aristocratic values*).

Istilah modernitas (*modernity*) menggambarkan atribut tertentu masyarakat modern. Banyak pemikiran sosiologi didasarkan pada asumsi mengenai pembagian tajam antara masyarakat pra-moderen dan modern. Ada banyak perdebatan mengenai kualitas kedua jenis masyarakat itu serta mengenai kapan masyarakat Barat menjadi modern. Modernitas dibedakan berdasarkan aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya. Sebagai contoh, masyarakat modern biasanya memiliki ekonomi kapitalis industrial, organisasi politik demokrasi, dan struktur sosial berupa pembagian ke dalam kelas-kelas sosial. Ada ketidaksepakatan mengenai aspek budaya yang termasuk di antaranya adalah kecenderungan fragmentasi pengalaman, komodifikasi (*commodification*) dan rasionalisasi (*rationalization*) semua aspek kehidupan, dan percepatan laju hidup sehari-hari. Modernitas membutuhkan sistem-sistem baru berupa pengintaian (*surveillance*), disiplin dan kontrol individu. Modernitas menekankan pengaturan dan pengukuran kehidupan sehari-hari. Yang termasuk nilai-nilai modernitas adalah aktivisme, universalisme dan netralitas afektif (Abercrombie, Hill & Turner, 2010: 355-356).

Studi mengenai gambaran masyarakat sebagai massa dapat dilacak sebagai berikut: Pada awal abad ke-19 para teoritis politik (*political theorist*) seperti Alexis de Tocqueville menggunakan terminologi *mass society* dengan memusatkan perhatian terhadap elit dalam proses pergantian susunan politik (*body politic*) pada masyarakat Barat ketika revolusi Perancis (*the French Revolution*) terjadi. Selanjutnya, pada akhir abad ke-19, Emile Durkheim menghubungkan masyarakat sebagai massa melalui konsep *atomistic individuals*. Atomisme merupakan gagasan bahwa masyarakat sebaiknya dilihat sebagai entitas-entitas yang tersusun dari unit-unit individual (atom), yaitu individu yang berinteraksi. Dalam pandangan semacam itu, struktur dan organisasi sosial tereduksi menjadi tindakan individual. Teori atomistik yang ekstrem berpendapat bahwa sosiologi hanya dapat berjalan dengan meneliti individu-individu dan makna yang diberikan pada tindakan mereka dan bukan dengan analisis keseluruhan struktur sosial. Atomisme adalah lawan dari holisme (*holism*) dalam sosiologi (Abercrombie, Hill & Turner, 2010: 30). Sedangkan pada abad ke-20, sejumlah neo-marxis seperti penganut *the Frankfurt School*, memusatkan kajian tentang masyarakat massa (*mass society*) yang dihubungkan dengan masyarakat dimana individu mengalami keterasingan secara

bersama oleh budaya industri (*culture industry*) sebagai akibat kapitalisme interes (*interest of capitalism*).

Sejumlah teoritisi konservatif pada abad ke-20 mengkritik masyarakat massa (*mass society*) dalam perspektif yang beragam. Misalnya, Jose Ortega Gasset, mengeluhkan penurunan tentang *high culture* dalam masyarakat massa (*mass society*). Sementara, Beck dalam karyanya yang berjudul *Risk Society* berpendapat bahwa perkembangan masyarakat industri yang lebih jauh lagi akan membawa sejumlah konsekuensi. Keahlian dalam hal teknologi saat ini telah digunakan secara refleksif, yaitu mengurangi efek pengaplikasian ilmu dan teknologi yang telah digunakan sebelumnya. Jauh lebih penting dari hal ini, terdapat peningkatan perkembangan dari proses individualisasi yang telah membuat manusia semakin terpisah dari ikatan tradisional, yaitu keluarga, lokalitas, atau kelas sosial. Mereka dapat terhubung bersama-sama hanya melalui hubungan yang bersifat pasar (Abercrombie, Hill & Turner, 2010: 463).

2. Masyarakat Massa (*Mass Society*) dan Teori tentang Politik Massa (*The Theory of Mass Politics*)

Menurut Gusfield (1962: 20), para analis masyarakat massa (*mass society analysts*) memandang sistem sosial modern secara signifikan berbeda dari masyarakat awal dan masyarakat non-industrial. Namun terdapat kesamaan secara umum ketika menggambarkan tentang intisari (*core*) dari masyarakat massa (*mass society*), yakni menunjukkan lemahnya asosiasi-asosiasi primer dan kelompok-kelompok lokal. Secara umum, hubungan birokrasional dalam organisasi skala besar telah menggantikan sistem informal dari loyalitas (kesetiaan) dalam kelompok-kelompok kecil (*small group*) dan afiliasi-afiliasi lokal (*local affiliations*). Kondisi kesetaraan (*equalitarian*) dan ideologi telah melemahkan karakteristik sistem politik dan otoritas sosial dari masyarakat yang berjenjang (*stratified communities*). Inovasi teknologi telah memungkinkan suatu standar tingkat tinggi, baik dalam produksi maupun ide-ide.

Para teoritisi masyarakat massa (*mass society*) memandang bahwa kategori-kategori tradisional tentang analisis sosiologis, seperti: keluarga (*family*), kelas

(*class*), komunitas (*community*), identitas etnis (*ethnic identity*), dan sebagainya, telah kehilangan signifikansinya dalam masyarakat massa (*mass societies*). Sebuah masyarakat massa (*mass society*) adalah massa yang tidak berbentuk (*shapeless*), tanpa struktur (*structureless*), tidak dibedakan (*undifferentiated*). Politik massa (*mass politics*) menelusuri implikasi dari hilangnya diferensiasi ini untuk ikatan loyalitas terhadap institusi politik demokratis.

Para eksponen politik massa (*mass politics*) memberikan gambaran tentang keadaan modernitas Barat, masyarakat industrial sebagai masyarakat dimana seseorang tidak memiliki keterikatan dengan asosiasi-asosiasi primer atau sekunder. Hannah Arendt menulis bahwa karakteristik dari para pemimpin masyarakat massa bukanlah kebrutalan atau keterbelakangan, namun lebih karena adanya isolasi dan hilangnya hubungan sosial yang normal. Ekstremis politik yang ditunjukkan melalui gerakan anti demokrasi (*anti-democratic movements*), dipandang sebagai akibat dari konsekuensi-konsekuensi struktural dan psikologis atas suatu loyalitas politik untuk tujuan dan prosedur demokratis. Para pendukung pandangan ini berpendapat bahwa karakteristik struktural dari birokratisasi dan kesetaraan merusak fungsi-fungsi dari asosiasi-asosiasi primer dan sekunder dalam menanamkan nilai-nilai dan mentransmisikan norma-norma politik. Dalam masyarakat massa (*mass society*), asosiasi sekunder seperti sekolah (*school*), gereja (*church*), komunitas atau gabungan (*community or union*), beroperasi dalam gaya skala besar (*large-scale*). Tingkat dan identifikasi dengan elit organisasi menjadi berkurang, kehidupan anggota asosiasi bersifat peri-peri dan tangensial (pinggiran dan singgungan) saja. Tingkat mobilitas tinggi dan gaya hidup standar menghancurkan kelas ekonomi sebagai sumber penting motivasi dan ketertarikan pada peristiwa-peristiwa politik. Fungsi-fungsi institusi di bawah kondisi masyarakat massa (*mass society*) tidak menyentuh karakter dan nilai-nilai personal.

Kondisi disintegrasi dari masyarakat massa (*mass society*) diikuti oleh kondisi disorganisasi personal dari individu. Konsekuensi psikologis dari masyarakat massa (*mass society*) digambarkan oleh perasaan keterlepasan, kata kunci dari keadaan seperti ini adalah apa yang disebut dengan *alienation* (keterasingan). Alienasi (*alienation*) adalah keterasingan individu dari diri mereka sendiri dan orang lain. Pada mulanya, term ini memiliki makna filosofis dan religious, tetapi Marx

mentransformasikannya ke dalam konsep sosiologis dalam *Economic and Philosophical Manuscripts of 1844*. Menurut Marx, keterasingan berakar dalam struktur sosial yang menyangkal sifat esensi manusia. Ia percaya bahwa esensi manusia diwujudkan dalam kerja, aktivitas kreatif yang diselenggarakan dalam kerja sama dengan orang lain sehingga orang melakukan transformasi terhadap dunia di luar diri mereka sendiri. Proses produksi adalah “objektivikasi”, yaitu manusia membuat objek yang mengejawantahkan kreativitas manusia, namun merupakan entitas yang terpisah dari penciptanya. Alienasi muncul ketika setelah terobjektivikasi, manusia tidak lagi mengenali dirinya dalam produk yang terasing baginya, produk yang tidak lagi menjadi “miliknya” dan “berdiri berlawanan dengan dirinya sebagai kekuasaan otonom”. Namun, “objektivikasi” hanya menjadi alienasi pada keadaan sejarah kapitalisme tertentu. Pada masyarakat kapitalis, satu kelompok yaitu kaum kapitalis mengambil dan mengklaim produk yang diciptakan orang lain. Inilah awal mula alienasi. Marx melihat alienasi sebagai keadaan subjektif, sebagai perasaan orang atas keterasingan, dan sebagai kategori struktural yang menggambarkan penataan sosial dan ekonomi oleh kapitalisme.

Sejak diperkenalkan oleh Marx, pengertian sosiologis alienasi kehilangan telah digunakan untuk menggambarkan beragam fenomena. Termasuk di antaranya: perasaan terpisah dan gelisah terhadap masyarakat; perasaan bahwa ada keterpurukan moral dalam masyarakat; perasaan ketidakberdayaan di hadapan kukuhnya lembaga sosial, sifat organisasi sosial birokratik berskala besar yang impersonal dan nirkemanusiaan. Dua pengertian yang pertama ini lebih menyerupai konsep Anomie (anomi) Durkheimian daripada konsep alienasi Marx. Pengertian yang terakhir menggemakan sentiment Weber tentang kecenderungan birokratik masyarakat modern (Abercrombie, Hill, & Turner, 2010: 21).

Pada era 1950-an dan 1960-an, ilmuwan sosial Amerika menekankan aspek subjektif atau psikologis dari alienasi dengan mengabaikan struktur sosial. Ketika mereka mempertimbangkan kondisi-kondisi struktural, mereka mengabaikan sosiologi Marx akan kapitalisme. Seeman (1959) memisahkan berbagai fase psikologis yang ia ukur dengan skala sikap (*Attitude Scale*). Dimensi “ketidakberdayaan” alienasi mengacu pada perasaan bahwa seseorang tidak dapat mempengaruhi lingkungan sosialnya. “Ketidakberartian” adalah perasaan bahwa

sarana yang tidak sah dibutuhkan untuk meraih tujuan. “Isolasi” terjadi ketika orang merasa terasing dari norma dan nilai masyarakat. “Pengasingan-diri” merujuk pada ketidakmampuan untuk menemukan kegiatan yang berharga secara psikologis. Blauner (1964) menghubungkan dimensi-dimensi subjektif ini dengan berbagai tipe pekerjaan pada industri modern dan mengklaim bahwa teknologi produksi merupakan determinan utama dari alienasi. Ia mengklaim bahwa alienasi tidak terlalu dijumpai pada pekerjaan kriya kuno karena pekerja kriya punya kendali atas pekerjaannya, memiliki “seluruh” tugas yang bermakna, memiliki kesempatan untuk bersosialisasi dengan kolega di tempat kerja, dan menganggap bahwa pekerjaan bernilai secara psikologis.

Menurut Varma (1987: 421), di antara persoalan penting yang telah diidentifikasi para kritisi sosial Barat saat ini adalah persoalan antara suatu masyarakat kapitalis yang sangat terorganisasi dan suatu negara yang tersentralisasi dan menindas individu atas dasar keseragaman yang ketat. Masyarakat telah menjadi besar, rumit, dan sangat terorganisasi, dan basis organisasinya demikian berdaya guna. Manusia semakin dilihat sebagai produsen dan karena tujuan organisasi sosial dalam mana ia melaksanakan peranannya juga demikian luas dan rumit, maka hubungan-hubungan pribadi lalu kehilangan artinya.

B. *Relative Deprivation Theory* (Teori Deprivasi Relatif)

Relative Deprivation Theory, adalah teori yang lebih luas dan lebih umum daripada *Mass Society Theory*. Fokus dari *Relative Deprivation Theory* adalah alasan-alasan psikologis yang melatarbelakangi keputusan untuk membentuk atau terlibat dalam suatu gerakan sosial (*social movement*). Menurut Morrison (Locher, 2002: 254) terdapat beberapa kondisi sosial (*social conditions*) yang menyebabkan deprivasi relatif (*relative deprivation*) dalam suatu masyarakat. Jika kebanyakan orang-orang merasakan kondisi seperti ini, maka suatu gerakan sosial cenderung akan terbentuk.

Teori ini mengacu terhadap situasi dimana seseorang merasa memiliki kekurangan (kelemahan) dibandingkan dengan kelayakannya. Seseorang yang tidak memiliki makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang cukup, maka dia sedang

mengalami deprivasi absolut (*absolute deprivation*). Sementara jika seseorang merasa tidak cukup memiliki pakaian, sementara orang lain berganti-ganti merk yang terkenal, maka dia sedang mengalami suatu deprivasi relatif (*relative deprivation*).

Terdapat beberapa konsep yang terkait dengan dengan teori deprivasi relatif (*relative deprivation theory*), yakni: (1) *Relative deprivation*; (2) *Legitimate expectations*, dan (3) *Blocked expectations and discontent*. Penjelasaannya akan diuraikan di bawah ini.

1. Relative Deprivation:

Istilah *relative deprivation* dikemukakan oleh Samuel Stouffer (Rey & Raju, 1996: 579) dan Robert Merton (Locher, 2002: 254). Stouffer dan koleganya, menggunakan referensi *relative deprivation* (kekurangan relative) dalam studi sosial-psikologis (*socio-psychological study*) skala besar tentang militer Amerika Serikat selama Perang Dunia II. Namun, Runciman (Rey & Raju, 1996: 579) adalah orang pertama yang secara resmi mengkaitkan konsep *relative deprivation* terhadap beberapa isu penting.

Secara umum, terminologi *relative deprivation* digunakan untuk menggambarkan ketidakpuasan yang berasal dari suatu keyakinan bahwa ada sesuatu yang didapatkan kurang dari hak seharusnya didapatkan. Studi-studi dewasa ini, secara khusus banyak tertarik terhadap hipotesis bahwa ketidakpuasan sosial (*social discontent*) dimungkinkan sebagai hasil dari perbedaan antara persepsi tentang apa yang pantas dan kenyataannya.

Morrison (Locher, 2002: 254) mengidentifikasi *relative deprivation* kedalam dua jenis yang berbeda, yang dapat mendorong suatu gerakan sosial (*social movements*), yaitu: *decremental deprivation* dan *aspirational deprivation*. Suatu *decremental deprivation* terjadi dalam suatu situasi dimana orang meyakini bahwa peluangnya secara tiba-tiba menjadi berkurang. Misalnya, dalam peristiwa resesi keuangan (*financial recession*), orang meyakini bahwa kesempatan untuk memperoleh gaji yang cukup menjadi hilang atau berkurang secara tiba-tiba. Sedangkan, *aspirational deprivation* adalah suatu deprivasi yang terjadi ketika

ambisi dan harapan orang (*people's expectation and ambition*) meningkat, tetapi peluang (kesempatan) untuk memenuhi ambisi dan harapan tersebut tidak ikut naik.

Suatu *decremental deprivation* cenderung membentuk gerakan konservatif dan kanan (*conservative and rightist movements*) yang dimaksudkan untuk merubah masyarakat kembali kepada cara-cara yang dulu (ketika kesempatan cukup luas). Gerakan ini bisa menjadi gerakan nasionalis atau gerakan fasis. Sementara, *aspiration deprivation* cenderung membentuk gerakan liberal dan kiri (*liberal and leftist movements*) yang bertujuan untuk melakukan suatu perubahan baru dalam masyarakat secara progresif (untuk menciptakan peluang-peluang baru). Model gerakan ini bisa menjadi suatu gerakan revolusioner (*revolutionary movements*).

Runciman (Rey & Raju, 1996: 580) membagi situasi *relative deprivation* ke dalam dua kategori, yakni: (1) *egoistic relative deprivation*; dan (2) *fraternal relative deprivation*. *Egoistic relative deprivation* secara umum mengacu kepada kekurangan (deprivasi) yang dirasakan oleh seorang individu sebagai hasil perbandingan antara kondisi dia dengan kondisi orang lain. Sedangkan *fraternal relative deprivation* secara umum mengacu kepada posisi suatu kelompok sendiri (*one's own-group*) dalam relasinya dengan kelompok yang lainnya (*other groups*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa situasi *fraternal relative deprivation* secara kuat berkorelasi dengan munculnya perilaku kolektif (*collective behavior*) dibandingkan dengan situasi *egoistic relative deprivation*. Sebagai contoh, Walker dan Mann (Rey & Raju, 1996: 580) dalam studinya menemukan bahwa *fraternal relative deprivation* berkaitan dengan aktivitas protes militan (*militant protest activities*), sementara *egoistic relative deprivation* lebih dekat hubungannya dengan munculnya stres individual (*individual stress*). Hasil penelitian Walker dan Mann ini konsisten dengan apa yang dikemukakan oleh Tajfel dalam teori identitas sosial (*the social identity theory*) yang mengindikasikan bahwa antara perilaku antar-personal (*interpersonal behavior*) dan perilaku antar-kelompok (*intergroup behavior*) secara kualitatif berbeda pada level sosial-psikologis (*socio-psychological level*).

Menurut Abercrombie, Hill & Turner (2010: 469-470), konsep *relative deprivation* diformulasikan oleh Stouffer, dkk., (1949) dan dikembangkan oleh Merton (1957), menyatakan bahwa orang biasanya mengalami perasaan bahwa

dirinya kekurangan ketika mereka membandingkan situasi mereka yang tidak menguntungkan dengan orang atau kelompok lain. Perbandingan ini dapat dilakukan dengan orang dalam lingkungan interaksi mereka ataupun orang di luar interaksi mereka; yang menjadi permasalahan adalah kelompok rujukan (*reference group*) yang dipilih orang atau kelompok untuk mereka jadikan fokus perbandingan. Penekanan pada kerangka subjektif orang atas referensi yang mereka pilih merupakan tambahan berguna bagi studi tentang ketidakberdayaan (*deprivation*).

Walker & Smith (2001) menyatakan bahwa *relative deprivation* adalah suatu pengalaman dari seseorang yang merasakan kekurangan sesuatu padahal dia meyakini bahwa sesuatu tersebut berhak untuk didapatkannya (dimilikinya). Hal ini mengacu kepada ketidakpuasan yang dirasakan orang-orang ketika mereka membandingkan posisi mereka terhadap orang lain dan memahami bahwa mereka memiliki kekurangan dibandingkan yang lainnya (Bayertz, 1999). Menurut Schaefer (2008), suatu *relative deprivation* didefinisikan sebagai suatu pengalaman sadar tentang perbedaan negatif antara harapan-harapan (*expectations*) dan kenyataan-kenyataan yang ada (*actualities*). Istilah *relative deprivation* juga digunakan di dalam ilmu-ilmu sosial untuk menggambarkan perasaan (*feelings*) atau mengukur deprivasi ekonomi, politik, atau sosial. Konsep tentang *relative deprivation* memiliki konsekuensi yang penting baik terhadap perilaku (*behavior*) dan sikap (*attitudes*), termasuk perasaan terhadap stress (*feeling of stress*), sikap politik (*political attitudes*) dan keterlibatan dalam tindakan kolektif (*participation in collective action*).

Para ilmuwan sosial, khususnya ilmuwan politik dan ilmuwan sosiologi, mencatat bahwa *relative deprivation* khususnya *relative deprivation* temporal sebagai penyebab potensial bagi munculnya gerakan sosial (*social movements*) dan penyimpangan (*deviance*), mengarahkan kepada situasi ekstrim untuk terjadinya kekerasan politik (*political violence*) seperti: kekerasan (*riots*), terorisme (*terrorism*), perang sipil (*civil wars*) dan jenis-jenis lainnya dari penyimpangan sosial, termasuk kriminalitas (*crime*). Sosiolog Amerika, Robert K. Merton, merupakan sosiolog yang pertama kali menggunakan konsep tentang *relative deprivation* untuk memahami penyimpangan sosial (*social deviance*), dimana dia menggunakan konsep tentang anomie dari sosiolog Perancis, Emile Durkheim, sebagai titik awal pembahasannya.

Rey dan Raju (1996: 579) menyatakan bahwa beberapa teoritis memiliki pandangan bahwa faktor kunci dalam menghasilkan protes sosial dan politik (*political and social protest*) adalah perasaan tentang *relative deprivation* (kekurangan relative).

2. *Legitimate Expectations* (Harapan Legitimasi):

Kunci dari *relative deprivation* adalah *legitimate expectations*, yang dikembangkan oleh Morrison (Locher, 2002: 255). Individu-individu tidak hanya sekedar menginginkan sesuatu, tetapi mereka yakin bahwa mereka memiliki hak atas suatu harapan dan layak untuk mendapatkannya. Ketika orang-orang meyakini bahwa harapan-harapan mereka sebagai sesuatu yang sah (*legitimate*), maka suatu deprivasi (*deprivation*) akan terjadi apabila harapan-harapan mereka itu tidak terpenuhi. Dalam kaitannya dengan bentuk gerakan sosial (*social movements*), maka orang-orang harus menyadari tujuan dari kelompok, meyakini bahwa tujuan gerakan dapat memungkinkan untuk terpenuhinya keinginan dan harapan orang-orang.

3. *Blocked Expectation and Discontent* (Harapan dan Ketidakpuasan yang Dihambat):

Tahap berikutnya dari proses deprivasi adalah apa yang disebut *blocked expectation and discontent* (harapan dan ketidakpuasan yang dihambat). Apabila orang-orang dapat memperoleh keinginan-keinginannya dengan mudah, maka mereka tidak memerlukan sebuah gerakan sosial (*social movement*). Sedangkan apabila mereka meyakini bahwa jalannya merasa dihambat, maka mereka menjadi tidak bahagia dan merasa tidak terpenuhi kebutuhan dan harapannya. Dalam kondisi seperti ini, maka bisa memunculkan suatu gerakan sosial (*social movements*). Morrison (Locher, 2002: 256) mengemukakan suatu konsep yang disebut tipe khusus dari disonansi kognitif (*special type of cognitive dissonance*). Suatu *special type of cognitive dissonance* terjadi apabila orang-orang menginginkan (membutuhkan) sesuatu, yakin bahwa mereka memiliki hak untuk itu, dan yakin bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkannya. Hal ini membuat situasi yang tidak membahagiakan

dimana dalam situasi seperti ini orang mengalami disonansi kognitif (*cognitive dissonance*), keadaan psikologis terganggu, dan merasakan suasana tidak adil.

Kondisi masyarakat yang ditandai oleh suatu *relative deprivation* sangat memungkinkan untuk terjadinya gerakan sosial (*social movements*). Orang-orang yang mengalami *relative deprivation* setiap saat, maka harapan mereka tidak akan bisa terpenuhi. Apabila sejumlah orang memiliki suatu harapan yang sama dan mereka meyakini bahwa terjadi hambatan di masyarakat untuk memperolehnya, maka gerakan sosial (*social movement*) akan terjadi.

Morrison (Lecher, 2002;256) menyatakan bahwa terdapat beberapa kondisi struktural khusus yang dapat memunculkan suatu gerakan sosial (*social movements*), yaitu: *Pertama*, harus ada sejumlah populasi (orang-orang) yang cukup banyak dimana mereka mengalami suatu *relative deprivation*. *Kedua*, harus ada kedekatan interaksi, komunikasi, dan kedekatan fisik antara orang-orang dalam situasi yang sama. *Ketiga*, harus ada kesamaan peran dan status karena gerakan sosial mensyaratkan adanya kesamaan sosial antara orang-orang dalam suatu situasi yang sama. *Keempat*, suatu gerakan sosial sangat besar kemungkinannya untuk muncul pada masyarakat yang memiliki sistem stratifikasi yang kaku (*rigid*). *Kelima*, berkaitan dengan adanya berbagai kegiatan dari berbagai kelompok (asosiasi) sukarela di dalam masyarakat.

C. *The Value-Added Theory* (Teori Nilai Tambah)

Untuk dapat memahami bagaimana kondisi terjadinya suatu *collective behavior* (perilaku kolektif), maka bisa mengacu kepada teori yang dikembangkan oleh Neil J. Smelser, yakni *The Value-Added Theory* (Locher, 2002: 39). Pada tahun 1962, Neil J. Smelser menerbitkan apa yang dia sebut sebagai teori baru dan kontroversi (*new and controversial*) tentang perilaku kolektif (*collective behavior*). Smelser memfokuskan perhatian kepada kondisi struktur sosial yang menyebabkan terjadinya apa yang disebut sebagai *collective seizures* (serangan kolektif). Selanjutnya, Smelser juga menyatakan bahwa faktor yang berperan dalam *collective behavior* adalah faktor-faktor sosial, bukan faktor psikologis.

Menurut Locher (2002: 248), *the Value-Added Theory* yang dikembangkan oleh Smelser dapat digunakan untuk mengkaji tentang *social movements* sebagaimana juga diterapkan dalam mengkaji bentuk-bentuk perilaku kolektif (*collective behavior*) yang lainnya. *The value-added theory* berpandangan bahwa terjadinya suatu *social movements* memiliki kesamaan alasan dengan terjadinya perilaku kolektif (*collective behavior*) tipe lainnya.

Neil J. Smelser mengembangkan *the Value-Added Theory* sebagai kritik terhadap teori-teori sebelumnya. Fokus Smelser terhadap kondisi struktur sosial (*social structural*) yang disebutnya sebagai *collective seizures* (kekejangan kolektif). Smelser berpendapat bahwa faktor-faktor yang mendorong munculnya perilaku kolektif adalah bersifat sosial, bukan bersifat psikologis. *The Value-Added Theory* berakar dari fungsionalisme, yang berasumsi bahwa segala sesuatu akan bertahan lama di dalam masyarakat apabila memberikan keuntungan atau memiliki fungsi bagi masyarakat. Berdasarkan perspektif ini, Smelser menyatakan bahwa suatu perilaku kolektif memiliki fungsi sebagai *katup pengaman* dari ketegangan atau tekanan dalam masyarakat. Ketika ketegangan (*tension*) eksis, maka perilaku kolektif juga akan muncul (Locher, 2002: 39).

Dasar pernyataan yang paling penting dari teorinya Smelser dapat disimpulkan sebagai berikut (Locher, 2002: 39-40):

- (1) *Collective behavior* tidak disebabkan oleh kekuatan-kekuatan misterius, tapi jelas dapat diidentifikasi merupakan dorongan determinan sebuah peristiwa kolektif.
- (2) *Collective behavior* tidak disebabkan jiwa (psikologi) dari partisipan, tetapi oleh kondisi di dalam struktur sosial, organisasi, dan seting spesifik (khusus).
- (3) *Collective behavior* didorong oleh ketegangan yang dialami oleh partisipan dalam seting sosial. Tindakan perilaku yang tidak biasa dilakukan partisipan, sebagai pelepasan dan pengurangan ketegangan mereka. Perilaku yang bersifat tidak normatif, dilembagakan, atau perilaku resmi.
- (4) Terdapat beberapa faktor penentu (determinan) untuk bisa terjadinya suatu *collective behavior*. Faktor-faktor penentu tersebut meliputi: *structural*

conduciveness, structural strain, generalized belief, precipitating factors, mobilization of participants, dan social control.

Selanjutnya, Smelser melalui *The Value-Added Theory* menegaskan tentang Enam determinan dari *collective behavior* tersebut sebagai *the value-added process* (Locher, 2002: 43), yakni:

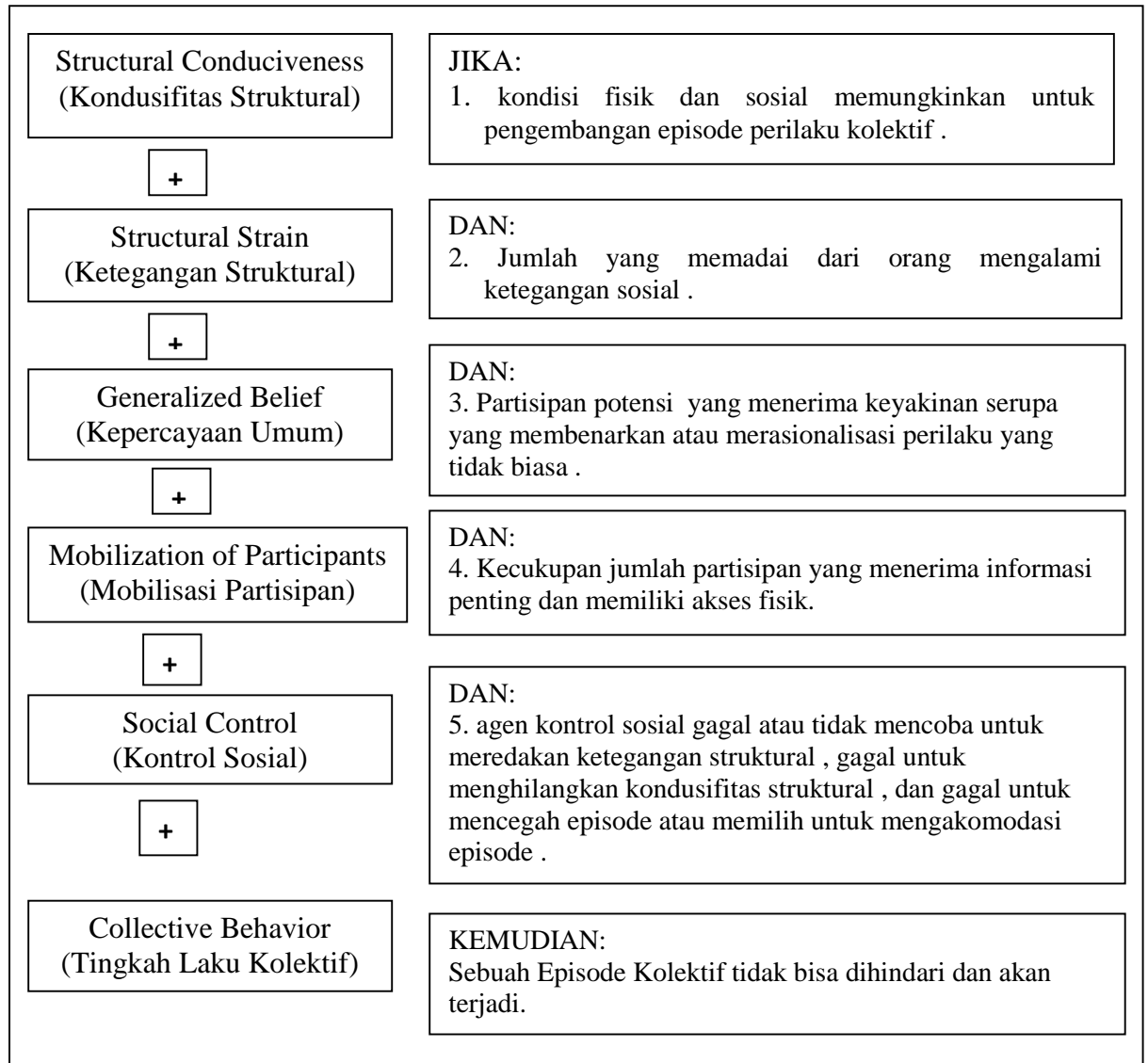
- (1) *Structural Conduciveness*;
- (2) *Structural Strain*;
- (3) *Growth and spread of generalized belief*;
- (4) *Precipitating Factors*;
- (5) *Mobilization of Participants for Action*, dan
- (6) *The Operation*.

Menurut Smelser (Spencer, 1982: 491), keterkaitan antara ke-enam faktor determinan *collective behavior*, dapat dijelaskan sebagai berikut:

*If structural conduciveness exists,
And if structural strain exists,
And if an appropriate generalized belief exist,
And if precipitating factors occur,
And if the participants can be mobilized fo action,
And if social control fails to stop the event,
Then collective behavior will occur.*

Dalam bentuk gambaran lainnya, perkembangan perilaku kolektif (*collective behavior*) dari Smelser dapat juga digambarkan sebagai berikut:

Bagan 4. 1. :
Perkembangan Perilaku Kolektif (*Collective Behavior*)
menurut Perspektif *Value-Added Theory*



Sumber: Locher, 2002: 40.

1. Komponen-Komponen Tindakan Sosial (*Components of Social Action*)

Selain mengemukakan tentang Enam faktor determinan dari *collective behavior*, Smelser juga mengemukakan tentang komponen-komponen dari *social action* (*collective behavior*). Menurut Smelser, terdapat Empat komponen dalam *social action*, yakni: (a) *Values*, (b) *Norms*, (c) *Orgnized individual motivation in roles and*

collectivities, dan (d) *Situational facilities*. Perbedaan bentuk dari *collective behavior* berkaitan dengan empat komponen tersebut (Locher, 2002: 41):

a. *Values* (Nilai-Nilai):

Values (nilai-nilai) menyediakan sumber umum legitimasi untuk perilaku sosial (*social behavior*). Dalam setiap masyarakat, perilaku dinilai pada tingkat yang paling umum menurut nilai-nilai masyarakat (*societal values*). Jika suatu perilaku bertentangan dengan nilai-nilai sosial, maka perilaku ini dipandang “terkutuk”. Apabila perilaku dipandang bertautan dengan nilai-nilai sosial, maka perilaku ini kemudian akan diterima.

b. *Norms* (Norma):

Norman memberikan panduan khusus tentang bagaimana nilai-nilai ini harus ditetapkan. Mereka adalah aturan formal dan informal, dan hukum yang diharapkan diikuti oleh kita.

c. *Individual Mobilization of Motivation* (Mobilisasi motivasi individu):

Smelser menggunakan ungkapan: “Mobilisasi motivasi individu untuk tindakan terorganisir dalam peran dan kolektivitas” untuk mengacu kepada komponen ketiga dari tindakan sosial ini. Masyarakat menciptakan organisasi sosial tertentu untuk memenuhi fungsi-fungsi tertentu. Organisasi sosial (*social organization*) dan struktur sosial (*social structure*) mempengaruhi dan bahkan mendikte perilaku individu.

d. *Situational Facilities* (Fasilitas-Fasilitas Situasional):

Situational Facilities (Fasilitas-Fasilitas Situasional), merupakan komponen keempat tentang perilaku sosial (*social behavior*), adalah sarana dan hambatan yang memfasilitasi atau menghambat pencapaian tujuan. Hal ini termasuk alat-alat (*tools*), keterampilan-keterampilan (*skills*), dan pengetahuan (*knowledge*).

Nilai-nilai (*values*) membimbing apakah kita seperti yang diinginkan masyarakat, norma membimbing tentang bagaimana cara kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, motivasi individu membimbing struktur atau organisasi yang

kita ciptakan dalam rangka mencapai apa yang kita inginkan, dan fasilitas situasional membimbing bagaimana agar kita sukses dalam mencapai apa yang kita inginkan.

Dalam setiap tindakan (*any action*) yang dianalisis oleh sosiolog, Smelser mengajukan suatu pertanyaan tentang: Nilai-nilai apa yang melegitimasi tindakan ini? Apakah norma-norma tetap terkoordinasi dan relatif bebas konflik? Dengan cara apa tindakan distruktur ke dalam peran dan organisasi? Dan jenis fasilitas situasi apa yang tersedia?

Keempat komponen perilaku ini adalah penting sejauh komponen-komponen tersebut membentuk dasar sebagaimana konsepsi Smelser tentang perilaku kolektif (*collective behavior*). Smelser berpendapat bahwa perilaku kolektif (*collective behavior*) dapat dikelompokkan dan diklasifikasikan ke dalam kerangka konsepsi yang sama sebagai setiap perilaku sosial (*social behavior*). Perbedaan yang utama adalah bahwa perilaku kolektif (*collective behavior*) berada di luar harapan normatif. Perilaku kolektif (*collective behavior*) terjadi ketika ketegangan yang diberikan pada salah satu atau lebih dari empat komponen tindakan dan cara yang mapan untuk meredakan ketegangan tidak tersedia. Perilaku kolektif (*collective behavior*) setiap saat akan terjadi jika terjadi ketegangan (*strain*) dalam nilai-nilai masyarakat (*societal values*), norma-norma, organisasi sosial, atau sumberdaya (*resources*).

2. Proses Nilai Tambah (*The Value-Added Process*).

Dalam formulasi Smelser (Locher, 2002: 43; Zanden, 1988: 571572), terdapat enam faktor determinan (penentu) dari perilaku kolektif (*collective behavior*). Keenam faktor determinan ini adalah: (1) *Structural Conduciveness* (Kondusifitas Struktural), (2) *Structural Strain* (Ketegangan Struktural), (3) *Growth and spread of a generalized belief* (Perkembangan dan penyebaran Kepercayaan Umum), (4) *Precipitating factors* (Faktor-faktor Pencetus), (5) *Mobilization of participants for action* (Mobilisasi partisipan untuk aksi), dan (6) *the Operation of Social Control* (Operasi dari Kontrol Sosial).

Uraian penjelasan keenam faktor determinan perilaku kolektif (*collective behavior*) tersebut adalah sebagai berikut:

(1) *Structural Conduciveness* (Kondusifitas Struktural):

Faktor determinan pertama dari perilaku kolektif (*collective behavior*) adalah kondusifitas struktural (*structural conduciveness*). Hal ini mengacu kepada setiap faktor dalam lingkungan sosial dan/atau lingkungan fisik yang memungkinkan terjadinya perilaku kolektif. Determinan ini menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya perilaku kolektif, akan tetapi peristiwa perilaku kolektif tidak bisa terjadi hanya karena disebabkan oleh faktor kondusifitas struktural secara sendirian.

Masing-masing bentuk dari perilaku kolektif (*collective behavior*) memiliki faktor kondusifitas struktural (*structural conduciveness*) sendiri. Faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya suasana *panic*, tidak sama dengan faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya “kegilaan konsumen” (*consumer craze*). Untuk terjadinya suatu kerusuhan (*riots*), sebagai contoh, harus didahului adanya sejumlah orang yang di tempat yang sama dalam waktu yang sama. Sebuah lapangan yang kosong (*cornfield*) tidak menjadi komponen dasar yang penting dari kondusifitas struktural (*structural conduciveness*) yang memungkinkan suatu kerusuhan (*riots*) terjadi. Apabila, untuk beberapa alasan, ribuan orang berkumpul di suatu lapangan untuk mendengarkan seorang pembicara (*speaker*), maka salah satu komponen dasar dari kondusifitas struktural (*structural conduciveness*), yakni berkumpulnya sejumlah orang, telah terpenuhi. Setiap faktor sosial atau fisik (*social or physical factors*) yang memungkinkan terjadinya setiap bentuk dari perilaku kolektif (*collective behavior*) merupakan bagian dari kondusifitas struktural (*structural conduciveness*). Faktor determinan (penentu) ini bisa muncul di dalam banyak tempat di hampir setiap waktu. Semakin besar faktor-faktor dari kondusifitas struktural (*structural conduciveness*) muncul, maka akan semakin besar pula kemungkinan perilaku kolektif (*collective behavior*) terjadi. Meskipun demikian, tidak ada peristiwa kolektif (*collective behavior*) yang akan terjadi hingga faktor-faktor determinan yang lainnya muncul.

Beberapa kondusifitas struktural (*structural conduciveness*) muncul pada saat orang-orang berkumpul atau berkomunikasi. Bentuk khusus dari perilaku kolektif (*collective behavior*) dimungkinkan memiliki berbagai variasi yang berbeda dari

suatu situasi ke situasi yang lainnya. Beberapa bentuk dari perilaku kolektif (*collective behavior*) seperti *lynchings*, *riots*, dan *panic*, mensyaratkan keberadaan orang-orang di suatu tempat yang sama dalam waktu yang bersamaan, sementara bentuk perilaku kolektif (*collective behavior*) yang lainnya, seperti *fads*, *social movements*, dan *crazes*, tidak. Beberapa bentuk perilaku kolektif (*collective behavior*) memungkinkan untuk terjadi di seting perkotaan, sementara beberapa yang lainnya memungkinkan untuk terjadi di sekitar pedesaan.

(2) *Structural Strain* (Ketegangan Struktural):

Perilaku kolektif (*collective behavior*) menarik karena merupakan perilaku yang tidak normal. Kadang-kadang orang-orang melakukan sesuatu yang biasanya tidak mereka lakukan, dalam situasi dimana perilaku itu tidak diharapkan terjadi. Menurut Smelser, munculnya perilaku yang tidak biasanya terjadi ini didorong oleh faktor-faktor sosial. Ketegangan struktural (*structural strain*), yang merupakan determinan kedua dari perilaku kolektif (*collective behavior*), mendorong partisipan untuk terlibat dalam perilaku yang tidak biasa seperti ini. Setiap hal yang menyebabkan orang-orang stress, tekanan (*tension*), atau kecemasan (*anxiety*), maka akan memungkinkan mereka untuk melakukan sesuatu yang biasanya tidak dilakukan. Perilaku kolektif (*collective behavior*) menjadi sangat mungkin terjadi apabila suatu ketegangan (*strain*) yang disebabkan oleh ambiguitas (*ambiguities*), privasi (*deprivations*) konflik (*conflicts*), atau perbedaan (*discrepancies*) yang terjadi secara bersamaan dengan faktor-faktor kondusifitas yang lainnya. Ketegangan (*strain*) itu sendiri tidak dapat menyebabkan munculnya perilaku kolektif (*collective behavior*), akan tetapi apabila ketegangan tersebut kompatibel dengan kondusifitas struktural (*structural conduciveness*), maka bahan dasar untuk munculnya suatu perilaku kolektif (*collective behavior*) telah dirakit.

Kecemasan (*anxiety*) merupakan bentuk khusus dari ketegangan struktural (*structural strain*) yang sangat memungkinkan untuk terjadinya suatu perilaku kolektif (*collective behavior*). Smelser mencatat bahwa meskipun orang-orang yang berada di dalam situasi stress (tekanan) dapat menyebabkan munculnya perilaku kolektif (*collective behavior*), namun Smelser berpendapat bahwa kecemasan

(*anxiety*) akan menyebabkan munculnya berbagai variasi dari perilaku. Suatu kecemasan (*anxiety*) yang disebabkan oleh depresi ekonomi akan menjadi pemicu bagi munculnya berbagai bentuk perilaku kolektif (*collective behavior*), seperti: *fads*, *crazes*, *panics*, *riots*, *religious revivals*, dan *social movements*.

(3) *Generalized Belief* (Kepercayaan Umum):

Tahap yang krusial munculnya suatu perilaku kolektif (*collective behavior*) adalah bentuk dari kepercayaan umum (*generalized belief*). Aktor-aktor potensial harus bisa menjelaskan tentang definisi situasi yang menyebabkan suatu tindakan khusus muncul, bahwa hal tersebut logis, rasional, diinginkan (*desirable*), atau sesuatu yang tidak bisa dihindari (*unavoidable*). Partisipan suatu perilaku kolektif (*collective behavior*) merasa percaya bahwa apa yang mereka lakukan dipandang bisa mengeliminir atau mengurangi (*eliminate or reduce*) suatu ketegangan dan kecemasan (*strain and anxiety*) yang mereka rasakan.

Perkembangan dan penyebaran dari kepercayaan umum (*generalized belief*) merupakan hal yang sangat krusial bagi peristiwa kolektif. Kepercayaan umum (*generalized belief*) merupakan determinan yang memiliki potensi untuk terjadinya suatu pola perilaku. Selanjutnya, Smelser (Locher, 2002: 47) membuat daftar tentang lima tipe spesifik dari kepercayaan umum (*generalized belief*), dimana setiap tipe tersebut menuntun kepada munculnya berbagai bentuk perilaku kolektif (*collective behavior*) yang berbeda, dan memberikan justifikasi atau rasionalisasi dalam pikiran partisipan. Tipe-tipe dari kepercayaan umum (*generalized belief*) tersebut adalah:

- (1) *Hysterical beliefs* (Kepercayaan Histeris), yakni mentransformasikan suatu situasi yang ambigu ke dalam suatu ancaman yang spesifik (*specific threat*).
- (2) *Wish-fulfillment beliefs* (Kepercayaan Pemenuhan-Keinginan), yakni mereduksi situasi ambigu dengan memproduksi apa yang dipercaya sebagai solusi efektif dalam mengatasi masalah.
- (3) *Hostile beliefs* (Keyakinan Bermusuhan), memiliki kesamaan dengan *Wish-fulfillment beliefs*, kecuali bahwa tindakan yang diperlukan untuk

memperbaiki masalah tersebut didalamnya termasuk juga merubah agen atau objek yang dipersepsi sebagai ancaman atau kendala.

(4) *Norm-oriented beliefs* (Kepercayaan Berorientasi Norma), yakni suatu pandangan untuk mengganti atau memperbaharui dan memperkuat suatu struktur normatif.

(5) *Value-oriented beliefs* (Kepercayaan Berorientasi Nilai), yakni suatu pandangan untuk mengganti sistem nilai yang mengancam.

(4) *Precipitating Factors* (Faktor-Faktor Pencetus):

Smelser menyatakan bahwa *Precipitating Factors* (Faktor-Faktor Pencetus), merupakan tahap determinan berikutnya dari perilaku kolektif (*collective behavior*). Beberapa jenis dari letupan suatu kejadian merupakan awal dari kemunculan suatu peristiwa. Misalnya, terjadinya kerusuhan dalam suatu demonstrasi mahasiswa karena ada mahasiswa yang dipukul oleh polisi, maka terjadinya pemukulan ini merupakan faktor pencetus munculnya peristiwa kerusuhan.

(5) *Mobilization of Participants* (Mobilisasi Partisipan):

Tahap terakhir dari *the value-added process* tentang perilaku kolektif (*collective behavior*) adalah adanya mobilisasi actual dan tindakan organisasi. Dalam situasi dimana suatu *structural conduciveness*, *strain*, dan *generalized belief* eksis, maka untuk dapat terjadinya suatu tindakan kolektif hanya tinggal melakukan proses mobilisasi. Perilaku dari para pemimpin (*leaders*) merupakan aspek yang penting dalam tahap mobilisasi ini. Mobilisasi partisipan menyangkut baik dalam hal tindakan individu partisipan itu sendiri maupun dalam hal mendorong kemampuan orang-orang untuk turut serta mengambil bagian dalam kejadian. Orang-orang tidak akan bisa terlibat dalam suatu perilaku kolektif (*collective behavior*) jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk memahami dimana tindakan itu harus dilakukan.

(6) *Social Control* (Kontrol Sosial):

Dalam proses perilaku kolektif (*collective behavior*), *social control* (kontrol sosial) lebih banyak berfungsi sebagai penentu-kontra (*counter-determinant*). Tindakan dari agen kontrol sosial formal dan informal (*formal and informal social control*) yang terjadi pada setiap tahapan proses akan mampu mencegah terjadinya peristiwa kolektif. Agen kontrol sosial di dalamnya bisa meliputi: polisi (*police*), pengadilan (*courts*), otoritas keagamaan (*religious authorities*), pemimpin masyarakat (*community leaders*), dan sebagainya.

D. Perspektif Teori Dominasi Kelas dan Teori Korporatokrasi

Menurut Lovett (2001: 99-100), pada umumnya dominasi mengacu kepada suatu jenis khusus dari relasi antara orang-orang dan kelompok. Dalam dominasi, harus terdapat beberapa orang atau kelompok sebagai agen dominasi, harus terdapat orang atau kelompok yang berbeda sebagai subjek dominasi, dan harus terdapat suatu keadaan tertentu antara dua pihak, yakni agen dan subjek, yang bisa digambarkan sebagai situasi dan kondisi *dominating*. Konsep dominasi dapat dikonstruksi dari tiga elemen, yakni: (1) kondisi kekuasaan yang tidak seimbang (*the imbalance of power condition*); (2) kondisi ketergantungan (*the dependency condition*); dan (3) kondisi ketidakhadiran atau ketidakpatuhan atas aturan (*the absence of rules condition*).

Konsep tentang dominasi dapat dipahami dari pandangan beberapa tokoh teori kritis, seperti Karl Marx, Max Weber, Herbert Marcuse, dan Jurgen Habermas. Karl Marx mengembangkan teori dominasi kelas, Max Weber mengembangkan teori dominasi birokrasi, Herbert Marcuse mengembangkan teori dominasi teknokratis, dan Jurgen Habermas mengembangkan teori dominasi budaya (Suka, 2012: 43-49). Selain tokoh teori kritis tersebut, Scott (1990: 198) juga menjelaskan tentang tiga bentuk dominasi, yakni: dominasi material (*material domination*), dominasi status (*status domination*), dan dominasi ideologis (*ideological domination*). Dalam konteks penelitian ini, peneliti didasarkan analisis dominasi berdasarkan teori dominasi kelas dari Karl Marx.

Memahami bagaimana perspektif Marx tentang dominasi, tidak bisa dilepaskan dari penjelasan Marx tentang negara. Analisis Marx tentang negara sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan para filsuf pendukung liberalisme, seperti Hobbes, Locke dan Rousseau. Marx percaya bahwa eksistensi masyarakat mendahului adanya negara, namun ia tidak setuju dengan analisis kaum liberal yang menolak realisasi negara jika negara hanya mengekang kebebasan. Marx justru menganggap eksistensi negara diakibatkan oleh adanya ketidakberesan yang sifatnya fundamental dari masyarakat. Ketidakberesan itu bersumber pada proses produksi masyarakat yang tidak adil, dimana terdapat pembagian kelas, antara mereka yang memiliki (borjuis) dan mereka yang tidak punya alat produksi (proletar). Menurut Marx, negara tidak mengabdikan kepada kepentingan seluruh masyarakat, melainkan hanya melayani kepentingan kelas-kelas sosial tertentu saja, menjadi alat suatu kelas dominan untuk mempertahankan kedudukan mereka (Patria dan Arief, 1999: 175-176).

Marx mengembangkan teorinya tentang dominasi kelas. Menurut Marx, masyarakat yang membentuk negara, dan masyarakat pula yang dibentuk oleh cara produksi yang dominan dan hubungan-hubungan produksi yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, negara merupakan ekspresi politik dari struktur kelas yang melekat dalam produksi. Dalam masyarakat ber-kelas seperti masyarakat kapitalis, negara didominasi oleh kaum borjuis, sehingga negara merupakan ekspresi politik dari kelas dominan ini (Patria dan Arief, 1999: 17-18).

Dalam rumusan Marx yang terkenal, “negara adalah panitia penyelenggara kepentingan kelas borjuis”. Munculnya negara dalam masyarakat kapitalis akibat dari tidak terdamaikannya pertentangan kelas (antara borjuis dan proletar) dalam struktur masyarakat tersebut. Negara juga mengontrol perjuangan sosial dari kepentingan ekonomi yang berbeda, dimana kontrol tersebut dipegang oleh kelas yang kuat secara ekonomi dalam masyarakat. Dengan demikian, negara juga menjadi alat represif dari kelas yang berkuasa (Patria dan Arief, 1999: 177). Selain menjalankan kekuasaan represif, negara juga menjalankan kekuatan hegemoni yang mampu melanggengkan kekuasaannya, yakni kekuasaan kelas dominan. Maka, hegemoni selalu berhubungan dengan penyusunan kekuatan negara sebagai kelas diktator (Patria dan Arief, 1999: 18).

Dominasi kelas yang terjadi dalam masyarakat selanjutnya melahirkan bentuk dominasi baru berupa dominasi ideologi yang sengaja diciptakan oleh kelas dominan. Marx mendeskripsikan bahwa ketika kelas-kelas dominan dalam masyarakat mengembangkan dan mengambil alih bentuk-bentuk ideologi yang mengabsahkan dominasinya, maka pada saat yang sama kelas dominan tersebut mempunyai kendali atas sarana produksi intelektual, sehingga secara umum, gagasan pihak yang tidak mempunyai sarana produksi intelektual menjadi terakomodasi oleh sarana tersebut. Akhirnya, kesadaran dalam masyarakat ditentukan oleh kelas dominan. Lebih lanjut, Marx menilai bahwa kesadaran itu berakar dari praksis manusia yang pada gilirannya bersifat sosial. Jadi, bukan kesadaran yang menentukan eksistensi seseorang, tetapi kehidupan sosial yang menentukan kesadaran mereka (Suka, 2012: 44).

Konsep Marx tentang dominasi kelas kemudian dikembangkan oleh para pengikutnya, baik *Marxist* maupun *Marxian*. Misalnya pemikiran Gramsci tentang hegemoni yang berakar pada konsepsi fundamental Marx tentang negara (Patria dan Arief, 1999: 175). Konsep Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Pareto mengembangkan teori elit, dimana menurut Pareto (Varma, 1987: 2002) bahwa masyarakat pada kenyataannya terbagi dalam dua kategori, yakni: (1) sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah; dan (2) sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah. Dengan demikian, menurut Pareto, masyarakat terdiri dari dua kelas, yakni: (1) lapisan atas, yaitu elit, yang terbagi ke dalam elit yang memerintah (*governing elite*) dan elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*); dan (2) lapisan yang lebih rendah, yaitu non-elit.

Dalam konteks kontemporer akhir-akhir ini, Perkins mengembangkan istilah Korporatokrasi (Perkins, 2007: x). Istilah Korporatokrasi belum digunakan secara meluas dan merupakan konsep yang relatif baru. Istilah Korporatokrasi digunakan oleh Perkins untuk menunjukkan bahwa dalam rangka membangun imperium global, maka berbagai korporasi besar, Bank, dan pemerintahan bergabung menyatukan kekuatan finansial dan politiknya untuk memaksa masyarakat dunia mengikuti kehendak mereka. Menurut Wikipedia, dengan merujuk kepada Perkins, Korporatokrasi dilukiskan sebagai sistem kekuasaan yang dikontrol oleh berbagai

korporasi besar, bank-bank internasional dan pemerintahan. Menurut Rais (2008: 82), sesungguhnya istilah Korporatokrasi dapat digunakan untuk menunjukkan betapa korporasi atau perusahaan besar memang dalam kenyataannya dapat mendikte, bahkan kadang-kadang membeli pemerintahan untuk meloloskan keinginan mereka. Kalau sebuah pemerintahan yang dikuasai oleh kaum aristokrat (bangsawan) disebut aristokrasi, sebuah pemerintahan yang dikendalikan oleh kaum plutokrat (orang kaya) disebut sebagai plutokrasi, dan sebuah pemerintahan yang dikendalikan oleh kaum kleptokrat (maling, preman) disebut sebagai kleptokrasi, maka sebuah pemerintahan yang dikendalikan oleh kaum korporatokrat (pemilik korporasi besar) boleh juga dinamakan Korporatokrasi.

BAB V

KONSEP DAN TEORI GERAKAN SOSIAL BARU **(*NEW SOCIAL MOVEMENTS*)**

A. Konsep tentang Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*)

Teori Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement Theory*) merupakan suatu pendekatan teoritis terbaru yang menjelaskan tentang perubahan karakter dari Gerakan Sosial (*Social Movements*). *New Social Movements Theory* menekankan ciri khas gerakan sosial dalam perkembangan masyarakat pasca-industri (*post-industrial*) di Amerika Utara dan Eropa Barat (Melucci, 1980; McAdam, McCarthy, & Zald, 1988; Kriesi, 1989; Pakulski, 1993; dalam Macionis, 1999: 621). Teori Gerakan Sosial Baru (GSB) berakar dari tradisi Eropa Kontinental tentang teori sosial dan filsafat politik. Teori ini merupakan suatu pendekatan sebagai respons terhadap kelemahan Marxisme klasik dalam menganalisis tindakan kolektif (*collective action*).

Bagi para teoritis Gerakan Sosial Baru (GSB), dua tipe tentang paham reduksi (*reductionism*) Marxisme klasik harus dicegah dari bentuk tindakan kolektif. *Pertama*, paham reduksi ekonomi Marxisme (*Marxism's economic reductionism*) yang menganggap semua faktor signifikan politik dari tindakan sosial berasal dari logika ekonomi fundamental tentang produksi kapitalis (*capitalist production*) dan logika yang lainnya yang membentuk tindakan tersebut. *Kedua*, paham reduksi kelas Marxisme (*Marxism's class reductionism*) yang menganggap bahwa hal yang paling penting dari aktor-aktor sosial didefinisikan oleh relasi-relasi kelas (*class relationships*) yang berakar dalam proses produksi dan identitas sosial lainnya yang membentuk aktor-aktor kolektif. Premis-premis ini mengarahkan Marxis kepada keistimewaan revolusi proletarian yang berakar dari iklim produksi dan mengesampingkan bentuk lain dari protes sosial.

Para teoritis Gerakan Sosial Baru (GSB) secara kontras memiliki cara pandang tersendiri tentang logika dari tindakan yang berbasis dalam politik, ideologi, dan kultur sebagai akar dari tindakan-tindakan kolektif (*collective actions*), dan sumber-sumber lainnya tentang identitas, termasuk etnisitas, jender dan seks yang memaknai

identitas kolektif. Dengan demikian, Gerakan Sosial Baru (GSB) memiliki terminologi yang berbeda tentang tindakan kolektif yang menggantikan asumsi-asumsi dari Gerakan Sosial Lama (*Old Social Movement*) tentang revolusi proletarian yang dihubungkan dengan Marxisme Klasik. Meskipun teori Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*) merupakan reaksi kritik terhadap Marxisme Klasik, namun beberapa teoritis Gerakan Sosial Baru berusaha meng-update dan merevisi asumsi-asumsi Marxis, sementara teoritis yang lainnya melakukan perubahan (Buechler, 1995: 442).

Meskipun istilah teori Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*) sudah berlaku umum, namun terdapat variasi pandangan dari beberapa teoritis. Berbagai pandangan teoritis Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*) tersebut dapat diidentifikasi tentang pendekatan umum (*general approach*) tentang konsep Gerakan Sosial Baru, sebagai berikut (Buechler, 1995: 442):

Pertama, pada umumnya teori Gerakan Sosial Baru menggarisbawahi tindakan simbolik dalam masyarakat sipil atau lingkungan kultural sebagai arena untuk tindakan kolektif disamping tindakan instrumental dalam lingkungan politik atau negara (Cohen, 1985; Melucci, 1989);

Kedua, teoritis Gerakan Sosial Baru menekankan pada pentingnya proses yang mempromosikan *autonomy and self-determination*, bukan pada strategi untuk memaksimalkan pengaruh dan kekuasaan (Habemas, 1987; Rucht, 1988);

Ketiga, beberapa teoritis Gerakan Sosial Baru, menekankan pada peranan nilai-nilai *post-materialist* dalam banyak tindakan kolektif kontemporer, sebagai lawan terhadap konflik atas sumberdaya material (Inglehar, 1990; Dalton, Kuechler, & Burklin, 1990);

Keempat, teoritis Gerakan Sosial Baru cenderung mempersoalkan proses yang rapuh dari konstruksi identitas kolektif dan identifikasi kelompok kepentingan, bukan pada asumsi bahwa konflik kelompok dan kepentingan mereka ditentukan secara struktural (Hunt, Benford, & Snow, 1994; Johnston, Larana, & Gusfield, 1994; Klandermans, 1992);

Kelima, teori Gerakan Sosial Baru juga menekankan konstruksi sosial alami dari ketidakpuasan dan ideologi (*grievances and ideology*), daripada pada asumsi bahwa

mereka dapat disimpulkan dari lokasi struktural kelompok (Johnston, Larana, & Gusfield, 1994; Klandermans, 1992); dan

Terakhir, teori Gerakan Sosial Baru mengakui adanya jaringan (*network*) yang bersifat tersembunyi, laten, dan temporal yang seringkali mendasari tindakan kolektif, ketimbang memahami bentuk organisasi yang terpusat (*centralized*) sebagai prasyarat keberhasilan mobilisasi (Melucci, 1989; Gusfield, 1994; Mueller, 1994). Beberapa dari tema ini menandai perbedaan baik dari teori Marxisme klasik dan teori mobilisasi sumberdaya (*resource mobilization*), serta dengan teori konstruksinisme sosial.

B. Karakteristik Gerakan Sosial Baru

Menurut Pichardo (1997: 414), paradigma Gerakan Sosial Baru (GSB) secara fundamental memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan paradigm Gerakan Sosial Lama (*Old Social Movement*). Karakteristik khusus dari Gerakan Sosial Baru (GSB) dapat dilihat dari Empat aspek, yakni:

- (1) *Ideology and goals* (Tujuan dan Ideologi);
- (2) *Tactics* (Taktik);
- (3) *Structure* (Struktur); dan
- (4) *Participants of contemporary movements* (Partisipan dari Gerakan Kontemporer).

Selanjutnya Pichardo memberikan penjelasan ke-Empat aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Ideology and Goals* (Tujuan dan Ideologi):

Faktor sentral karakteristik dari Gerakan Sosial Baru (GSB) adalah pandangan ideologi yang berbeda. Paradigma Gerakan Sosial Baru (GSB) mencatat bahwa Gerakan sosial kontemporer merepresentasikan keterputusan dari gerakan era industrial. Bukan memfokuskan pada redistribusi ekonomi (seperti yang dilakukan gerakan kelas-pekerja), Gerakan Sosial Baru (GSB) menekankan perhatian kepada kualitas hidup dan gaya hidup (*quality of life and life-style concerns*). Dengan

demikian, Gerakan Sosial Baru (GSB) mempertanyakan kekayaan yang berorientasi tujuan materialistik dari masyarakat industrial. Mereka juga mempertanyakan struktur dari representasi demokrasi yang membatasi masukan dan partisipasi warganegara dalam pemerintahan, yang tidak mendukung demokrasi langsung (*direct democracies*), kelompok-kelompok swadaya (*self-help groups*), gaya kooperatif (*cooperative styles*) dari organisasi sosial. Nilai-nilai dari Gerakan Sosial Baru (GSB) berpusat dalam otonomi dan identitas (*outonomy and identity*).

Dalam banyak hal, klaim identitas adalah ciri paling khas dari Gerakan Sosial Baru (GSB), meskipun semua gerakan sebelumnya juga dapat digambarkan sebagai klaim yang mengekspresikan identitas. Beberapa penelitian yang mengkaji tentang bagaimana pengaruh (*impact*) dari identitas terhadap partisipasi dalam gerakan sosial telah dilakukan. Misalnya, Klandermans melakukan penelitian dalam Gerakan Perdamaian Belanda (*Dutch peace movement*) tentang bagaimana variasi identitas kolektif, yang diwakili oleh keanggotaan yang berbeda, memprediksi pembelotan partisipan dari gerakan. Selanjutnya, Pichardo, Catlin, dan Deane juga melakukan penelitian tentang identitas personal (*personal identity*) dalam relasi dengan partisipasi dalam gerakan lingkungan (*environmental movement*). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara signifikan ada hubungan antara identitas baik dengan aktivitas-aktivitas gerakan sosial konvensional (peristiwa partisipasi, keanggotaan organisasi, kontribusi gerakan) dan dalam perilaku sehari-hari (konservasi energi dan air, penggunaan transportasi alternatif, dan membeli produk yang terbuat dari bahan adur ulang). Untuk lebih jelasnya, diperlukan lebih banyak lagi penelitian empiris tentang kaitan (*connection*) antara identitas dan partisipasi gerakan.

Sifat unik yang lainnya, adalah sifat ideologi dari Gerakan Sosial Baru (GSB) yang merupakan karakter refleksi diri (*self-reflective character*). Hal ini berarti bahwa partisipan selalu mempertanyakan makna dari apa yang sedang dilakukan. Hal ini telah mengarahkan kepada pilihan sadar (*conscious choices*) tentang struktur dan aksi (*structure and action*), pilihan kata untuk melambangkan Gerakan Sosial Baru. Contoh yang baik dalam hal ini adalah meningkatkan karakteristik kesadaran kelompok dari gerakan feminis. Hal yang unik adalah bahwa orientasi ideologi dan karakter refleksi diri (*ideological orientation and self-reflexive character*) secara luas

mendikte jenis-jenis dari taktik (*tactics*), struktur (*structures*), dan partisipan (*participants*) dalam Gerakan Sosial Baru.

2. *Tactis* (Taktik):

Taktik dari Gerakan Sosial Baru merupakan cerminan orientasi ideologi. Keyakinan dalam karakter yang tidak mewakili tentang demokrasi modern adalah konsisten dengan orientasi taktik anti institusi. Gerakan Sosial Baru lebih suka untuk tetap berada di luar saluran politik normal, menggunakan taktik mengganggu (*disruptive tactics*) dan memobilisasi opini publik (*mobilizing public opinion*) untuk mendapatkan pengaruh politik. Mereka juga cenderung menggunakan bentuk demonstrasi yang sangat dramatis dan direncanakan dengan representasi simbol dan kostum (*costumes and symbolic representations*).

Namun demikian, tidak berarti bahwa Gerakan Sosial Baru (GSB) tidak melibatkan diri dalam politik, atau menghindar menjadi dilembagakan sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Eder (1985) bahwa “Gerakan Sosial Baru suatu bentuk wujud dari protes kelas menengah (*middle-class protest*) yang berkaitan dengan upaya memberantas tekanan kelompok politik untuk gerakan sosial”. Beberapa Gerakan Sosial Baru (GSB) terintegrasi ke dalam sistem partai dan memperoleh akses reguler terhadap regulasi, implementasi, dan badan pengambilan keputusan, sementara yang lain telah membentuk partai politik yang teratur untuk kontes dalam pemilihan keterwakilan. Beberapa partai-partai Hijau (*Green parties*) adalah menonjol di Eropa, dengan beberapa memiliki manifestasi lokal di Amerika Serikat. Namun, tidak ada korespondensi langsung yang muncul antara pendukung Gerakan Sosial Baru dan mereka yang memilih partai-partai Hijau. Dengan demikian, paradigma Gerakan Sosial Baru mengakui bahwa tidak ada gaya taktik yang khas dari Gerakan Sosial Baru, lebih sekedar, opini publik dan politik anti-institusi sebagai tambahan baru dan lebih menonjol dalam repertoar dari gerakan sosial.

3. *Structure (Struktur):*

Sikap anti-institusi dari Gerakan Sosial Baru juga meluas kepada cara mereka mengatur. Gerakan Sosial Baru berupaya untuk mereplikasi dalam struktur mereka sendiri jenis perwakilan pemerintahan yang mereka inginkan. Yaitu, mereka mengorganisir diri dalam gaya yang tidak kaku yang menghindari bahaya oligarki. Mereka cenderung melakukan rotasi kepemimpinan, suara umum dalam semua isu, dan memiliki organisasi sementara yang tidak permanen. Mereka juga mendukung sikap anti-birokrasi, berdebat melawan dengan apa yang mereka anggap karakter dehumanisasi dari birokrasi modern.

Sehingga, mereka menyerukan dan menciptakan struktur yang lebih responsif terhadap individu; terbuka, desentralis, dan non-hierarkis (Zimmerman, 1987). Dimotivasi oleh pelajaran masa lalu, mereka mengharap untuk menghindari menjadi dikooptasi. Ini adalah untuk klaim, bukan berarti bahwa semua Gerakan Sosial Baru begitu terorganisir, tetapi bahwa bentuk perorganisasian yang lebih menonjol dari pada di masa lalu. Tipe ideal gaya organisasi dari Gerakan Sosial Baru tidak harus dilihat sebagai organisasi yang mencerminkan gaya dari setiap Gerakan Sosial Baru. Kelompok seperti Organisasi Nasional Perempuan (*the National Organization of Women*) dan berbagai lingkungan kelompok kerja lebih tradisional terpusat, bentuk hirarkis dari organisasi.

4. *Participants (Partisipan):*

Terdapat dua pandangan tentang siapa dan mengapa partisipan bergabung dalam suatu gerakan sosial baru. Basis pertama dukungan dari kelas menengah baru (*new middle class*), yakni sebuah strata sosial pekerja baru yang muncul dalam sektor ekonomi non-produktif. Peningkatan kelas menengah baru dalam masyarakat pasca-industri (*postindustrial society*) membangun basis dukungan partisipan Gerakan Sosial Baru. Akan tetapi, teoritis gerakan sosial baru melangkah melampaui basis kelas menengah baru ini, melalui argumenasi bahwa strata ini memproduksi partisipan gerakan sosial baru apabila mereka tidak terikat pada motif keuntungan perusahaan atau tidak tergantung pada dunia usaha demi mempertahankan hidup mereka. Dukungan kelas menengah terhadap Gerakan Sosial Baru lebih muncul dari

mereka yang cenderung bekerja di wilayah yang sangat tergantung pada pengeluaran Negara seperti akademisi, seniman, dan agen-agen pelayanan kemanusiaan, dan mereka cenderung harus berpendidikan tinggi.

Pandangan kedua tentang partisipan dalam gerakan sosial baru adalah bahwa mereka tidak didefinisikan oleh batas kelas tetapi ditandai oleh perhatian umum atas isu-isu sosial. Basis partisipan Gerakan Sosial Baru adalah ideologi, bukan etnis, agama, atau komunitas berbasis kelas (*class-based community*). Mereka didefinisikan oleh nilai-nilai umum daripada struktur lokasi. Offe (1985) menawarkan pandangan yang berbeda tentang siapa partisipan dari gerakan sosial baru. Menurutnya, partisipan dari gerakan sosial baru dapat digambarkan dari tiga sektor, yakni: kelas menengah baru (*new middle class*), elemen-elemen dari kelas menengah lama (seperti petani, pemilik toko, dan produser artis), dan populasi ferifer yang terdiri dari orang-orang yang tidak banyak terlibat dalam pasar kerja (seperti mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pensiunan).

Hasil studi terhadap gerakan lingkungan menunjukkan bahwa partisipan gerakan sosial baru dapat digambarkan dari dua populasi, yakni kelas menengah baru (*new middle class*) dan komunitas secara geografis yang dipengaruhi secara langsung oleh eksternalitas negatif dari pertumbuhan industri. Partisipan adalah kelas menengah yang lebih berkomitmen ideologis seperti halnya komunitas yang memprotes bahaya sampah, atau limbah kimia beracun dari lingkungan lokal.

Menurut Macionis (1999: 622) karakteristik dari Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*) meliputi hal-hal sebagai berikut:

Pertama, sebagian besar gerakan sosial internasional saat ini memfokuskan perhatian kepada persoalan ekologi global, kedudukan sosial dari kaum wanita dan gay, hak-hak binatang, dan pengurangan resiko perang. Sebagai suatu proses dari globalisasi yang menghubungkan negara-negara di dunia yang menyebabkan gerakan sosial menjadi fenomena global.

Kedua, sementara gerakan sosial tradisional (*traditional social movements*) atau Gerakan Sosial Lama, seperti organisasi buruh, lebih berkonsentrasi kepada isu-isu ekonomi, sedangkan gerakan sosial baru (*new social movements*) cenderung memfokuskan kepada perubahan kultural dan perbaikan lingkungan sosial dan fisik.

Sebagai contoh, gerakan lingkungan internasional menentang praktek yang memperparah pemanasan global dan bahaya lingkungan lainnya.

Ketiga, pada umumnya, sebagian besar Gerakan Sosial Lama mendapat dukungan yang kuat dari golongan kelas pekerja (*working-class*), sedangkan gerakan sosial baru (*new social movements*) umumnya mendapat dukungan golongan kelas menengah (*the middle-class*). Di Amerika Serikat dan di negara-negara maju lainnya, sejumlah kaum profesional yang berpendidikan tinggi, yang merupakan pendukung Gerakan Sosial Baru (*new social movements*), jumlahnya menunjukkan peningkatan sehingga akan mendorong terjadinya suatu gerakan sosial.

Menurut Singh (2001: 89), studi teoritik tentang gerakan sosial (*social movements*) dapat dikelompokkan ke dalam tiga perspektif, yakni: (a) Klasik (*classical*), (b) Neo-klasik (*neo-classical*), dan (c) Kontemporer (*contemporary*) atau Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*). Perspektif atau tradisi klasik meliputi sebagian besar studi-studi tentang perilaku kolektif dari kerumunan (*crowd*), kerusuhan (*riot*) dan kelompok pemberontakan (*rebel groups*), terutama oleh para psikolog sosial Barat era sebelum tahun 1950-an. Sementara perspektif atau tradisi neo-klasik (*the neo-classical*) dikaitkan dengan tradisi utama dalam studi-studi Gerakan Sosial Lama (*Old Social Movements*). Pada umumnya, tulisan-tulisan tradisi neo-klasik banyak dipublikasikan setelah era tahun 1950-an.

Sedangkan perspektif ketiga dari studi Gerakan Sosial, yakni *New Social Movements* (NSMs) muncul sekitar era tahun 1960-an dan 1970-an, terutama di masyarakat Eropa dan Amerika (Singh, 2001: 96). Masyarakat Eropa dan Amerika saat itu menyaksikan munculnya gerakan skala besar sekitar isu-isu yang mendasarkan pada aspek humanis (*humanist*), kultural (*cultural*), dan non-materialistik (*non-materialistic*). Tujuan-tujuan dan nilai-nilai dari gerakan ini secara esensial bersifat universal, yakni diarahkan untuk memberikan perlindungan dan mempertahankan kondisi kehidupan manusia ke arah yang lebih baik. Berbeda dengan model Gerakan Sosial Lama (klasik dan neo-klasik), maka model Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*, NSMs) tidak terjebak ke dalam diskursus ideologi seperti anti-kapitalisme (*anticapitalism*), revolusi kelas (*class revolution*), dan perjuangan kelas (*class struggle*). Dengan demikian, Gerakan Sosial Baru tidak

tertarik dengan ide revolusi, termasuk melakukan gerakan revolusi untuk menggulingkan sistem pemerintahan Negara. Strategi dan tujuan dari Gerakan Sosial Baru (GSB) memiliki sedikit kesamaan dengan model gerakan masa lalu yaitu dalam memperjuangkan untuk isu-isu seperti: peningkatan upah buruh industri, menentang ketidakadilan ekonomi dan eksploitasi kelas (*class exploitation*).

Pada dasarnya, *New Social Movements* (NSMs) bersifat plural. Menurut Melucci (1980), Cohen (1985), Slater (1985) dan Touraine (1985), ekspresi *New Social Movements* (NSMs) bergerak dari anti-rasialisme (*anti-racism*), anti-nukliarisme (*anti-nuclearism*), perlucutan senjata (*disarmament*), feminisme (*feminism*), lingkungan (*environmentalism*), regionalisme dan etnisitas (*regionalism and ethnicity*), kebebasan sipil (*civil libertarianism*), dan sebagainya, hingga ke isu-isu kebebasan personal dan perdamaian. Perkembangan masyarakat dari masyarakat modernitas (*modernist society*) menuju masyarakat pasca modernitas (*post modernist-post society*) merefleksikan terjadinya perubahan bentuk dari gerakan sosial (*social movements*) dari bentuk lama (klasik dan neo-klasik) kepada bentuk Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*). Dengan kata lain, terjadinya perubahan bentuk masyarakat berhubungan dengan terjadinya perubahan bentuk dari gerakan sosial (Singh, 2001: 97).

Untuk melihat perbedaan antara *New Social Movements* (NSMs) dengan bentuk tindakan kolektif (*collective action*) dan gerakan sosial lama (*old social movements*), maka dirumuskan beberapa karakteristik dasar dari *New Social Movements* (NSMs) sebagai berikut (Larana, Johnston, dan Gusfield, 1994: 6-8):

Pertama, *New Social Movements* (NSMs) tidak berhubungan dengan peran struktural dari partisipan (*participants*) gerakan. Kecenderungan basis sosial dari *New Social Movements* (NSMs) adalah bersifat melampaui struktur kelas (*class structure*). Latar belakang dari partisipan ditemukan menyebar dalam berbagai status sosial, seperti pemuda (*youth*), jender (*gender*), orientasi seksual (*sexual orientation*), atau kalangan profesional (*professional*), yang tidak berhubungan dengan penjelasan struktural (*structural explanations*).

Kedua, karakteristik ideologi dari *New Social Movements* (NSMs) bertolak belakang dengan ideologi gerakan kelas pekerja (*the working class movements*) dan

konsepsi ideologi Marxist sebagai elemen penyatuan dan totalitas untuk tindakan kolektif (*collective action*). Khususnya di Eropa dan juga di Amerika Serikat, gerakan ditandai oleh karakteristik ideologi: *conservative* atau *liberal*, *right* atau *left*, *capitalist* atau *socialist*. Pandangan Marxist lebih dominan di Eropa daripada di Amerika, mengarahkan paradigma untuk membentuk persepsi tentang tindakan baik borjuis atau proletar. Memberikan batasan terhadap *New Social Movements* (NSMs) akan lebih sulit karena ide-ide dan nilai-nilainya lebih plural, cenderung memiliki orientasi yang pragmatis, dan berupaya untuk melakukan reformasi kelembagaan dimana semakin terbukanya sistem bagi partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan (Offe, 1985; Cohen, 1985; dan Larana, 1992; dalam Larana, Johnston, dan Gusfield, 1994: 7). Gerakan ini memiliki makna politik yang penting bagi masyarakat Barat; memiliki implikasi bagi dinamika demokratisasi dan pengembangan sipil versus dimensi politik dari masyarakat (Larana, 1993; dalam Larana, Johnston, dan Gusfield, 1994: 7).

Ketiga, *New Social Movements* (NSMs) seringkali menyangkut dimensi identitas baru. Faktor mobilisasi lebih cenderung mengarah kepada isu-isu simbolis dan kultural yang dikaitkan dengan isu-isu tentang identitas daripada keluhan-keluhan ekonomi sebagaimana menandai gerakan kelas pekerja (Melucci, 1985; dalam Larana, Johnston, dan Gusfield, 1994: 7). *New Social Movements* (NSMs) diasosiasikan dengan seperangkat keyakinan (*beliefs*), symbol (*symbols*), nilai (*values*), dan makna (*meanings*) yang berkaitan dengan perasaan sentimen terhadap kelompok sosial yang berbeda. Hal ini cocok dengan gerakan etnis, separatis, dan gerakan nasionalistis dalam Negara. Gerakan Catalan dan Bosque (*the Catalan and Bosque movements*) di Spanyol, gerakan Asian dan Hispanic (*the Asian and Hispanic movements*) di Amerika Serikat, gerakan etnis di bekas Negara Uni Soviet, dan gerakan nasional Palestina adalah contoh dari munculnya identitas baru dalam dunia modern. Gerakan kaum wanita dan gerakan hak kaum Gay juga bisa dikategorikan sebagai suatu identitas baru.

Keempat, relasi antara individu dan kolektif bersifat tidak jelas (kabur). Kebanyakan gerakan-gerakan kontemporer bergerak dalam tindakan individu daripada melalui mobilisasi kelompok. Dalam bahasa lain, gerakan tidak memiliki basis struktur dan kelas, gerakan menjadi suatu fokus pemahaman diri individu, dan

tindakan dalam gerakan adalah bauran yang kompleks dari penegasan identitas individu dan kolektif.

Kelima, *New Social Movements* (NSMs) menyangkut aspek-aspek personal dan erat dengan kehidupan manusia. Gerakan-gerakan yang berfokus dalam hak-hak kaum gay dan aborsi, gerakan kesehatan termasuk pengobatan alternatif dan anti-merokok, gerakan transformasi diri dan usia baru (*new age and transformation movements*), dan gerakan kaum wanita, semuanya bertujuan untuk merubah perilaku fisik dan seksual. Gerakan juga diperluas ke dalam arena kehidupan sehari-hari, seperti: bagaimana kita makan, berpakaian, dan santai; bagaimana kita mencintai, mengatasi masalah pribadi, atau perencanaan karier.

Keenam, ciri-ciri umum lainnya dari *New Social Movements* (NSMs) adalah dalam menggunakan taktik mobilisasi terhadap gangguan dan hambatan yang berbeda dari praktek mobilisasi gerakan kelas pekerja (*working-class movement*). *New Social Movements* (NSMs) menggunakan pola mobilisasi baru yang diwarnai oleh anti-kekerasan dan pembangkangan sipil (*nonviolence and civil disobedience*).

Ketujuh, Organisasi dan perkembangan kelompok *New Social Movements* (NSMs) dikaitkan dengan krisis kredibilitas terhadap saluran partisipasi dalam demokrasi Barat. Krisis ini adalah faktor motivasional bagi tindakan kolektif dalam mencari bentuk alternatif dari partisipasi dan pembuatan keputusan yang berkaitan dengan isu-isu kepentingan kolektif (Whalen dan Flacks, 1989; Melucci, 1989).

Kedelapan, berbeda dengan partai massa yang birokrasi dan sifat pimpinannya yang terpusat, maka organisasi *New Social Movements* (NSMs) bersifat segmental, menyebar, dan desentralisasi. Terdapat variasi sesuai dengan tipe gerakan dengan kecenderungan menuju otonomi besar pada tingkat lokal, dimana bentuk-bentuk gerakan untuk pengambilan keputusan seringkali membatasi hubungannya dengan organisasi regional dan nasional. Kondisi seperti ini disebut sebagai “elemen referensial diri” (*self referential element*) tentang gerakan baru (*new movements*), yang merupakan perbedaan yang kontras dari organisasi kelas pekerja (*working-class*) dan peran partai model Lenin dengan hirerarki yang terpusat.

Sebagai bahan perbandingan, Singh (2001: 98) mengemukakan beberapa karakteristik dari *New Social Movements* (NSMs). Menurut Singh, beberapa sarjana

seperti Tilly (1978, 1985), Melucci (1980, 1985), Habermas (1981, 1985), Touraine (1981, 1982, 1985), Tarrow (1982), Morris dan Herring (1984), Cohen (1985), dan Klaus (1985) telah berhasil merumuskan elemen-elemen umum sebagai karakteristik bentuk *ideal-typical* dari *New Social Movements* (NSMs). Beberapa karakteristik tipe ideal (*ideal-typical*) dari *New Social Movements* (NSMs) adalah sebagai berikut:

- (1) Sebagian besar Gerakan Sosial Baru (GSB) mengembangkan konsepsi ideologi mereka tentang asumsi bahwa masyarakat sipil semakin berkurang; ruang sosial mengalami krisis penyusutan dan makna “sosial” dari masyarakat sipil terkikis oleh kemampuan kontrol dari Negara. Ekspansi Negara (state), dalam seting kontemporer, bertepatan dengan ekspansi dari pasar (market). Negara dan pasar (state and market) dipandang sebagai dua institusi yang menimbulkan penjabaran ke hampir seluruh aspek kehidupan warga Negara. Di bawah kombinasi pengaruh kekuatan Negara dan pasar, masyarakat menjadi tidak berdaya (*helpless*). Akibatnya, Gerakan Sosial Baru (GSB) mengangkat isu tentang pertahanan-diri (*self-defence*) dari komunitas dan masyarakat (*community and society*) terhadap ekspansi dari apparatus Negara: agen pengendalian dan control sosial.
- (2) Gerakan Sosial Baru (GSB) secara radikal mengubah paradigma Marxist tentang penjelasan konflik dan kontradiksi dalam terminologi kelas dan kelas konflik (*class and class conflict*). Marxisme melihat bahwa seluruh perjuangan sebagai perjuangan kelas (*class struggles*) dan semua bentuk dari kelompok manusia sebagai kelompok kelas (*class groupings*). Banyak dari perjuangan kontemporer, seperti misalnya gerakan anti-rasisme, gerakan feminis dan lingkungan, bukan merupakan perjuangan kelas, juga tidak mencerminkan gerakan kelas. Dalam konteks sosial kontemporer, pembuktian Marxisme menjadi model penjelasan yang tidak cukup kuat. Hal ini sebagai keruntuhan dari paradigma kelas (*class paradigm*) sebagai teori umum (*general theory*) tentang penjelasan dalam ilmu sosial.

Alberto Melucci (Singh, 2010: 127) melihat bentuk Gerakan Sosial Baru (GSB) sebagai “tersegmentasi, sebuah struktur jejaring dengan banyak kepala”, yang

merupakan produk transformasi mendalam Gerakan sosial di era *post-industry*. Medan konflik sosial dalam mode Maxist biasanya dilihat sebagai lokasi struktur kelas masyarakat. Dalam perkembangannya sekarang, konflik sosial melebihi dan meluber keluar dari ruang-ruang sosial berdasarkan kelas, ia meluas melintasi kotak-kotak pengkhususan masyarakat atau sistem politik. Gerakan Sosial Baru (GSB) adalah gerakan transnasional. Gerakan ini menyuarakan, mengarah dan berjuang bagi isu-isu kemanusiaan dan isu-isu yang berhubungan dengan kondisi mendasar keberadaan manusia serta mungkin bagi keberadaan yang layak di masa depan. Karenanya sejumlah tujuan dan targetnya berlokasi di wilayah lintas masyarakat kemanusiaan global. Konsepsi mereka ikhwal konflik dan tegangan merupakan sesuatu yang internasional dan cakupan pelebaran serta perluasannya meliputi segenap kemanusiaan. Gerakan Sosial Baru (GSB) mencari jawaban atas pertanyaan yang terkait dengan perdamaian, perlucutan senjata, polusi nuklir, perang nuklir; yang berhubungan dengan ketahanan planet (bumi), ekologi, lingkungan; dan hak-hak asasi manusia. Komitmen mereka melintasi paradigma kelas dan melampaui ketidakmampuan penjelasan materialistik Marxis untuk menjawab gerakan baru kontemporer ini.

Dengan demikian, sebagian besar dari Gerakan Sosial Baru (GSB) didefinisikan oleh non-kelas, menekankan dan memfokuskan kepada non-materialistik. Artikulasi ideologi dari nilai-nilai dan tujuan-tujuan mereka melampaui metode Marxist yang berkisar tentang penjelasan dalam terminologi kelas dan pembentukan kelas (*class formation*). Kini, perjuangannya bukanlah “ekonomi politik sebuah bangsa”, melainkan keberadaan mendasar manusia tanpa memandang nasionalitas dan keberbagaian sistem ekonomi politik. Respons GSB terhadap pertanyaan-pertanyaan ini terkait dengan keberadaan manusia yang bermartabat dan bermasa depan di planet bumi.

- (3) Sejak latar belakang kelas tidak lagi menjadi identitas determinan dari aktor atau penyangga tindakan kolektif, Gerakan Sosial Baru umumnya meninggalkan baik model pekerja industri dari organisasi gabungan dan model politik dari partai politik. Menurut Cohen, Gerakan Sosial Baru umumnya merespons isu-isu yang berasal dari masyarakat sipil, targetnya adalah domain sosial dari masyarakat sipil bukan ekonomi atau negara, mengangkat isu-isu yang peduli dengan

demoralisasi dari struktur kehidupan sehari-hari dan memfokuskan ke dalam bentuk dari komunikasi dan identitas kolektif.

Ciri utama GSB dilihat dari sifat membatasi diri mereka. Cohen (Singh, 2010: 129) menyatakan GSB membatasi diri dalam empat pengertian, yakni: (1) Umumnya aktor-aktor GSB tidak berjuang demi kembalinya komunitas-komunitas utopia tak terjangkau di masa lalu; (2) Aktor-aktornya berjuang untuk otonomi, pluralitas, dan keberbedaan tanpa menolak prinsip-prinsip egalitarian formal dari demokrasi, parlemen, partisipasi politik dan representasi publik pada struktur yuridis; (3) Para aktornya melakukan upaya sadar untuk belajar dari pengalaman masa lalu, untuk merelatifkan nilai-nilai mereka melalui penalaran, kecuali dalam kasus ekspresi fundamentalis GSB; (4) Para aktornya mempertimbangkan keberadaan formal negara dan ekonomi pasar.

Tujuan GSB adalah untuk menata kembali relasi negara, masyarakat dan perekonomian, dan untuk menciptakan ruang publik yang di dalamnya wacana demokratis perihal otonomi dan kebebasan individu dan kolektivitas serta identitas dan orientasi mereka, bisa didiskusikan dan diperiksa selalu. Dalam banyak ekspresinya, GSB umumnya membatasi diri mereka pada aksi sosial dengan semangat yang oleh Cohen disebut “radikalisme membatasi diri”.

- (4) Tidak seperti halnya gerakan klasik, struktur dari Gerakan Sosial Baru didefinisikan oleh keragaman (pluralitas) cita-cita, tujuan-tujuan, dan orientasi serta oleh heterogenitas dari basis sosial mereka.

Merujuk Touraine, di masa lalu, kapasitas sebuah masyarakat untuk mereproduksi dirinya adalah terbatas. Ia dibatasi atas perhitungan sebuah jaminan meta sosial mengenai tatanan sosial, aturan ilahiah, hukum-hukum alam, evolusi sejarah, termasuk meta sosial yang menandai pengertian modernitas pada kemarin-kemarin ini. “Di masa sekarang, transformasi diri dan konstruksi diri adalah sesuatu yang tiada terbatas”. Akibatnya, bentuk-bentuk aksi dan gerakan sosial menjadi plural menapaki banyak jalur, mencita-citakan beragam tujuan, dan menyuarakan aneka kepentingan.

Tidak seperti gerakan klasik, medan GSB umumnya transnasional. Wilayah aksi, strategi dan cara mobilisasi mereka adalah global. Perhatian sosial dan isu-isu yang

bergulir menyeberangi batas-batas bangsa dan masyarakat. GSB tidak melulu merespons pertanyaan keberadaan manusia saja. Mereka melampaui dunia manusia, menuju alam raya; mereka menanggapi persoalan atas planet tempat manusia bertahan hidup. Dalam hal inilah GSB tampil trans-manusia; mereka mendukung pelestarian alam di mana manusia menjadi bagiannya. Perjuangan menentang perang nuklir, perlombaan senjata, dan demi ekologi dan lingkungan, perdamaian dan kemerdekaan sipil, identitas individual, kebebasan dan kedaulatan personal, merupakan perjuangan yang menghamparkan kebersamaan warga dari beragam nasionalitas, kebudayaan dan sistem politik. Demikian, GSB adalah kekuatan sosial yang besar dan arus integrasi kultural dari warga yang bahkan hidup di pojok-pojok bumi ini.

Aktor-aktor sosial GSB pada garis besarnya berasal dari basis sosial yang luas, tidak terbagi-bagi, melintasi kategori-kategori sosial ikhwal gender, pendidikan, okupasi atau kelas. Para aktornya tidak terkotakkan pada pembagian tertentu seperti proletariat, kelas buruh, pekerja industri dan petani. Aktor-aktor yang beroperasi dalam GSB bukan karena kepentingan kelas mereka, tetapi mereka berjuang demi kepentingan kemanusiaan. Sementara struktur GSB secara umum memintas batas-batas nasional, para aktor gerakan menyeberangi kotak-kotak kategori sosial dari kasta, kelas, suku, agama, dan teritori politik.

C. Pandangan Umum Beberapa Teoritisi tentang Gerakan Sosial Baru

Menurut Buechler (1955: 443) paling tidak terdapat empat pemikiran teoritisi yang bisa dijadikan dasar untuk mengkaji teori-teori tentang Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*). Keempat teoritisi Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*) adalah:

- (1) Manuel Castells (Spanyol),
- (2) Alain Touraine (Prancis),
- (3) Alberto Melucci (Italia), dan
- (4) Jurgen Habermas (Jerman).

Uraian pemikiran ke-empat teoritisi Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manuel Castells:

Kajian Castells difokuskan pada pengaruh dinamika kapitalis (*capitalist dynamics*) dalam proses transformasi ruang kota dan peran dari Gerakan sosial kota. Castells berpendapat bahwa isu-isu perkotaan menjadi penting karena adanya peningkatan dari konsumsi kolektif (*collective consumption*) dan pentingnya intervensi (campur-tangan) pemerintah untuk meningkatkan produksi barang-barang kebutuhan publik. Dalam konteks seperti ini, Castells melihat bahwa munculnya gerakan sosial kota (*urban Social movements*) dalam arena dialektika antara negara dan kekuatan politik lainnya yang berusaha melakukan re-organisasi kehidupan sosial perkotaan. Menurut Castells, kota dianggap sebagai produk sosial yakni hasil dari konflik kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai. Dengan kata lain, kepentingan-kepentingan sosial yang dominan berusaha untuk mendefinisikan ruang kota dalam menjaga tujuan-tujuan dari dominasi komodifikasi dan birokrasi kapitalis, dengan kata lain, mobilisasi akar rumput (*grassroots*) dan gerakan sosial kota ditujukan untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan, membangun otonomi politik, dan memelihara identitas kultural. Sementara berpendapat bahwa relasi-relasi kelas (*class relationships*) bersifat fundamental, Castells mengakui bahwa mereka berada berdampingan bersama identitas-identitas dan sumber-sumber perubahan yang lainnya, termasuk negara dan kelompok-kelompok identitas yang berbasikan gender (*gender*), etnisitas (*ethnicity*), nasioalitas (*nationality*), dan kewarganegaraan (*citizenship*).

Bagi Castells, tipologi gerakan protes perkotaan berkisar dalam tiga tema umum, yakni:

- (1) Beberapa fokus tuntutan pada bentuk konsumsi kolektif (*collective consumption*) yang disediakan oleh negara, yang menantang logika kapitalis untuk menggantikannya dengan nilai yang digunakan dalam konteks masyarakat;
- (2) Fokus tuntutan yang lainnya berkaitan dengan kepentingan identitas kultural yang dihubungkan dengan kewilayahan, dengan demikian maka menolak

standarisasi dan homogenisasi yang dikaitkan dengan bentuk birokrasi dari organisasi dengan mempertahankan bentuk asli dari masyarakat; dan

- (3) Fokus tuntutan lainnya merupakan ekspresi mobilisasi politik warga negara yang mengupayakan bentuk pemerintahan yang lebih desentralisasi yang menekankan pada otonomi dan penegelolaan sendiri (*self management and autonomous*) dalam pembuatan keputusan (*decision making*).

Bagi Castells, tujuan dari konsumsi kolektif (*collective consumption*), kultur masyarakat (*community culture*), manajemen-sendiri politik (*political self-management*) mungkin ditemukan dalam bentuk yang bervariasi dalam seting silang-budaya (*cross-culture*) yang menjamin konsep gerakan sosial perkotaan (*urban Social movements*).

Analisis Castells tentang gerakan sosial kota (*urban social movement*) memberikan contoh beberapa tema Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement*), dengan bingkai (*framing*) yang berbeda-beda pula. Penekanan terhadap tema-tema dalam identitas kultural (*cultural identity*), pengakuan terhadap konstituen berbasis non-kelas (*recognition of non-class constituencies*), tema tentang otonomi manajemen-sendiri (*outonomous sel-management*), dan gambaran tentang perlawanan terhadap sistem logika dari birokrasi dan komodifikasi (*commodification and bureaucratization*), menunjukkan ilustrasi tekanan dominan dalam teori-teori Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement Theories*). Dalam waktu yang bersamaan, Castells lebih dekat dengan beberapa tema dari Marxisme konvensional daripada dengan beberapa teoritis Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement Theories*) yang lain, dan Castells menawarkan gagasan tentang “baik/dan” (*both/and*) daripada “baik/atau” (*either/nor*) terhadap beberapa dikotomi gerakan sosial.

Dengan demikian, daripada mengkontraskan antara Gerakan Sosial Lama (*Old Social movement*) dengan Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement*), Castells lebih mengakui peran keduanya baik dari konstituen yang berbasis kelas (*class-based*) dan berbasis-non kelas (*nonclass-based*) dalam gerakan sosial kota (*urban social movements*). Daripada mengkontaskan antara orientasi politik (*political*) dan orientasi kultural (*cultural*), Castells mengakui bahwa gerakan sosial kota yang ditunjukkan dalam negara dan masyarakat sipil berisi gabungan dari orientasi

keduanya. Ketimbang mendikotomikan antara strategi instrumental (*instrumental strategies*) dan identitas ekspresif (*expressive identities*), Castells lebih mengakui saling mempengaruhi antara tema-tema ini dalam beberapa gerakan sosial perkotaan. Karena pendekatan ini lebih bersifat inklusif, maka pandangan Castells tentang teori Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement theory*) lebih memperhatikan terhadap peran negara daripada beberapa pandangan teori lainnya yang tampaknya sama sekali menjauhkan dari tindakan instrumental. Hasilnya, Castells lebih mengakui adanya peran dari dinamika politik (*political dynamics*), seperti perubahan struktur kesempatan politik (*political opportunity structures*), dibandingkan dengan sarjana-sarjana teori Gerakan Sosial Baru yang lainnya. Akhirnya, pendekatan Castells menekankan kesesuaian dari analisis neo-Marxis dengan beberapa pandangan teori Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement theory*).

2. Jorgen Habermas:

Habermas (1984-1987) mengusulkan teori paling rumit tentang struktur sosial modern (*modern social structure*) dengan membedakan antara sistem politik-ekonomi yang diatur oleh media umum kekuasaan dan uang dan dunia kehidupan (*lifeworld*) yang masih diatur oleh consensus normatif (*normative consensus*). Sementara sistem mengikuti logika instrumental (*instrumental logic*) yang melepaskan media seperti uang dan kekuasaan dari tanggung jawab, maka dunia kehidupan (*lifeworld*) mengacu kepada kebutuhan rasionalitas komunikatif (*communicative rationality*) dimana norma-norma dapat dibenarkan (dijustificasi) melalui diskusi dan debat. Masalahnya bagi Habermas adalah bahwa di dalam masyarakat modern, logika dan sistem imperatif mengganggu dunia kehidupan (*lifeworld*) dalam bentuk kolonisasi, sehingga media uang dan kekuasaan hadir bukan hanya untuk mengatur transaksi ekonomi dan politik tetapi juga mengenai pembentukan identitas (*identity formation*), regulasi normatif (*normative regulation*), dan bentuk-bentuk lain tentang reproduksi simbolik tradisional (*symbolic reproduction traditionally*) yang dihubungkan dengan dunia kehidupan (*lifeworld*).

Habermas menyatakan bahwa relasi antara klien dengan Negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah model kasus dari kolonisasi dunia kehidupan, dalam Negara kesejahteraan relasi dunia kehidupan moneterisasi dan birokratisasi merupakan kontrol jenis dan tingkat pengeluaran dalam kebijakan kesejahteraan (*welfare policy*) untuk menyesuaikan dengan kepentingan uang dan kekuasaan (*the imperatives of money and power*). Secara lebih umum, Habermas berpendapat bahwa proses kolonisasi mengubah masing-masing peran yang muncul dari persimpangan (*intersection*) dari sistem ekonomi-politik dan publik dan dunia kehidupan privat (*private lifeworld*), seperti pekerja (*employee*), konsumen (*consumer*), klien (*client*), dan warga negara (*citizen*). Dalam setiap kasus, dinamika ini menemukan kekuasaan pengambilan keputusan lebih di tangan para ahli dan struktur administratif, dimana beroperasi menurut sistem logika dari uang dan kekuasaan (*money and power*), dan keputusan yang tidak sesuai dengan konteks justifikasi dan pertanggungjawaban dalam dunia kehidupan (*lifeworld*).

Mengacu kepada konsep struktur sosial (*social structure*), Habermas menemukan Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement*) dalam lapisan sistem dan dunia kehidupan (*System and lifeworld*). Temuan ini mengarahkan Habermas untuk mengidentifikasi dua ciri gerakan yang mewarnai debat dalam teori Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*), yakni:

Pertama, Habermas tampaknya menyiratkan bahwa Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*) murni memiliki karakteristik defensif, mereka akan mempertahankan dunia kehidupan (*lifeworld*) terhadap gangguan kolonisasi dari sistem dan mempertahankan peran consensus normatif yang berakar pada rasionalitas komunikatif yang telah berkembang dalam lingkungan selama proses modernisasi sosial. Tetapi Habermas menunjukkan sedikit bukti bahwa Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*) dapat memberikan kontribusi yang luas terhadap transformasi sosial, khususnya mengenai dominasi sistem atas dunia kehidupan (*lifeworld*) dan dominasi umum media pertukaran seperti uang dan kekuasaan dalam dunia sistem. Sebagaimana yang kita lihat, tidak ada Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*) yang membawa transformasi sosial yang lengkap, banyak teoritis yang membayangkan suatu peran yang lebih luas dan progresif dari gerakan

daripada hanya sekedar mempertahankan dunia kehidupan (*defending the lifeworld*) secara sederhana.

Kedua, tema yang kedua dari Habermasian yang relatif diterima lebih luas diantara teoritisi Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*), menyangkut sifat dan tujuan atau tuntutan yang terkait dengan gerakan ini. Bagi Habermas, demikian juga yang lainnya, sifat konflik di dalam Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*) tidak pada konflik yang bersifat reproduksi material (*material reproduction*), tetapi lebih bersifat reproduksi kultural (*cultural reproduction*), integrasi sosial (*social integration*), dan sosialisasi (*socialization*). Suatu gerakan baru membawa bersama mereka politik baru yang bersangkutan dengan kualitas hidup (*quality of life*), proyek realisasi diri (*projects of self-realization*), dan tujuan dari bentuk partisipasi dan identitas (*goals of participation and identity formation*). Banyak dari gerakan-gerakan ini bersatu di sekitar kritik atas pertumbuhan sebagai dasar ideologis, dimana gerakan ekologi dan perdamaian memainkan peran yang penting. Karena ini bukan perjuangan distribusi tradisional, Habermas menunjukkan bahwa mereka tidak bisa disalurkan oleh partai politik atau disembuhkan oleh kompensasi material. Implikasinya adalah bahwa dalam kondisi tertentu, konflik terkait dengan Gerakan Sosial Baru (GSB) dapat berkontribusi terhadap krisis legitimasi yang lebih besar, yang oleh Habermas diasosiasikan dengan kapitalisme maju (*advanced capitalism*).

3. Arberto Melucci:

Melucci berpendapat bahwa dunia pasca-modernitas (*post-modern*) membawa bentuk baru dari kontrol sosial (*social control*), tekanan penyesuaian (*conformity pressure*), dan proses informasi (*information processing*) yang direspons oleh Gerakan Sosial Baru (GSB). Gerakan dipicu oleh situasi baru dari konflik yang terjalin dengan kehidupan sehari-hari; konflik itu sendiri meliputi kode-kode simbolik (*symbolic codes*), tuntutan-tuntutan identitas (*identity claims*), dan tuntutan-tuntutan personal atau ekspresif (*personal or expressive claims*). Melucci setuju dengan Touraine bahwa status politik dari Gerakan Sosial Baru (GSB) adalah tidak jelas (*unclear*), tetapi Melucci tidak merasa terganggu dengan kondisi ini

dibandingkan Touraine. Sementara konflik-konflik ini jauh dari lingkup politik konvensional, mereka bukan tanpa efek struktural, yang penting dari argumen Melucci. Dalam perkembangan masyarakat yang diwarnai oleh informasi dan isyarat-isyarat (*information and signs*), gerakan sosial memainkan peranan penting sebagai pesan yang mengekspresikan kecenderungan oposisi dan modalitas. Sangat berfokus dalam aspek-aspek personal, spiritual dan ekspresif dari tipe kehidupan modern tentang Gerakan Sosial Baru (GSB) adalah penolakan implisit tentang rasionalitas instrumental dari masyarakat dominan. Efek sistemik paling penting dari Gerakan Sosial Baru (GSB) adalah untuk melihat secara jelas bentuk khas kekuasaan modern yang berada di balik rasionalitas administratif; dengan cara ini, tindakan kolektif menekankan konstruksi dunia sosial alami dan kemungkinan pengaturan alternatif. Pandangan positif dari Melucci tentang gerakan dan pesan-pesan mereka menggarisbawahi pentingnya ruang bebas antara level kekuasaan politik (*political power*) dan kehidupan sehari-hari (*everyday life*) dimana aktor-aktor dapat mengkonsolidasi identitas kolektif baik melalui representasi dan partisipasi.

Kerja Melucci juga membantu untuk mendefinisikan beberapa isu sentral dari teori Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*). Salah satu isu yakni perhatian terhadap peran dari identitas dalam tindakan kolektif modern (*modern collective action*). Premis awal dari Melucci adalah bahwa di dalam masyarakat modern, menghadapi perubahan, pluralitas keanggotaan, dan pesan yang melimpah semua bergabung untuk melemahkan referensi tradisional dan sumber identitas, sehingga menciptakan tunawisma (*homelessness*) dari identitas personal. Hal ini berarti bahwa kecenderungan orang-orang untuk terlibat dalam suatu tindakan kolektif adalah terkait dengan kemampuan mereka untuk mengidentifikasikan identitas di tempat pertama. Hal ini berarti pula bahwa suatu konstruksi sosial dari identitas kolektif merupakan prasyarat utama dan prestasi besar dari Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*). Tingkat kecairan (*fluidity*) dari identitas dalam dunia modern dan dalam Gerakan sosial adalah terkait dengan kerapuhan dari organisasi gerakan. Melucci bersikeras bahwa Gerakan Sosial Baru dilihat sebagai konstruksi sosial yang sedang berlangsung, bukan sebagai objek kesatuan empiris, kodrat (pemberian), atau peristiwa tindakan tokoh dalam panggung. Berlawanan dengan konsep ini, kesatuan gerakan apaun mungkin dapat dicapai sebagai hasil dari suatu upaya daripada titik

awal dari tindakan kolektif. Dalam level yang lain, Melucci mengarahkan perhatian dari organisasi formal dengan menekankan bahwa tindakan kolektif banyak bersarang dalam jaringan dalam kelompok terendam bahwa kadang-kadang menyatu menjadi bentuk referensi diri organisasi untuk perjuangan, tetapi sering secara temporer. Dia dengan demikian menunjukkan bahwa kita berbicara sedikit dalam hal gerakan, dan lebih banyak dalam jaringan gerakan (*movement networks*) atau wilayah gerakan (*movement areas*) untuk menangkap sifat fana dari banyak mobilisasi temporer.

4. Alain Touraine:

Touraine melalui jaminan metasosial dari tatanan sosial (*social order*), berpendapat bahwa masyarakat dipandang sebagai produk dari tindakan sosial reflektif (*reflective social action*). Pertumbuhan kapasitas—Touraine menyebutnya historisitas (*historicity*), dari aktor-aktor sosial membangun baik sistem pengetahuan maupun perangkat teknis yang memungkinkan mereka untuk campur tangan dalam keberfungsian diri mereka sendiri, yang memungkinkan peningkatan produksisendiri dari masyarakat, yang menjadi ciri masyarakat pasca-industri atau masyarakat yang diprogram (*postindustrial or programmed society*). Kontrol historisitas merupakan objek dari perjuangan yang sedang berlangsung antara kelas-kelas yang didefinisikan oleh relasi dominan. Seperti kelas-kelas mengambil bagian dalam bentuk Gerakan sosial saat mereka masuk ke dalam perjuangan ini. Di dalam masyarakat pasca-industri (*postindustrial society*), kelas-kelas sosial utama terdiri dari konsumen/klien dalam peran kelas populer dan manajer/teknokrat sebagai kelas dominan. Arena atau lapangan utama dari konflik untuk kelas-kelas ini adalah kultur (*culture*), dan pusat kontes meliputi siapa saja yang ingin mengontrol pertumbuhan kapasitas masyarakat untuk mengelola diri sendiri (*self-management*). Negara menjadi tempat bagi peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengontrol historisitas, hal ini menjadi alasan untuk meyakini bahwa pusat konflik dalam masyarakat pasca-industri akan datang ke sekitar pusat institusi ini. Dalam formulasi terakhir, Touraine membatasi Gerakan Sosial Baru antara dua logika, yakni: *pertama*, sebagai sistem yang berupaya untuk meningkatkan produksi, uang, kekuasaan, dan informasi; dan

kedua, sebagai subjek yang berupaya untuk mempertahankan dan memperluas individu mereka sendiri.

D. Tipologi Teori Gerakan Sosial Baru

Menurut Buechler (1995: 457), secara umum teori-teori Gerakan Sosial Baru (GSB) dapat dikelompokkan ke dalam dua versi (tipe) yang berbeda, yakni versi politik (*political version*) dan versi kultural (*cultural version*). Perbedaan kedua versi ini tidak bersifat eksklusif, akan tetapi lebih sekedar pemahaman tentang perbedaan posisi dan beberapa dimensi tertentu saja. Adapun perbedaan kedua versi dari teori Gerakan Sosial Baru (GSB) dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 1. :
Versi Politik dan Kultural tentang Teori Gerakan Sosial Baru
(Political and Kultural Versions of New Sosial movement Theory)

Isu (Issue)	Versi Politik (Political Version)	Versi Kultural (Kultural Version)
Orientasi Umum (General Orientation)	Pro-Marxist	Post-Marxist
Teoritisi yang mewakili (Representative Theorist)	Manuel Castells	Alberto Melucci
Totalitas Sosial (Societal Totality)	Advanced capitalism	Information society
Gambaran Kekuasaan (Image of Power)	Sistemic, centralized	Diffuse, decentralized
Tingkat Analisis (Level of Analysis)	Macro, mesolevel, state- orientated	Meso, microlevel, civil society, everyday life.
Aktivitas Gerakan (Movement Activity)	Retains role for instrumental action toward strategic goals	Eschews strategic concerns in favor of symbolic expressions

Debat Pertama: Pandangan tentang Gerakan Baru (First Debate: View of New Movements)	Recognizes their role without rejecting role of working-class movements	Regards new movements as having displaced working-class movements
Debat Kedua: Orientasi Gerakan (Second Debate: Movement Orientations)	Potential for progressive orientations if allied with working-class movements	Sees new movements as defensive or rejects category of "progressive"
Debat Ketiga: Evaluasi tentang Gerakan (Third Debate: Evaluation of Movements)	Sees political movements as most radical, kultural movements as apolitical	Sees kultural movements as most radical, political movements as co-optable
Debat Keempat: Basis Sosial dari Gerakan (Fourth Debate: Sosial Base of Movements)	Analyzed in class term via contradictory locations, new class, or middle class	Analyzed in term of nonclass constituencies or issues and ideologies

Sumber: Buechler, 1995: 457

Pandangan (versi) politik tentang teori Gerakan Sosial Baru merupakan kategori pro-Marxist yang mengacu kepada hasil kerja para sarjana neo-Marxist. Seperti halnya semua teori gerakan sosial baru, versi politik memiliki model dari totalitas sosial dimana gerakan sosial baru muncul, namun versi ini lebih menekankan pada pemahaman sifat kapitalis yakni totalitas atas yang lainnya. Versi politik menawarkan klaim tentang hubungan antara wajah struktur level makro dari kapitalisme kontemporer dengan kemunculan dari gerakan sosial baru. Versi politik tentang teori gerakan sosial baru secara umum lebih berorientasi makro (*macro-oriented*) dan secara khusus lebih berorientasi pada negara (*state-oriented*). Mempertahankan perhatian dengan pertanyaan-pertanyaan strategis dan tindakan instrumental menjadi tujuan utama dari gerakan sosial, sambil mengakui pentingnya bentuk identitas (*identity formation*), definisi keluhan (*grievance definition*), dan artikulasi kepentingan (*interest articulation*) sebagai langkah-langkah antara (*intermediate steps*) dalam proses aktivisme gerakan. Dari pandangan umum para teorisi gerakan sosial baru sebagaimana sudah dijelaskan di atas, maka Castells lebih

dekat dengan tipe-tipe ideal dari perspektif politik, meskipun beberapa hasil kerja Touraine bisa juga dimasukkan ke dalam kelompok ini.

Dalam terminologi debat pertama atas kebaruan (*newness*) dari gerakan, versi politik tentang teori Gerakan Sosial Baru meyakini peran dari konstituen-konstituen baru dalam aktivitas sosial yang berbasiskan ras (*race*), jender (*gender*), nasionalitas (*nationality*) atau karakteristik-karakteristik lainnya, tetapi juga tidak mengabaikan potensi gerakan berbasis kelas (*class-based*) atau berbasis pekerja (*worker-based*) bersama kelompok-kelompok yang lainnya. Dalam terminologi debat kedua atas orientasi gerakan, versi politik memandang suatu potensi untuk perubahan proaktif dan progresif jika ada kedekatan koalisi dan aliansi antara gerakan berbasis kelas (*class based*) dan gerakan berbasis non-kelas (*nonclass-based*) dapat dipadukan. Dalam terminologi debat ketiga atas tantangan yang ditimbulkan gerakan sosial baru, versi politik mengkritik tentang sifat apolitik dari gerakan sosial baru yang lebih berorientasi kultural, dimana perspektif ini akan melihat sebagai membatasi potensi mereka untuk menghasilkan perubahan yang bermakna. Dalam terminologi debat keempat atas basis sosial (*social base*) dari gerakan, versi politik kemungkinan besar untuk mengidentifikasi basis sosial dari gerakan sosial baru dalam terminologi kelas melalui upaya membangun kompleksitas teori tentang struktur kelas kontemporer dan lokasi-lokasi yang bertentangan sebagai latar bagi aktivitas sosial.

Versi kultural dari teori gerakan sosial baru adalah post-Marxist dalam hal ini melampaui tradisi ini melalui pengajuan pemutusan radikal antara tipe dan bentuk gerakan masyarakat masa lalu dan sekarang, daripada mungkin yang ditemukan dalam versi politik. Sementara versi kultural memiliki model dari totalitas sosial, hal ini tidak ada identitas totalitas dalam terminologi dari kapitalisme tetapi lebih dalam terminologi kultural atau semiotik sebagaimana dalam masyarakat informasi yang menyembunyikan bentuk-bentuk dominasi. Versi kultural mengklaim tentang hubungan antara struktur sosial dan bentuk gerakan dengan menekankan sifat desentralisasi baik kekuasaan maupun resistensi. Dengan demikian, hal ini tidak secara khusus berorientasi makro (*macro-oriented*) atau berpusat pada negara (*state-centered*) tetapi difokuskan kepada kehidupan sehari-hari (*everyday life*), masyarakat sipil (*civil society*), dan membangun ruang bebas (*free spaces*) antara negara dan masyarakat sipil. Versi kultural menghindari pertanyaan-pertanyaan strategis dan

tindakan instrumental sebagai perangkat yang harus dihindari, sementara versi politik menekankan ekspresi dan eksplorasi simbolik yang justru menantang logika instrumental dari dominasi sistemik. Dari para teoritis umum, maka Melucci lebih dekat dengan tipe ideal kultural, meskipun beberapa hasil kerja Habermas juga bisa masuk ke dalam kategori ini.

Dalam terminologi debat pertama, versi kultural tentang teori Gerakan Sosial Baru tidak hanya menekankan pada konstituen-konstituen sosial baru akan tetapi juga berpendapat bahwa konstituen yang berbasiskan pekerja lama untuk aktivitas sosial telah melampaui bersama dengan kapitalisme industri. Dalam terminologi debat kedua, versi kultural cenderung memandang aktivitas sebagai reaksi defensif terhadap dominasi sistem. Dalam terminologi debat ketiga, versi kultural menolak label apolitik yang seringkali menyerang gerakan kulturalis melalui argumenasi bahwa gerakan politik adalah mudah untuk dikooptasi dan kekuatan gerakan kultural pada medal simbolik dapat berbuat lebih banyak mengekspos bentuk kontemporer dari kekuasaan daripada gerakan politik konvensional. Dalam terminologi debat keempat, versi ini lebih memungkinkan untuk mengidentifikasi basis sosial dari gerakan sosial baru dalam terminologi non kelas, dengan mengacu kepada baik identitas-identitas dan status-status lain atau nilai-nilai dan ideologi yang menentukan konstituen gerakan, bukan oleh lokasi kelas.

E. Perspektif Teori Identitas (*The Identity-Oriented Theory*)

Teori Berorientasi Identitas (*The Identity-Oriented Theory*) yang berakar dari tradisi ilmu sosial di Eropa merupakan salah satu orientasi teori kontemporer dalam gerakan sosial baru (Singh, 2001: 105)

a. Perspektif Teoritik

Menurut Singh (2001: 113), teori berorientasi identitas (*the Identity-Oriented theory*) tentang gerakan sosial kontemporer (*contemporary social movements*) menjelaskan asumsi dasar sebagai kritik terhadap perspektif teori Mobilisasi Sumberdaya (*the Resource Mobilisation Theory*). Basis rasionalitas dari teori mobilisasi sumberdaya dianggap tidak cukup memadai dalam menjelaskan gerakan sosial baru. Teori mobilisasi sumberdaya dianggap gagal dalam menjelaskan

beberapa ekspresi dari beberapa bentuk gerakan sosial baru, seperti: gerakan feminis, gerakan lingkungan, gerakan damai, gerakan perlucutan senjata, dan gerakan kebebasan lokal.

Teori Identitas (*the Identity-Oriented Theory*) sangat dominan di Eropa, sebagai oposisi atas penjelasan (eksplanasi) rasionalitas tentang gerakan sosial kontemporer yang umumnya dirumuskan dan dipraktikkan oleh sarjana-sarjana di Amerika, khususnya eksplanasi yang digambarkan oleh teori Mobilisasi Sumberdaya (*the Resource Mobilisation theory*). Dibandingkan dengan teori Mobilisasi Sumberdaya yang memfokuskan dan terikat secara signifikan dengan rasionalisme dan materialisme (*rationalism and materialism*), maka teori Identitas (*the Identity-Oriented Theory*) secara umum mempunyai sifat-sifat non-materialistik dan ekspresif (*nonmaterialistic and expressive in nature*). Teori Identitas (*the Identity-Oriented Theory*) membahas pertanyaan-pertanyaan tentang integrasi dan solidaritas dari kelompok yang terlibat dalam aksi kolektif. Teori Identitas (*the Identity-Oriented Theory*) menolak usaha (dari teori Mobilisasi Sumberdaya) untuk memaksakan model rasionalitas dari neo-utilitarian dan voluntaristik dalam menjelaskan aksi kolektif dan gerakan sosial (*social movements and collective actions*) (Singh, 2001, 113).

Paradigma teori Identitas (*the Identity-Oriented Theory*), meskipun meletakkan pembahasan ke dalam pertanyaan-pertanyaan tentang solidaritas dan integrasi. Menurut pandangan teori ini, baik konsep Durkhemia tentang anomie dan gangguan (*anomie and breakdown*), atau pandangan Smelserian tentang ketegangan (*strain*), arus pendek/"korsleting" (*short-circuiting*), keyakinan umum (*generalized beliefs*), dan sebagainya, dianggap kurang relevan untuk menjelaskan tentang perilaku kolektif (*collective behavior*). Penyimpangan sosial (*social aberration*), sebagai gagasan tentang anomie atau gangguan sosial (*anomie or social breakdown*), tidak bisa dijadikan jendela dalam memandang berbagai dimensi tentang Gerakan sosial.

Para pendukung teori Identitas, meskipun sementara mereka menerima beberapa elemen repertoar dari teori Marxist seperti gagasan tentang perjuangan (*struggle*), mobilisasi (*mobilization*), kesadaran (*consciousness*), dan solidaritas (*solidarity*), namun mereka menolak tesis reduksionisme dan deterministik materialisme dan

konsep-konsep basis materialistik tentang formasi sosial (*social formation*). Determinisme Marxist, dan konsekuensi yang menyangkut reduksionisme, saat ini mulai ditinggalkan karena redundansi (*redundancy*) teoritis mereka; terkesan berlebih-lebihan. Formasi-formasi sosial baru (*new social formations*) dan gerakan sosial baru (*new social movements*) seperti ekologi (*ecology*), feminisme (*feminism*), perdamaian (*peace*) dan mobilisasi akar rumput (*grassroots mobilisation*) melampaui ide tentang kelas dan melewati batas kondisi material. Para partisipan GSB menegaskan bahwa tindakan diri mereka tidak dalam rangka mengusung nilai-nilai tenaga kerja (*labour values*) akan tetapi lebih mengusung nilai-nilai kemanusiaan secara luas (*whole human*).

Dengan demikian, teori Identitas merupakan teori yang berorientasi *post-Marxism*. *Post-Marxism* sebagai cara (mode) berpikir kritis merupakan logika tentang bentuk-bentuk sosial (*social forms*) dari *post-materialism*, *post-industrialism* dan *post-capitalism* (Singh, 2001: 114). Bentuk-bentuk sosial ini, merupakan sifat yang muncul dari refleksi kritis kontemporer dan aplikasi empirisme ekspresif sebagai metode dalam memahami konsepsi tentang *post-society*, *post-sociology* dan *new social movements*. Merupakan kesepakatan umum (*general agreement*) bahwa gerakan berorientasi identitas (*identity oriented movements*) dan tindakan kolektif (*collective actions*) merupakan ekspresi tentang upaya penyelidikan tentang identitas (*identity*), otonomi (*autonomy*), dan pengakuan (*recognition*) manusia.

Menurut Hunt dan Benford (dalam Snow, Soule, & Kriesi, 2004: 432), dalam literatur ilmu sosial tentang gerakan, konsep identitas kolektif (*collective identity*) digunakan secara luas. Identitas kolektif dipandang baik sebagai pendahulu (prasyarat) yang diperlukan bagi munculnya tindakan kolektif maupun sebagai hasil dari gerakan tindakan kolektif. Para peneliti telah menggunakan identitas kolektif dalam berbagai teori dan pada semua level analisis. Identitas kolektif telah menjadi pusat kajian analisis tentang kemunculan (*emergence*) gerakan, lintasan (*trajectories*) gerakan, dan dampak (*impacts*) gerakan. Kajian tentang Identitas juga masuk ke dalam dimensi analisis konstruksi ketidakpuasan dan proses-proses pembingkaihan (*framing*), motivasi keikutsertaan (*motivation for participation*), pilihan taktik aktivis (*activists tactical choices*), hasil (*life-course outcomes*), dan emosi (*emotions*). Identitas kolektif tampaknya telah menjadi konsep sentral untuk hampir setiap

perspektif teoritis dan pertanyaan-pertanyaan empiris yang terkait dengan studi-studi kontemporer tentang gerakan sosial.

Dalton dan Kuechler (Hunt & Benford, 2004: 437) menyatakan bahwa GSB dalam masyarakat pasca-industri (*postindustrial societies*) berbeda dari gerakan terdahulu yang berbasis kelas (*class based*) dalam terminologi ideologi (*ideology*), sumber-sumber (*origins*), struktur (*structure*), gaya (*style*), dan tujuan (*goals*). Dalam beberapa hal, identitas kolektif (*collective identity*) menggantikan kesadaran kelas (*class consciousness*) sebagai faktor yang menyebabkan mobilisasi dan keterlibatan individu dalam gerakan sosial. Perspektif gerakan sosial baru menjelaskan bahwa pencarian identitas kolektif merupakan aspek sentral dalam formulasi gerakan (Johnston, dalam Hunt & Benford, 2004). Sebagaimana yang ditunjukkan Klandermans (Hunt & Benford, 2004: 437), identitas kolektif dan partisipasi dihipotesiskan berhubungan, yang sangat didukung oleh bukti empiris yang ada, bahwa identifikasi yang kuat bersama kolektivitas menyebabkan partisipasi.

Berbagai kajian yang membahas tentang perkembangan dan identifikasi konsep identitas kolektif (*collective identity*) telah banyak dilakukan, baik menurut perspektif Amerika maupun di Eropa Kontinental. Kajian awal dilakukan oleh para teoritis aliran Chicago (*Chicago School*) yang menggunakan pandangan klasik dan psikologi sosial (*classical and social-psychological insights*) atas perkembangan perspektif dari identitas kolektif.

Sebagai contoh, Blumer (Hunt & Benford, dalam Snow, Soule & Kriesi, 2004: 436) berpendapat bahwa gerakan harus mengembangkan semangat korps (*esprit de corps*) di antara anggota melalui konstruksi *in-group-out-group relationships*, memberikan kesempatan untuk interaksi formal, serta ritual dan seremoni formal organisasi (*organizing formal ceremonies and rituals*). Hasil pemikiran Blumer mengantisipasi formulasi tentang identitas kolektif dengan perhatian terhadap kebutuhan gerakan dalam membangun ideologi dan membina semangat atau perasaan semangat dan energi.

Klapp (Hunt & Benford, dalam Snow, Soule & Kriesi, 2004: 437), menggunakan pendekatan sosiologi klasik (*classical sociological approaches*) dan interaksionisme simbolik (*symbolic interactionism*) dalam membangun

pandangannya tentang Gerakan sosial. Klapp menyatakan bahwa di masa lalu masyarakat Amerika mengalami penderitaan akibat anomie (*anomie*), keterasingan (*alienation*), pemisahan (*estrangement*), dan kemiskinan simbolik (*symbolic poverty*), bahwa pusat perhatian aktor gerakan di Amerika saat itu adalah bagaimana mengembangkan makna dari identitas kolektif atas kondisi ini. Secara umum, hasil kerja Klapp menegaskan bahwa perilaku kolektif (*collective behavior*) adalah memiliki keterkaitan yang erat dengan konstruksi dari identitas kolektif.

Menurut Hunt dan Benford (Snow, Soule, & Kriesi, 2004: 450) beberapa penelitian yang secara khusus mengkaji tentang Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*) menunjukkan bahwa aksi gerakan kolektif (*movement collective action*) muncul secara langsung dari identitas kolektif. Meskipun, hasil studi yang lainnya menunjukkan bahwa identitas kolektif muncul dari aksi gerakan kolektif (*movement collective action*). Kedua jenis temuan ini menunjukkan temuan yang sama-sama akurat. Data hasil studi kasus secara jelas menyatakan bahwa terdapat asosiasi antara gerakan aksi kolektif (*movement collective action*) dan identitas kolektif. Terdapat kesepakatan dan beberapa bukti pendukung bahwa penelusuran tentang identitas personal dan kolektif adalah hal yang sangat penting untuk partisipasi individu dalam gerakan, menjelaskan bagaimana dan mengapa hal ini terjadi.

Lebih lanjut, Hunt dan Benford (Snow, Soule, & Kriesi, 2004: 450) menyatakan bahwa identitas kolektif dan konsep-konsep lainnya yang berhubungan seperti solidaritas (*solidarity*) dan komitmen (*commitment*), merupakan suatu kemajuan yang sangat menarik dalam memahami tentang gerakan sosial. Lebih penting lagi adalah bahwa identitas kolektif, solidaritas, dan komitmen dapat membantu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat psikologis (*psychological*), psikologi sosial (*social-psychological*), dan sosiologi makro (*macrosociological*) tentang gerakan sosial.

Teori tentang aksi kolektif secara sistematis menjelaskan konsep identitas kolektif (*collective identity*), solidaritas (*solidarity*), dan komitmen (*commitment*). Ketiga konsep ini membentuk basis sistematis, teori komprehensif yang mensintesisan perspektif-perspektif psikologi, psikologi sosial dan sosiologi makro. Secara umum, identitas kolektif (*collective identity*) menjelaskan bahwa kelompok

individu memiliki kepentingan (*interest*), nilai (*values*), perasaan (*feelings*) dan tujuan (*goals*) bersama. Identitas kolektif di dalamnya meliputi menekankan pada komitmen dari individu, menekankan pada solidaritas dari kolektivitas, serta menyoroti secara lebih luas, struktur makrososial dan dinamika yang melampaui gerakan kolektivitas, termasuk yang membantu membentuk dan memberikan interes, konteks politik, simbol kultur, tujuan, dan sebagainya. Sementara, komitmen (*commitment*) memfokuskan perhatian kepada investasi individu dalam garis aksi individu yang konsisten dengan garis aksi yang dimunculkan oleh kolektivitas. Komitmen (*commitment*) membantu menjelaskan hubungan individu dan kolektivitas melalui perhatian yang utama kepada aktivitas individu. Sedangkan, solidaritas (*solidarity*) memberikan perhatian kepada tingkat dari kohesivitas sosial yang eksis dalam dan bersama kelompok. Solidaritas melakukan eksplorasi tentang hubungan individu dan kolektivitas dengan fokus utama pada kolektivitas.

Johnston dan Klandermans (1995: 44-45) mendefinisikan identitas kolektif (*collective identity*) sebagai saling interaksi dan berbagi yang diproduksi oleh beberapa individu (atau kelompok pada level yang lebih kompleks) dan memusatkan orientasinya pada tindakan serta peluang dan kendala dimana aksi terjadi. Terdapat tiga unsur dalam identitas kolektif, yakni:

- (1) Identitas kolektif sebagai proses yang melibatkan definisi kognitif tentang tujuan, sarana, dan bidang tindakan;
- (2) Identitas kolektif adalah sebagai proses yang mengacu kepada jaringan relasi aktif antara aktor yang berinteraksi (*interact*), berkomunikasi (*communicate*), saling mempengaruhi (*influence each other*), negosiasi (*negotiate*), dan membuat keputusan (*make decisions*). Bentuk organisasi dan model kepemimpinan, saluran komunikasi, dan teknologi komunikasi merupakan bagian dari jaringan relasi; dan
- (3) Tingkat tertentu dari investasi emosional, yang memungkinkan individu merasakan seperti sebagai bagian dari suatu kesatuan.

b. Produksi dan Cara Kerja Identitas

Identity (identitas), yakni ciri-ciri atau tanda-tanda khusus. Pengertian identitas antara lain: (1) mengacu kepada istilah Freud, maka identitas berarti berusaha menjadi seperti orang lain; (2) kesamaan sifat-sifat dasar dengan mengenyampingkan perbedaan-perbedaan superfisial; suatu perasaan kepribadian yang tetap sama dan berlanjut terus-menerus (Kartono & Gulo, 1987: 216).

Menurut Abercrombie, Hill, & Turner (2010: 266) identitas adalah kesadaran akan diri, kedirian, tentang sosok yang seperti apa dirinya itu. Identitas selalu melibatkan persamaan dan perbedaan. Terdapat kecenderungan untuk melihat identitas sebagai sesuatu yang tetap, namun para sosiolog sebagian besar berpendapat bahwa identitas itu cair dan bisa berubah-ubah.

Menurut Della Porta dan Diani (2006: 93), konstruksi identitas (*identity construction*) tidak dipandang secara sederhana sebagai prakondisi (*precondition*) untuk suatu tindakan kolektif (*collective action*). Identitas sosial aktor dalam suatu periode waktu tertentu, akan menuntun perilaku apa yang akan dimunculkan oleh aktor tersebut berikutnya. Mengutip pendapat Tourine, Della Porta dan Diani menyatakan bahwa suatu tindakan terjadi ketika aktor mengembangkan kemampuan untuk mendefinisikan diri mereka sendiri, aktor sosial yang lainnya, dan topangan dari hubungan timbal-balik (*mutual relationship*) diantara mereka.

Dari uraian penjelasan perspektif teori identitas, maka dapat dirumuskan tentang faktor-faktor determinan terjadinya Gerakan sosial, yaitu: (1) Identitas kolektif; (2) Solidaritas; dan (3) Komitmen.

Sebagaimana dikatakan oleh Hunt dan Benford (Snow, Soule, & Kriesi, 2004: 450) bahwa identitas kolektif dan konsep-konsep lainnya yang berhubungan seperti solidaritas (*solidarity*) dan komitmen (*commitment*), merupakan suatu kemajuan yang sangat menarik dalam memahami tentang Gerakan sosial, dimana identitas kolektif, solidaritas, dan komitmen dapat membantu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat psikologis (*psychological*), psikologi sosial (*social-psychological*), dan sosiologi makro (*macrosociological*) tentang gerakan sosial. Ketiga konsep ini, yakni: identitas kolektif (*collective identity*), solidaritas (*solidarity*), dan komitmen (*commitment*) membentuk basis sistematis komprehensif

yang mensintesisakan perspektif-perspektif psikologi, psikologi sosial dan sosiologi makro dalam mengkaji Gerakan sosial. Secara umum, identitas kolektif (*collective identity*) menjelaskan bahwa kelompok individu memiliki kepentingan (*interest*), nilai (*values*), perasaan (*feelings*) dan tujuan (*goals*) bersama. Identitas kolektif di dalamnya meliputi menekankan pada komitmen dari individu, dan pada solidaritas dari kolektivitas, serta menyoroti secara lebih luas, struktur makrososial dan dinamika yang melampaui gerakan kolektivitas, termasuk yang membantu membentuk dan memberikan interes, konteks politik, simbol kultur, tujuan, dan sebagainya. Menurut Hollinger (2006: 23-31), untuk membagi identitas dengan orang-orang yang lainnya, maka harus ada perasaan solidaritas di antara orang-orang tersebut. Solidaritas di antara orang-orang akan muncul dalam suatu kondisi dimana identitas kolektif terjadi.

Sementara, komitmen (*commitment*) memfokuskan perhatian kepada investasi individu dalam garis aksi individu yang konsisten dengan garis aksi yang dimunculkan oleh kolektivitas. Komitmen (*commitment*) membantu menjelaskan hubungan individu dengan kolektivitas melalui perhatian yang utama kepada aktivitas individu. Sedangkan, solidaritas (*solidarity*) memberikan perhatian kepada tingkat kohesivitas sosial yang eksis di dalam dan bersama kelompok. Solidaritas melakukan eksplorasi tentang hubungan individu dan kolektivitas dengan fokus utama pada kolektivitas.

Selanjutnya, penjelasan tentang kaitan antara identitas kolektif, solidaritas, dan komitmen dengan gerakan sosial, sebagai berikut:

Pertama; identitas kolektif (*collective identity*) dan gerakan sosial. Menurut Snow (dalam Snow, Soule, & Kriesi, 2004: 440-441), identitas kolektif adalah berbagi perasaan tentang “kami” (*we-ness*) dan lembaga kolektif (*collective agency*). Selanjutnya Polleta dan Jasper (2001: 284), memberikan definisi identitas kolektif sebagai kognitif individu, moral, dan emosional yang dihubungkan dengan masyarakat luas, kategori, praktis, atau institusi. Identitas kolektif menunjukkan persepsi tentang status atau hubungan bersama yang mungkin bersifat imajinasi daripada pengalaman secara langsung, dan dibedakan dari identitas personal, meskipun identitas kolektif merupakan bagian dari identitas personal. Identitas

kolektif mungkin pertama kali dikonstruksi oleh orang luar (*outsiders*), tetapi tergantung atas bagaimana orang-orang yang dikonstruksi itu penerimanya. Identitas kolektif diekspresikan dalam materi kultural (*cultural materials*), seperti: nama (*names*), narasi (*narratives*), simbol (*symbols*), gaya verbal (*verbal styles*), ritual (*rituals*), pakaian (*clothing*), dan sebagainya, meskipun tidak semua materi kultural mengekspresikan suatu identitas kolektif. Identitas kolektif tidak berimplikasi pada kalkulasi rasional sebagai evaluasi pilihan interes. Tidak juga seperti halnya ideologi, identitas kolektif menyertakan perasaan positif tentang anggota-anggota kelompok yang lainnya.

Dari definisi identitas kolektif yang dikemukakan Polleta dan Jasper ini, dapat disimpulkan bahwa: (1) identitas kolektif memiliki karakter multidimensional yang di dalamnya menyangkut elemen-elemen kognitif, moral dan emosional; (2) identitas kolektif dihubungkan dengan, namun dibedakan dari beberapa konsep, seperti: ideologi, identitas personal, dan motivasi; dan (3) identitas kolektif mengidentifikasi beberapa referensi atau indikator (Snow, Soule, & Kriesi, 2004: 441).

Klandermans, Sabucedo, Rodriguez, dan Weerd (2002: 238), mengacu kepada pendapat Tajfel (1981) serta Tajfel dan Turner (1986), mengemukakan bahwa terdapat empat komponen dalam identitas kolektif, yakni: (1) komponen kognitif, yang mengacu kepada proses tentang kategorisasi; (2) komponen evaluasi, yang mengacu kepada pemahaman tentang posisi relatif kelompok terhadap kelompok-kelompok yang lain; (3) komponen afektif, yang mengacu kepada tingkat keterikatan dengan kelompok atau kategori; dan (4) komponen behavioral, yang mengacu kepada partisipasi dalam kelompok identitas.

Taylor dan Whittier (Snow, Soule, & Kriesi, 2004: 441) mengemukakan tentang tiga alat analisis untuk memahami bagaimana konstruksi suatu identitas kolektif, yaitu: (1) Batas-batas (*boundaries*); (2) Kesadaran (*consciousness*); dan (3) Negosiasi (*negotiation*). Ketiga alat analisis identitas kolektif ini, yakni batas-batas (*boundaries*), kesadaran (*consciousness*); dan negosiasi (*negotiation*) meskipun analisisnya berbeda namun secara empiris ketiganya saling terkait. Batas-batas (*boundaries*) mengacu kepada struktur sosial, psikologis, dan fisik yang membangun

perbedaan antara kelompok penentang dan kelompok dominan (*challenging group and dominant group*). Kesadaran (*consciousness*) mengacu kepada kerangka kerja interpretatif yang memunculkan perjuangan kelompok penentang untuk mendefinisikan dan mewujudkan kepentingannya. Sedangkan negosiasi (*negotiation*) meliputi simbol-simbol dan tindakan sehari-hari dari kelompok sub-ordinat yang digunakan untuk melawan dan merestrukturisasi dominasi sistem sosial.

Dewasa ini, para pakar khususnya para psikolog sosial secara sistematis mulai melakukan investigasi tentang bagaimana proses-proses identitas di dalam konteks tindakan kolektif (Klandermans, Sabucedo, Rodriguez, dan Weerd, 2002: 235-251). Kelly dan Breinlinger (1996) mengkaji tentang bagaimana peran identitas kolektif dalam mendorong partisipasi pada gerakan buruh dan gerakan perempuan. Simon (1998) melakukan studi tentang peran dari identitas kolektif dalam mendorong partisipasi pada gerakan gay dan gerakan kaum manula. Mummendey, Klink, Mielke, Wenzel, dan Blanz (1999) mengkaji bagaimana peran dari identifikasi kelompok dalam preferensi tindakan kolektif di bekas Jerman Timur. De Weerd dan Klandermans (1999) mengkaji tentang protes petani di Belanda, dan Sturmer (2000) melakukan studi tentang proses-proses identitas dalam gerakan gay. Dari berbagai hasil studi ini menunjukkan bahwa paling tidak ada dua cara untuk mendorong partisipasi dalam suatu gerakan sosial, yakni: *pertama*, diarahkan oleh alasan-alasan instrumental tentang untung-rugi (*cost and benefits*) tentang partisipasi; dan *kedua*, diarahkan oleh proses-proses dari identifikasi. Proses-proses identitas memiliki efek baik langsung maupun tidak langsung terhadap partisipasi dalam tindakan kolektif (protes) (Klandermans, Sabucedo, Rodriguez, dan Weerd, 2002: 236).

Kedua; solidaritas dan gerakan sosial. Durkheim memberikan perhatian terhadap kajian solidaritas melalui tulisannya tentang *The Division of Labor in Society*. Durkheim menjelaskan bahwa fungsi sesungguhnya dari pembagian kerja adalah untuk menciptakan solidaritas antara dua orang atau lebih. Durkheim membagi dua tipe solidaritas, yakni solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Masyarakat yang ditandai oleh solidaritas mekanis menjadi satu dan padu karena seluruh orang adalah generalis. Ikatan dalam masyarakat seperti ini terjadi karena mereka terlibat dalam aktivitas yang sama dan memiliki tanggung jawab yang sama. Sebaliknya, masyarakat yang ditandai oleh solidaritas organis bertahan bersama justru dengan

perbedaan yang ada di dalamnya, dengan fakta bahwa semua orang memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda-beda (Ritzer & Goodman, 2009: 90-92).

Menurut Fireman dan Gamson (Snow, Soule, & Kriesi, 2006: 439), solidaritas berakar dalam konfigurasi relasional yang menghubungkan anggota-anggota kelompok yang satu dengan yang lainnya. Blumer (Snow, Soule, & Kriesi, 2006: 439), memberikan pandangan tentang solidaritas melalui terminologi *of esprit de corps*, yakni perasaan pengabdian dan antusiasme untuk suatu kelompok yang dibagi oleh anggotanya. *Esprit de corps* menekankan bahwa solidaritas memiliki dua wajah, yakni: (1) suatu persekutuan badan yang dapat diidentifikasi sebagai kolektivitas (*identification of*); dan (2) suatu spirit yang melibatkan perasaan identifikasi dengan kelompok (*identification with*). Dengan demikian, solidaritas mensyaratkan adanya *identification of* dan *identification with*, yakni identifikasi entitas kolektivitas dan identifikasi partisipan dengan kumpulan aktor. Secara konseptual, solidaritas dibedakan dari identitas kolektif, namun dua konstruk ini saling terpadu. Sejalan dengan pandangan Melluci, selanjutnya Della Porta dan Diani (Snow, Soule, & Kriesi, 2006: 439) memberikan definisi solidaritas sebagai kemampuan aktor untuk mengenali orang lain dan diakui sebagai milik unit sosial yang sama. Solidaritas memiliki dua fokus fundamental, yaitu solidaritas internal dan solidaritas eksternal. Solidaritas internal difokuskan ke dalam kelompok dan kepada para anggota kelompok, sedangkan solidaritas eksternal adalah suatu identifikasi dari (*identification of*) dan identifikasi dengan (*identification with*) kelompok. Konstruksi dari solidaritas internal dan solidaritas eksternal tergantung dari pembingkaihan (*framing*) dari pandangan dunia (*worldviews*) atau ideologi (Benford and Snow; dalam . Snow, Soule, & Kriesi, 2006: 439).

Solidaritas memiliki dua ciri, yaitu *corpus* dan *spiritus*. Aspek *Corpus* dalam solidaritas terkait dengan ciri-ciri fisik tubuh (*body*) sebagai sarana untuk realitas pengalaman dan merupakan komponen esensial dari identitas personal dan sosial. Identitas kolektif tergantung atas identifikasi fisik tubuh dengan aktor terkait. Bagi beberapa kelompok, identifikasi fisik aktor diperlukan sebagai gambaran atau citra entitas aktual. Sebagai contoh, Organisasi Militer menunjukkan citranya melalui penggunaan baju seragam (*uniforms*) sebagai suatu kesatuan. Kelompok-kelompok lainnya, termasuk gerakan sosial, menggunakan berbagai cara untuk membangun

lingkaran keanggotaan, misalnya dengan memakai T-shirts, stiker, dan tanda-tanda yang lainnya (Snow, Soule, & Kriesi, 2006: 439). Sedangkan aspek *spiritus* dalam solidaritas, sebagaimana dikatakan Blumer bahwa solidaritas melibatkan perasaan memiliki terhadap kolektifitas. Solidaritas mengisyaratkan suatu perasaan tentang loyalitas dan interes emosional (Benford dan Hunt, Gamson, Taylor dan Whittier; dalam Snow, Soule, & Kriesi, 2006: 439).

Ketiga; Komitmen dan Gerakan sosial. Sebagaimana solidaritas, komitmen juga dipandang sebagai kunci untuk mengeksplorasi tentang partisipasi dalam gerakan sosial. Zurcher dan Snow (Snow, Soule, & Kriesi, 2006: 440) menyatakan bahwa komitmen (*commitment*) bersifat relatif, bervariasi dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya, termasuk juga dalam gerakan yang sama. Kanter (Snow, Soule, & Kriesi, 2006: 440) memberikan pandangan yang berbeda, menurutnya komitmen adalah kesediaan atau kerelaan diri untuk syarat bagi suatu relasi sosial.

Bagi Kanter, komitmen mengacu kepada kerelaan seseorang untuk mencapai syarat-syarat bagi suatu tindakan sosial. Komitmen dapat dipandang sebagai identifikasi individual dengan kolektifitas yang mengarahkan kepada pelengkap instrumental, afektif, dan moral bagi investasi aktivitas gerakan. Menurut Kanter (1968: 499-517), komitmen dapat didefinisikan sebagai proses melalui mana kepentingan individu menjadi terikat dengan pola-pola organisasi sosial dari perilaku yang dipandang dapat memenuhi kepentingannya, sebagai ekspresi alami dan kebutuhan-kebutuhan dari orang. Definisi komitmen yang dikemukakan Kanter ini memiliki kesamaan dengan pandangan Parson tentang institusionalisasi (*institutionalization*), yakni integrasi tentang harapan-harapan dari aktor dalam sistem yang sesuai (relevan) dengan peran pola-pola normatif tentang nilai-nilai bersama.

Meyer dan Allen (2007), berdasarkan hasil penelitiannya, kemudian merumuskan bahwa terdapat tiga karakteristik komitmen dalam organisasi, yaitu: komitmen afektif (*affective commitment*), komitmen kontinuitas (*continuance commitment*), dan komitmen normatif (*normative commitment*). Komitmen afektif (*affective commitment*) didefinisikan sebagai emosi positif keterikatan dengan organisasi. Komitmen afektif (*affective commitment*) merupakan komponen yang mendorong

komitmen. Para anggota suatu kelompok (organisasi) yang memiliki komitmen afektif dengan kuat akan mengidentifikasi dirinya dengan tujuan dari kelompok (organisasi) dan memunculkan hasrat untuk menjadi bagian dari kelompok (organisasi) tersebut. Komitmen kontinuitas (*continuance commitment*) merupakan komponen kebutuhan atau keuntungan dibandingkan apabila tidak menjadi bagian dari anggota kelompok (organisasi). Seseorang akan merasa rugi apabila dia tidak menjadi anggota atau meninggalkan kelompok (organisasi) tersebut. Seorang individu mungkin berkomitmen terhadap suatu organisasi karena dia memahami bahwa resiko biaya yang akan ditanggung terlalu tinggi apabila dia kehilangan keanggotaannya dalam kelompok (organisasi) tersebut. Sedangkan komitmen normatif berkaitan dengan alasan seseorang menjadi bagian dari suatu kelompok (organisasi) karena perasaan sebagai suatu kewajiban (*obligation*).

BAB VI

TEORI MOBILISASI SUMBERDAYA DAN TEORI PELUANG POLITIK

A. Teori Mobilisasi Sumberdaya

Dalam disiplin sosiologi dewasa ini, teori Mobilisasi Sumberdaya (*the Resource Mobilisation Theory*) merupakan kerangka teoritik yang cukup dominan dalam menganalisis gerakan sosial dan tindakan kolektif (Buechler, 1993: 217). Menurut Cohen (Singh, 2001: 106), para teoritis mobilisasi sumberdaya (*resource mobilization*) mengawali tesis mereka dengan penolakan atas perhatian terhadap peran dari perasaan (*feelings*) dan ketidakpuasan (*grievances*), serta penggunaan kategori psikologi dalam memahami Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*). Senada dengan Cohen, Zurcher dan Snow (dalam Klandermans, 1984: 583) menyatakan bahwa *Resource Mobilization Theory (RMT)* merupakan reaksi atas pandangan tradisional dari teori-teori psikologi sosial tentang gerakan sosial. Para teoritis psikologi sosial umumnya mengkaji partisipasi orang-orang dalam suatu gerakan sosial atas dasar sifat-sifat kepribadian (*personality traits*), marginalisasi dan keterasingan (*marginality and alienation*), serta ketidakpuasan dan ideologi (*grievances and ideology*).

Para teoritis yang berdiri dalam arus pemikiran ini (seperti Oberschall, 1973), mempertanyakan asumsi konvensional bahwa secara umum para aktor mobilisasi kolektif adalah orang-orang yang mengalami alienasi dan ketegangan sosial. Asumsi dasar paradigma mobilisasi sumberdaya adalah bahwa gerakan kontemporer mensyaratkan sebetulnya komunikasi dan organisasi yang canggih, ketimbang terompet dan tambur dari gerakan “lama”. GSB adalah sebuah sistem mobilisasi yang terorganisir secara rasional (Singh, 2010: 135).

Resource Mobilization Theory (RMT), pertama kali diperkenalkan oleh Anthony Oberschall (Locher, 2002: 258). Oberschall mengkritik *Mass Society Theory* yang dikembangkan Kornhauser, yang pada waktu itu merupakan perspektif yang sangat dominan dalam mengkaji gerakan sosial (*social movements*). Menurut Oberschall,

mass society theory tidak mampu ketika menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dalam gerakan anti-demokrasi, seperti Gerakan Nazi (*Nazism*) di Jerman.

Resource Mobilization Theory (RMT), memfokuskan perhatiannya kepada proses-proses sosial yang memungkinkan muncul dan berhasilnya suatu gerakan. *Resource Mobilization Theory* lebih banyak memberikan perhatian terhadap faktor-faktor ekonomi dan politik daripada *Mass Society Theory* atau *Relative Deprivation Theory*, serta kurang memberikan perhatian terhadap sifat-sifat psikologis dari anggota gerakan. Teori ini juga dibangun tidak didasarkan atas asumsi bahwa terdapat motivasi individu ketika bergabung dalam suatu gerakan, dan adanya keterasingan individu (*individual alienation*) adalah dianggap tidak relevan. *Resource Mobilization Theory* berasumsi bahwa dalam suatu masyarakat dimana muncul ketidakpuasan maka cukup memungkinkan untuk memunculkan sebuah gerakan sosial. Faktor organisasi dan kepemimpinan merupakan faktor yang dapat mendorong atau menghambat suatu gerakan sosial (*Social movements*). Menurut Oberschall (Locher, 2002: 259), istilah mobilisasi (*mobilization*) mengacu kepada proses pembentukan kerumunan, kelompok, asosiasi, dan organisasi untuk mencapai suatu tujuan kolektif.

Klandermans (1984: 583), dengan mengutip pendapat Oberschall, Gamson, Marx dan Wood, McCarthy dan Zald, dan Snow, menyatakan bahwa *Resource Mobilization Theory (RMT)* menekankan pada pentingnya faktor-faktor struktural (*structural factors*), seperti ketersediaan sumberdaya (*the availability of resources*) untuk kolektivitas dan posisi individu dalam jaringan sosial, serta menekankan rasionalitas tentang partisipasi dalam suatu gerakan sosial. Partisipasi dalam gerakan sosial dipandang bukan sebagai konsekuensi dari sifat-sifat predisposisi psikologis, tetapi sebagai hasil proses-proses keputusan rasional dimana orang melakukan pertimbangan untung dan rugi (*reward and cost*) atas keterlibatannya dalam suatu gerakan sosial. Sejalan dengan pandangan Klandermans, selanjutnya Waterman (Pichardo, 1988: 98) menyatakan bahwa mobilisasi sumberdaya (*resource mobilization*) pada dasarnya suatu teori yang mengkaji rasionalitas dari perilaku gerakan sosial. Menurut Fireman dan Gamson (Pichardo, 1988: 98), esensi dari *Resource Mobilization Theory (RMT)* adalah upaya untuk mencari basis rasionalitas tentang bentuk dan partisipasi dalam suatu gerakan sosial.

Beberapa teoritis telah melakukan kajian untuk memahami basis rasionalitas partisipasi dalam suatu gerakan sosial. Misalnya Olson (Pichardo, 1988: 98) mengembangkan model utilitarian untuk menjelaskan partisipasi perilaku kolektif dan menyatakan bahwa untuk dapat memahami mengapa individu terlibat dalam suatu perilaku kolektif maka harus dianalisis tentang konsep imbalan dan biaya (*reward and cost*) yang dialami oleh individu tersebut. Berbagai bentuk biaya (*cost*) yang dihubungkan dengan partisipasi dalam aktivitas kolektif meliputi antara lain: waktu (*time*), uang (*money*), keamanan personal (*personal safety*), dan hilangnya pekerjaan (*loss of job*). Olson berpendapat bahwa aktivitas kolektif harus mampu menawarkan pilihan insentif, seperti prestise (*prestige*), gaji (*salary*), dan kepemimpinan (*leadership*) untuk menarik partisipasi masyarakat dalam suatu aktivitas kolektif.

Sementara Oberschall, McCarthy dan Zald, Gamson, dan Tilly (Pichardo, 1988: 98) mengkaji berbagai elemen yang diperlukan dalam suatu gerakan dan bagaimana proses dari elemen-elemen ini, khususnya sumberdaya, dimobilisasi untuk digunakan dalam suatu gerakan. Pendekatan ini mengkonsentrasikan pada isolasi dan pemahaman atas kekuatan-kekuatan yang berkontribusi terhadap munculnya Gerakan sosial, khususnya persyaratan fisik dan lingkungan yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku gerakan. Konsep ini merupakan dasar bagi lahirnya teori mobilisasi sumberdaya (*the resource mobilization theory*) tentang Gerakan sosial. Menurut Halebsky (Pichardo, 1988: 98), teori mobilisasi sumberdaya menyamakan antara perilaku gerakan sosial (*social movemen behavior*) dengan perilaku politik (*political behavior*). Secara umum, model ini berpandangan bahwa keberadaan struktur pemerintah menentukan akses kelompok terhadap sumberdaya masyarakat.

Perkembangan Gerakan sosial dipandang sebagai produk dari kekuatan-kekuatan lingkungan (*environmental forces*) baik bersifat internal maupun eksternal terhadap gerakan. Faktor-faktor internal meliputi: kepemimpinan (*leadership*), tingkat ketersediaan sumberdaya (*level of available resources*), ukuran kelompok (*group size*), dan tingkat dari organisasi internal (*degree of internal organization*). Sedangkan faktor-faktor eksternal meliputi: tingkat represi dari masyarakat (*the level of societal repression*), tingkat simpatian eksternal (*extent of external sympathizers*), serta jumlah dan kekuatan kelompok politik (*number and strength of polity groups*).

Interaksi dari berbagai faktor tersebut disebut sebagai faktor penentu atas perkembangan dan perilaku dari suatu gerakan sosial (McCarthy & Zald, Oberschall, Gamson, Ash-Garner, Freeman, Marx, & Morris; dalam Pichardo, 1988: 99).

Atas dasar berbagai kajian tentang basis rasionalitas partisipasi dalam tindakan kolektif, kemudian Pichardo (1988: 100) melihat bahwa terdapat tiga elemen dasar dalam teori mobilisasi sumberdaya tentang proses terjadinya suatu gerakan sosial, yakni: sumberdaya (*resources*), motivasi (*motivation*), dan lingkungan politik (*political environment*).

Menurut Canel (Triwibowo, 2006: 11), pendekatan RMT memusatkan analisisnya pada seperangkat proses kontekstual (keputusan mengenai pengelolaan sumberdaya, dinamika organisasi, serta perubahan politik) yang memungkinkan gerakan sosial untuk mengoptimalkan potensi-potensi struktural yang dimiliki guna mencapai tujuannya. Pendekatan ini menganalisis bagaimana para aktor gerakan sosial mengembangkan strategi dan berinteraksi dengan lingkungannya untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka. Munculnya gerakan sosial dan capaian dari aktivisme mereka dipandang sebagai hasil dari proses yang terbuka dan dipengaruhi oleh serangkaian taktik, strategi dan keputusan tertentu yang dipilih oleh para aktor dalam konteks relasi kuasa dan interaksi konfliktual yang ada.

Selanjutnya, terdapat dua model analisis dalam pendekatan *Resource Mobilization Theory* (Pichardo, 1988: 99; Phongpaichit, dalam Triwibowo, 2006: 11), yakni:

Pertama; *The Political-interactive model (The Political process models)*. Model ini dikembangkan oleh Tilly, Gamson, Oberschall dan McAdam. Model ini lebih menekankan pentingnya perubahan struktur kesempatan bagi aksi kolektif, keberadaan jejaring (*network*), serta kaitan horizontal yang telah terbangun dengan kelompok-kelompok tertindas (*aggrieved groups*) sebagai faktor penentu keberhasilan gerakan sosial. Model ini menempatkan relasi gerakan sosial dengan negara dan bingkai sistem politik yang ada sebagai determinan yang penting bagi keberhasilan gerakan sosial. Jika negara kuat dan represif, maka gerakan sosial sulit untuk mencapai tujuannya, demikian juga sebaliknya. Pichardo (1988: 99)

menjelaskan bahwa model ini menekankan pada kapasitas internal dari komunitas untuk menghasilkan organisasi gerakan sosial.

Kedua; *The Organizational-entrepreneurial model (The Professional organizer models)*. Model ini dikembangkan oleh McCarthy dan Zald. Model ini memandang bahwa dinamika organisasional, kepemimpinan dan pengelolaan sumberdaya merupakan faktor yang lebih signifikan dalam menentukan keberhasilan gerakan sosial. Model ini pada dasarnya mengaplikasikan teori pengembangan organisasi untuk menganalisis gerakan sosial serta memandang bahwa organisasi formal merupakan *carriers of Social movements*. Organisasi gerakan sosial adalah suatu organisasi yang kompleks, atau formal, yang mengidentikkan tujuannya dengan preferensi dari gerakan sosial dan berusaha mewujudkan pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

Setiap *Social Movement Organization (SMO)* harus mampu mengelola sumber-sumber (*resources*) yang tersedia dengan baik. Sumber-sumber dimaksud meliputi sumber-sumber material, seperti pekerjaan (*jobs*), penghasilan (*income*), dan tabungan (*savings*), serta sumber-sumber non-material seperti wewenang (*authority*) komitmen moral (*moral commitment*), kepercayaan (*trust*), persahabatan (*friendship*), kemampuan (*skills*) dan sebagainya. Menurut Oberschall (Locher, 2002: 260), keberhasilan dan kegagalan sebuah gerakan, tergantung atas seberapa banyak orang-orang yang bergabung ke dalam organisasi, bagaimana mengarahkan mereka, apa pengorbanan mereka, dan bagaimana mereka bertahan terhadap pihak lawan (*opponents*).

Oberschall (Locher, 2002: 260), menyatakan bahwa keberadaan kelompok sosial akan lebih memungkinkan untuk memunculkan suatu gerakan sosial jika kelompok sosial tersebut tersegmentasi. Karena kelompok sosial yang tersegmentasi akan menarik keanggotaannya dari kelas khusus dalam suatu masyarakat. Semakin tersegmentasi kelompok asosiasi dalam suatu masyarakat, maka semakin besar kemungkinannya untuk dimobilisasi ke dalam *Social Movement Organization (SMO)*. Kesamaan keanggotaan dalam suatu kelompok cenderung memiliki kesamaan juga dalam hal keinginan bersama.

Faktor penting mengapa kelompok lebih mudah untuk melakukan mobilisasi karena kelompok memiliki jaringan komunikasi yang sudah mapan (*established*), terdapatnya anggota dengan kemampuan kepemimpinan, dan adanya partisipasi tradisional dari para anggotanya. Selain itu, dalam kelompok juga terdapat pemimpin, anggota, tempat pertemuan, kegiatan rutin, rantai sosial, dan berbagai kepercayaan, simbol serta bahasa yang sama. Seorang pemimpin dalam suatu organisasi gerakan sosial harus memusatkan perhatiannya kepada masalah mobilisasi, hal-hal yang membuat ketidakpuasan, pilihan taktis, dan infrastruktur masyarakat dan gerakan yang diperlukan agar suatu gerakan sosial berhasil (McCarthy & Zald, dalam Locher, 2002: 261).

Pemimpin (*leaders*) dalam suatu organisasi gerakan sosial, memiliki resiko dan tanggung jawab yang lebih besar daripada para anggotanya, namun mereka juga akan menerima keuntungan yang lebih besar atas keberhasilan suatu gerakan sosial. Pemimpin biasanya akan mendapatkan keuntungan dalam hal status dan wewenang, kadang-kadang juga dalam hal kekayaan, atas posisinya dalam suatu organisasi gerakan sosial. Menurut Morris dan Staggenborg (dalam Snow, Soule, & Kriesi, 2004: 171), para pemimpin (*leaders*) sangat penting dalam gerakan sosial, mereka menginspirasi komitmen, memobilisasi sumber-sumber, menciptakan dan memahami kesempatan-kesempatan, menyusun strategi, membingkai tuntutan-tuntutan, dan mempengaruhi hasil-hasil. Pemimpin gerakan (*leaders movement*) didefinisikan sebagai pembuat keputusan strategis (*strategic decision-makers*) yang menginspirasi dan mengorganisasi orang lain untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial.

Menurut Singh (2010: 144), teori mobilisasi sumberdaya yang berbasiskan rasionalitas, tetaplah sebuah teori yang tidak persis dan tidak mencukupi. Teori ini gagal menjelaskan beberapa ekspresi kuat dari bentuk GSB seperti: feminisme, environmentalism, perdamaian, perlucutan senjata, dan gerakan perekonomian lokal. Dengan tepat, Cohen menyatakan bahwa “aktor-aktor kolektif kontemporer dengan sadar berjuang melawan kekuasaan untuk secara sosial membangun identitas baru, untuk menciptakan ruang demokratis bagi aksi sosial otonom.

Dari uraian teori mobilisasi sumberdaya, maka dapat dirumuskan faktor-faktor determinan dalam suatu gerakan sosial, yaitu:

- (1) Organisasi Gerakan sosial;
- (2) Pemimpin dan kepemimpinan;
- (3) Sumberdaya dan mobilisasi sumberdaya;
- (4) Jaringan dan partisipasi; dan
- (5) Peluang dan kapasitas masyarakat.

Penjelasan faktor-faktor determinan dalam suatu gerakan sosial tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Organisasi Gerakan Sosial:

Menurut McCarthy dan Zald (Della Porta dan Diani, 2006: 140) Organisasi Gerakan Sosial (*Social Movement Organization*) merupakan bahasan yang sangat populer dalam mengkaji Gerakan Sosial. McLaughlin (Curtis, Jr. ; & Zurcher, Jr. : 1974: 356-370), menyatakan bahwa karakteristik yang menonjol dari suatu gerakan sosial adalah meliputi adanya sistem nilai bersama, perasaan dari komunitas, norma tindakan, dan struktur organisasi. Selanjutnya Killian (Della Porta dan Diani, 2006: 140), berdasarkan hasil studinya tentang struktur peranan, posisi, dan norma di antara partisipan gerakan sosial, berkesimpulan bahwa karakteristik penting dalam suatu gerakan sosial adalah organisasi.

Selanjutnya, McCarthy dan Zald (Della Porta dan Diani, 2006: 140) menyatakan bahwa organisasi gerakan sosial adalah suatu organisasi yang kompleks, atau formal, yang mengidentikkan tujuannya dengan preferensi dari gerakan sosial dan berusaha mewujudkan pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Menurut Porta dan Diani (2006: 140), meskipun para ahli memberikan pengertian yang cukup bervariasi tentang organisasi gerakan sosial (*social movement organization*), namun secara umum dapat dikatakan bahwa organisasi gerakan sosial adalah suatu organisasi identitas yang bersifat kompleks atau formal, dengan tujuan mencapai tujuan mereka yang diimplementasikan dalam suatu gerakan sosial (*social movement*) atau kontra gerakan sosial. Sementara definisi yang lainnya, menyatakan bahwa organisasi gerakan sosial (SMO) sebagai asosiasi orang-orang yang melakukan tuntutan moral

dan ideal tentang bagaimana seharusnya kehidupan personal atau kelompok termarginalkan dari masyarakat diorganisasikan.

Setiap *Social Movement Organization (SMO)* harus mampu mengelola sumber-sumber (*resources*) yang tersedia dengan baik. Menurut Oberschall (Locher, 2002: 260), keberhasilan dan kegagalan sebuah gerakan, tergantung atas seberapa banyak orang-orang yang tergabung ke dalam organisasi, bagaimana mengarahkan mereka, apa pengorbanan mereka, dan bagaimana mereka bertahan terhadap pihak lawan (*opponents*).

Menurut Bernard (Horton & Hunt, 1984: 89), organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Schein, Cummings dan Worly (dalam Chaskin, Brown, Venkatesh, dan Vidal, 2001: 62) mengemukakan bahwa organisasi berbeda menurut ukuran, usia, misi, kultur, stabilitas, pengaruh politik, dan akses terhadap sumberdaya. Arnold dan Feldman (1986: 5) menyebutkan bahwa karakteristik dari semua tipe organisasi ditandai oleh tiga faktor, yaitu: (1) organisasi terdiri dari individu-individu dan kelompok; (2) organisasi diarahkan untuk mencapai suatu tujuan; dan (3) organisasi agar bisa mencapai tujuannya maka menerapkan koordinasi dan spesialisasi. Sementara Chaskin, Brown, Venkatesh, dan Vidal (2001: 63-65) menyatakan bahwa peran yang bisa dimainkan oleh suatu organisasi dalam masyarakat adalah meliputi: (1) memproduksi pelayanan-pelayanan dan barang-barang yang dibutuhkan; (2) menyediakan akses terhadap sumberdaya dan kesempatan; (3) perantara atas sumberdaya eksternal; (4) membantu pengembangan sumberdaya manusia; (5) menciptakan atau memperkuat identitas dan komitmen dalam masyarakat; dan (6) mendukung advokasi masyarakat dan pengerahan kekuatan.

Kata organisasi mengandung paling tidak tiga makna, yakni: *Pertama*, organisasi diartikan sebagai sistem sosial yang dibentuk untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, artinya hubungan antar individu dan kelompok dalam suatu organisasi menciptakan harapan bagi perilaku individu. Harapan ini diwujudkan dalam peran-peran tertentu yang harus dihasilkan. Beberapa orang harus memainkan peran pemimpin, sementara yang lainnya sebagai pengikut; *Kedua*, organisasi diartikan suatu kelompok yang mempunyai diferensiasi peranan, artinya dalam satu

organisasi setiap individu harus dapat memainkan peranannya secara lebih (peran ganda); dan *Ketiga*, organisasi adalah sekelompok orang yang sepakat untuk mematuhi seperangkat norma, artinya ketika orang masuk dalam organisasi, maka orang tersebut secara sukarela harus patuh terhadap norma organisasi (Soekanto; dalam Sugiyanto, 2002: 26).

Para aktivis gerakan sosial harus memahami tentang keragaman (*heterogenity*) dari bentuk-bentuk organisasi yang bisa diadopsi ke dalam organisasi gerakan sosial. Kriesi (Della Porta dan Diani, 2006: 140) melakukan analisis sistematis dan memberikan gambaran tentang pengalaman gerakan sosial baru di Eropa Barat pada tahun 1980-an, yang kemudian menjelaskan bahwa karakteristik struktur internal suatu organisasi gerakan sosial harus meliputi: (1) Formalisasi, yakni kriteria dan syarat formal keanggotaan, aturan tertulis, prosedur tetap, kepemimpinan formal, kantor tetap; (2) Profesionalisasi, yakni memiliki staf yang diperlakukan secara profesional dengan gaji dan sistem karir yang jelas; (3) Diferensiasi internal, yakni meliputi fungsi-fungsi pembagian kerja dan penciptaan kesatuan wilayah; dan (4) Integrasi, yakni koordinasi yang dilakukan melalui mekanisme vertikal maupun horizontal.

Terdapat berbagai tipe dari organisasi gerakan sosial. Della Porta dan Diani (2006: 145-150) membagi tipe-tipe organisasi gerakan sosial ke dalam: (1) organisasi gerakan profesional (*professional movement organization*); dan (2) organisasi gerakan partisipatif (*participatory movement organization*).

Organisasi gerakan profesional (*professional movement organization*), menurut McCarthy dan Zald (Della Porta dan Diani, 2006: 145), ditandai dengan: (1) kepemimpinan yang mencurahkan seluruh waktunya untuk suatu gerakan, dengan sebagian besar sumberdaya yang berasal dari luar kelompok yang dirugikan dimana gerakan diklaim mewakilinya; (2) basis keanggotaannya sangat sedikit (terbatas), tidak nyata, atau hanya keanggotaan di atas kertas saja; (3) bertujuan membangun atau menyampaikan citra: “berbicara untuk konstituen”; dan (4) bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan ke arah yang sama dengan yang diinginkan konstituen. Kebanyakan anggotanya hanya memiliki sedikit kekuasaan dan tidak memiliki peran yang serius dalam pengambilan kebijakan organisasional jangka pendek tentang

pungutan iuran keanggotaan. Sebagian besar staf profesional menentukan posisi organisasi atas berbagai isu yang muncul.

Sedangkan organisasi gerakan partisipatif (*participatory movement organization*), memiliki dua model, yaitu: (1) organisasi protes massa (*mass protest organization*); dan (2) organisasi akar rumput (*grassroots organizations*) (Della Porta & Diani, 2006: 147-149). Model organisasi protes massa (*mass protest organization*) memadukan perhatian terhadap demokrasi partisipatif melalui level tertentu dari formalisasi struktur organisasi. Dalam Gerakan sosial pada tahun 1970-an, banyak organisasi partai politik seperti “*the Communist K-Gruppen*” di Jerman, “*the New Left parties*” di Italy, dan “*the Trotskyists*” di Perancis, telah mengadopsi struktur organisasi yang hirarkis dan kaku, mirip seperti model partai Lenin (*the Leninist Party*) (Della Port, 1995; & Lumley, 1990; dalam Della Porta & Diani, 2006: 147). Secara bertahap, model organisasi gerakan sosial ini terjebak ke dalam peran revolusioner profesional yang tidak memberikan perhatian terhadap demokrasi akar rumput. Sementara model organisasi akar rumput (*grassroots organizations*) secara kontras berbeda dengan model organisasi protes massa (*mass protest organization*). Model ini mengkombinasi orientasi partisipasi yang kuat dengan level struktur formal yang rendah. Eksistensi organisasi model seperti ini tergantung pada kerelaan dari para anggotanya untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas organisasi.

Mengapa orang-orang mau bekerja sama dan melibatkan diri suatu kelompok (organisasi)? Robbins (1988: 72-74) mengemukakan terdapat enam alasan mengapa seseorang mau terlibat dalam kelompok (organisasi), yaitu: (1) *Security* (keamanan), keterlibatan seseorang dalam kelompok karena kelompok mampu mengurangi perasaan tidak aman dibandingkan jika sendirian; (2) *Status*, keterlibatan seseorang dalam kelompok karena kelompok mampu memberikan atau meningkatkan nilai gengsi karena inklusitas kelompok dipandang penting oleh orang lain dalam memberikan pengakuan dan status bagi anggota kelompok; (3) *Self-esteem* (harga diri), yakni keterlibatan seseorang dalam kelompok karena kelompok mampu menyediakan perasaan akan harga atau nilai diri bagi para anggotanya; (4) *Affiliation* (afiliasi), yakni keterlibatan seseorang dalam kelompok karena kelompok mampu menyediakan kebutuhan akan afiliasi seseorang dengan orang lain; (5) *Power* (kekuasaan), keterlibatan seseorang dalam kelompok karena kelompok mampu

memberikan kekuatan bahwa tindakan yang tidak mungkin dilakukan secara orang-perorangan, maka dalam situasi kelompok dimungkinkan untuk bisa dilakukan; dan (6) *goal achievement* (pencapaian tujuan), yakni keterlibatan seseorang dalam kelompok karena kelompok mampu menciptakan pencapaian tujuan melalui pelaksanaan tugas-tugas yang sulit dilakukan oleh orang-perorangan.

(2) Pemimpin dan Kepemimpinan (*Leader and Leadership*):

Menurut Morris dan Staggenborg (dalam Snow, Soule, & Kriesi, 2004: 171), para pemimpin (*leaders*) sangat penting dalam gerakan sosial, mereka menginspirasi komitmen, memobilisasi sumber-sumber, menciptakan dan memahami kesempatan-kesempatan, menyusun strategi, membingkai tuntutan-tuntutan, dan mempengaruhi hasil-hasil. Pemimpin gerakan (*leaders movement*) didefinisikan sebagai pembuat keputusan strategis (*strategic decision-makers*) yang menginspirasi dan mengorganisasi orang lain untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial. Pemimpin (*leaders*) dalam suatu organisasi gerakan sosial memiliki resiko dan tanggung jawab yang lebih besar daripada para anggotanya, namun mereka juga akan menerima keuntungan yang lebih besar atas keberhasilan suatu gerakan sosial. Pemimpin biasanya akan mendapatkan keuntungan dalam hal status dan wewenang, kadang-kadang juga dalam hal kekayaan, atas posisinya dalam suatu organisasi gerakan sosial.

Kepemimpinan (*leadership*) adalah kemampuan untuk mempengaruhi kelompok melalui pencapaian tujuan (Robbins, 1988: 117). Senada dengan Robbins, Arnold dan Feldman (1986: 120) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi (*influence process*), dimana dalam kepemimpinan melibatkan upaya pemimpin (*leader*) untuk mempengaruhi perilaku satu atau beberapa orang lainnya. Selanjutnya, Arnold dan Feldman (1986: 120-121) menyebutkan ada lima sumber kekuasaan dari seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain, yaitu: (1) *reward power*, yakni kemampuan pemimpin untuk memberikan ganjaran/hadiah kepada para pengikut; (2) *coercive power*, yakni mengacu kepada kemampuan pemimpin untuk memberikan tekanan atau hukuman terhadap para pengikut; (3) *legitimate power*, yakni mengacu kepada kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin sebagai hasil dari

kedudukan atau peran dalam kelompok/organisasi; (4) *expert power*, yakni kekuasaan yang diperoleh seorang pemimpin karena pengetahuan atau keahliannya atas tugas-tugas yang berkaitan dengan bawahannya; dan (5) *referent power*, yakni kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin tergantung atas sejauhmana bawahan mengidentifikasi dan ingin meniru pemimpinnya. *Referent power* secara penuh tergantung pada sifat-sifat dan karakteristik-karakteristik yang ada pada diri seorang pemimpin.

Sementara Gusfield (dalam Snow, Soule, & Kriesi, 2004: 172) mencatat beberapa fungsi pemimpin (*leader*) dalam suatu gerakan, yakni sebagai mobilisator (*mobilizer*), menginspirasi partisipan (*inspiring participants*), dan di luar gerakan pemimpin berfungsi sebagai artikulator yang menghubungkan antara gerakan dengan masyarakat luas. Meskipun demikian, karena kompleksitas dari gerakan, maka fungsi dan peran pemimpin dalam gerakan juga bisa bervariasi.

Menurut Cartwright dan Zander (1968: 304), kepemimpinan dipandang sebagai tampilan dari seluruh tindakan yang membantu pencapaian tujuan kelompok. Secara spesifik, kepemimpinan meliputi berbagai tindakan dari anggota kelompok dalam setting tujuan kelompok, mengarahkan kelompok kepada tujuan, meningkatkan kualitas interaksi antar anggota, membangun kohesifitas kelompok, dan membuat ketersediaan sumberdaya bagi kelompok. Krech dan Crutchfield (dalam Cartwright dan Zander, 1968: 305) menyebutkan tentang 14 fungsi dari seorang pemimpin, yakni sebagai: eksekutif (*executive*), perencana (*planner*), pembuat keputusan (*policy maker*), ahli (*expert*), mewakili kelompok untuk pihak luar (*external group representative*), pengendali hubungan internal (*controller of internal relationship*), penyedia penghargaan dan hukuman (*purveyor of rewards and punishments*), arbiter (*arbitrator*), teladan (*exemplar*), simbol kelompok (*group symbol*), pengganti tanggung jawab individu (*surrogate for individual responsibility*), ideologis (*ideologist*), figur ayah (*father figure*), dan kambing hitam (*scapegoat*).

Perbedaan tipe pemimpin menjadikan perbedaan struktur organisasi sebelumnya. Sebagai contoh, gerakan perempuan di Amerika pemimpin “cabang tua” berasal dari mereka yang berpengalaman dalam organisasi volunteer tradisional, serikat-serikat, dan partai politik dengan struktur organisasi formal, sementara pemimpin feminis

“cabang muda” muncul dari mereka yang memiliki pengalaman langsung dalam organisasi partisipasi hak sipil dan organisasi kanan baru (*new left organization*). Pemimpin yang berasal dari tipe latar belakang yang berbeda mewarnai struktur sesuai pengalaman, mempengaruhi mobilisasi, strategi-strategi, dan hasil dari gerakan. Para teoritis Mobilisasi Sumberdaya (*resource mobilization*) memandang seorang pemimpin dalam gerakan sosial sebagai entrepreneur politik (*political entrepreneurs*) yang melakukan mobilisasi sumberdaya dan menemukan respons organisasi atas insentif, resiko dan peluang-peluang; dan pendukung dipandang sebagai aktor-aktor rasional yang mengikuti seorang pemimpin yang efektif.

Bagaimana pemimpin muncul dalam suatu gerakan sosial? Menurut Snow, Soule, & Kriesi (2004: 178-179), berbagai penelitian yang terkait dengan studi kemunculan gerakan sosial telah banyak dilakukan dengan fokus kepada: peluang politik dan kultural (*political and cultural opportunities*), basis organisasi (*organization bases*), sumberdaya manusia dan material (*material and human resources*), peristiwa-peristiwa pencetus (*precipitating events*), ancaman-ancaman (*threats*), keluhan-keluhan (*grievances*), dan framing tindakan kolektif (*collective action frame*). Namun studi tentang bagaimana kemunculan pemimpin dalam suatu gerakan sosial masih belum banyak dilakukan.

Mengacu kepada pandangan Oberschall (1973; dalam Snow, Soule, & Kriesi, 2004: 178-179), bahwa pemimpin potensial selalu tersedia dalam masyarakat namun kemunculan mereka tergantung atas peluang-peluang politik. Oberschall menyatakan bahwa keterampilan kepemimpinan dapat dipelajari melalui pendidikan dan latihan “*trial and error*” dalam aktifitas pengalaman melalui berkembangnya gerakan. Morris dan Braine (2001; dalam Snow, Soule, & Kriesi, 2004: 178-179) membedakan tiga tipe gerakan dan bagaimana pemimpin muncul. Ketiga tipe gerakan tersebut adalah:

- (1) Gerakan pembebasan (*Liberation movements*); yakni gerakan yang anggotanya merupakan orang-orang dari kelompok yang tertindas, yang menggambarkan kultur oposisi mereka. Dalam tipe gerakan pembebasan, seperti misalnya gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat, institusi gereja kulit hitam merupakan sumber utama bagi kepemimpinan gerakan dan tradisi partisipasi. Bentuk kultur

dari Gereja telah menjadi tulang punggung (*backbone*) bagi gerakan hak-hak sipil.

- (2) Gerakan Isu khusus berbasis kesamaan (*Equality-based special issue movements*); yakni gerakan isu-isu khusus yang dirasakan oleh orang-orang atau kelompok tertindas tertentu. Dalam gerakan isu-isu khusus, seperti gerakan hak aborsi di Amerika Serikat, pemimpin muncul dari gerakan sosial yang ada (*existing Social movements*), termasuk misalnya Gerakan Perencanaan Keluarga dan Populasi (*the population and family planning mvements*), seperti halnya juga gerakan perempuan (*women`s movement*), dan mereka dipengaruhi oleh taktik dan struktur dari gerakan ini.
- (3) Gerakan tanggung jawab sosial (*social responsibility movements*); yakni gerakan yang menentang kondisi tertentu yang mempengaruhi populasi umum. Dalam gerakan tipe ini, fondasi struktural dan organisasional belum tersedia. Keluhan atau peristiwa tiba-tiba secara terpaksa muncul, termasuk tragedi-tragedi personal seperti peristiwa kecelakaan nuklir dan tumpahan minyak. Kondisi seperti ini kemudian mendorong motivasi seorang pemimpin untuk muncul. Misalnya, dalam gerakan anti minuman keras saat mengemudi di Amerika Serikat pada tahun 1980-an, munculnya Candy Lightner sebagai pemimpin gerakan setelah anaknya tewas karena tertabrak oleh seorang pengemudi yang mabuk karena minuman keras. Candy Lightner kemudian mendirikan organisasi Gerakan sosial yang bernama “*Mother Against Drunk Drivers (MAAD)*”.

Dengan demikian, ketika suatu gerakan di dasarkan atas sejarah tekanan atau kesenjangan yang melibatkan institusi asli dan gerakan sosial sebelumnya, maka pemimpin biasanya muncul dari institusi atau organisasi yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan ketika peristiwa-peristiwa pencetus terjadi secara tiba-tiba menimpa individu dan komunitas, maka pemimpin yang tidak memiliki latar belakang sebelumnya sebagai pemimpin, akan sangat dimungkinkan untuk muncul sebagai pemimpin gerakan (Snow, Soule, & Kriesi, 2004: 179).

(3) Sumberdaya dan Mobilisasi Sumberdaya:

Menurut Edwards dan McCarthy (Snow, Soule, & Kriesi, 2004: 125-128), dalam konteks gerakan sosial, paling tidak terdapat 5 (Lima) tipe sumberdaya (*resources*), yaitu: sumberdaya moral (*moral resources*), sumberdaya kultural (*cultural resources*), sumberdaya organisasi-sosial (*social-organizational resources*), sumberdaya manusia (*human resources*), dan sumberdaya material (*material resources*).

Pertama, sumberdaya moral (*moral resources*). Sumberdaya moral (*moral resources*) meliputi legitimasi atau hak kekuasaan (*legitimacy*), dukungan solidaritas (*solidarity support*), dukungan simpati (*sympathetic support*), dan dukungan orang-orang atau tokoh-tokoh terkenal (*celebrity*). Dalam hal ini, legitimasi secara teoritis lebih banyak mendapatkan perhatian. Para teoritis neo-organisasi institusional (*neo-institutional organization*) menyatakan bahwa legitimasi penting sebagai penghubung antara konteks makro-kultural (*macrocultural contexts*) dengan proses-proses level meso dan mikro organisasi (*micro and microlevel organizational processes*). Sumberdaya moral cenderung berasal dari luar gerakan sosial atau organisasi gerakan sosial dan secara umum diberikan oleh sumber-sumber eksternal.

Kedua, sumberdaya kultural (*cultural resources*). Sumberdaya kultural (*cultural resources*) adalah artefak dan produk budaya seperti seperangkat konseptual dan pengetahuan khusus yang telah dikenal secara luas, meskipun tidak harus universal. Dalam hal ini termasuk pengetahuan yang tidak terungkap (tidak tertulis) tentang bagaimana cara mengerjakan tugas-tugas tertentu seperti cara memperlakukan atas peristiwa protes (*enacting a protest event*), mengadakan konferensi pers (*holding a news conference*), mengatur rapat/pertemuan (*running a meeting*), membentuk sebuah organisasi (*forming an organization*), memulai festival (*initiating festival*), atau berselancar di web (*surfing the web*). Tidak semua anggota suatu masyarakat atau kelompok memiliki kompetensi atau pengetahuan khusus yang bisa menjadi nilai untuk sebuah gerakan sosial atau organisasi gerakan sosial.

Suatu perbedaan kunci antara sumberdaya kultural (*cultural resources*) dan sumberdaya moral (*moral resources*) adalah bahwa sumberdaya kultural (*cultural resources*) tersedia secara lebih luas, kurang eksklusif, dan dapat diakses untuk

digunakan secara bebas dari penilaian menguntungkan dari orang-orang di luar gerakan atau organisasi gerakan sosial. Kategori sumberdaya kultural ini meliputi produksi gerakan atau isu-isu penting seperti musik (*music*), literatur (*literature*), majalah (*magazine*), koran (*newspapers*), dan film dan video (*films and videos*). Produk kultural seperti ini memfasilitasi rekrutmen dan sosialisasi kepada pendukung baru dan membantu gerakan memelihara kesiapan dan kapasitas mereka untuk tindakan kolektif.

Ketiga, Sumberdaya organisasi-sosial (*social-organizational resources*). Kategori sumberdaya ini meliputi baik organisasi sosial yang disengaja (*intentional social organization*) dan sepadan (*appropriable*). Organisasi sosial yang disengaja (*intentional social organization*) adalah organisasi yang dibentuk secara khusus untuk tujuan gerakan sosial lebih lanjut. Kebalikanya, organisasi sosial sepadan (*appropriable social organization*) dibentuk bukan untuk tujuan gerakan (*nonmovement purposes*), akan tetapi aktor-aktor gerakan memungkinkan untuk mendapatkan akses sumberdaya melalui organisasi ini. Rekrutmen sukarelawan atau penyebaran informasi melalui koneksi kerja, komunitas, masyarakat atau lingkungan, secara luas merupakan contoh yang bisa ditiru. Keduanya lebih lanjut dibedakan oleh cara khas dimana para aktor mendapatkan akses kepada mereka. Sumberdaya yang terdapat di dalam organisasi sosial sepadan (*appropriable social organization*) harus dikooptasi, sementara akses terhadap organisasi sosial yang disengaja (*intentional social organization*) relatif lebih mudah dan tidak bermasalah. Dalam kedua kasus kemudahan mengakses sumberdaya tersebut akan bervariasi menurut kesesuaian antara legitimasi khusus (*specific legitimation*), bentuk organisasi (*organizational form*), tujuan (*goals*), dan taktik (*tactics*) dari kelompok-kelompok yang terlibat. Kedua bentuk dari organisasi sosial telah terbukti sangat penting di dalam menjelaskan pola-pola dari mobilisasi gerakan (*movement mobilization*). Dengan demikian, adanya sumberdaya organisasi sosial di lokasi tertentu akan memungkinkan meningkatnya mobilisasi gerakan dan tindakan secara keseluruhan dalam setting ini.

Terdapat tiga bentuk dari sumberdaya organisasi sosial, yakni: infrastruktur (*infrastructures*), jaringan sosial (*social network*), dan organisasi (*organizations*). Secara jelas, ketiga bentuk ini berbeda dalam formalitas organisasi, tapi kami

menekankan sejauhmana akses kepada mereka dapat dikendalikan, atau dengan kata lain bagaimana mereka memilikinya. Infrastruktur adalah organisasi sosial setara dengan barang publik seperti layanan pos (*postal service*), sanitasi (*sanitation*), atau infrastruktur sipil (*civil infrastructures*) seperti jalan (*roads*), trotoar (*sidewalks*), dan lampu lalu lintas (*traffic lights*), yang memfasilitasi kelancaran fungsi kehidupan sehari-hari. Infrastruktur bukan milik sumberdaya sosial (*social resources*). Sebaliknya, akses terhadap jaringan sosial (*social networks*) dan kelompok dan organisasi formal khusus, maka sumberdaya yang ada di dalamnya dapat dikontrol (dikendalikan).

Keempat, sumberdaya manusia (*human resources*). Sumberdaya manusia lebih nyata (*tangible*) dan lebih mudah untuk diapresiasi dibandingkan dengan tiga sumberdaya sebelumnya yaitu: sumberdaya moral (*moral resources*), sumberdaya kultural (*cultural resources*), dan sumberdaya organisasi sosial (*social organizational resources*). Kategori sumberdaya manusia meliputi sumber-sumber seperti: tenaga kerja (*labor*), pengalaman (*experience*), keterampilan (*skills*), dan keahlian (*expertise*). Dalam kategori ini juga termasuk kepemimpinan. Sumberdaya manusia dalam hal ini lebih bersifat individual daripada struktur organisasi sosial atau kultural. Individu biasanya memiliki hak untuk mengontrol penggunaan sumberdaya manusia dan tenaga kerja, kecuali dalam kasus ekstrim seperti kerja paksa (*force labor*) dan pemerasan (*extortion*). Partisipasi individu memungkinkan akses terhadap gerakan khusus atau Organisasi Gerakan sosial (SMOs). Organisasi Gerakan Sosial (SMOs) dapat mengumpulkan dan menyebarkan (*aggregate and deploy*) personilnya secara lebih mudah dibandingkan dengan sumberdaya organisasi sosial. Namun, kapasitas gerakan untuk menyebarkan personil dibatasi oleh kerjasama dari individu-individu yang terlibat. Dan partisipasi mereka pada gilirannya dibentuk oleh faktor ruang dan ekonomi, serta oleh relasi sosial (*social relationships*), kewajiban (*obligation*), dan komitmen moral (*moral commitments*).

Kelima, sumberdaya material (*material resources*). Kategori dari sumberdaya material mengombinasikan apa yang dalam bahasa ekonomi disebut dengan modal fisik dan finansial (*financial and physical capital*), meliputi sumber-sumber: moneter (*monetary*), hak milik (*property*), ruang kantor (*office space*), peralatan (*equipments*), dan perbekalan (*supplies*). Sumberdaya moneter/keuangan (*monetary*) telah

mendapat perhatian yang besar. Uang adalah sangat dibutuhkan dan penting. Tidak peduli berapa banyak sumberdaya lainnya tentang mobilisasi gerakan, itu akan dikenakan biaya dan seseorang harus membayarnya. Sumberdaya material juga mendapat perhatian analisis karena mereka secara umum lebih nyata (*tangible*), lebih eksklusif (*more proprietary*), dan dalam beberapa kasus uang lebih fungsional (*more fungible*) dibandingkan dengan tipe dari sumberdaya yang lainnya.

Menurut Edwards dan McCarthy (dalam Snow, Soule & Kriesi, 2004: 131-135), terdapat empat mekanisme (cara/alat) yang bisa dilakukan oleh aktor gerakan sosial dan organisasi gerakan sosial untuk bisa akses terhadap sumberdaya. Keempat mekanisme (cara/alat) akses terhadap sumberdaya tersebut meliputi: (1) agregasi/pengumpulan (*aggregation*); (2) produksi-diri (*self-production*); (3) kooptasi/pengambilan (*co-optation/appropriation*); dan (4) perlindungan (*patronage*).

Pertama, mekanisme agregasi/pengumpulan (*aggregation*), yakni mengacu kepada mekanisme dimana sumberdaya yang ada dan masih menyebar pada setiap individu kemudian dikonversi menjadi sumberdaya kolektif oleh aktor gerakan. Agregat sumberdaya gerakan sosial bisa bersumber dan dimiliki pihak swasta atau bisa berasal dari sumbangan hati nurani konstituen untuk mencapai tujuan kolektif. Mekanisme agregat Gerakan sosial yang terkait dengan sumberdaya moral, sebagai contoh misalnya, melalui kompilasi dan publikasi dari individu dan organisasi yang mendukung tujuan dan tindakan (aksi) mereka. Sementara sumberdaya kultural (*cultural resources*) dapat dikumpulkan dengan cara mengorganisir konferensi di mana para aktivis dari berbagai kelompok bertemu untuk berbagi informasi, bertukar pikiran tentang strategi, dan melakukan pelatihan.

Kedua, mekanisme produksi-diri (*self-production*) tentang sumberdaya mengacu kepada mekanisme dimana organisasi gerakan sosial dan pemimpin gerakan menciptakan sumberdaya atau menambah nilai terhadap sumberdaya yang telah dikumpulkan. Gerakan sosial menciptakan produk kultural seperti: pemingkiaan tindakan kolektif (*collective-action frames*), repertoar taktik (*tactical repertoires*), musik (*music*), bacaan (*literature*), dan organisasi (*orgazational*) untuk mengelola berbagai even kolektif atau melakukan kampanye untuk mengangkat isu-isu khusus.

Gerakan mendirikan organisasi gerakan sosial, membangun jaringan, dan membentuk koalisi. Gerakan memproduksi sendiri sumberdaya manusia melalui pelatihan kepemimpinan dan sosialisasi tentang praktek dan nilai-nilai gerakan. Pemimpin gerakan juga membuat berbagai barang untuk dijual seperti literatur dan simbol-simbol penting dari gerakan seperti kaos, gelas, poster, dan sebagainya.

Ketiga, mekanisme kooptasi/pengambilan (*co-optation/appropriation*). Kooptasi mengacu kepada penggunaan sumberdaya yang telah dikumpulkan oleh kelompok secara transparan dan atas seizin pihak kelompok. Sedangkan pengambilan (*appropriation*) mengacu kepada eksploitasi secara diam-diam dari sumberdaya yang sebelumnya dikumpulkan dari berbagai kelompok lain. Kooptasi disertai dengan pengalihan beberapa jumlah kontrol kepemilikan atas sumberdaya yang terkooptasi.

Keempat, mekanisme perlindungan (*patronage*). Perlindungan (*patronage*) mengacu kepada pemberian (penganugerahan) sumberdaya kepada organisasi gerakan sosial oleh individu atau organisasi. Misalnya, perlindungan (*patronase*) keuangan kontrak-kontrak pemerintah (*government contracts*), hibah yayasan (*foundation grants*), dan donasi pihak swasta yang lebih luas adalah bentuk umum dari *patronase* keuangan. Mekanisme *patronase* dalam gerakan sosial mungkin pula berupa penyediaan sumberdaya manusia, termasuk, secara khusus, pinjaman personel untuk beberapa waktu tertentu. *Patronase* dalam sumberdaya moral terjadi ketika individu atau suatu organisasi memberikan penghargaan atau pengakuan atas pencapaian positif organisasi gerakan sosial.

(4) Jaringan dan Partisipasi:

Partisipasi individu dan kelompok merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu gerakan sosial. Gerakan sosial adalah kolektifitas dari orang-orang yang terlibat dalam upaya menciptakan atau menolak perubahan sosial. Organisasi gerakan sosial (*social movement organization-SMOs*) merupakan aktor kunci dalam gerakan sosial kontemporer. Keberhasilan suatu organisasi gerakan sosial dikaitkan dengan sejauhmana mobilisasi individu dan kelompok dalam mendukung gerakan (Tindall, 2004). Menurut Passy dan Giugni (2001: 127), temuan hasil studi akhir-akhir ini tentang mikro-mobilisasi (*micromobilization*) menyatakan bahwa terdapat

pengaruh dari jaringan sosial (*social network*) terhadap partisipasi individu dalam suatu gerakan sosial.

Terdapat beberapa pakar sosiologi baik klasik maupun modern yang telah memberikan perhatian terhadap “analisis jaringan”, seperti: Simmel, Durkheim, Moreno, Bavelas, Emerson, Cook, Lawler, dan sebagainya. Simmel, misalnya, mengatakan bahwa tugas inti dari pendekatan jaringan adalah untuk mengetahui struktur dari relasi sosial. Sementara, Durkheim yang meneliti tentang morfologi sosial menyebutkan bahwa analisis morfologi mencakup jumlah, nature, ukuran, *arrangement*, dan interelasi dari bagian-bagian dalam jaringan. Selanjutnya, Moreno juga menaruh perhatian pada proses ketertarikan dan ketidaksukaan di dalam kelompok. Ia mencari cara untuk mengkonseptualisasikan dan mengukur proses tersebut. Kepada anggota kelompok eksperimen, Moreno mempertanyakan tentang “siapa yang mereka sukai dan dengan siapa mereka akan mmpergunakan waktunya dalam suatu aktivitas”. Sedangkan, Bavelas melakukan studi tentang bagaimana struktur jaringan mempengaruhi arus komunikasi di dalam kelompok. Hasil studi Bavelas kemudian dilengkapi oleh Leavitt yang mengkaji tentang bagaimana pola komunikasi mempengaruhi penampilan tugas dari orang-orang di dalam kelompok. Menurutnya, pesan hanya dapat berjalan dengan mengikuti perintah dan melalui orang-orang tertentu.

Kaitan antara jaringan sosial dengan partisipasi atau keterlibatan individu dalam tindakan kolektif mengacu kepada beberapa hasil studi. Snow, Zurcher, dan Eklandson (1980) yang menunjukkan bahwa jaringan sosial merupakan faktor pelekak bagi sebagian besar (sekitar 60% sampai 90%) anggota dalam berbagai organisasi keagamaan (religius) dan politik. Diani dan Lodi (1988) dalam studinya juga menemukan tentang kekuatan dari jaringan sosial yang menunjukkan bahwa sekitar 78% dari para aktivis lingkungan di Milan pada tahun 1980-an telah direkrut melalui kontak personal, baik yang dikembangkan dalam seting pribadi (keluarga, pertemanan pribadi, kolegal) atau dalam konteks aktivitas asosiasi-asosiasi lainnya.

Menurut Wasserman dan Faust (1994: 1-27), sebuah jaringan sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari satu set aktor (seperti sebagai individu atau organisasi) dan satu set kompleks dari ikatan diadik antara aktor-aktor ini. Perspektif

jaringan sosial menyediakan cara yang jelas tentang menganalisis struktur dari entitas sosial secara keseluruhan. Studi tentang struktur ini menggunakan analisis jaringan sosial untuk mengidentifikasi pola-pola lokal dan global, mencari entitas berpengaruh, dan memeriksa dinamika jaringan. Menurut Turner (1998: 520), analisis jaringan sebagai pendekatan teoritis sangat penting untuk memahami struktur sosial, yaitu bagaimana menggambarkan pola relasi di antara unit-unit sosial baik orang-orang, kolektifitas-kolektifitas, atau posisi-posisi. Menurut Simmel (Turner, 1998: 520) inti dari konsep tentang struktur adalah pandangan bahwa struktur terdiri dari relasi-relasi dan tautan-tautan diantara berbagai entitas.

Jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul (yang umumnya adalah individu atau organisasi) yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan lain-lain. Sebuah jaringan sosial adalah suatu struktur sosial yang terdiri dari individu (atau organisasi) disebut “simpul” (*nodes*), yang terikat (terhubung) oleh satu atau lebih tipe hubungan saling ketergantungan tertentu, seperti persahabatan, kekerabatan, kepentingan bersama, pertukaran keuangan, hubungan kepercayaan, pengetahuan dan persepsi. Turner (1998: 521) menyebutkan bahwa unit dari jaringan bisa berupa orang, posisi, korporasi atau aktor-aktor kolektif, atau gambaran setiap entitas. Secara umum, unit-unit ini dikonseptualisasikan sebagai titik-titik (*points*) atau simpul-simpul (*nodes*).

Analisis jaringan jejaring sosial memandang hubungan sosial sebagai *simpul* dan *ikatan*. Simpul adalah aktor individu di dalam jaringan, sedangkan ikatan adalah hubungan antar aktor tersebut. Bisa terdapat banyak jenis ikatan antar simpul. Penelitian dalam berbagai bidang akademik telah menunjukkan bahwa jaringan jejaring sosial beroperasi pada banyak tingkatan, mulai dari keluarga hingga negara, dan memegang peranan penting dalam menentukan cara memecahkan masalah, menjalankan organisasi, serta derajat keberhasilan seorang individu dalam mencapai tujuannya. Dalam bentuk yang paling sederhana, suatu jaringan jejaring sosial adalah peta semua ikatan yang relevan antar simpul yang dikaji. Jaringan tersebut dapat pula digunakan untuk menentukan modal sosial aktor individu. Konsep ini sering digambarkan dalam diagram jaringan sosial yang mewujudkan simpul sebagai titik dan ikatan sebagai garis penghubungnya.

Teori jaringan muncul sebagai kritik terhadap pendekatan sosiologi atomistik dan normatif. Para analis teori jaringan seperti White (1992), Wasserman dan Faust (1994), Wellman dan Berkowitz (1988/1997) menolak pandangan pendekatan sosiologi atomistik dan normatif yang memusatkan perhatian pada aktor yang mengambil keputusan terlepas dari aktor lain. Pendekatan atomistik lebih memusatkan perhatiannya terhadap atribut personal dari aktor. Pendekatan atomistik ditolak karena terlalu bersifat mikro dan mengabaikan hubungan antar-aktor. Menurut pandangan para teoritis jaringan, pendekatan normatif terpusat pada kebudayaan dan proses sosialisasi yang di dalamnya norma dan nilai diinternalisasi pada diri aktor. Dalam orientasi normatif, yang menyatukan orang adalah gagasan bersama. Para teoritis jaringan berargumenasi bahwa orang harus memusatkan perhatiannya pada pola-pola objektif ikatan yang menyatukan anggota masyarakat. Dengan demikian, teori jaringan memusatkan perhatian utamanya kepada relasi sosial atau pola objektif dari ikatan yang menyatukan anggota masyarakat, individu dan kolektif (Ritzer & Goodman, 2009: 469-470).

Salah satu kekhususan teori jaringan adalah bahwa teori ini memperhatikan struktur mikro sampai dengan struktural makro. Jadi, bagi teori jaringan, aktor bisa jadi orang dan bisa pula kelompok, perusahaan, dan masyarakat. Kaitan terjadi pada level skala-besar, sosial struktural maupun pada level yang lebih mikroskopis. Salah satu aspek terpenting dari analisis jaringan adalah cenderung menjauhkan sosiologi dari studi kelompok sosial dan kategori sosial dan mendekatkannya pada studi tentang ikatan antar dan antara aktor yang “tidak cukup terbatas dan begitu ketat untuk disebut sebagai kelompok”. Sebagai contoh mengacu kepada karya Granovetter tentang “kekuatan ikatan lemah”. Granovetter membedakan antara “ikatan kuat” dan “ikatan lemah”. Ikatan kuat misalnya kaitan antara orang dengan sahabat mereka dan ikatan lemah misalnya ikatan antara orang dengan teman yang hanya kenal. Sumbangsih Granovetter adalah menjelaskan bahwa ikatan lemah bisa menjadi sangat penting. Sebagai contoh ikatan lemah antara dua orang bisa menjadi jembatan antar dua kelompok dengan ikatan internal yang kuat. Tanpa ikatan lemah tersebut kedua kelompok bisa sepenuhnya terisolasi. Isolasi ini pada gilirannya dapat menggiring ke arah sistem sosial yang lebih terfragmentasi. Individu tanpa ikatan lemah akan menganggap dirinya terisolasi dengan kelompok dalam ikatan kuat dan

tidak akan memiliki informasi tentang apa yang terjadi dikelompok lain maupun pada masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian ikatan lemah mencegah terjadinya isolasi dan mendorong individu untuk terintegrasi secara lebih baik kedalam masyarakat yang lebih besar. Meskipun Granovetter menekankan pada ikatan lemah tapi ikatan kuat juga penting misalnya orang dengan ikatan kuat lebih mempunyai solidaritas yang lebih kuat (Ritzer & Goodman, 2009: 470-471).

(5) Peluang dan Kapasitas Masyarakat:

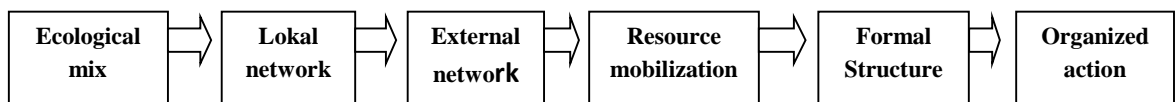
Salah satu pendekatan yang menjelaskan tentang bagaimana kemunculan dan kekuatan (*emergence and persistence*) tentang organisasi masyarakat lokal (*local communities organization*) sebagai basis dari tindakan kolektif (*collective action*), adalah pendekatan sumberdaya dan organisasi (*resources and organization*), yakni pendekatan perbedaan distribusi tentang sumberdaya dalam memfasilitasi mobilisasi dan organisasi dari jaringan sosial (*the differential distribution of resources to facilitate the mobilization and organization of social network*). Pendekatan ini lebih mendasarkan pada perspektif teori mobilisasi sumberdaya yang dilakukan oleh kelompok terorganisir (*organized group*) dalam menjelaskan tindakan kolektif (*collective action*) (Hunter & Staggenborg; dalam Milofsky, 1988: 245). Namun, sebenarnya ada dua perspektif teoritik yang bisa dijadikan dasar analisis, yakni: (1) perspektif teori gerakan sosial yang mengacu pada mobilisasi sumberdaya (*resource mobilization*); dan (2) perspektif teori organisasi formal yang mengacu pada lingkungan organisasi (*ecology of organizations*). Kedua perspektif ini menekankan bahwa kemampuan masyarakat lokal untuk mengorganisir suatu tindakan kolektif tergantung atas sumberdaya, yang utama adalah personel dan dana, akan tetapi juga meliputi dukungan moral dan legitimasi untuk membentuk struktur yang lebih bisa bertahan yang akan dijadikan basis dari tindakan kolektif masyarakat (*collective community action*).

Hunter & Staggenborg (Milofsky, 1988: 248) selanjutnya menyatakan bahwa sumberdaya (*resources*) seringkali berasal dari sumber-sumber eksternal atas masyarakat lokal, baik bersifat privat, non-profit, atau dana-dana publik untuk mendukung aktivitas-aktivitas dan program-program khusus. Kemampuan untuk

memanfaatkan sumber dana eksternal tergantung atas jaringan hubungan dalam masyarakat lokal, atau lebih khusus lagi masyarakat lokal, yang mampu menempatkan organisasi-organisasi eksternal yang lainnya ke dalam masyarakat lokal. Perspektif ini menekankan adanya pergeseran dari pendekatan institusi masyarakat yang lebih umum kepada organisasi masyarakat yang lebih spesifik. Permasalahan umum yang perlu dianalisis dalam penelitian adalah menentukan bagaimana kombinasi berbagai elemen kunci tentang baik institusi “perspektif masyarakat” (*the institutional community perspective*) dan Gerakan sosial yang terorganisir (*the organized Social movement perspective*), untuk memahami kondisi-kondisi masyarakat lokal apa yang memungkinkan terjadinya mobilisasi untuk suatu tindakan kolektif.

Untuk memperjelas bagaimana kaitan antara mobilisasi sumberdaya (*resource mobilization*) dan tindakan terorganisir dari masyarakat lokal (*local communities for organized action*), Hunter & Stggenborg (Milofsky, 1988: 263) merumuskan model sebagai berikut:

Bagan 6. 1. :
***Synthetic Model of Resource Mobilization
by Local Communities for Organized Action***



Sumber: Hunter & Staggenborg; dalam Milofsky, 1988: 263.

Penjelasan umum dari model ini adalah bahwa karakteristik lingkungan pada masyarakat lokal akan menghasilkan pola dan tipe jaringan lokal dan jaringan eksternal. Melalui kemampuan mobilisasi sumberdaya, kemudian jaringan lokal dan eksternal menghasilkan struktur formal masyarakat lokal. Melalui struktur formal masyarakat lokal ini, kemudian terjadi tindakan yang terorganisir pada masyarakat lokal.

B. Teori Proses Politik (*the Political Process Theory*)

Teori Proses Politik (*the Political Process Theory*) tentang *social movements* (gerakan sosial) untuk pertama kali dirumuskan oleh Douglas McAdam pada tahun 1982 dalam sebuah buku yang berjudul *Political Process and the Development of Black Insurgency 1930-1970* (Locher, 2002: 264). Istilah *the Political Process Theory* (Teori Proses Politik) seringkali disebut juga dengan istilah *Political Opportunity Approach* (Pendekatan Kesempatan Politik) atau *Political Opportunity Structure* (Struktur Kesempatan Politik).

McAdam (Locher, 2002: 264), berpendapat bahwa teori-teori *social movement* klasik seperti *Mass Society Theory* dan *Relative Deprivation Theory* terlalu memfokuskan kepada dinamika psikologis dari anggota gerakan. Sementara itu, *Resource Mobilization Theory* terlalu memfokuskan kepada sumberdaya dan bantuan dari pihak luar, bukan pada lingkungan politik, yang memungkinkan terjadinya suatu gerakan. Pandangan *the Political Process Theory* melihat faktor internal dan faktor eksternal sama pentingnya. Ideologi dan keyakinan dianggap sama pentingnya dengan sumberdaya material, seperti halnya koneksi politik dan struktur sosial. *Political Process Theory*, adalah teori yang berusaha mengkombinasikan dari pandangan *Mass Society Theory*, *Relative Deprivation Theory*, dan *Resource Mobilization Theory* secara bersama ke dalam perspektif yang lebih historis dan politik.

Dalam beberapa hal, *Political Process Theory* memiliki kesamaan dengan *Resource Mobilization Theory*. Seperti halnya *Resource Mobilization Theory*, *Political Process Theory* memfokuskan kepada fakto-faktor yang dapat memungkinkan suatu gerakan berhasil. Faktor politik dan ekonomi dianggap jauh lebih penting dibandingkan faktor-faktor personal. Teori Proses Politik (*the Political Process Theory*) lebih banyak memfokuskan kepada faktor-faktor yang memungkinkan warga negara biasa membentuk suatu gerakan sosial mereka sendiri yang bertentangan dengan masyarakat yang dominan.

Beberapa sosiolog berpendapat bahwa Teori Proses Politik (*the Political Process Theory*) merupakan pandangan yang mendasarkan pada pemikiran teori Marxist (neo-Marxis) karena memfokuskan kepada kekuasaan potensial revolusioner dari

orang-orang biasa dan berasumsi bahwa masyarakat dikendalikan oleh sekelompok kecil dari elit yang berkuasa (Locher, 2002: 265). Fokus analisis neo-Marxis adalah kekuasaan serta konflik yang terjadi dalam Negara. Bagi kalangan Neo-Marxis, konflik antarkelas merupakan proses dialektis paling penting dalam mendorong perkembangan masyarakat dan semua gejala politik harus dilihat dalam rangka konflik antarkelas ini (Budiardjo, 2008: 87).

Proses politik (*political process*) adalah mengacu kepada suatu keadaan dimana ketika orang berusaha memperoleh akses pada kekuasaan politik dan menggunakannya untuk kepentingan mereka atau kelompok mereka sendiri. Studi tentang proses politik berfokus pada aktivitas-aktivitas partai dan kelompok-kelompok kepentingan, organisasi-organisasi internal, sifat pembuatan keputusan politik, serta peran dan latar belakang para politisi. (Abercrombie, Hill, & Turner, 2010: 420-421).

Fokus dari *Political Process Theory* adalah lebih banyak kepada koneksi politik (*political connections*) daripada kepada sumberdaya material (*material resources*). Sebuah gerakan sosial (*social movement*) dipandang sebagai fenomena politik, bukan fenomena psikologis seseorang. Gerakan sosial dipandang sebagai upaya rasional dari kelompok untuk memperoleh pengaruh yang cukup demi memajukan kepentingan-kepentingan politik mereka. Semua gerakan sosial (*social movements*) merupakan perjuangan untuk melawan penindasan atas suatu kekuasaan sosial dan politik.

Eisinger pada tahun 1973 (Wahlstrom & Peterson, 2006: 364) memperkenalkan konsep tentang Struktur Peluang Politik (*the Political Opportunity Structure: POS*), dimana dewasa ini konsep tentang digunakan Struktur Peluang Politik (*the Political Opportunity Structure*) banyak digunakan oleh McAdam (1982) dan Tarrow (1994). *POS* merupakan suatu ekspresi yang bertujuan melakukan analisa tentang keadaan politik yang memiliki pengaruh terhadap kemunculan, struktur, skope dan keberhasilan sebuah gerakan sosial. Para ilmuwan menggunakan konsep tentang POS dan dapat diterapkan secara umum dalam menganalisis gerakan pada konteks karakteristik lokal. Suatu struktur adalah spesifik, setiap lokasi berbeda dan bervariasi dari waktu ke waktu.

McAdam (Locher, 2002: 265), berpendapat bahwa ada tiga faktor determinan yang dapat mendorong keberhasilan suatu gerakan sosial, yakni:

1. Organization strength (Kekuatan Organisasi):

Organization strength (Kekuatan Organisasi), yakni level (tingkat kondisi) organisasi dalam masyarakat yang merasa dirugikan. Semakin terorganisir suatu kelompok orang-orang, maka akan semakin besar kemungkinan berhasilnya suatu gerakan sosial.

Seperti halnya dalam *Resource Mobilization Theory*, McAdam melalui *Political Process Theory*-nya juga mencatat pentingnya kehadiran organisasi untuk membentuk gerakan baru. Keberadaan suatu organisasi, apapun jenisnya, akan membangun suatu struktur dari *solidarity incentive*, jaringan komunikasi, dan pemimpin yang diakui. Selanjutnya, McAdam berpendapat bahwa keberadaan suatu kelompok sosial akan memungkinkan munculnya motivasi sosial dan antar-personal untuk mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan kelompok bersama anggota yang lainnya. Anggota kelompok yang tidak mau bergabung dalam suatu gerakan bersama dengan yang lainnya akan merasa bersalah dan mungkin akan mendapatkan hukuman secara sosial. Sementara, jika mereka ikut bergabung maka akan mendapatkan keuntungan secara sosial dan akan merasasemakin memiliki kedekatan dengan anggota yang lainnya.

Menurut Porta dan Diani (2006: 140), dalam analisis tentang Gerakan sosial, kajian tentang organisasi gerakan sosial (*Social movement organization: SMO*) merupakan kajian yang cukup populer. Meskipun para ahli memberikan pengertian yang cukup bervariasi tentang organisasi gerakan sosial (*Social movement organization*), namun secara umum dapat dikatakan bahwa organisasi gerakan sosial adalah suatu organisasi identitas yang bersifat kompleks atau formal, dengan tujuan mencapai tujuan mereka yang diimplementasikan dalam suatu gerakan sosial (*social movement*) atau kontra gerakan sosial. Sementara definisi yang lainnya, menyatakan bahwa organisasi gerakan sosial (SMO) sebagai asosiasi orang-orang yang melakukan tuntutan moral dan ideal tentang bagaimana seharusnya kehidupan personal atau kelompok yang termarginalkan dari masyarakatnya diorganisasikan.

2. *Cognitive liberation* (Pembebasan Kognitif):

Cognitive liberation (Pembebasan Kognitif), yakni persepsi tentang peluang keberhasilan dalam masyarakat. Semakin mereka percaya bahwa mereka bisa berhasil, maka semakin besar mereka untuk mencoba melakukan gerakan.

Cognitive Liberation, merupakan konsep yang sederhana. Sebelum orang-orang ikut mengambil bagian dalam suatu gerakan, para anggota potensial harus mengembangkan ide (gagasan) bahwa suatu situasi dipandang tidak adil dan kondisi ini dapat diubah melalui suatu tindakan kolektif. Dalam kata lain, mereka harus mengembangkan perasaan suatu deprivasi relative (*relative deprivation*), yakin bahwa deprivasi ini salah, memutuskan bahwa tujuan mereka adalah benar, dan yakin bahwa solusi atas problem mereka adalah bersifat struktural. Sebenarnya McAdam tidak pernah menggunakan kata *relative deprivation*, akan tetapi gagasannya memiliki kesamaan. Sebelum suatu gerakan dapat dimulai, terlebih dahulu harus ada kelompok dimana para anggotanya mempunyai keinginan dan keyakinan bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu dari tindakan bersama.

3. *Political opportunities* (Peluang-Peluang Politik):

Political opportunities (Peluang-peluang politik), yakni keselarasan antara kelompok dengan lingkungan politik yang lebih besar. Semakin besar suatu kelompok dapat bersatu dalam arena politik, maka semakin besar kemungkinannya untuk dapat melakukan perubahan dalam suatu sistem politik.

Political Opportunity (Peluang-peluang politik) merupakan aspek yang sangat penting dibandingkan dengan dua faktor yang lainnya. Organisasi-organisasi gerakan, harus memperoleh dan menggunakan kekuasaan politik untuk mencapai hasil yang signifikan. Gerakan sosial (*Social movements*) bukan suatu ruang kosong (*vacuum*); dia merupakan produk dari lingkungan sosial dan politik sekitarnya. Adanya perubahan dalam suatu sistem, akan memungkinkan untuk munculnya sebuah gerakan sosial.

The Social System. Untuk dapat bertahan hidup, maka gerakan sosial harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik dalam masyarakat. McAdam

menyebutkan terdapat empat dimensi dari *political opportunity* yang memiliki hubungan langsung dengan sistem sosial dimana gerakan eksis (Locher, 2002: 267; McAdam, McCarthy, & Zald, 1996: 27), yakni:

- 1) Relatif terbuka atau tertutupnya suatu kelembagaan sistem politik (*the relative openness or closure of the institutionalized political system*);
- 2) Stabil atau tidak stabilnya dari berbagai hubungan antar-kelompok yang berkuasa (*the stability or instability of that broad set of elite alignments that typically undergird a polity*);
- 3) Ada atau tidaknya persekutuan antara kekuatan-kekuatan (elit) dalam masyarakat (*the presence or absence of elite allies*); dan
- 4) Kapasitas dan kecenderungan Negara untuk melakukan tindakan represif (*the state's capacity and propensity for repression*).

Masing-masing faktor secara langsung menentukan seberapa besar kesempatan politik (*political opportunity*) yang dimiliki oleh suatu gerakan sosial (*Social movement*). Semua faktor tersebut di luar kendali dari anggota-anggota gerakan. Agar berhasil, maka suatu gerakan harus ada dalam situasi dan tempat dimana faktor-faktor tersebut mendukung.

Dalam menjelaskan peluang atau kesempatan politik bagi lahirnya suatu gerakan, Sydney Tarrow (dalam McAdam, McCarthy, & Zald, 2004: 41-44) sebagaimana dikutip Soenyono (2008: 31-32), berpendapat bahwa secara umum terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengetahui peluang-peluang politik yang memicu munculnya gerakan-gerakan sosial, yakni: (1) *Proximate opportunity structure*; dan (2) *State centered opportunity structure*.

Proximate opportunity structure; Pendekatan ini menekankan pada tanda/signal yang diterima dari kebijakan-kebijakan di lingkungan mereka atau dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam sumberdaya dan kapasitas mereka. Secara khusus, pendekatan ini dibagi lagi menjadi dua tipe, yaitu:

- (1) *Policy specific opportunities*; yang berpandangan bahwa peluang atau kesempatan politik bagi lahirnya suatu gerakan sosial bisa muncul oleh karena suatu kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, atau

tidak dilaksanakan oleh pemerintah dengan baik. Kebijakan pemerintah yang demikian dapat memberikan peluang bagi hadirnya suatu gerakan sosial. Peluang politik juga bisa muncul sebagai akibat dari legitimasi pemerintah yang semakin merosot, atau bahkan karena legitimasi negara tidak diakui oleh masyarakat; singkatnya, karena masyarakat tidak mengakui legitimasi negara.

- (2) *Group-specific opportunities*; Pendekatan ini melihat struktur peluang-peluang yang terfokus pada perubahan-perubahan yang terjadi atau dialami oleh kelompok-kelompok tertentu, baik tujuan ataupun keberadaannya di masyarakat. Perubahan-perubahan ini juga dapat memicu munculnya aksi kolektif. Adapun penyebab terjadinya perubahan-perubahan tersebut bisa ditimbulkan oleh berbagai faktor, seperti: politik, ekonomi, ideologi, budaya, perang, dsb.

State centered opportunity structur; Pendekatan ini memfokuskan pada negara dan segala aspek di dalamnya yang merupakan sumber terjadinya peluang-peluang yang bisa digunakan untuk memunculkan aksi kolektif. Secara khusus, terdapat dua tipe dari *state centered opportunity structur*, yaitu:

- (1) *Cross-sectional statism*; Dalam pendekatan ini, negara dianggap sebagai arena persaingan antara berbagai kelas sosial. Status dan terjadinya konflik-konflik politik; “...*the state as the arena of routinized political competition in which class, status, and political conflicts. . are played out...*”.
- (2) *Dynamic statism*; Pendekatan ini menyoroti pengaruh perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu negara dan pengaruhnya pada aktor-aktor gerakan sosial.

Seluruh sistem politik, menurut Tarrow (dalam McAdam, dkk.), mengalami perubahan yang pada gilirannya akan mengubah lingkungan aktor-aktor sosial yang cukup kuat untuk mempengaruhi langkah awal, bentuk-bentuk, dan hasil-hasil dari tindakan kolektif.

Dari pembacaan berbagai literatur, McAdam, dkk., berhasil mengidentifikasi adanya empat penulis yang menjelaskan beberapa dimensi peluang politik bagi lahirnya suatu gerakan sosial, yakni:

- 1) Brockett melihat adanya lima dimensi peluang politik yang akan mempengaruhi derajat besar-kecilnya kesempatan politik bagi lahirnya suatu gerakan sosial, yaitu: (a) ada-tidaknya akses, (b) ada-tidaknya aliansi gerakan, (c) ada-tidaknya fragmentasi dan konflik elit, (d) tingkat refresi yang dilakukan negara, dan (e) lokasi temporal dalam siklus protes.
- 2) Kriesi, dkk. menemukan tiga dimensi struktur kesempatan politik yang akan mempengaruhi munculnya gerakan sosial, yaitu: (a) struktur kelembagaan formal, (b) prosedur-prosedur dalam kaitannya dengan suatu tantangan, dan (c) konfigurasi kekuasaan bertalian dengan kehadiran suatu kekuatan lawan.
- 3) Rucht melihat ada empat dimensi kesempatan politik yang akan mempengaruhi munculnya gerakan sosial, yakni: (a) akses terhadap sistem partai, (b) kapasitas negara untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya, (c) struktur aliansi yang berhubungan dengan kehadiran lawan yang harus dihadapi; dan (d) struktur konflik dalam hubungannya dengan kehadiran suatu kekuatan lawan tertentu.
- 4) Tarrow menemukan empat dimensi kesempatan politik yang akan mempengaruhi terjadinya gerakan sosial, yakni: (a) terbuka atau tidaknya sistem politik, (b) stabilitas aliansi-aliansi politik, (c) ada-tidaknya aliansi elit politik, dan (d) ada-tidaknya pemilahan-pemilahan atau faksi-faksi dalam kekuatan elit.

Selanjutnya, keempat pandangan ahli tersebut tentang peluang politik yang dapat mempengaruhi munculnya suatu gerakan sosial dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. 1. :
Dimensi-Dimensi Peluang Politik (Political Opportunity) dari Beberapa Ahli

Brockett	Kriesi, dkk.	Rucht	Tarrow
1. Ada-tidaknya akses.	1. Struktur kelembagaan formal.	1. Akses terhadap sistem partai.	1. Terbukanya atau tidaknya sistem politik.
2. Ada-tidaknya aliansi gerakan.	2. Prosedur-prosedur dalam kaitannya dengan suatu	2. Kapasitas Negara untuk meng-implementasikan kebijakan-	2. Stabilitas aliansi-aliansi politik.

	tantangan.	kebijakannya.
3. Ada-tidaknya fragmentasi dan konflik elit.	3. Konfigurasi kekuasaan bertalian dengan kehadiran suatu kekuatan lawan.	3. Struktur aliansi yang berhubungan dengan kehadiran lawan yang harus dihadapi.
4. Tingkat represi yang dilakukan negara.		4. Struktur konflik dalam hubungannya dengan kehadiran suatu kekuatan lawan tertentu.
5. Lokasi temporer dalam siklus protes.		3. Ada-tidaknya pemilahan-pemilahan atau faksi-faksi dalam kekuatan elit.

Sumber: Diadopsi dari McAdam, dkk., 1996: 27.

McAdam, dkk. selanjutnya menyederhanakan konseptualisasi tentang dimensi-dimensi kesempatan atau peluang politik dari Brockett, Kriesi, dkk., Rucht, dan Tarrow menjadi empat dimensi, yakni:

- 1). Keterbukaan atau tertutupan relatif sistem politik,
- 2). Stabilitas atau instabilitas aliansi-aliansi elit yang secara tipikasi mendasari suatu sistem politik,
- 3) Ada-tidaknya aliansi-aliansi elit, dan
- 4) Kapasitas dan kemungkinan negara untuk melakukan tekanan-tekanan atau represi.

Dari keempat dimensi tersebut dapat dipahami bahwa dimensi keterbukaan sistem politik akan menjadi peluang bagi terjadinya gerakan sosial, sementara itu tertutupan sistem politik akan menjadi pemicu bagi terjadinya gerakan sosial.

Dimensi stabilitas aliansi-aliansi elit juga dapat menjadi peluang bagi terjadinya gerakan sosial, sementara itu instabilitas aliansi-aliansi elit akan menjadi penghambat bagi terjadinya gerakan sosial. Dimensi adanya aliansi dengan elit juga dapat

menjadi peluang bagi terjadinya gerakan sosial, sementara itu tidak adanya aliansi dengan elit akan menjadi penghambat bagi terjadinya gerakan sosial. Dimensi kapasitas negara dalam melakukan tekanan juga mempengaruhi terjadinya gerakan sosial. Semakin besar kapasitas negara dalam melakukan tekanan, semakin besar juga gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat.

Terhadap keempat dimensi peluang politik yang dapat disimpulkan dari konseptualisasi Brockett, Kriesi, dkk., Rucht, dan Tarrow di atas, McAdam dkk. kemudian mengkritik mereka karena dianggapnya telah lalai tidak memasukkan pentingnya peran kritis bekerjanya berbagai kecenderungan dan peristiwa-peristiwa internasional dalam mempengaruhi munculnya kesempatan atau peluang politik pada tingkat domestik: *“What is missed in this conceptualization is the critical role of international trends and events in shaping domestic institution and alignment”*.

Lebih jauh, McAdam, dkk. menegaskan bahwa para ahli gerakan sosial sampai saat ini tidak memberikan perhatian yang cukup pada pentingnya proses politik dan ekonomi global dalam mempengaruhi pembentukan struktur kemungkinan-kemungkinan bagi keberhasilan suatu gerakan sosial pada tingkat domestik; *“In short, movement scholars have, to date, grossly undervalued the impact of global political and economic process in structuring the domestic possibilities for successful collective action”*.

Kritik McAdam, dkk. memperkuat argumen beberapa ahli gerakan sosial seperti Ezra S. Layton tentang pentingnya konteks global dari banyak kelahiran gerakan sosial di berbagai Negara. Dalam disertasinya yang berjudul *“The International Context of the US Civil Rights Movement: the Dynamics between Racial Policies and International Politics, 1941-1960”*, misalnya, Layton mengungkapkan pentingnya peran perang dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam mempengaruhi dinamika kehidupan politik dalam negeri dan maraknya gerakan anti rasialisme di Amerika Serikat sebelum Perang Dunia Kedua. Lebih jauh, Layton menjelaskan bahwa perang dingin telah memaksa munculnya aliansi elit politik baru dan keterbukaan institusi pemerintah di Amerika Serikat.

Jauh sebelum itu, Theda Skocpol telah sangat dikenal sebagai seorang ahli teori revolusi yang lebih awal menyampaikan argumen serupa. Melalui karyanya, Skocpol

menyatakan bahwa situasi revolusioner yang terjadi di suatu negara sangat dikondisikan oleh terputusnya dukungan sumberdaya internasional justru ketika suatu negara sedang memasuki tahapan lanjut dari proses modernisasi yang tengah dilakukan dengan menggantungkan diri pada sistem internasional. Situasi yang demikian dapat menciptakan apa yang oleh Chalmer Johnson disebut sebagai deflasi kekuasaan (*power deflation*) dan merosotnya otoritas pusat kekuasaan yang dapat dipahami sebagai dua bentuk dari kesempatan politik bagi kelahiran suatu gerakan sosial yang sangat penting.

Noreena Hertz menguatkan argumen Skocpol tentang pentingnya konteks global bagi berkembangnya kesempatan politik bagi lahirnya sebuah gerakan sosial. Hertz dengan jelas menyebutkan bahwa sebagai akibat dari terjadinya pengambilalihan otoritas negara oleh kekuatan korporasi-korporasi transnasional di mana-mana di seluruh dunia, banyak pemerintah dan rakyat mereka di berbagai belahan dunia kehilangan kekuasaan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan nasional mereka. Sebagai implikasinya, kebijakan-kebijakan nasional negara-negara tersebut semakin tidak mampu mengungkapkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan rakyat mereka.

4. Sumber Kekuatan Politik Gerakan sosial:

Studi terhadap gerakan sosial yang telah ada terfokus pada latarbelakang dan bagaimana aksi kolektif timbul, tapi di sisi lain kurang memperhatikan politik gerakan itu sendiri dan hasil politis dari aksi kolektif tersebut. Akibatnya, hasil analisis lebih banyak menggambarkan persoalan struktural dan organisasi internal dari gerakan-gerakan tersebut dan tidak banyak mengungkap aspek relasional dan kontekstual yang diperlukan untuk memahami dinamika politik dalam negeri. Untuk membahas isu tersebut, bagian ini mengungkapkan tulisan mengenai gerakan sosial yang terkait dengan konseptualisasi kekuasaan yang diuraikan Bourdieu (Harriss, Stokke, & Tornquist, 2005: 185). Argumentasi dasar Bourdieu adalah bahwa praktek-praktek sosial dan kekuasaan untuk bertindak itu berlandaskan disposisi para aktor untuk berpraktik (*habitus*), berbagai bentuk permodalan (misalnya, modal ekonomi, sosial, budaya, simbolik) yang mereka miliki dan bidang (misalnya bidang

politik) dimana praktek-praktek tersebut terjadi. Konsepsi praktek sosial ini menggambarkan sejumlah sumber utama kekuasaan dilihat dari posisi (ditentukan oleh volume dan komposisi modal yang dimiliki pemegang posisi yang berbeda-beda) dan kekuatan (ditentukan oleh hubungan dominasi, subordinasi atau kesetaraan antara posisi yang berbeda-beda) dalam bidang itu. Sehubungan dengan aksi kolektif tersebut, maka konsep umum mengenai kekuasaan itu berkaitan dengan kesadaran struktur peluang politik yang spesifik (hubungan dalam bidang politik), struktur mobilisasi (modal sosial), kerangka budaya (modal simbolik) dan identitas bersama (habitus).

Sumber utama kekuatan ada pada relasi gerakan dengan aktor-aktor dan institusi kunci dalam bidang politik. Tarrow (1994) melihat bahwa ada struktur peluang politik yang kompleks dan dinamis yang dimanfaatkan oleh gerakan sosial untuk mencapai tujuan. Umumnya bisa digarisbawahi pentingnya hak-hak formal dan institusional dalam sistem politik, misalnya adanya hak konstitusional dan institusi yang menjunjung hak-hak tersebut. Meski hak dan institusi bisa menjadi kerangka formal untuk berpartisipasi, koneksi dan relasi politis tampaknya lebih menentukan dalam memberi akses dan transformasi yang sesungguhnya terhadap hak dan institusi. Para ahli bidang pergerakan juga menekankan bahwa gerakan sosial ada dalam konteks politik kerjasama dan kompetisi di dalam masyarakat, yang merefleksikan hubungan formal dan informal di antara dan di dalam organ-organ masyarakat sipil (Della Porta dan Diani, 1999).

Kemampuan gerakan sosial untuk memobilisasi individu maupun kelompok dalam masyarakat juga merupakan sumber kekuatan politik lain. Ahli gerakan sosial menggunakan pemahaman struktur mobilisasi untuk konseptualisasi jaringan sosial dan institusi yang berfungsi sebagai struktur sosial bagi mobilisasi kolektif dan untuk menjelaskan bentuk organisasi dalam suatu gerakan (Della Porta dan Diani, 1999). Struktur mobilisasi bisa bersifat formal maupun informal dan biasanya struktur yang sering luput dari perhatian meliputi jaringan pertemanan, tetangga dan rekan kerja sehari-hari. Struktur mobilisasi informal juga mencakup jaringan aktivis serta masyarakat yang merasa senasib dan sepenanggungan. Infrastruktur sosial semacam itu bisa memfasilitasi komunikasi dan solidaritas sebelum dan selama mobilisasi kolektif.

Kemampuan gerakan sosial untuk berpartisipasi dalam memperjuangkan arti hak, isu, aktor dan kebijakan merupakan kekuatan tambahan. Gerakan sosial “memaknai ketidakadilan dan pelanggaran atas suatu kelayakan berdasarkan budaya yang ada” (Zald, 1996: 226). Kerangka budaya mengenai ketidakadilan dan cita-cita politik serta mengenai hak dan kewajiban, mengalami berbagai cobaan dan bisa terus berubah-ubah. Artinya, ada suatu proses kerangka strategis yang aktif dan kompetitif yang terjadi di berbagai arena, baik dalam gerakan sosial itu sendiri maupun diantara aktivis dan otoritas sebagai modal simbolis, yaitu agar diakui sebagai perwakilan resmi suatu kelompok tertentu.

Terakhir, aksi kolektif juga didasari oleh refleksi identitas diri para aktornya (habitus). Partisipasi individual dalam aksi kolektif tidak berdasarkan pada realita yang ada melainkan berdasarkan persepsi dan interpretasi terhadap realitas tersebut, dan gerakan sosial itu sendiri berperan aktif dalam membangun serta mengkomunikasikan identitas bersama tersebut (Melucci, 1996). Pengalaman sebelumnya menunjukkan, politik oposisi memfasilitasi dan member kerangka bagi mobilisasi bentuk baru, tanpa sedikit pun memanfaatkan unsur budaya yang sudah ada mengenai cara-cara berprotes dan berorganisasi. Ini artinya, prinsip-prinsip pengelompokan dan prinsip-prinsip organisasi aksi dalam habitus merupakan sumber utama kekuatan aksi kolektif (Stokke, 2002).

Mengutip konseptualisasi umum Bourdieu mengenai kekuasaan dan tingkat pemahaman yang lebih tinggi terhadap teori gerakan sosial, konsep-konsep tersebut memberi basis dalam menganalisa segi politik gerakan sosial. Secara lebih spesifik, Tornquist (1999, 2002b) mengidentifikasi tiga isu utama dalam studi politik Gerakan sosial, yaitu: (a) dimana bidang politik yang dipilih aktor; (b) apa isu dan kepentingan yang didengungkan dan dipolitisir; dan (c) bagaimana masyarakat dimobilisasikan ke dalam gerakan politik dan bidang politik.

BAB VII:
PERSPEKTIF KOMPREHENSIF
TEORI GERAKAN SOSIAL

McAdam, McCarthy, dan Zald dalam bukunya yang berjudul “*Comparative Perspective on Social Movements: Political Opportunity, Mobilizing Structure, and Cultural Framings*”, menjelaskan bahwa ada tiga faktor yang penting dalam mengkaji dan menganalisis tentang kemunculan dan perkembangan gerakan sosial. Ketiga faktor tersebut meliputi: (1) Struktur peluang-peluang politik dan kendala-kendala yang menghambat gerakan; (2) Bentuk dari organisasi, baik formal maupun informal, yang mendukung suatu perlawanan/pemberontakan; dan (3) Proses-proses kolektif tentang interpretasi, atribusi, dan konstruksi sosial yang menghubungkan antara peluang dan tindakan (aksi). Dalam bahasa yang sederhana ketiga faktor tersebut meliputi: (1) Peluang-peluang politik (*Political opportunities*); (2) Struktur mobilisasi (*Mobilizing structures*); dan (3) Pembingkaihan kultural (*Cultural framing*) (McAdam, McCarthy, dan Zald, 2004: 2).

Penjelasan ketiga faktor tersebut, yakni: Peluang-peluang politik (*Political opportunities*), Struktur mobilisasi (*Mobilizing structures*); dan Pembingkaihan kultural (*Cultural framing*) adalah sebagai berikut:

A. Peluang-Peluang Atau Kesempatan Politik (*Political Opportunities*):

Istilah *Political Opportunity Approach* (Pendekatan peluang/Kesempatan Politik) seringkali disebut juga dengan istilah *Political Opportunity Structure* (Struktur peluang/Kesempatan Politik) atau *the Political Process Theory* (Teori Proses Politik). Teori Proses Politik (*the Political Process Theory*) tentang *Social Movements* (Gerakan Sosial) untuk pertama kali dirumuskan oleh Douglas McAdam pada tahun 1982 dalam sebuah buku yang berjudul “*Political Process and the Development of Black Insurgency 1930-1970*” (Locher, 2002:264).

Dalam beberapa hal perspektif *Political Process Theory* memiliki kesamaan dengan *Resource Mobilization Theory*. Seperti halnya *Resource Mobilization Theory*, *Political Process Theory* memfokuskan kepada fakto-faktor yang dapat memungkinkan suatu gerakan sosial berhasil, dimana faktor politik dan ekonomi dianggap jauh lebih penting dibandingkan faktor-faktor personal. Teori Proses Politik (*the Political Process Theory*) lebih banyak memfokuskan kepada faktor-faktor yang memungkinkan warganegara biasa membentuk suatu gerakan sosial mereka sendiri yang bertentangan dengan masyarakat yang dominan.

Proses politik (*political process*) mengacu kepada suatu keadaan dimana ketika orang-orang atau kelompok berusaha memperoleh akses kepada kekuasaan politik dan menggunakannya untuk kepentingan mereka atau kelompok mereka sendiri. Studi tentang proses politik berfokus pada aktivitas-aktivitas partai dan kelompok-kelompok kepentingan, organisasi-organisasi internal, sifat pembuatan keputusan politik, serta peran dan latar belakang para politisi (Abercrombie, Hill, & Turner, 2010: 420-421).

Fokus dari *Political Process Theory* adalah lebih banyak kepada koneksi politik (*political connections*) daripada kepada sumberdaya material (*material resources*). Sebuah gerakan sosial (*social movement*) dipandang sebagai fenomena politik, bukan fenomena psikologis seseorang. Gerakan sosial dipandang sebagai upaya rasional dari kelompok untuk memperoleh pengaruh yang cukup demi memajukan kepentingan-kepentingan politik mereka. Semua Gerakan Sosial (*Social Movements*) adalah merupakan perjuangan untuk melawan penindasan atau dominasi atas suatu kekuasaan sosial dan politik.

Eisinger (dalam Wahlstrom & Peterson, 2006: 364), memperkenalkan konsep tentang Struktur Peluang Politik (*the Political Opportunity Structure: POS*), dimana dewasa ini konsep tentang Struktur Peluang Politik (*the Political Opportunity Structure*) tersebut banyak digunakan oleh McAdam (1982) dan Tarrow (1994). *POS* merupakan suatu ekspresi yang bertujuan melakukan analisa tentang keadaan politik yang memiliki pengaruh terhadap kemunculan, struktur, skope dan keberhasilan sebuah gerakan sosial. Para ilmuwan menggunakan konsep tentang POS dan dapat diterapkan secara umum dalam menganalisis gerakan pada konteks karakteristik

local. Suatu struktur adalah spesifik, setiap lokasi berbeda dan bervariasi dari waktu ke waktu.

McAdam (Locher, 2002:265), berpendapat bahwa ada tiga faktor determinan yang dapat mendorong keberhasilan suatu gerakan social, yakni: (1) *organization strength*; (2) *cognitive liberation*; dan (3) *political opportunities*.

Pertama, *Organization strength*, yakni level (tingkat kondisi) organisasi dalam masyarakat yang merasa dirugikan. Semakin terorganisir suatu kelompok orang-orang, maka akan semakin besar kemungkinan berhasilnya suatu gerakan sosial. Seperti halnya dalam *Resource Mobilization Theory*, McAdam melalui *Political Process Theory*-nya juga mencatat pentingnya kehadiran organisasi untuk membentuk gerakan sosial. Keberadaan suatu organisasi, apapun jenisnya, akan membangun struktur *solidarity incentive*, jaringan komunikasi, dan pemimpin yang diakui. Selanjutnya McAdam berpendapat bahwa keberadaan suatu kelompok sosial akan memungkinkan munculnya motivasi sosial dan antar-personal untuk mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan kelompok bersama anggota yang lainnya. Anggota kelompok yang tidak mau bergabung dalam suatu gerakan bersama dengan yang lainnya akan merasa bersalah dan mungkin akan mendapatkan hukuman secara sosial. Sementara jika mereka ikut bergabung maka akan mendapatkan keuntungan secara social dan akan merasa semakin memiliki kedekatan dengan anggota yang lainnya.

Menurut Porta dan Diani (2006:140), dalam analisis tentang gerakan social, kajian tentang organisasi gerakan social (*social movement organization: SMO*) merupakan kajian yang cukup populer. Meskipun para ahli memberikan pengertian yang cukup bervariasi tentang organisasi gerakan sosial (*social movement organization*), namun secara umum dapat dikatakan bahwa organisasi gerakan sosial adalah suatu organisasi identitas yang bersifat kompleks atau formal, dengan tujuan mencapai tujuan mereka yang diimplementasikan dalam suatu gerakan sosial (*social movement*) atau kontra gerakan sosial. Sementara definisi yang lainnya, menyatakan bahwa organisasi gerakan sosial sebagai asosiasi orang-orang yang melakukan tuntutan moral dan ideal tentang bagaimana seharusnya kehidupan personal atau kelompok yang termarginalkan dari masyarakatnya diorganisasikan.

Kedua, *Cognitive liberation*, yakni persepsi tentang peluang keberhasilan dalam masyarakat. Semakin percaya bahwa mereka bisa berhasil, maka semakin besar mereka untuk mencoba terlibat dalam melakukan gerakan sosial. *Cognitive Liberation*, merupakan konsep yang sederhana. Sebelum orang-orang ikut mengambil bagian dalam suatu gerakan, para anggota potensial harus mengembangkan ide (gagasan) bahwa suatu situasi dipandang tidak adil dan kondisi ini dapat diubah melalui suatu tindakan kolektif. Dalam kata lain, mereka harus mengembangkan perasaan suatu deprivasi relative (*relative deprivation*), yakin bahwa deprivasi ini salah, memutuskan bahwa tujuan mereka adalah benar, dan yakin bahwa solusi atas problem mereka adalah bersifat struktural. Sebenarnya McAdam tidak pernah menggunakan kata *relative deprivation*, akan tetapi gagasannya memiliki kesamaan. Sebelum suatu gerakan dapat dimulai, terlebih dahulu harus ada kelompok dimana para anggotanya mempunyai keinginan dan keyakinan bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu dari tindakan bersama.

Ketiga, *Political opportunities*. Ada dua konsep dalam *political opportunities*, yaitu: (a) ***Political opportunities***, yakni keselarasan antara kelompok dengan lingkungan politik yang lebih besar. Semakin besar suatu kelompok dapat bersatu dalam arena politik, maka semakin besar kemungkinannya untuk dapat melakukan perubahan dalam suatu system politik. *Political Opportunity* merupakan aspek yang sangat penting dibandingkan dengan dua faktor yang lainnya. Organisasi-organisasi gerakan, harus memperoleh dan menggunakan kekuasaan politik untuk mencapai hasil yang signifikan. Gerakan Sosial (*social movements*) bukan suatu ruang kosong (*vacuum*); dia merupakan produk dari lingkungan social dan politik sekitarnya. Adanya perubahan dalam suatu system, akan memungkinkan untuk munculnya sebuah gerakan social; dan (b) ***The Social System***; Untuk dapat bertahan hidup, maka gerakan social harus mampu beradaptasi dengan perubahan social dan politik dalam masyarakat. McAdam menyebutkan terdapat empat dimensi dari *political opportunity* yang memiliki hubungan langsung dengan system social dimana gerakan eksis (Locher, 2002:267; McAdam, McCarthy, & Zald, 2004:27), yakni: (1) Relatif terbuka atau tertutupnya suatu kelembagaan system politik (*the relative openness or closure of the institutionalized political system*); (2) Stabil atau tidak stabilnya dari berbagai hubungan antar-kelompok yang berkuasa (*the stability or instability of that*

broad set of elite alignments that typically undergird a polity); (3) Ada atau tidak adanya persekutuan antara kekuatan-kekuatan (elit) dalam masyarakat (*the presence or absence of elite allies*); dan (4) Kapasitas dan kecenderungan Negara untuk melakukan tindakan represif (*the state's capacity and propensity for repression*).

Masing-masing faktor secara langsung menentukan seberapa besar kesempatan politik (*political opportunity*) yang dimiliki oleh suatu gerakan sosial (*social movement*). Semua faktor tersebut di luar kendali dari anggota-anggota gerakan. Agar berhasil, maka suatu gerakan harus ada dalam situasi dan tempat dimana faktor-faktor tersebut mendukung.

Dalam menjelaskan peluang atau kesempatan politik bagi lahirnya suatu gerakan, Sydney Tarrow (dalam McAdam, McCarthy, & Zald, 2004: 41-44) berpendapat bahwa secara umum terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengetahui peluang-peluang politik yang memicu munculnya gerakan-gerakan sosial, yakni: (1) *Proximate opportunity structure*; dan (2) *State centered opportunity structure*.

Pertama, *Proximate opportunity structure*. Pendekatan ini menekankan pada tanda/signal yang diterima dari kebijakan-kebijakan di lingkungan masyarakat atau dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam sumber daya dan kapasitas masyarakat. Secara khusus pendekatan ini dibagi lagi menjadi dua tipe, yaitu: (1) *Policy specific opportunities*; yang berpandangan bahwa peluang atau kesempatan politik bagi lahirnya suatu gerakan sosial bisa muncul oleh karena suatu kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah dengan baik. Kebijakan pemerintah yang demikian dapat memberikan peluang bagi hadirnya suatu gerakan sosial. Peluang politik juga bisa muncul sebagai akibat dari legitimasi pemerintah yang semakin merosot, atau bahkan karena legitimasi Negara tidak diakui oleh masyarakat; singkatnya, karena masyarakat tidak mengakui legitimasi Negara; dan (2) *Group-specific opportunities*; Pendekatan ini melihat struktur peluang-peluang yang terfokus pada perubahan-perubahan yang terjadi atau dialami oleh kelompok-kelompok tertentu, baik tujuan ataupun keberadaannya di masyarakat. Perubahan-perubahan ini juga dapat memicu munculnya aksi kolektif. Adapun penyebab terjadinya perubahan-perubahan tersebut

bisa ditimbulkan oleh berbagai faktor, seperti: politik, ekonomi, ideologi, budaya, perang, dsb.

Kedua, *State centered opportunity structure*. Pendekatan ini memfokuskan pada negara dan segala aspek di dalamnya yang merupakan sumber terjadinya peluang-peluang yang bisa digunakan untuk memunculkan aksi kolektif. Secara khusus terdapat dua tipe dari *State centered opportunity structure*, yaitu: (1) *Cross-sectional statism*; Dalam pendekatan ini negara dianggap sebagai arena persaingan antara berbagai kelas social. Status dan terjadinya konflik-konflik politik.; dan (2) *Dynamic statism*; yang memfokuskan kepada bagaimana perubahan negara (*state change*) dan bagaimana perubahan negara ini memproduksi atau mengurangi peluang-peluang politik. Pendekatan ini menyoroti pengaruh perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu negara dan pengaruhnya pada aktor-aktor gerakan sosial. Seluruh system politik menurut Tarrow (McAdam, McCarthy, & Zald, 2004: 40-45) mengalami perubahan yang pada gilirannya akan mengubah lingkungan aktor-aktor sosial yang cukup kuat untuk mempengaruhi langkah awal, bentuk-bentuk, dan hasil-hasil dari tindakan kolektif.

B. Struktur Mobilisasi (*Mobilizing Structures*):

McCarthy (McAdam, McCarthy, & Zald, 2004: 141-142) mengartikan konsep struktur mobilisasi (*mobilizing structure*) sebagai cara-cara yang disepakati untuk terlibat dalam tindakan kolektif yang meliputi repertoar taktik-taktik tertentu, bentuk organisasi gerakan sosial khusus, dan repertoar modular (rancangan) gerakan sosial. Dalam pengertian lain, struktur mobilisasi (*mobilizing structure*) adalah struktur-struktur yang berperan sebagai wahana mobilisasi suatu gerakan sosial.

Menurut McCarthy (McAdam, McCarthy, & Zald, 2004: 145) terdapat empat dimensi struktur mobilisasi (*mobilizing structure*) baik bersifat formal maupun informal, dimana melalui wahana ini orang bergerak dan melibatkan diri dalam suatu tindakan kolektif. Keempat dimensi struktur mobilisasi (*mobilizing structure*) sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 7.1.:
Dimensi Struktur Mobilisasi**

Non-Gerakan	Gerakan
-------------	---------

	<i>(NonMovement)</i>	<i>(Movement)</i>
Tidak Resmi <i>(Informal)</i>	Jaringan Pertemanan (<i>Friendship Networks</i>); Lingkungan Tempat Tinggal (<i>Neighborhoods</i>); Jaringan Kerja (<i>Work Networks</i>).	Jaringan Aktivis (<i>Activist Networks</i>); Kelompok-Kelompok Kesamaan (<i>Affinity Groups</i>); Komunitas Memori (<i>Memory Communities</i>).
Resmi <i>(Formal)</i>	Gereja (<i>Churches</i>); Gabungan-Gabungan (<i>Unions</i>); Asosiasi Profesional (<i>Professional Associations</i>).	Organisasi Gerakan Sosial (<i>SMOs</i>); Komite-Komite Protes (<i>Protest Committees</i>); Lembaga-Lembaga Gerakan (<i>Movement Schools</i>).

Sumber: McAdam, McCarthy, & Zald, 2004: 145.

Dengan demikian, mengacu kepada perspektif McCarthy sebagaimana digambarkan dalam Tabel 7.1. tersebut diatas, maka dimensi-dimensi struktur mobilisasi (*mobilizing structure*) yang dapat dijadikan wahana bagi mobilisasi sumberdaya gerakan sosial adalah meliputi bentuk dimensi yang tidak resmi (*informal*) seperti: Jaringan Aktivis (*Activist Networks*); Kelompok-Kelompok Kesamaan (*Affinity Groups*); Komunitas Memori (*Memory Communities*), dan bentuk dimensi yang resmi (*formal*) seperti: Organisasi Gerakan Sosial (*SMOs*); Komite-Komite Protes (*Protest Committees*); Lembaga-Lembaga Gerakan (*Movement Schools*).

Resource Mobilization Theory (RMT), pertama kali diperkenalkan oleh Anthony Oberschall (Locher, 2002:258). *Resource Mobilization Theory* memfokuskan perhatiannya kepada proses-proses sosial yang memungkinkan muncul dan berhasilnya suatu gerakan. *Resource Mobilization Theory* lebih banyak memberikan perhatian terhadap faktor-faktor ekonomi dan politik. *Resource Mobilization Theory* berasumsi bahwa dalam suatu masyarakat dimana muncul ketidakpuasan maka cukup memungkinkan untuk memunculkan sebuah gerakan sosial. Faktor organisasi dan kepemimpinan merupakan faktor yang dapat mendorong atau menghambat suatu gerakan sosial (*social movements*). Menurut Oberschall (Locher, 2002:259), istilah

mobilisasi (*mobilization*) mengacu kepada proses pembentukan kerumunan, kelompok, asosiasi, dan organisasi untuk mencapai suatu tujuan kolektif.

Atas dasar berbagai kajian tentang basis rasionalitas partisipasi dalam tindakan kolektif, kemudian Pichardo (1988:100) melihat bahwa terdapat tiga elemen dasar dalam teori mobilisasi sumberdaya tentang proses terjadinya suatu gerakan sosial, yakni: sumberdaya (*resources*), motivasi (*motivation*), dan lingkungan politik (*political environment*).

Selanjutnya terdapat dua model analisis dalam pendekatan *Resource Mobilization Theory* (Pichardo, 1988:99; Phongpaichit, dalam Triwibowo, 2006:11), yakni:

Pertama; *The Political-interactive model (The Political process models)*. Model ini dikembangkan oleh Tilly, Gamson, Oberschall dan McAdam. Model ini lebih menekankan pentingnya perubahan struktur kesempatan bagi aksi kolektif, keberadaan jejaring (*network*), serta kaitan horizontal yang telah terbangun dengan kelompok-kelompok tertindas (*aggrieved groups*) sebagai faktor penentu keberhasilan gerakan sosial. Model ini menempatkan relasi gerakan sosial dengan negara dan bingkai sistem politik yang ada sebagai determinan yang penting bagi keberhasilan gerakan sosial. Jika negara kuat dan represif, maka gerakan sosial sulit untuk mencapai tujuannya, demikian juga sebaliknya. Pichardo (1988:99) menjelaskan bahwa model ini menekankan pada kapasitas internal dari komunitas untuk menghasilkan organisasi gerakan sosial.

Kedua; *The Organizational-entrepreneurial model (The Professional organizer models)*. Model ini dikembangkan oleh McCarthy dan Zald. Model ini memandang bahwa dinamika organisasional, kepemimpinan dan pengelolaan sumberdaya merupakan faktor yang lebih signifikan dalam menentukan keberhasilan gerakan sosial. Model ini pada dasarnya mengaplikasikan teori pengembangan organisasi untuk menganalisis gerakan sosial serta memandang bahwa organisasi formal merupakan *carriers of social movements*. Organisasi gerakan sosial adalah suatu organisasi yang kompleks, atau formal, yang mengidentikkan tujuannya dengan preferensi dari gerakan sosial dan berusaha mewujudkan pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

Setiap Organisasi Gerakan Sosial (*Social Movement Organization; SMO*) harus mampu mengelola sumber-sumber (*resources*) yang tersedia dengan baik. Sumber-sumber dimaksud meliputi sumber-sumber material, seperti pekerjaan (*jobs*), penghasilan (*income*), dan tabungan (*savings*), serta sumber-sumber non-material seperti wewenang (*authority*) komitmen moral (*moral commitment*), kepercayaan (*trust*), persahabatan (*friendship*), kemampuan (*skills*) dan sebagainya. Menurut Oberschall (Locher, 2002:260), keberhasilan dan kegagalan sebuah gerakan, tergantung atas seberapa banyak orang-orang yang tergabung ke dalam organisasi, bagaimana mengarahkan mereka, apa pengorbanan mereka, dan bagaimana mereka bertahan terhadap pihak lawan (*opponents*).

Dalam mengembangkan pendekatan mobilisasi sumberdaya, McCarthy dan Zald (1977:1216) menekankan atas perspektif sentral, yakni: Pertama, studi agregasi (pengumpulan) sumber daya (seperti uang dan tenaga kerja) sangat penting untuk memahami aktivitas gerakan sosial. Karena sumber daya diperlukan untuk keterlibatan dalam konflik sosial, maka sumberdaya harus dikumpulkan untuk tujuan-tujuan kolektif; Kedua, dalam upaya agregasi (pengumpulan) sumber daya maka diperlukan beberapa bentuk minimal organisasi, dan karenanya perspektif mobilisasi sumberdaya secara implisit atau eksplisit lebih terfokus langsung kepada organisasi gerakan sosial daripada mereka yang bekerja dalam perspektif tradisional; Ketiga, dalam mengkalkulasi (menghitung) tentang keberhasilan dan kegagalan sebuah gerakan ada pengakuan eksplisit akan pentingnya keterlibatan individu dan organisasi dari luar kolektivitas dimana suatu gerakan sosial terjadi; Keempat, model penawaran dan permintaan (*supply and demand*) kadang-kadang diterapkan dalam mengkaji arus sumber daya yang bergerak kearah dan menjauh dari gerakan sosial tertentu; dan Kelima, ada kepekaan terhadap pentingnya biaya dan manfaat dalam menjelaskan individu dan keterlibatan organisasi dalam aktivitas gerakan sosial.

McCarthy dan Zald (1977: 1236) menjelaskan bahwa model mobilisasi sumberdaya (*the resource mobilization model*), sebagaimana yang digambarkannya, menekankan kepada interaksi antara: ketersediaan sumberdaya (*resource availability*), struktur preferensi dari organisasi yang sudah ada sebelumnya (*the preexisting organization of preference structures*), dan pengelolaan yang ditujukan

untuk mempertemukan preferensi tuntutan (*entrepreneurial attempts to meet preference demand*).

Menurut Dieter Opp (2009: 141), perspektif mobilisasi sumberdaya yang digambarkan oleh McCarthy dan Zald berasumsi bahwa aktor-aktor politik dan Organisasi Gerakan Sosial memiliki tujuan-tujuan tertentu. Salah satu strategi yang diambil oleh aktor-aktor politik dan Organisasi Gerakan Sosial dalam rangka mencapai tujuan tersebut adalah dengan melakukan mobilisasi sumberdaya. Hal ini berimplikasi bahwa tindakan Organisasi Gerakan Sosial adalah dalam tataran mendapatkan sesuatu yang bernilai bagi mereka, yakni mereka bertindak menurut preferensi mereka. Organisasi Gerakan Sosial memiliki keyakinan bahwa mobilisasi sumberdaya adalah sebagai instrumen untuk mencapai tujuannya. Namun tidak selamanya Organisasi Gerakan Sosial berhasil dalam melakukan mobilisasi sumberdaya.

McCarthy dan Zald (Dieter Opp, 2009:129) mengakui bahwa ketidakpuasan atau keluhan (*grievances*) dan deprivasi relatif (*relative deprivation*) adalah merupakan variabel kunci dalam menjelaskan tentang perilaku protes dan Gerakan Sosial. Namun demikian berbeda dengan pendekatan perpektif teori deprivasi relatif, McCarthy dan Zald (Dieter Opp, 2009:130) melalui pespektif mobilisasi sumberdaya memandang bahwa ketidakpuasan (*grievances*) bukan bersifat pemberian (*given*). Keluhan (*discontent*) dan ketidakpuasan (*grievances*) dapat didefinisikan, dibuat dan dimanipulasi oleh para pengelola isu dan organisasi (*issue entrepreneurs and Organizations*). Argumen ini tidak menyatakan bahwa menolak tentang pentingnya keluhan sebagai variabel penjelas untuk memahami gerakan sosial. Namun lebih sebagai faktor penjelas tentang bagaimana proposisi munculnya ketidakpuasan. Oleh karena itu McCarthy dan Zald, lebih menekankan pada analisis kondisi struktural yang memfasilitasi ekspresi keluhan (*grievances*). Selanjutnya McCarthy dan Zald (Dieter Opp, 2009: 130) berpendapat bahwa aktivitas pengelola (pengusaha) politik akan menghasilkan keluhan, dan keluhan ini memungkinkan pada gilirannya memiliki efek positif terhadap munculnya protes.

McCarthy dan Zald (1977; dalam Dieter Opp, 2009: 138) dan beberapa penulis yang lainnya membuat daftar tentang berbagai bentuk dari sumberdaya seperti uang (*money*), fasilitas dan tenaga kerja (*facilities and labor*), dan legitimasi (*legitimacy*).

Dalam tulisan lainya, McCarthy dan Zald menyatakan bahwa perspektif mobilisasi sumberdaya (*resources mobilization*) menempatkan beberapa sumberdaya dalam masyarakat, seperti semua level pemerintahan (*all levels government*), yayasan-yayasan (*foundations*), institusi keagamaan (*religious institutions*), dan konstituen ikhlas/baik hati (*conscience constituences*), kelompok-kelompok yang mendukung tujuan gerakan (*groups that support the movement's goals*). Pernyataan ini mempertegas bahwa sumberdaya bukan hanya berupa barang-barang yang berwujud (*tangible*) seperti uang dan fasilitas (*money and facilities*) akan tetapi juga meliputi institusi dan kelompok (*institutions and groups*). Selain itu, sumberdaya juga bisa meliputi akses kepada media (*access to media*), dukungan simpatisan (*support by sympathozers*), loyalitas kelompok atau anggota (*loyalty of groups or members*), kesediaan ruang pertemuan atau ruang kantor (*availability of rooms for meeting or office work*), hak-hak, pengetahuan dan kemampuan dari aktor.

Mengacu kepada pandangan tersebut, kemudian Dieter Opp (2009: 139) mendefinisikan sumberdaya (*resources*) sebagai barang-barang, yakni segala sesuatu yang bisa digunakan dimana individu atau aktor kolektif dapat mengontrolnya (*Resources are goods, i.e. everything that has utility which individual or collective actors can control*). Dalam warna yang sama, Gamson, Fireman, dan Rytina (1982:23; dalam Dieter Opp, 2009: 139) menyatakan bahwa sumberdaya (*resources*) dimaksudkan sebagai semua objek yang dapat digunakan oleh kelompok untuk meningkatkan tujuan kolektif, dan kontrol atas objek-objek tersebut dapat ditransfer dari seseorang kepada orang yang lainnya. Sebagai contoh, misalnya uang (*money*), senjata (*weapons*), alat-alat percetakan (*printing presses*), dan sebagainya. Dengan demikian, maka sumberdaya (*resources*) itu adalah milik kelompok (*properties of groups*), akan tetapi semua objek tersebut harus dapat ditransfer dari seseorang kepada orang yang lainnya. Maka, intelegensia (*intelligence*) atau kemampuan (*skills*) tidak bisa disebut sebagai sumberdaya (*resources*).

Konsep mobilisasi (*mobilization*). Berangkat dari konsep Jenkin (Dieter Opp, 2009: 139) yang menjelaskan tentang konsep mobilisasi (*mobilization*), yakni bahwa mobilisasi (*mobilization*) adalah suatu proses dimana kelompok mengamankan kontrol kolektif atas sumberdaya yang diperlukan untuk suatu tindakan kolektif. Selanjutnya McCarthy dan Zald (Dieter Opp, 2009: 140) memperluas konsep

mobilisasi (*mobilization*), yang menyatakan bahwa mobilisasi adalah mengacu kepada berbagai aktivitas dari suatu organisasi gerakan sosial atau aktor individual untuk mendapatkan kontrol atas barang-barang yang memberikan kontribusi dalam meningkatkan tujuan dari organisasi gerakan atau aktor individual.

C. Pembingkai Kultural (*Cultural Framing*).

Konsep tentang *framing* yang digunakan dalam studi gerakan sosial (*social movements*) berasal pemikirannya Goffman (Benford & Snow, 2000: 614). Goffman (1974:12) mengartikan proses pembingkai (*framing processes*) merupakan proses yang digunakan oleh masyarakat untuk mereproduksi makna. Menurut Eriyanto (2002:10), analisis *framing* adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realita. Analisis framing juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media (Seonyono, 2008:41-42).

Mengacu kepada sumber Wikipedia, bahwa secara sederhana *Framing* adalah membingkai sebuah peristiwa, atau dengan kata lain *framing* digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. *Framing* merupakan metode penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus, dengan memberikan penonjolan pada aspek tertentu. Penonjolan aspek-aspek tertentu dari isu berkaitan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis. Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian diksi atau kata, kalimat, gambar atau foto, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak. Analisis framing digunakan untuk mengkaji pembingkai realitas (peristiwa, individu, kelompok, dan lainnya) yang dilakukan oleh media massa. Pembingkai tersebut merupakan proses konstruksi, yang berarti realitas dimaknai dan direkonstruksi dengan cara dan makna tertentu.

Gagasan *framing* pertama kali dilontarkan oleh Baterson tahun 1955 (Sobur, 2002: 161). Mulanya *frame* dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan dan wacana serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Konsep tersebut kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Goffman pada tahun 1974 yang

mengandaikan frame sebagai kepingan-kepingan perilaku yang membimbing individu dalam membaca realitas (Sobur, 2002:162).

Menurut Benford dan Snow (2000: 611) konsep proses *framing* dewasa ini berkembang di dalam disiplin ilmu sosial seperti psikologi, khususnya psikologi kognitif, linguistik dan analisis diskursus, komunikasi dan studi media, ilmu politik dan studi kebijakan, dan sosiologi. Di dalam sosiologi, konsep framing khususnya digunakan dalam studi gerakan sosial dan tindakan kolektif (*social movements and collective action*). Selanjutnya Benford dan Snow (2000: 613) menyatakan bahwa aktor gerakan sosial dipandang sebagai agen signifikan yang secara aktif terlibat dalam produksi dan pemeliharaan makna untuk konstituen gerakan (*constituents*), pihak lawan (*antagonists*), dan pengamat (*bystanders*). Para aktor gerakan sosial secara mendalam terlibat dengan media, pemerintahan lokal (*local government*), dan negara (*state*), dengan apa yang disebut “politik signifikasi (*the politics of signification*).

Menurut McAdam, McCarthy, dan Zald (2004: 5), faktor peluang/kesempatan politik (*political opportunity*) dan faktor struktur mobilisasi (*mobilizing structure*) merupakan fondasi yang potensial untuk terjadinya suatu tindakan, apabila salah satu faktor tersebut tidak ada maka kecil kemungkinan suatu tindakan kolektif akan terjadi. Penghubung antara faktor peluang/kesempatan (*opportunity*), organisasi, dan tindakan (*action*) adalah makna dan definisi yang mengarahkan orang-orang kepada situasi mereka, yakni situasi ketidakpuasan dan kekecewaan. Paling tidak orang-orang perlu merasakan kondisi ketidakpuasan tentang beberapa aspek kehidupan mereka dan meyakini bahwa melalui tindakan kolektif mereka dapat mengatasi masalah. Kekurangan salah satu atau keduanya dari persepsi ini, yakni ketidakpuasan dan keyakinan, nampaknya tidak akan memungkinkan bahwa orang-orang mau dimobilisasi meskipun ada kesempatan untuk melakukannya. Kondisi kehadiran atau ketidakhadiran persepsi ini bersifat kompleks yang oleh David Snow, dkk., disebutnya sebagai proses pembingkai (*framing processes*). Selanjutnya Snow (McAdam, McCarthy, dan Zald, 2004: 6), mendefinisikan *framing* sebagai upaya strategis yang disadari oleh kelompok orang-orang sebagai cara bersama untuk memahami tentang dunia dan diri mereka sendiri yang melegitimasi dan memotivasi suatu tindakan kolektif.

Mengacu kepada pandangan Benford dan Snow (2000:614) yang menyatakan bahwa *framing* membantu untuk membuat suatu peristiwa atau kejadian memiliki makna (arti) dan dengan demikian berfungsi untuk mengatur pengalaman dan membimbing tindakan. *Framing* tindakan kolektif juga melakukan fungsi penafsiran dan pemahaman yang dimaksudkan untuk memobilisasi pengikut potensial dan konstituen, untuk menggalang dukungan penonton, dan memobilisasi antagonis (Snow & Benford 1988: 198). Dengan demikian, *framing* tindakan kolektif merupakan seperangkat aksi yang berorientasi memberikan keyakinan dan makna yang menginspirasi dan melegitimasi kegiatan dan kampanye dari Organisasi Gerakan Sosial (*Social Movements Organization*).

Proses pembingkaiian kultural (*cultural framing*) gerakan sosial berkaitan dengan konstruksi identitas partisipan gerakan. Menurut Singh (2001:113), teori berorientasi Identitas (*the Identity-Oriented theory*) secara umum mempunyai sifat-sifat non-materialistik dan ekspresif (*nonmaterialistic and expressive in nature*). Teori Identitas (*the Identity-Oriented Theory*) membahas pertanyaan-pertanyaan tentang integrasi dan solidaritas dari kelompok yang terlibat dalam aksi kolektif.

Berbagai kajian yang membahas tentang perkembangan dan identifikasi konsep identitas kolektif (*collective identity*) telah banyak dilakukan, baik menurut perspektif Amerika maupun di Eropa Kontinental. Kajian awal dilakukan oleh para teoritis aliran Chicago (*Chicago School*) yang menggunakan pandangan klasik dan psikologi social atas perkembangan perspektif dari identitas kolektif. Misalnya, Blumer (Hunt & Benford, dalam Snow, Soule & Kriesi, 2004:436) berpendapat bahwa gerakan harus mengembangkan semangat korps (*esprit de ceps*) di antara anggota melalui konstruksi *in-group-out-group relationships*, memberikan kesempatan untuk interaksi formal, serta ritual dan seremoni formal organisasi (*organizing formal ceremonies and rituals*).

Johnston dan Klandermans (1995: 45) mendefinisikan identitas kolektif (*collective identity*) sebagai saling interaksi dan berbagai yang diproduksi oleh beberapa individu (atau kelompok pada level yang lebih kompleks) dan memusatkan orientasinya pada tindakan serta peluang dan kendala dimana aksi terjadi. Terdapat tiga unsure dalam identitas kolektif, yakni: (1) Identitas kolektif sebagai proses yang melibatkan denifisi kognitif tentang tujuan, sarana, dan bidang tindakan; (2)

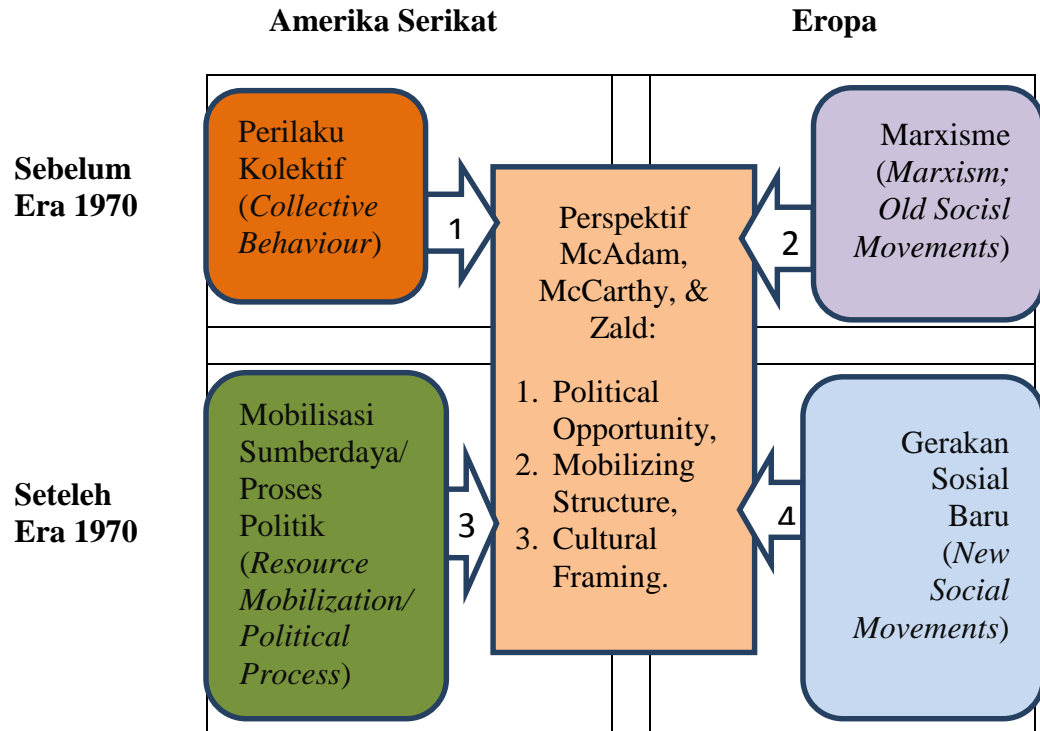
Identitas kolektif adalah sebagai proses yang mengacu kepada jaringan relasi aktif antara actor yang berinteraksi (*interact*), berkomunikasi (*communicate*), saling mempengaruhi (*influence each other*), negosiasi (*negotiate*), dan membuat keputusan (*make decisions*). Bentuk organisasi dan model kepemimpinan, saluran komunikasi, dan teknologi komunikasi adalah merupakan bagian dari jaringan relasi; dan (3) Tingkat tertentu dari investasi emosional, yang memungkinkan individu merasakan seperti sebagai bagian dari suatu kesatuan.

Menurut Della Porta dan Diani (2006:93) konstruksi identitas (*identity construction*) tidak dipandang secara sederhana sebagai prakondisi (*precondition*) untuk suatu tindakan kolektif (*collective action*). Identitas social actor dalam suatu periode waktu tertentu akan menuntun perilaku mereka berikutnya. Mengutip pendapat Tourine, Della Porta dan Diani menyatakan bahwa suatu tindakan terjadi ketika actor mengembangkan kemampuan untuk mendefinisikan diri mereka sendiri, actor social yang lainnya, dan topangan dari hubungan timbal-balik (*mutual relationship*) diantara mereka.

D. Kerangka Berpikir (Kerangka Konseptual)

Perspektif teoritik yang dijelaskan oleh McAdam, McCarthy, dan Zald tentang tiga aspek penting dalam mengkaji kemunculan dan perkembangan gerakan sosial, yakni: peluang politik (*political opportunity*), struktur mobilisasi (*mobilizing structure*), dan pembingkai kultural (*cultural framing*), dalam konteks pemetaan teoritik studi gerakan sosial sebagaimana dikemukakan oleh Crossley, maka posisinya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 7.1.:
Konstruksi Posisi Pemikiran McAdam, McCarthy, & Zald
dalam Empat Tradisi Analisis Gerakan Sosial Crossley



Sumber: Diadopsi dari Crossley (2002:10); dan McAdam, McCarthy, & Zald (2004)

Gambar 1.1. menggambarkan tentang konstruksi posisi perspektif McAdam, McCarthy, dan Zald dalam konteks Empat tradisi analisis studi gerakan sosial menurut pandangan Crossley. Perspektif McAdam, McCarthy, dan Zald tentang peluang politik (*political opportunity*), struktur mobilisasi (*mobilizing structure*), dan pembingkaihan kultural (*cultural framing*) dipengaruhi oleh ke-Empat peta studi gerakan sosial sebagaimana digambarkan Crossley. Pengaruh ke-Empat peta studi gerakan sosial dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama; Dimensi perilaku kolektif (*collective behaviour*), memberikan sumbangan terhadap perspektif McAdam, McCarthy, dan Zald berkaitan dengan konsep keluhan-keluhan (*grievances*), ketidakpuasan, dan kekecewaan sebagai faktor pendorong munculnya tindakan (aksi) kolektif;

Kedua; Dimensi Marxisme (*Marxism; Old Social Movements*), memberikan sumbangan terhadap perspektif McAdam, McCarthy, dan Zald berkaitan dengan

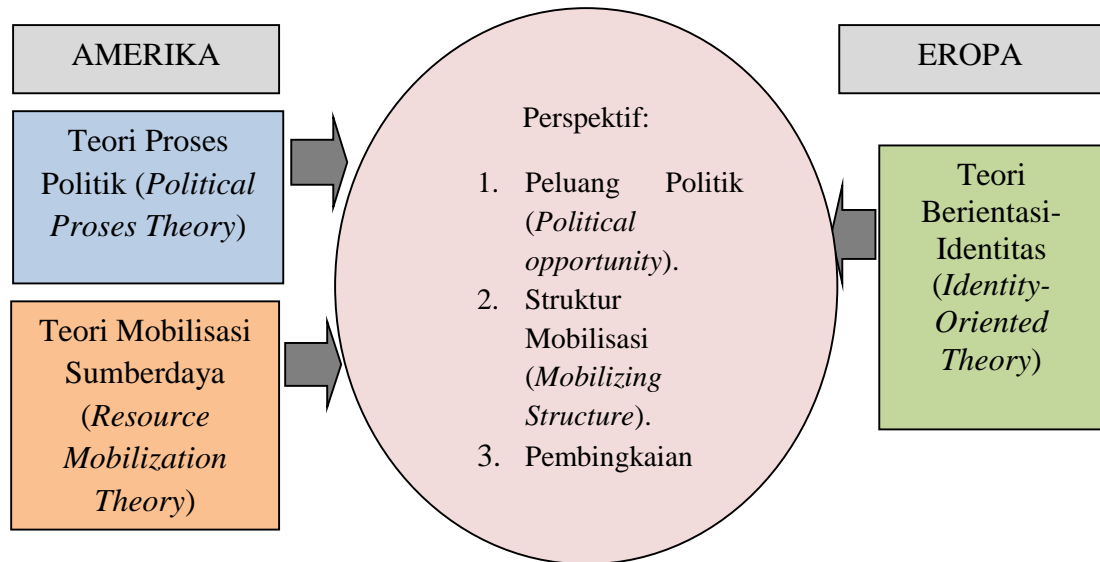
konsep bahwa kemunculan gerakan sosial seiring dengan adanya suatu konflik dan pergulatan-pergulatan di seputar persoalan ketimpangan, dominasi, kebebasan dan keadilan sosial. Situasi-situasi ketimpangan dan dominasi sosial, jika dijalankan dan dipertahankan oleh institusi-institusi dan lembaga-lembaga sosial, maka pada gilirannya akan menghasilkan sebuah situasi balik dimana terjadi perlawanan, penolakan, dan pemberontakan menentang sistem-sistem dominasi tersebut. Struktur-struktur sosial dikonseptualisasikan sebagai sebuah arena pertemuan yang intens dan tidak terhitung jumlahnya dari berbagai kelompok pendominasi dan kolektivitas-kolektivitas sosial yang terdominasi. Struktur-struktur masyarakat merupakan sebuah medan pergulatan yang terus-menerus di antara berbagai kelompok, strata, dan lapisan sosial yang saling bersaing;

Ketiga; Dimensi Mobilisasi Sumberdaya/Proses Politik (*Resource Mobilization/Political Process*), memberikan sumbangan terhadap perspektif McAdam, McCarthy, dan Zald berkaitan dengan konsep rasionalitas politik (peluang politik) dan rasionalitas ekonomi tentang kalkulasi keuntungan dan kerugian (*costs and benefits*) dalam suatu gerakan sosial; dan

Keempat; Dimensi Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*), memberikan sumbangan terhadap perspektif McAdam, McCarthy, dan Zald berkaitan dengan konsep identitas sebagai basis pembingkai kultural (*cultural framing*) dalam membangun spirit dan simpati gerakan sosial.

Selanjutnya, perspektif McAdam, McCarthy, dan Zald adalah merupakan kombinasi (gabungan) dari pemikiran dasar atas tiga teori utama dalam studi gerakan sosial, yakni: Teori Proses Politik atau Teori Struktur Peluang Politik (*Political Process Theory or Political Opportunity Structure: POS*), Teori Mobilisasi Sumberdaya (*Resource Mobilization Theory: RMT*), dan Teori Identitas (*Identity-Oriented Theory: IOT*). Teori Proses Politik (*Political Process Theory: PPT*) dan Teori Mobilisasi Sumberdaya (*Resource Mobilization Theory: RMT*) berkembang di Amerika dengan basis rasionalitas, sementara Teori Berorientasi-Identitas (*Identity-Oriented Theory: IOT*) berkembang di Eropa dengan basis identitas (emotif). Posisi perspektif McAdam, McCarthy, dan Zald dalam kombinasi ketiga teori tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 7.2.:
Kombinasi antara Tiga Teori Gerakan Sosial
Dalam Perspektif McAdam, McCarthy, dan Zald

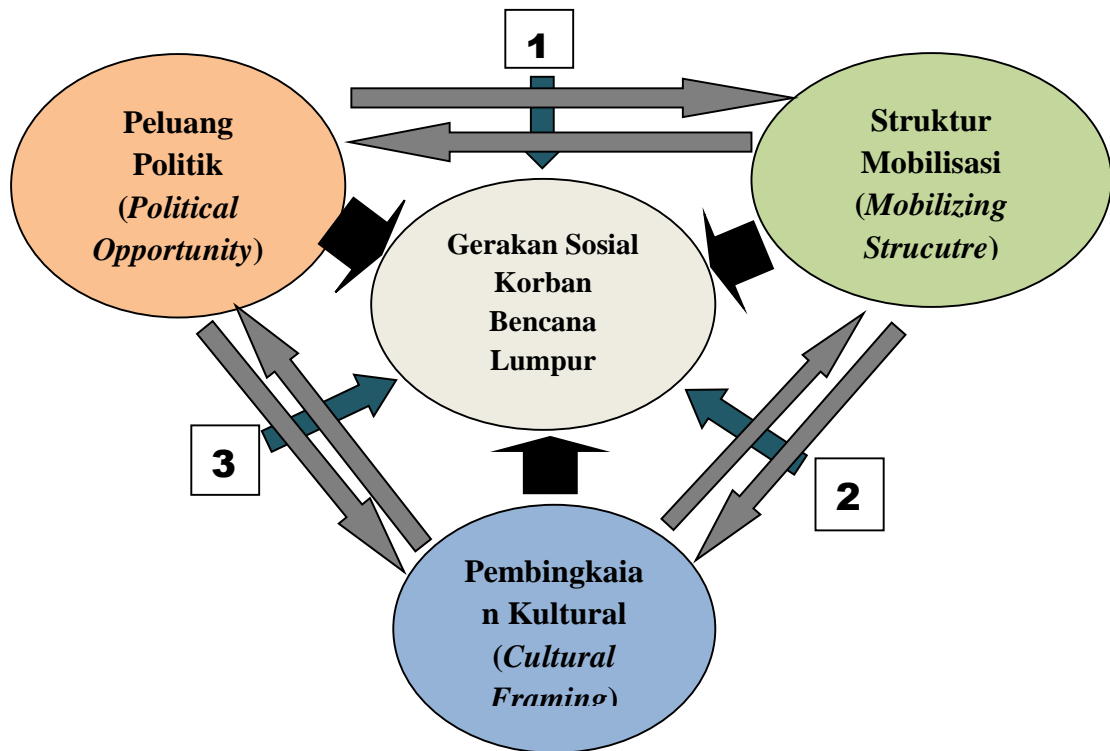


Sumber: Konstruksi peneliti diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan konstruksi pada Gambar 7.3., maka perspektif teori gerakan sosial yang berkembang di Amerika dan Eropa meskipun memiliki perbedaan, namun perspektif teori-teori tersebut bisa diintegrasikan secara komprehensif dalam mengkaji kemunculan dan perkembangan gerakan sosial.

Selanjutnya, dari penjelasan kerangka teoritik gerakan sosial yang mengacu kepada perspektif McAdam, McCarthy, dan Zald, maka selanjutnya dirumuskan model kerangka berpikir (kerangka konseptual) dalam konteks gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo (Lula) sebagai berikut:

**Gambar 7.3.:
Model Kerangka Berpikir**



Sumber: Diadopsi dari McAdam, McCarthy, & Zald, 2004.

Dari model kerangka berpikir sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.3. tersebut diatas, maka dapat dijelaskan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Pertama, Faktor peluang politik (*political opportunity*), struktur mobilisasi (*mobilizing structure*), dan pembingkaian kultural (*cultural framing*), merupakan faktor-faktor yang berkontribusi atas kemunculan dan perkembangan gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo (Lula) di Sidoarjo;

Kedua, Faktor peluang politik (*political opportunity*) akan berkontribusi bagi muncul dan berkembangnya gerakan sosial apabila ditopang oleh faktor struktur mobilisasi (*mobilizing structure*) dan pembingkaian kultural (*cultural framing*);

Ketiga, Faktor struktur mobilisasi (*mobilizing structure*) akan berkontribusi bagi muncul dan berkembangnya gerakan sosial apabila ditopang oleh faktor peluang politik (*political opportunity*) dan pembingkaian kultural (*cultural framing*);

Keempat, Faktor pembingkai kultural (*cultural framing*) akan berkontribusi bagi muncul dan berkembangnya gerakan sosial apabila ditopang oleh faktor peluang politik (*political opportunity*) dan faktor struktur mobilisasi (*mobilizing structure*);

Kelima, Analisis kemunculan dan perkembangan gerakan sosial dapat dikaji dalam dimensi kombinasi antara faktor peluang politik (*political opportunity*) dan faktor peluang politik (*political opportunity*) (**Wilayah 1**);

Keenam, Analisis kemunculan dan perkembangan gerakan sosial dapat dikaji dalam dimensi kombinasi antara faktor struktur mobilisasi (*mobilizing structure*) dan pembingkai kultural (*cultural framing*) (**Wilayah 2**); dan

Ketujuh, Analisis kemunculan dan perkembangan gerakan sosial dapat dikaji dalam dimensi kombinasi antara faktor pembingkai kultural (*cultural framing*) dan peluang politik (*political opportunity*) (**Wilayah 3**).

BAB VIII

MASYARAKAT SIPIL DAN GERAKAN SOSIAL

A. Konsep tentang Masyarakat Sipil (*Civil Society*)

Istilah masyarakat sipil (*civil society*) masih menjadi perdebatan baik secara terminologis maupun etimologis. Beberapa kalangan akademisi di Indonesia menerjemahkan kata *civil society* sebagai “*masyarakat madani*” (Madjid, 1999; Rahardjo, 1999), “*masyarakat warga*” (Lembaga Etika Atmajaya, 1997), dan “*masyarakat sipil*” (Fakih, 1996). Menurut Damsar (2010: 124), *civil society* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam tiga cara, yaitu: (1) Masyarakat sipil; (2) Masyarakat warga/kewargaan; dan (3) Masyarakat madani.

Lebih lanjut, Damsar (2010: 124-126) menyatakan bahwa terjemahan *civil society* sebagai masyarakat sipil, dirasakan oleh berbagai kalangan kurang pas, karena dalam dunia keseharian dan akademik Indonesia, konsep sipil sering dikaitkan dengan konsep militer. Dengan kata lain, jika ada masyarakat sipil berarti juga ada masyarakat militer. Kandungan pemahaman konsep seperti ini akan mendistorsikan inti dan makna hakiki dari konsep *civil society*.

Kalangan akademisi Indonesia juga tidak sepakat untuk menggunakan konsep masyarakat madani sebagai terjemahan dari konsep *civil society*. Karena masyarakat madani kalau dipahami secara kasar adalah masyarakat kota. Sedangkan rujukannya adalah masyarakat Madinah ketika Rosulullah dan Khulafaur Rasyidin memimpin umat Islam dan setelahnya. Persoalan muncul karena konsep *civil society* muncul dari masyarakat Barat, maka rujukannya juga adalah Barat. Untuk menghindari perdebatan seperti ini, maka konsep *civil society* digunakan sebagaimana adanya.

Damsar (2010: 125) juga menyatakan bahwa *civil society* merupakan konsep yang lahir dari pandangan yang melihat adanya hubungan sedemikian rupa antara masyarakat dan negara. Pandangan tentang hubungan antara masyarakat dan negara mengalami evolusi dari masa ke masa. Terakhir, berkembang pemikiran bahwa ada tiga pilar kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia, yaitu *state* (negara), *market* (pasar), dan *civil society*.

Civil society dikonsepsikan secara teoritis merupakan masyarakat yang bebas dari ketergantungan terhadap negara dan pasar, *self-reliance* (percaya diri), *self-supporting* (swasembada), *voluntary* (sukarela), dan taat akan nilai dan norma yang berlaku. Bebas dari ketergantungan negara dan pasar dimaksud sebagai suatu bentuk kebebasan dari masyarakat untuk melakukan aktivitas kemasyarakatan (sosial, budaya, politik, dan agama) tanpa adanya intervensi negara dan pasar. Intervensi negara terhadap masyarakat dibolehkan jika terjadi ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, aturan main dilanggar, atau undang-undang tidak ditegakkan.

Dalam *civil society*, individu dan/atau kelompok individu memiliki *self-reliance* (percaya diri). Percaya diri merupakan suatu keadaan di mana potensi dan kapasitas yang dimiliki dipandang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Sedangkan *self-supporting* (swasembada) adalah kemampuan melakukan sesuatu tanpa adanya ketergantungan. Aktivitas-aktivitas kemasyarakatan yang dilakukan oleh *civil society* dilakukan tidak terpaksa, ketaatan terhadap nilai dan norma yang berlaku merupakan ciri dari suatu komunitas yang telah menerapkan prinsip *civil society*.

Harus diakui, konsep *civil society* dipahami dari perspektif yang berbeda-beda dan hal itu merupakan perkembangan yang dinamis sesuai dengan konteks, *setting*, ideologi dan kepentingan setiap subjek (INCIS, 2002). Dalam pendekatan Hegelian, penekanannya lebih pada pentingnya kelas menengah dan pemberdayaannya, khususnya pada sektor ekonomi, bagi pembangunan *civil society* yang kuat. Sementara itu, dalam perspektif Gramscian, penguatan *civil society* sebagai alat untuk menghadapi hegemoni ideologi negara. *Civil society* adalah sebuah arena tempat para intelektual organik dapat menjadi kuat yang tujuannya adalah mendukung upaya melakukan perlawanan terhadap hegemoni negara. Dalam pendekatan Tocquevellian, penguatan *civil society* lebih menekankan pada penguatan organisasi-organisasi dan asosiasi independen dalam masyarakat dan melakukan inkubasi budaya keadaban (*civic culture*) untuk membangun jiwa demokrasi.

Istilah masyarakat madani sebenarnya hanya salah satu di antara beberapa istilah lain yang sering kali digunakan orang dalam menerjemahkan *civil society* ke

dalam bahasa Indonesia. Di samping itu, istilah masyarakat madani juga sering digunakan masyarakat warga atau masyarakat kewargaan, masyarakat sipil, masyarakat beradab atau masyarakat berbudaya. Bagi kalangan tertentu, konsep masyarakat sipil dipersepsi mengandung makna yang setara dengan *masyarakat madani*. Namun demikian, bila ditinjau dari sejarah konsepnya, maka kedua istilah ini (masyarakat sipil dan masyarakat madani) jelas berangkat dari konteks yang berbeda. Masyarakat sipil berasal dari konsep potret dan sejarah Barat/Eropa. Sedangkan konsep masyarakat madani merujuk pada sejarah Islam di awal penyebarannya.

Dilihat dari bahasa asalnya, *civil society* berasal dari bahasa latin “*civilis societas*” yang mengacu kepada gejala budaya perorangan dan masyarakat. Dalam konteks yang lain, kata *civil society* sebenarnya berasal dari khazanah kosa kata Latin, yaitu *civitas dei* atau “Kota Illahi” sehingga secara harfiah kata *civil society* diterjemahkan dengan masyarakat kota. Akar kata *civil* adalah *civilization*, yang berarti beradab sehingga *civil society* sering pula diterjemahkan dengan masyarakat beradab. Oleh karena itu, *civil society* dapat dimaknai sebagai sebuah masyarakat yang memiliki peradaban (*civility*) yang dibedakan dari masyarakat yang tidak beradab atau *barbarian* atau masyarakat *jahiliyah*.

B. Pengertian Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)

Merujuk kepada pengertian Masyarakat Sipil (MS) sebagai aktor atau agen, maka istilah yang biasa dipergunakan adalah *Civil Society Organization (CSOs)* atau Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Hyden (dalam Suharko, 2005) membedakan antara OMS dalam pengertian minimalis dan maksimalis. Dalam pengertian yang pertama, OMS hanya mencakup mereka yang secara politis dan “civic” benar-benar melindungi dan memperjuangkan norma-norma demokratis. Asosiasi-asosiasi ekonomi dan produksi biasanya tidak termasuk dalam pengertian ini. Mereka lebih ditempatkan sebagai bagian dari masyarakat ekonomi (*economic society*). Dalam pengertian yang kedua, OMS adalah semua organisasi atau asosiasi yang berada di luar sektor Negara. Mereka mencakup dari organisasi ketetanggaan yang kecil-lokal hingga organisasi-organisasi berbasis keanggotaan berorientasi nasional.

Bagi Diamond, sebagaimana dikutip oleh Suharko (2005), OMS adalah organisasi atau asosiasi yang ada di luar negara, bersifat bebas dan independen. OMS biasanya merupakan organisasi-organisasi yang memiliki karakter sekunder daripada primer. OMS mencakup serangkaian organisasi, baik yang formal maupun informal, yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Bersifat ekonomis: asosiasi dan jaringan produktif dan komersial;
- b. Bersifat kultural: institusi atau asosiasi religius, etnis, komunal, dan asosiasi-asosiasi lain yang mempertahankan hak-hak, nilai-nilai, keyakinan dan simbol kolektif;
- c. Bersifat informasional dan edukasional: organisasi-organisasi yang memiliki bidang gerak pada produksi dan diseminasi (baik untuk tujuan perolehan profit atau tidak) pengetahuan, ide, berita dan informasi publik;
- d. Berkaitan dengan kepentingan (*interest*): kelompok-kelompok yang berupaya memajukan atau mempertahankan kepentingan-kepentingan fungsional atau material bersama untuk para anggotanya, seperti serikat buruh, kelompok profesional, dll. ;
- e. Berkaitan dengan pembangunan (*developmental*): organisasi-organisasi yang mengumpulkan sumberdaya dan bakat-bakat individual untuk memperbaiki infrastruktur, kelembagaan dan kualitas kehidupan komunitas;
- f. Berorientasi isu (*issue-oriented*): gerakan untuk perlindungan lingkungan, reformasi agrarian, perlindungan konsumen, hak-hak perempuan, etnis minoritas, kelompok adat, kaum difabel, dan korban-korban lain dari diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan;
- g. Berorientasi civic: kelompok-kelompok non-partisan yang berupaya memperbaiki sistem politik dan membuatnya lebih demokratis, seperti kelompok-kelompok yang bekerja untuk HAM, pendidikan dan mobilisasi pemilih, pemantauan pemilu, pengungkapan praktek-praktek korupsi, dll.; dan
- h. Berhubungan dengan "*the ideological marketplace*", aliran informasi dan ide-ide, yang mencakup kelompok-kelompok yang mengevaluasi dan

mengkritisi negara, seperti media massa yang independen, dan area-area yang lebih luas dari aktivitas kultural dan intelektual yang otonom, seperti universitas, kelompok pemikir (*think-thanks*), kelompok teater, dll.

Suharko (2005) selanjutnya menjelaskan bahwa Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dapat dibedakan dari kelompok-kelompok lain dalam masyarakat dari lima karakteristik berikut: *Pertama*, OMS memiliki kepedulian yang berhubungan dengan tujuan-tujuan publik daripada tujuan-tujuan privat. OMS dapat diakses oleh warga negara dan terbuka bagi deliberasi publik. Inilah yang membedakan OMS dari masyarakat parochial yang eksklusif dan cenderung bersifat rahasia; *Kedua*, OMS berhubungan dengan negara dalam berbagai cara namun tidak berupaya untuk memenangkan kontrol atas atau posisi di dalam negara. OMS tidak berupaya untuk “*govern the polity as a whole*”. Apa yang ingin diraih oleh OMS dari negara biasanya berkaitan dengan perubahan kebijakan, reformasi kelembagaan, akuntabilitas negara, dan seterusnya; *Ketiga*, OMS memperjuangkan pluralisme dan diversitas. OMS menghindari tendensi untuk menjadi kelompok fundamentalis agama, gerakan millenarian, dan chauvanisme etnis. OMS juga tidak berupaya memonopoli ruang-ruang politis dan fungsional dalam masyarakat; *Keempat*, OMS tidak berupaya mewakili serangkaian kepentingan yang utuh dari orang per orang atau suatu komunitas. Lebih dari itu, OMS merepresentasikan kepentingan kelompok yang berbeda-beda atau meliputi aspek-aspek yang beragam dari suatu kepentingan; dan *Kelima*, OMS juga berbeda dari fenomena demokrasi yang telah maju yang oleh Putnam (1993) disebut sebagai komunitas yang beradab (*civic community*). *Civic community* bisa lebih sempit atau lebih luas dari konsep *civil society*. Dikatakan lebih luas karena ia mencakup seluruh asosiasi di luar negara, dan disebut lebih sempit karena ia hanya meliputi asosiasi-asosiasi yang terstruktur secara horisontal yang melibatkan ikatan-ikatan yang kurang lebih bersifat mutual, kooperatif, simetris, dan saling mepercayai. Sebaliknya, Putnam tidak memasukkan banyak organisasi yang sebenarnya lebih aktif dalam mereformasi politik atau membela HAM dalam kategorinya tentang *civic community*. Karena itu, untuk menghindari tautologi yang menyamakan masyarakat sipil dengan segala sesuatu yang demokratis, mulia, dan baik, masyarakat sipil harus diperjelas ke dalam suatu pengertian yang

membedakannya dari arena yang lebih umum dan luas dari kehidupan asosiasi (independen).

Lebih lanjut, Suharko (2005) menyatakan bahwa tidak semua OMS memiliki potensi yang sama untuk mengembangkan tata pemerintahan yang demokratis atau demokrasi secara umum. OMS dapat mengaktualisasikan potensi itu manakala mereka memenuhi kriteria-kriteria berikut: *Pertama*, secara internal OMS memiliki struktur yang demokratis yang antara lain ditandai oleh rekrutmen anggota yang terbuka, adanya prinsip persamaan dalam organisasi, dll; *Kedua*, OMS memiliki tingkat pelembagaan yang tinggi yang meliputi otonomi, kemampuan adaptasi, koherensi dan kompleksitas; *Ketiga*, OMS memiliki “civicness” yang antara lain mencakup toleransi, kepercayaan (trust), kerjasama, dan sebagainya; *Keempat*, OMS selalu menghargai dan mengembangkan pluralism; dan *Kelima*, OMS mempunyai ciri “*density*” atau dukungan rakyat yang luas.

C. Perkembangan Masyarakat Sipil (*Civil Society*)

Sejak awal tahun 1990-an, konsep masyarakat sipil (*civil society*) menjadi wacana di lingkungan akademik maupun aktivis gerakan sosial. Istilah *civil society* berasal dari bahasa Latin *societes civiles* yang mula-mula dipakai oleh Cicero (106-43 SM), seorang orator, politisi dan filosof Roma. Sejak saat itu sampai dengan abad ke-18, pengertian *civil society* masih disamakan dengan negara (*thestate*), yakni sekelompok masyarakat yang mendominasi seluruh kelompok lain. Rahardjo (1999) menjelaskan bahwa Cicero (106-43 SM) menyebut masyarakat sipil sebagai sebuah masyarakat politik (*political society*) yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan. Pada sejarah awalnya, masyarakat seperti ini ada di lingkungan perkotaan. Bahkan bisa pula dikatakan bahwa proses pembentukan masyarakat sipil itulah yang sesungguhnya membentuk masyarakat kota. Masyarakat kota telah menjadikan kehidupannya di bawah kendali hukum sipil (*civil law*).

Dalam rentang waktu yang panjang itu, Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) dan Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) kembali menghidupkan dan mengembangkan istilah *civil society* (masyarakat sipil) dengan merujuk kepada masyarakat dan politik. Hobbes, misalnya, berpendapat bahwa perjanjian masyarakat

diadakan oleh individu-individu untuk membentuk suatu masyarakat politik atau negara. Locke mendefinisikan masyarakat sipil sebagai masyarakat politik (*political society*) yang mana dihadapkan dengan keadaan alami (*state of nature*) sekelompok manusia. Masyarakat politik itu sendiri, menurut Rousseau yang senada dengan Hobbes, merupakan hasil dari suatu kontrak sosial. Perlu digarisbawahi bahwa pengertian-pengertian ini lahir ketika perbedaan antara masyarakat sipil dan negara belum dikenal, sehingga negara merupakan bagian dari masyarakat sipil yang mengontrol pola-pola interaksi warga negaranya.

Barulah pada paruh kedua abad 18 Adam Ferguson (1723-1816) dan Thomas Paine (1737-1809) memberi tekanan lain terhadap makna *civil society*. *Civil society* dan negara dipahami sebagai dua buah entitas yang berbeda, sejalan dengan proses pembentukan sosial dan perubahan-perubahan struktur politik sebagai akibat pencerahan (*enlightment*). Keduanya diposisikan dalam posisi yang diametral. Masyarakat sipil bahkan dinilai sebagai anti tesis terhadap negara, ia harus lebih kuat untuk mengontrol negara demi kepentingannya.

Pemahaman ini mengundang reaksi para pemikir lainnya seperti Hegel (1770-1831) yang beraliran idealis. Menurutny, *civil society* tidak dapat dibiarkan tanpa terkontrol. Ia justru memerlukan berbagai macam aturan dan pembatasan melalui kontrol hukum, administrasi dan politik. Lebih lanjut, Hegel membedakan masyarakat politik (*the state*) dan masyarakat sipil (*civil society*). Masyarakat politik adalah perkumpulan-perkumpulan yang mengandung aspek politik yang mengayomi masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan masyarakat sipil ialah perkumpulan merdeka yang membentuk apa yang disebut sebagai masyarakat borjuis.

Karl Marx (1818-1883) sependapat dengan Hegel dalam melihat *civil society* sebagai masyarakat borjuis. Bedanya, Hegel menganggap hanya melalui negara, kepentingan-kepentingan masyarakat yang universal dan mengandung potensi konflik bisa terselesaikan. *Dus*, negara merupakan sesuatu yang ideal. Marx berpandangan sebaliknya, ia menganggap negara tak lain sebagai badan pelaksana kepentingan kaum borjuis. Oleh sebab itu, negara harus dihapuskan, atau harus diruntuhkan oleh kelas proletar. Ketika negara akhirnya lenyap, maka yang tinggal hanyalah masyarakat tanpa kelas. Visi ini berseberangan dengan visi Hegel yang

mengatakan di masa depan bahwa masyarakat sipillah yang akan runtuh dari dalam, jika negara telah mampu mengayomi seluruh kepentingan masyarakat. Sedangkan menurut Antonio Gramsci (1891-1937), *civil society* juga merupakan milik kaum borjuis yang akhirnya menjadi pendukung negara, disamping mereka memegang hegemoni, mereka juga seharusnya bisa menjalankan fungsi etis dalam mendidik dan mengarahkan perkembangan ekonomi masyarakat (Dawam Raharjo: 1999)

Adapun menurut Alexis de Tocqueville (1805-1859), masyarakat sipil tidak secara *a priori* subordinatif terhadap negara, tetapi lebih dari itu ia bersifat otonom dan memiliki kapasitas politik cukup tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang menghadapi intervensi negara dan tidak hanya berorientasi pada kepentingan sendiri tetapi juga terhadap kepentingan publik. Pendapat Tocqueville ini kemudian diperkuat oleh Hannah Arendt (1906-1975) dan Jurgen Habermas (1929) dengan konsep "*a free public sphere*", sebuah wilayah di mana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Penciptaan ruang publik, bagi Arendt merupakan prasyarat terciptanya *civil society* dan demokratisasi. Hal senada diungkapkan Ernest Gellner (1925-1995) yang memandang perlunya ruang dan kebebasan publik. Menurutnya, *civil society* adalah seperangkat institusi non pemerintah yang cukup kuat untuk mengimbangi negara dan mencegah timbulnya tirani kekuasaan.

Secara umum, saat ini penganut sosialis banyak mengadopsi konsep hegemoni Gramsci dalam memahami *civil society* dimana hegemoni tidak lagi dilakukan secara fisik, melainkan melalui penjinakan budaya dan ideologi yang diselenggarakan secara terstruktur oleh negara. Sementara, penganut kapitalis lebih tertarik kepada *civil society* versi Tocqueville dimana masyarakat dapat melakukan partisipasi mengenai pembuatan kebijakan-kebijakan publik dalam sebuah negara dan dapat saling berinteraksi dengan semangat toleransi. Adapun di negara-negara berkembang umumnya, sikap Hegelian terhadap negara merupakan pandangan yang dominan. Di satu sisi, mereka memandang negara sebagai wadah segala sesuatu yang ideal dan di sisi lain mereka kurang percaya terhadap masyarakat sipil.

Menurut AS Hikam (1999), masyarakat sipil sebagaimana dikonsepsikan oleh para pemikirnya mempunyai tiga ciri khusus yaitu: *pertama*, adanya kemandirian

yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok dalam masyarakat, terutama saat berhadapan dengan negara. *Kedua*, adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara demi kepentingan publik. *Ketiga*, adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar tidak intervensionis dan otoriter. Selanjutnya akan kita lihat bagaimana konsep civil society ini diaktualisasikan dalam konteks Indonesia.

Pada tahap selanjutnya, konsep *civil society* dikaitkan dengan fenomena kemunculannya pasar ekonomi modern. Kemudian karakter ini dikembangkan dengan melibatkan aspek-aspek penyempurnaan moral dan budaya, perhatian terhadap pelaksanaan *rule of law* oleh pemerintahan, satu semangat publik, dan pembagian kerja (*division of labor*) yang kompleks sebagai bagian dari karakter utama masyarakat sipil (Chandhoke, 2005). Adam Ferguson dan beberapa pemikir lainnya di Skotlandia mulai memisahkan antara fenomena masyarakat sipil dan negara (Hikam, 1996: 2). Masyarakat sipil dinilai merupakan fenomena munculnya kemandirian masyarakat yang berseberangan dengan negara dalam arti kritis terhadap struktur dan kebijakan negara.

Dalam realitas empirisnya, masyarakat sipil mengorganisasi dirinya secara independen dari negara sekaligus mempunyai landasan pengetahuan yang menjadikan mereka berbeda dari masyarakat biasa yang tidak kritis dan pasif dalam struktur sosial yang bisa jadi menindas mereka. Secara mendasar, masyarakat sipil menempatkan dirinya dalam posisi yang kritis terhadap negara dengan terus melakukan upaya perubahan-perubahan dalam bidang-bidang sosial, ekonomi dan politik serta kontrol terhadap kekuasaan. Ketidakberdayaan masyarakat berpangkal pada perampasan kemampuan secara sistematis (*systematic process of disempowerment*) oleh negara dan pasar melalui globalisasi kapitalisme di tingkat global dan praktek pembangunan di tingkat negara berkembang. Hal tersebut sependapat dengan pendapat Sen bahwa kemiskinan dan ketidakberdayaan adalah efek dari perampasan kemampuan (*capability deprivation*).

Dalam proses demokrasi, masyarakat diberikan peranan yang luas untuk ikut aktif berpartisipasi dalam negara dan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan). Dengan pemberian kesempatan kepada

masyarakat untuk terlibat dalam negara dan pemerintahan merupakan suatu proses pemberdayaan masyarakat dan memfasilitasi masyarakat untuk memperkuat kemampuannya. Hal tersebut adalah salah satu esensi dari pengembangan *civil society*.

Diamond (2003: 281-283) mengajukan lima ciri masyarakat sipil yang dapat dibedakan dari masyarakat politik. Kelima ciri tersebut, yaitu :

- a. Masyarakat sipil memusatkan perhatiannya pada tujuan-tujuan publik bukannya tujuan privat.
- b. Masyarakat sipil dalam beberapa hal berhubungan dengan Negara tetapi tidak berusaha merebut kekuasaan atas negara atau mendapat posisi dalam negara; ia tidak berusaha mengendalikan politik secara menyeluruh.
- c. Masyarakat sipil mencakup pluralisme dan keberagaman. Artinya, organisasi yang sektarian dan memonopoli ruang fungsional atau politik dalam masyarakat bertentangan dengan semangat pluralistik.
- d. Masyarakat sipil tidak berusaha menampilkan seluruh kepentingan pribadi atau komunitas. Namun, kelompok-kelompok yang berbeda akan menampilkan atau mencakup kepentingan berbeda pula.
- e. Masyarakat sipil haruslah dibedakan dari fenomena *civic community* yang lebih jelas meningkatkan demokrasi. *Civic community* adalah konsep yang lebih luas dan lebih sempit sekaligus: lebih luas karena ia mencakup semua jenis perhimpunan (termasuk parokial); lebih sempit karena ia hanya mencakup perhimpunan yang terstruktur secara horizontal di seputar ikatan yang sekiranya mempunyai kebersamaan, kooperatif, dan saling mempercayai.

Dalam melihat hubungan masyarakat dengan negara, *civil society* dianggap mempunyai tiga fungsi, yaitu: *Pertama*; *civil society* mempunyai aktivitas memajukan kesejahteraan dengan memajukan kegiatan yang ditujukan untuk melengkapi peran negara sebagai pelayan publik; *Kedua*, *civil society* melakukan serangkaian aktivitas yang belum atau tidak dilakukan negara dalam kaitannya sebagai institusi yang melayani kepentingan masyarakat luas; dan *Ketiga*, *civil*

society sebagai kekuatan tandingan negara (*counter balancing the state* atau *counter veilling forces*).

Sebagaimana dikemukakan Diamond (2003: 278), masyarakat sipil melingkupi kehidupan sosial yang terorganisasi, terbuka, sukarela, lahir secara mandiri, setidaknya berswadaya secara parsial, otonom dan negara, dan terikat pada tatanan legal atau seperangkat nilai-nilai bersama. Masyarakat sipil berbeda dengan *"masyarakat biasa"* secara harfiah. Penggunaan kata *"biasa"* merujuk pada keterlibatan publik untuk mengekspresikan kepentingan-kepentingan, hasrat, pilihan dan ide-ide mereka untuk bertukar informasi, mencapai sasaran kolektif, mengajukan tuntutan pada negara, memperbaiki struktur dan fungsi negara, dan untuk menuntut akuntabilitas pejabat negara. Masyarakat sipil adalah sebuah fenomena penengah yang berdiri diantara ruang privat dan negara itu sendiri. Lain dari pada itu, masyarakat sipil pun berbeda dengan publik.

D. Gerakan Sosial dan Masyarakat Sipil (*Civil Society*)

Membahas suatu konsep seperti gerakan sosial tentulah perlu dimulai dengan kejelasan konsep tersebut sehingga pembaca dapat memperoleh batasan dan koridor yang dimaksud oleh para penulis dan definisi yang berlaku dalam bidang akademis atau publik. Sujatmiko (Triwibowo, 2006: xv), menyatakan bahwa gerakan sosial diartikan sebagai: *"se bentuk aksi kolektif dengan orientasi konflikktual yang jelas terhadap lawan sosial dan politik tertentu, dilakukan dalam konteks jejaring lintas kelembagaan yang erat oleh actor-aktor yang diikat rasa solidaritas dan identitas kolektif yang kuat melebihi bentuk bentuk ikatan dalam koalisi dan kampanye bersama"*.

Definisi ini berdasarkan dari M. Diani dan I. Bison yang dipublikasikan di Universitas Trento tahun 2004. Definisi ini tidaklah jauh berbeda dengan yang kita jumpai dalam kepustakaan sosiologi, misalnya: *"Social movements have traditionally been defined as organized efforts to bring about social change."* Selain itu terdapat pula definisi lain yakni: *"Social movements are described most simply as collective attempts to promote or resist change in a society or a group."* Demikian pula definisi yang "populer" gerakan sosial adalah: *"...a type of group action. They are*

2 large informal groupings of individuals and/or organizations focused on specific political or social issues, in other words, on carrying out, resisting or undoing a social change” (Triwibowo, 2006: xv-xvi).

Jelaslah bahwa definisi Gerakan sosial yang agak inklusif ini dapat mendeskripsikan gejala “*civil society in action*”. Gerakan sosial dapat juga dibagi menjadi “*Old Social Movement*” yang memfokuskan pada isu yang berkaitan dengan materi dan biasanya terkait dengan satu kelompok (misalnya, petani atau buruh). Sementara itu, “*New Social Movement*” lebih berkaitan dengan masalah ide atau nilai seperti gerakan feminisme atau lingkungan.

Namun, pembagian ini dalam menjelaskan kasus empirik menjadi tidaklah mudah dan tidaklah gerakan sosial yang “*old*” harus selalu jauh mendahului yang “*new*”. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa Gerakan Serikat Dagang Islam mungkin lebih menekankan aspek ekonomi (“*Old Social Movement*”) walaupun dimensi agama (Islam) cukup terasa juga. Demikian juga gerakan seperti NU atau Muhammadiyah yang erat dengan masalah ide atau “*New Social Movement*” ternyata secara waktu berdekatan dengan “*Old Social movement*” tersebut. Dalam hal ini, penggunaan aspek waktu atau kemutakhiran dalam menjelaskan gerakan sosial sangatlah tidak mudah.

Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial berkaitan dengan aksi organisasi atau kelompok masyarakat sipil dalam mendukung atau menentang perubahan sosial. Namun yang masih perlu diperjelas adalah gejala sosial di luar gerakan sosial itu apa saja? Sehingga kita dapat mempunyai peta dan mengetahui apakah sesuatu itu dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial atau tidak. Hal yang penting adalah padanan gerakan sosial yang seringkali dikaitkan dengan perubahan sosial atau masyarakat sipil (seperti judul buku ini). Seperti yang kita ketahui, seringkali ada pembagian ranah antara negara (*state*); perusahaan atau pasar (*corporation* atau *market*) dan masyarakat sipil (*civil society*).

Berdasarkan pembagian ini, maka terdapat pula “gerakan politik” yang berada di ranah negara dan “gerakan ekonomi” di ranah ekonomi. Pembagian ini telah dibahas juga oleh Sidney Tarrow yang melihat “*political parties*” berkaitan dengan “gerakan politik” yakni sebagai upaya perebutan dan penguasaan jabatan politik oleh

partai politik melalui pemilu. Sementara itu, "gerakan ekonomi" berkaitan dengan *lobby* dimana terdapat upaya melakukan perubahan kebijakan publik tanpa berusaha menduduki jabatan publik tersebut. Selain itu, perbedaan ketiga ranah tersebut dibahas juga oleh Habermas yang melihat gerakan sosial (baru atau "new") merupakan resistensi progresif terhadap invasi negara dan sistem ekonomi. Jadi, salah satu faktor yang membedakan ketiga gerakan tersebut adalah aktornya, yakni parpol di ranah politik; lobbyist dan perusahaan di ekonomi (pasar) dan organisasi masyarakat sipil atau kelompok sosial di ranah masyarakat sipil.

Perbedaan ketiga gerakan tersebut secara analitik dapat mempermudah pemahaman kita; namun secara empiris ketiganya dapat saja saling tumpang tindih. Berdasarkan pemetaan di atas, pada ranah negara dapat terjadi beberapa gerakan politik yang dilakukan oleh parpol dalam pemilu yang mengusung masalah yang juga didukung oleh gerakan sosial.

Demikian pula upaya *lobby* dalam ranah ekonomi dapat pula seolah-olah sebagai suatu gerakan sosial. Sebagai contoh, dukungan atau *lobby* suatu perusahaan agar suatu daerah dilarang untuk dieksplorasi seperti juga tuntutan gerakan lingkungan dapat saja upaya untuk mematikan saingan perusahaan tersebut. Dalam beberapa kasus, suatu gerakan sosial oleh organisasi masyarakat sipil seperti mereka yang pro atau anti RUU APP mempunyai kaitan dengan kelompok atau parpol di ranah politik. Demikian juga gerakan ini juga bersinggungan dengan perusahaan seperti kasus ormas yang melakukan demonstrasi dan perusakan kantor majalah *Playboy* Indonesia.

Selain definisi Gerakan sosial yang berada di ranah masyarakat sipil ("civil society"), maka para aktor atau kelompok yang terlibatpun perlu diperjelas. Selama ini ada yang melihat bahwa Ornop (*NGO*) atau LSM merupakan (satu-satunya) wakil atau penjelmaan masyarakat sipil. Namun, sebenarnya Ornop hanya merupakan salah satu dari organisasi masyarakat sipil ("civil society organizations" atau "*CSOs*") yang berdampingan dengan organisasi massa ("*mass organizations*"), terutama organisasi massa keagamaan; organisasi komunitas ("*neighborhood organizations*", seperti RT dan RW); organisasi profesi (IDI, Peradin, ISEI), media, lembaga pendidikan serta lembaga lain yang tidak termasuk dalam ranah politik dan ekonomi.

Namun, dapat dikatakan bahwa Ornop seringkali merupakan organisasi masyarakat sipil yang paling fokus dan konsisten pada suatu masalah dalam perubahan sosial. Tentulah dalam gerakannya Ornop tersebut berhubungan dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS atau "CSOs") lainnya. Dilihat dari skalanya, maka Ornop bisa lebih gesit dan berfungsi seperti "partai kader." Namun, kelemahannya adalah dalam hal memobilisasi massa yang tidak semudah organisasi massa yang seperti "partai massa".

E. Hubungan antara Negara, Pasar, dan Masyarakat Sipil (*Civil Society*)

Konsep Marx tentang Negara dan Masyarakat Sipil. Marx mengkritik pemisahan negara dan civil society dari Hegel menjadi penyebab keterasingan manusia (Suseno, 1999: 76-80). Manusia dalam *civil society* bersifat egois. Manusia-manusia lain dalam civil society saling memanfaatkan satu sama lain demi mencukupi kebutuhan mereka sendiri dan karena itu dalam civil society akan terjadi anarki. Oleh karena itulah, civil society memerlukan negara yang memaksa mereka untuk bersikap sosial melalui kepatuhan kepada hukum. Menurut Marx, seandainya individu dalam *civil society* itu tidak terasing dari kesosialannya, negara tidak diperlukan lagi.

Dengan demikian, yang menjadi pokok bukan negara tetapi justru manusia dalam masyarakat sipil itulah yang yang menjadi realitas pertama. Oleh karena itu, Marx sependapat dengan Feuerbach bahwa filsafat Hegel terbalik secara hakiki (Suseno, 1999: 72). Logika Hegel mengenai negara membawahi civil society dibalik menjadi civil society membawahi negara. Logika pembalikan ini bisa dijelaskan dalam pengertian civil society sebagai masyarakat borjuis dan negara merupakan alat di tangan borjuis untuk melanggengkan proses penghisapan terhadap kaum buruh.

Marx mengatakan bahwa teori negara Hegel tidak dapat menyelesaikan konflik tetapi justru akan melembagakan konflik itu sendiri dalam negara. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Marx yaitu:

Pertama, perwakilan dalam negara monarki konstitusional yang keanggotaannya terdiri dari bermacam-macam kelas justru akan melahirkan konflik di antara kelas-kelas itu sendiri;

Kedua, kelas birokrat yang ditampilkan Hegel akan memperjuangkan kepentingan kelas dari mana pejabat birokrasi itu berasal; dan

Ketiga, pemisahan negara dengan masyarakat sipil akan melanggengkan konflik kepentingan antara negara dengan masyarakat sipil (McClelland, 1996).

Marx memandang *civil society* sebagai masyarakat yang dicirikan oleh pembagian kerja, sistem pertukaran dan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Pandangan ini memang sama dengan pandangan Hegel, tetapi kemudian ia menambahkan bahwa masyarakat sipil itu terbagi dalam dua bagian yaitu kaum majikan atau kaum borjuis sebagai pemilik alat produksi (*property-owners*) dan kaum buruh atau kaum proletar yang tidak memiliki alat produksi (*propertyless*) (Shils, 1997: 324). Pembagian struktur dalam masyarakat sipil itu merupakan akibat dari adanya hak atas milik pribadi.

Sistem hak milik pribadi dalam masyarakat sipil mengakibatkan manusia mengalami alienasi. Buruh terasing dari pekerjaannya karena pekerjaan itu tidak lagi mencerminkan tindakan paling luhur manusia tetapi menjadi sesuatu yang rutin, membosankan dan tanpa makna, demi mendapatkan upah. Buruh juga terasing dengan majikan karena masing-masing mencari kepentingan sendiri-sendiri. Buruh juga terasing dengan sesama buruh karena mereka saling berebut pekerjaan (Suseno, 1991: 261-265).

Masyarakat sipil juga ditandai dengan penghisapan buruh oleh majikan. Buruh diperas tenaganya demi kepentingan majikan. Gambaran ini merupakan konsekuensi dari pandangan Marx atas *civil society* sebagai masyarakat kapitalis.

Pandangan Marx tentang Negara. Negara dalam, pandangan Marx, alat di tangan kaum borjuis untuk mempertahankan kepentingannya (Suseno, 1991: 259-267). Pandangan ini didasarkan pada paham materialisme sejarah Marx yang menempatkan negara dalam bangunan atas (*supra struktur*) bersamaan dengan hukum, ideologi, agama, filsafat dan lain-lain. Ada pun ekonomi yang menjadi sentral dari perkembangan sejarah manusia berada dalam bangunan bawah (*infra strukture*). Negara menjadi alat kaum borjuis untuk menjamin kelangsungan penindasan terhadap kaum buruh agar kaum buruh tidak berusaha membebaskan diri

dari usaha penghisapan dari kaum majikan. Sedangkan hukum, moral, agama, filsafat yang disebut juga dengan “bangunan atas ideologis” berfungsi memberikan legitimasi bagi usaha penghisapan yang dilakukan oleh kaum majikan.

Negara muncul sebagai akibat dari kebutuhan kaum borjuis untuk melindungi keberlangsungan proses kapitalisme yang ada dalam masyarakat sipil. Relasi-relasi dalam masyarakat sipil dikendalikan oleh relasi-relasi produksi kapitalis sehingga dalam masyarakat sipil terkandung tirani ideal bagi konsolidasi kapitalisme. Negara akan melindungi proses kapitalisme itu dari segala macam upaya yang akan menggagalkan proses tersebut.

Menurut Marx biang keladi dari seluruh keterasingan manusia adalah struktur ekonomi. Oleh karena itu, agar keterasingan manusia itu bisa dihilangkan, maka struktur ekonomi itu harus diubah. Perubahan struktur ekonomi itu dilakukan melalui revolusi, yaitu pertentangan antara kelas buruh melawan kelas majikan. Dalam perhitungan Marx, kelas buruh akan memenangkan perlawanan itu sehingga alat-alat produksi beralih dari tangan kaum majikan kepada kaum buruh.

Pada tahap awal pasca revolusi itu, negara masih dibutuhkan tetapi dalam bentuk “diktator proletariat”. Negara dalam bentuk ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa kaum kapitalis sudah tidak ada lagi dan untuk menjalani masa transisi kaum buruh dari keterampilan spesialis sebagai akibat dari pembagian kerja menjadi keterampilan universal dalam rangka mengatasi pembagian kerja.

Hasil akhir yang digambarkan Marx adalah sebuah masyarakat yang bebas dan kreatif dalam masyarakat komunis. Masing-masing orang bisa bekerja kapan saja, mau melakukan hobinya kapan saja sebelum atau sesudah bekerja. Dalam masyarakat komunis ini, pembagian kelas sudah tidak ada lagi. Negara pun sudah mati dengan sendirinya karena tidak ada lagi yang ditindas. Proses produksi dipimpin oleh persekutuan bebas semua individu (Suseno, 1991: 268-270).

Pandangan Gramsci tentang Negara dan Masyarakat Sipil. Gramsci mengkritik ekonomisme Marx yang didasarkan pada materialisme sejarah. Menurut Gramsci, pembagian struktur kehidupan pada bangunan atas dan bangunan bawah mengakibatkan kegagalan Partai Sosialis Italia dalam mengobarkan semangat revolusi 1912-1920. Gambaran struktur Marx itu pula yang menyebabkan gerakan

buruh melemah dan buruh tunduk pada struktur penindasan kapitalis dan fasisme (Simon, 2000: 6).

Gramsci menolak paham ekonomistis Marx. Bagi Gramsci, perubahan ke arah masyarakat sosialis bukan semata-mata bercorak ekonomistis, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial, budaya dan ideologi. Oleh karena itu, hegemoni menjadi tema sentral dalam pemikiran Gramsci sebagai upaya mewujudkan cita-cita masyarakat sosialis-nya. Gramsci juga menolak pemikiran Marx mengenai revolusi yang akan mengganti secara total negara dengan masyarakat tanpa kelas. Bagi Gramsci, perubahan ke arah sosialisme harus dilakukan dengan memanfaatkan jalur-jalur yang tersedia. Bertolak dari kondisi yang sudah ada itu, buruh membuat jaringan dan aliansi-aliansi baru dengan kelompok-kelompok sosial yang ada melalui hegemoni (Arif, 2001: 62).

Pemikiran Gramsci tentang Masyarakat Sipil. Gramsci memasukkan masyarakat sipil dalam bangunan atas (*super structure*) Marx bersama dengan negara. Dalam masyarakat sipil, terjadi proses hegemoni oleh kelompok-kelompok dominan sedangkan negara melakukan dominasi langsung kepada masyarakat sipil melalui hukum dan masyarakat politik. Gramsci sendiri mengakui bahwa senyatanya masyarakat sipil telah terhegomi. Pengakuannya itu diungkapkan dengan mengatakan bahwa masyarakat sipil adalah etika atau moral.

Gramsci membedakan masyarakat sipil dengan masyarakat politik. Masyarakat politik adalah aparat negara yang melaksanakan fungsi monopoli negara dengan koersi, yang di dalamnya meliputi tentara, polisi, lembaga hukum, penjara, semua departemen administrasi yang mengurus pajak, keuangan, perdagangan dan sebagainya. Masyarakat sipil adalah wilayah dimana relasi antara kelompok tidak dilakukan dengan koersi. Maka Gramsci mengatakan bahwa masyarakat sipil mencakup organisasi-organisasi privat seperti gereja, serikat dagang, sekolah, dan termasuk juga keluarga (Arif, 2001: 102-102). Gramsci juga mengatakan bahwa organisasi-organisasi dalam masyarakat sipil mempunyai tujuan yang berbeda-beda seperti politik, ekonomi, olah raga, seni dan sebagainya namun mereka memiliki asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat meskipun sering tidak kentara (Arif, 2001: 131).

Masyarakat sipil merupakan salah satu bagian dari masyarakat kapitalis. Gramsci mengatakan masyarakat kapitalis terdiri dari tiga jenis hubungan yaitu hubungan dasar antara pekerja dan pemodal, hubungan koersif yang menjadi watak negara, dan hubungan sosial lainnya yang membentuk masyarakat sipil. Maka bagi Gramsci, masyarakat sipil bukan negara karena negara bersifat koersif dan bukan produksi karena dalam produksi terjadi tindakan koersif pemilik modal kepada buruh. Ronnie D. Lipschutz merumuskannya dengan mengatakan “*Gramsci placed civil society between state and market and outside of the private sphere of family and friendship*” (Lipschutz, 2005).

Masyarakat sipil merupakan medan perjuangan politik. Oleh karena itu, dalam rangka pembentukan negara sosialis, Gramsci mengatakan perlunya kelompok buruh membangun hegemoni atas kelompok-kelompok lain dalam masyarakat sipil dengan sebuah ideologi baru yang mampu mewadahi kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat sipil dan sekaligus mampu mewadahi kepentingan kelompok buruh. Dalam hal ini, kelompok buruh harus mampu mentransformasi ideologi-ideologi yang ada dengan tetap mempertahankan unsur-unsur penting dari masing-masing ideologi itu dan menyusunnya menjadi sebuah ideologi baru yang mencakup semua termasuk kepentingan kelompok buruh sendiri.

Karena masyarakat sipil telah terhegemoni, maka kelompok buruh perlu melakukan kontra hegemoni. Dalam hal ini, kelompok buruh membangun hegemoni dengan melakukan “perang posisi” melawan hegemoni negara yang telah menjadi blok historis. Pada saatnya nanti ketika negara sosialis telah terbentuk, kelompok buruh harus tetap membangun hegemoni agar menjadi blok historis.

Ketika kelompok buruh memperoleh kekuasaan negara, masyarakat sipil harus sudah maju. Kemajuan masyarakat sipil diukur dari kemampuan membangun hubungan secara otonom, kemampuan mengatur dirinya sendiri (*self-governing*) dan adanya disiplin diri masyarakat. Tanpa disertai dengan kemajuan masyarakat sipil, maka kelompok buruh akan tetap memiliki ketergantungan yang kuat terhadap negara atau tetap berada dalam periode *statolatry*. Oleh karena itu, periode *statolatry* harus terus menerus dikritik agar masyarakat sipil menjadi maju dimana terjadi perkembangan inisiatif individu dan kelompok.

Bagi Gramsci, negara adalah masyarakat politik dan masyarakat sipil. Negara memiliki alat-alat koersif yaitu lembaga-lembaga yang disebutnya sebagai masyarakat politik. Tetapi negara tidak semata-mata melakukan koersif saja tetapi negara juga melakukan apa yang ia sebut sebagai 'peran edukatif dan formatif negara' yaitu melakukan hegemoni. Masyarakat sipil merupakan masyarakat yang telah terhegemoni oleh negara sehingga memungkinkan negara menjadi blok historis berkat dukungan dari masyarakat sipil. Itulah sebabnya, ia mengatakan bahwa negara merupakan masyarakat politik dan masyarakat sipil.

Pemikirannya mengenai negara sebagai masyarakat politik dan masyarakat sipil melahirkan gagasan mengenai negara integral. Pemahaman mengenai negara integral tidak bisa dilepaskan dari gagasannya mengenai sifat kekuasaan. Kekuasaan dipahami oleh Gramsci sebagai hubungan sosial. Hubungan sosial negara terjadi terhadap masyarakat politik dan juga terhadap masyarakat sipil. Jadi, di dalam masyarakat sipil, disamping terdapat hubungan sosial di antara kelompok-kelompoknya sendiri juga terdapat hubungan sosial dengan negara.

Gramsci memikirkan negara yang dicita-citakannya dalam gambaran Dewan Pabrik. Dewan pabrik ini merupakan hasil cetusan gagasannya mengenai perlunya transformasi komisi internal yang ia lontarkan saat ia duduk dalam kepengurusan komisi internal di Turin. Inti gagasannya mengenai transformasi itu adalah agar komisi internal sebagai organ kekuasaan proletarian menggantikan kelompok pemodal dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen dan administrasi sehingga komisi internal bisa menjadi sekolah politik dan administrasi bagi kaum pekerja. Gagasan itu diterima dengan cepat sehingga komisi internal berkembang menjadi dewan pabrik. Dalam dewan pabrik ini, pekerja dapat melakukan kontrol atas proses produksi, mengambil alih fungsi manajemen dan administrasi.

Dengan demikian, bagi Gramsci, dewan pabrik membangun kesadaran politik akan negara demokrasi langsung yang dibangun atas partisipasi rakyatnya. Dengan menggambarkan dewan pabrik sebagai embrio negara, Gramsci mencita-citakan sebuah negara demokrasi langsung dimana kendali atas proses produksi berada di tangan kelompok buruh.

BAB IX

MOZAIK GERAKAN SOSIAL

Berdasarkan hasil penelusuran dan telaah akademik (*literature review*), ditemukan berbagai hasil penelitian yang terkait dengan tema Gerakan sosial.

A. Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial di Papua

Ngadisah (2003) melakukan penelitian disertasi berkenaan dengan Konflik Pembangunan dan Gerakan sosial di Papua, dalam menentang (melawan) proyek pertambangan PT Freeport yang telah menimbulkan dampak negatif bagi warga Mimika, Papua. Ngadisah (2003: 18) mengajukan tiga fokus pertanyaan penelitian, yakni: (1) Mengapa timbul protes terhadap suatu proyek pertambangan?; (2) Mengapa protes berlangsung lama atau berkepanjangan?; dan (3) Bagaimana protes sosial dapat berkembang menjadi Gerakan sosial?.

Penelitian ini dilakukan di sekitar kawasan PT. Freeport Indonesia (PTFI) di Kabupaten Mimika, dengan alasan sebagai berikut:

- (1) Proyek pertambangan Freeport, diprotes sejak awal berdirinya (1970) dan sampai sekarang belum selesai. Bila dibandingkan dengan gerakan protes yang lain, ini adalah gerakan yang berlangsung lama, dimana gerakan-gerakan protes yang lain pada umumnya cepat padam. Karena gerakan masih berlangsung, dan pelaku-pelakunya masih ada, maka data yang diperoleh diharapkan lebih akurat;
- (2) Perkembangan gerakan di Mimika tergolong unik. Hal ini dapat dilihat dari perubahan-perubahan bentuk gerakan, mulai dari gerakan massa yang bersifat fisik pada masa berdirinya Freeport, sampai menjadi gerakan yang terorganisir, bahkan mungkin berafiliasi dengan gerakan politik tertentu, pada waktu pemerintahan pusat lemah;
- (3) Penduduk di sekitar proyek Freeport adalah masyarakat yang relatif tertutup yang mendapat pengaruh langsung proses modernisasi dengan kehadiran proyek Freeport yang menghadirkan teknologi modern, sekaligus sebagai bagian dari

globalisasi. Ini berarti ada “lompatan” budaya yang menarik untuk dicermati, yang mungkin berpengaruh terhadap sikap dan perilaku masyarakat setempat;

- (4) Di sekitar lokasi proyek terdapat dua suku besar yang berbeda sikapnya terhadap Freeport, yakni Suku Amungme dan Suku Kamoro. Suku yang pertama sangat reaktif, suku yang kedua kompromistis. Keadaan ini menarik untuk dikaji untuk melihat hal-hal yang melatarbelakangi perbedaan sikap tersebut.

Agar diperoleh gambaran yang utuh tentang Gerakan sosial, maka pendekatan yang digunakan adalah mengikuti konsep Lofland (1996) tentang 7 (tujuh) pertanyaan pokok yang perlu dikaji dalam studi gerakan sosial, yaitu aspek-aspek: kepercayaan (*beliefs*), organisasi (*organization*), sebab-sebab (*causes*), para pengikut (*participants*), strategi (*strategy*), reaksi (*reactions*), dan akibat-akibat (*effects*). Atas dasar ketujuh aspek gerakan sosial tersebut, selanjutnya Ngadisah (2003: 303) menyimpulkan bahwa tipe gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat Mimika tersebut merupakan kombinasi dari tipe Neo-Klasik dan Gerakan Sosial Baru.

B. Gerakan Sosial Rakyat Porsea, Toba Samosir

Silaen (2006) melakukan penelitian kualitatif tentang gerakan perlawanan komunitas lokal rakyat Porsea, Toba Samosir, dan sekitarnya terhadap PT Indorayon. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Memahami faktor-faktor penyebab munculnya gerakan-gerakan perlawanan rakyat Porsea, Toba Samosir, dan sekitarnya terhadap Indorayon; (2) Mengkaji dimensi sosial budaya dan politik di balik proses terbentuk dan berkembangnya Gerakan Sosial Baru di Porsea, Toba Samosir, dan sekitarnya, serta kaitannya dengan isu-isu tentang keadilan, kesetaraan, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan demokrasi; dan (3) Mengidentifikasi corak perlawanan dan pola hubungan yang terjalin di antara gerakan-gerakan perlawanan rakyat tersebut, baik yang berbasis di Toba Samosir, Medan, dan Jakarta.

Pendekatan teoritik yang digunakan adalah teori Gerakan Sosial Baru (GSB). Berlandaskan pada ciri-ciri GSB yang dikemukakan oleh Larana, dkk., yakni: (1) Mentransendensikan struktur kelas; (2) Memperlihatkan kemajemukan gagasan dan nilai-nilai; (3) Memfokuskan pada isu-isu budaya dan simbolik yang lebih terkait dengan identitas daripada ekonomi; (4) Hubungan antara individu dan ekonomi

kabur; (5) Melibatkan segi-segi pribadi dan keakraban kehidupan manusiawi; dan (6) Mengandalkan semangat anti-kekerasan dan pembangkangan sipil.

Selanjutnya, Silaen (2006: 328) menyimpulkan bahwa gerakan-gerakan perlawanan rakyat Porsea dan sekitarnya terhadap PT Indorayon tersebut merupakan bentuk GSB, karena: (1) Aksi-aksi protes dan penolakan yang mereka lakukan bersifat terorganisir dan berorientasi pada perubahan tatanan sosial yang menyeluruh dengan tujuan menghancurkan kepentingan-kepentingan kekuasaan yang sah demi terwujudnya pola baru; (2) Gerakan ini juga berdimensi politik, yang merupakan ekspresi atas protes terhadap keadaan-keadaan sosial yang tidak adil atau berbagai kekacauan termasuk pemerasaan dan penindasan oleh mereka yang menggunakan kekuasaan, yang karena itu juga bertujuan meniadakan dominasi; (3) Karena gerakan ini merupakan jaringan dari kelompok-kelompok lokal yang tidak terkait dengan gerakan massa dari suatu partai politik atau suatu perserikatan, yang memiliki prinsip dan cara tersendiri dalam melakukan aksi-aksi protes, dan yang tidak mengutamakan satu isu tertentu saja, khususnya ekonomi seperti yang ditunjukkan oleh Gerakan Sosial Lama, di balik perjuangan mereka; dan (4) Karena gerakan ini juga dapat dilihat sebagai unsur utama dalam proses memperkuat *civil society* di masa mendatang, khususnya di Toba Samosir. Eksistensi *civil society* itu sendiri ditandai oleh kemunculan berbagai Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) di masyarakat, yang mandiri dan berdaya untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Kelak, dengan menguatnya *civil society*, maka demokratisasi-pun niscaya akan semakin berkembang. Terkait dengan itu, maka perlu ditambahkan lagi bahwa Gerakan Sosial Baru tidak mengandalkan massa sebagai kekuatannya.

Atas dasar hasil temuan penelitiannya, kemudian Silaen memandang perlu adanya modifikasi terhadap Gerakan Sosial Baru, khususnya dalam aspek sifat keanggotaan gerakan. Keanggotaan dalam Gerakan Sosial Baru bersifat terbuka tanpa hiraukan latar belakang kelas sosial, etnisitas, politik, maupun agama. Dengan demikian, maka Gerakan Sosial Baru dapat dikategorikan sebagai suatu perkumpulan inklusif, yang sesuai dengan prasyarat utama sebagai komponen *civil society*. Gerakan Sosial Baru rakyat Porsea, Toba Samosir, dan sekitarnya, dalam perjuangan melawan PT Indorayon bersifat non-kelas dan tidak menghiraukan latar belakang agama, memang benar adanya. Namun, dalam hal etnisitas, gerakan rakyat Porsea,

Toba Samosir, dan sekitarnya ini justru menunjukkan bahwa ikatan kekerabatan dan ikatan kampung halaman di antara mayoritas anggota gerakan ini (yakni orang Batak) telah berfungsi sebagai “energy” untuk menghimpun dan mempersatukan mereka. Jadi, gerakan ini tidaklah abai akan hal-hal yang primordialistik, sebaliknya justru “memanfaatkannya” sedemikian rupa demi menumbuhkan spirit perjuangan mereka sendiri.

C. Gerakan Sosial Masyarakat Stren Kali, Surabaya

Soenyono (2008) melakukan kajian tentang keberhasilan gerakan sosial masyarakat Stren Kali di Surabaya dalam melawan/menolak (menggagalkan) penggusuran (pembongkaran) kawasan pemukiman di sepanjang Kali Surabaya. Gerakan sosial ini berhasil menunda pembongkaran pemukiman, meskipun pada akhirnya pembongkaran/penggusuran tetap dilaksanakan pada waktu berikutnya. Pendekatan teoritik yang digunakan adalah kerangka konseptual Doug McAdam, dkk., yang teorinya meliputi tiga varian teori gerakan sosial yang diintegrasikan, yakni tentang: peluang politik (*political opportunities*), struktur-struktur mobilitas (*mobilizing structures*), dan konstruksi sosial pengembangan bingkai kultural (*cultural framing*) gerakan.

Berdasarkan hasil penelitiannya, Soenyono (2008: 226-232) kemudian menyimpulkan bahwa:

- (1) Peluang-peluang politik (*political opportunities*) yang memfasilitasi dan/atau bekerja sebagai kendala bagi aktualisasi dan dinamika gerakan sosial masyarakat Stren Kali Surabaya adalah terbukanya era reformasi, yang memberi kebebasan berkumpul, keterbukaan menyampaikan pendapat, dan adanya pers yang bebas;
- (2) Sedangkan bagaimana struktur-struktur dan/atau lembaga-lembaga sosial tertentu dimanfaatkan sebagai wahana mobilisasi (*mobilizing structures*) gerakan masyarakat Stren Kali, termasuk di dalamnya bagaimana *networking* yang dibangun dapat memperkuat gerakan sosial tersebut, menunjukkan bahwa struktur atau lembaga yang menjadi wahana masyarakat Stren Kali Surabaya dalam melakukan gerakan sosial meliputi Paguyuban Masyarakat Stren Kali

Surabaya, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), kelompok pengajian, arisan, dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

- (3) Dalam proses *framing*, kelompok-kelompok masyarakat Stren Kali secara bersama-sama menciptakan makna-makna yang mereka bangun berdasarkan atas peristiwa-peristiwa yang terjadi dan yang mereka alami. Adapun wujud *framing* yang digunakan adalah: (a) Mengusung dan menggelar slogan-slogan antara lain: “*Kami menginginkan renovasi bukan penggusuran*”, dan “*Kami sebagai masyarakat Stren Kali, siap menjaga kebersihan kali*”. Seluruh slogan yang diciptakan pada dasarnya bertujuan untuk menggugah kesadaran masyarakat dan mempengaruhi kebijakan publik; (b) Menciptakan lagu-lagu gerakan yang bertema sindiran dan harapan. Lagu-lagu yang mereka ciptakan dan nyanyikan bukan hanya sebagai “pelipur lara” atas kekecewaan yang selama ini mereka rasakan, tetapi lebih dari itu sebagai sebuah sindiran dan harapan terhadap kebijakan yang diambil Negara; (c) Membuat sanggar yang merupakan pusat kegiatan pembentukan *framing*. Sanggar ini adalah ruang bersama yang didirikan oleh masyarakat Stren Kali, yang bisa dimanfaatkan untuk duduk bersama, berdiskusi, mencari penyelesaian atas semua permasalahan mereka, belajar dan mengembangkan segala potensi yang ada pada mereka, baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya; dan (d) Mengadakan “*Festival Jogo Kali*” sebagai wujud gerakan budaya. Festival ini bertujuan untuk menyatukan tekad bahwa masyarakat Stren Kali Surabaya benar-benar ingin menjadikan dirinya sebagai masyarakat *jogo kali*. Dengan predikat itu, tidak ada lagi yang namanya budaya mengotori sungai, tetapi yang ada adalah budaya menjaga kebersihan sungai. Apabila masyarakat Stren benar-benar digusur, maka siapa yang akan menjaga Sungai? Dengan demikian, antara masyarakat dan sungai merupakan satu kesatuan yang tidak bias dipisahkan.

D. Gerakan Sosial Lokal Perempuan

Farida (2012: 1-42) melakukan penelitian disertasi tentang Gerakan Sosial Lokal Perempuan di dusun Dasun, yang terletak di kawasan pegunungan Wilis,

Kediri, Jawa Timur. Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan: (1) Bagaimanakah aksi kolektif terbentuk dan berkembang? Aksi kolektif seperti apa yang dapat dimaknai sebagai gerakan sosial dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh kaum perempuan?; dan (2) Sejauhmana pencapaian aksi kolektif yang dilakukan oleh kaum perempuan Dasun berimplikasi pada kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat? Kerangka konsepsi teoritik gerakan sosial diletakkan atas pandangan Rajendra Singh dan pandangan Donatella della Porta dan Mario Diani.

Secara umum, temuan penelitian yang dilakukan oleh Farida dapat disimpulkan sebagai berikut:

- (1) Aksi kolektif di Dasun dapat berkembang menjadi sebuah gerakan sosial karena dilandasi oleh kesadaran kolektif yang kemunculannya diinspirasi oleh kehadiran mahasiswa KKN. Keberhasilan aksi-aksi kolektif dalam menyelesaikan masalah mendorong kaum perempuan untuk mengintegrasikannya dalam satu naungan, yaitu paguyuban perempuan Sido Rukun. Dalam proses pengintegrasian aksi kolektif inilah lahir seorang pemimpin yaitu Sulastri. Sulastri dalam hal ini merupakan produk yang dilahirkan oleh gerakan. Kemampuan untuk memproduksi pemimpin ini merupakan hal spesifik yang tidak ditemui pada aksi kolektif di tempat lainnya. Bahkan fenomena di Dasun tersebut tidak dapat dijelaskan dengan kerangka teori gerakan sosial lama ataupun Gerakan Sosial Baru (GSB) yang telah ada. Merujuk pada pendapat para teoritis gerakan sosial yang ada, sejauh ini aksi kolektif di Dasun telah dapat disebut sebagai gerakan sosial, yaitu telah terpenuhinya unsur kolektifitas, tujuan bersama, pengorganisasian yang longgar, adanya pemimpin, spontan dan bergerak di luar kekuasaan formal. Sedangkan jika ditinjau dari pluralisme isu yang diusung maupun heterogenitas pelaku yang tidak berbasiskan pada kelas, maka gerakan sosial di Dasun dapat dikategorikan sebagai sebuah Gerakan Sosial Baru. Namun dalam kasus Dasun ini tidak sepenuhnya tepat juga, karena pada GSB setting masyarakat biasanya sudah pada tahap *post-industry*, dan pelakunya pun berasal dari kelas menengah; dan
- (2) Implikasi pencapaian gerakan sosial di Dasun dipilah dalam ranah rumah tangga dan kehidupan masyarakat. Dalam ranah rumah tangga, terlihat adanya

perubahan relasi gender khususnya dalam pengelolaan keuangan (kontrol keuangan mulai bergeser kepada perempuan) dan pengambilan keputusan (suami melibatkan perempuan). Sedangkan dalam kehidupan bermasyarakat ditunjukkan dengan adanya berbagai capaian yang diperinci dalam bidang sosial budaya, politik, ekonomi, dan lingkungan. Merujuk pada pencapaian gerakan sosial yang telah dikemukakan, dapat dinyatakan bahwa gerakan sosial yang dilakukan oleh kaum perempuan pedesaan di Dasun telah berhasil sepenuhnya. Keberhasilan sebuah gerakan jika mengacu pada pendapat Gamson via della Porta dan Diani dapat dilihat dari dua sisi, yakni *pertama*, adanya capaian-capaian baru (*new gains*), dan *kedua*, tingkat penerimaan (*levels of acceptance*). *Pertama*, terkait capaian-capaian baru ini mengacu pada adanya perubahan nyata yang terkait dengan kebijakan publik yang merupakan tuntutan masyarakat, ditunjukkan dengan adanya kebijakan mengakomodir suara perempuan (30%) dalam tiap pengambilan keputusan mulai dari tingkat RT sampai desa. *Kedua*, terkait dengan keberhasilan gerakan membawa hasil nyata dalam sistem perwakilan kepentingan, yaitu terpilihnya Sulastris sebagai Kades, dan terakomodirnya warga Dasun dalam lingkaran kekuasaan desa baik di bidang eksekutif maupun legislatif.

Dari hasil temuan penelitian tersebut, selanjutnya Farida mengajukan beberapa proposisi, yaitu:

- (1) Pemimpin gerakan di Dasun merupakan produk dari gerakan sosial itu sendiri, pemimpin lahir karena sebuah proses kolektivitas, dan keberadaannya tidak terlebih dulu ada dibandingkan gerakan itu sendiri;
- (2) Gerakan sosial yang dilakukan oleh kaum perempuan Dasun mampu mendorong munculnya replikasi aksi kolektif yang dapat memproduksi pemimpin gerakan di wilayah sekitarnya;
- (3) Aksi kolektif di Dasun dapat berkembang karena dilandasi oleh adanya kesadaran kolektif dan solidaritas. Aksi kolektif yang ada dapat disebut sebagai gerakan sosial karena telah terpenuhinya unsur kolektivitas atau kebersamaan, tujuan bersama yang ditetapkan, pengorganisasian yang longgar, pemimpin, spontanitas dan bergerak di luar jalur kekuasaan formal;

- (4) Kekaburan identitas dengan peran gendernya telah membentuk aliansi kekuatan antara kaum perempuan Dasun dengan kaum lelaki Dasun yang tidak memiliki kekuasaan di tingkat desa berhadapan dengan penguasa desa;
- (5) Aliansi kekuasaan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki di Dasun berhasil menumbangkan resistensi kekuatan desa dan memperkuat eksistensi aksi kolektif perempuan yang ada melalui peristiwa Deklarasi Paguyuban;
- (6) Kontestasi kepentingan antara yang didominasi melawan yang mendominasi kekuasaan melahirkan kekuasaan baru dengan beralihnya kekuasaan kepada yang didominasi;
- (7) Gerakan sosial lokal perempuan terbentuk oleh dorongan kesadaran kolektif dan solidaritas untuk meraih kemanusiaan yang utuh;
- (8) Aksi kolektif yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan atau kepentingan praktis yang beraspek ekonomis merupakan daya tarik yang mampu menggerakkan berkembangnya suatu gerakan sosial pada masyarakat miskin;
- (9) Gerakan sosial yang dilakukan oleh kaum perempuan berimplikasi pada adanya reposisi dan redefinisi peran perempuan dalam tataran rumah tangga dan masyarakat; dan
- (10) Gerakan sosial merupakan ide dasar dari sebuah pemberdayaan yang sesungguhnya.

E. Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo

Sukanto (2012) melakukan penelitian disertasi dengan judul “Tindakan Kolektif dan Identitas: Studi Gerakan sosial Korban Lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo”, dalam rangka memperoleh derajat Doktor Ilmu Sosial di Program Pascasarjana (PPs), Universitas Airlangga (Unair), Surabaya. Dalam studinya, Sukanto (2012: 9) mengajukan tiga pertanyaan, yakni: (1) bagaimana evolusi bentuk-bentuk tindakan kolektif para korban Lumpur Lapindo sampai dengan gerakan sosial?; (2) bagaimana bentuk-bentuk perlawanan dan negosiasi dalam tindakan kolektif yang dilakukan oleh korban Lumpur terhadap Lapindo Brantas Inc. dan negara?; dan (3)

bagaimana produksi identitas oleh kelompok korban Lapindo dalam melawan Lapindo Brantas Inc., dan negara?

Untuk memahami bagaimana tindakan kolektif korban Lumpur Lapindo, Sukamto (2012: 25-27) mendasarkan analisisnya dengan menggunakan jalan pikiran Charles Tilly bahwa tindakan kolektif memiliki beberapa komponen, yaitu: (a) tindakan kolektif dan kepentingan (*interest*); (b) tindakan kolektif dan organisasi; (c) tindakan kolektif dan mobilisasi; dan (d) tindakan kolektif dan kesempatan. Kesimpulan hasil penelitian Sukamto, yakni:

- (1) Evolusi bentuk-bentuk tindakan kolektif para korban Lumpur Lapindo yang meliputi: (a) Pada awalnya tindakan kolektif dilakukan dalam kerangka institusi atau lembaga yang ada sejak dari tingkatan RT, RW, desa atau kelurahan, Kecamatan sampai dengan Kabupaten. Namun, ketika lembaga-lembaga yang ada sudah tidak mampu menyalurkan aspirasi dan tuntutan. Mulailah terjadi ketidakpercayaan pada lembaga atau institusi. Kemudian mereka membicarakan dan mendiskusikan keadaan itu satu dengan yang lain, lalu dibentuklah perwakilan-perwakilan. Hal ini juga tergambar dalam gelombang demi gelombang pengungsian; (b) Pada perjalanan berikutnya seolah-olah kelompok korban Lapindo terbelah ke dalam dua gugusan/kelompok/kolektivitas besar, ini terjadi sebagai akibat terbitnya Perpres, kolektivitas itu adalah Pagarekontrak dan GKLL. Dengan menunjuk kelompok besar tersebut, tidak berarti bahwa tidak ada kelompok-kelompok kecil lainnya melainkan masih ada kelompok-kelompok lain, yaitu Kelompok Siring Barat, Kelompok Besuki yang menamakan diri Pagarbetis; (c) GKLL dalam perjalanannya membangun kesepakatan baru dengan pihak Lapindo atau Minarak Lapindo Jaya, yaitu dengan jalan menandatangani MoU. Lahirnya MoU ini memicu keretakan di kelompok GKLL, mereka yang setuju MoU tetap menamakan diri GKLL, sedangkan yang tidak setuju menamakan diri Geppres. Geppres menilai bahwa MoU ini telah menyimpang dan mengkhianati Perpres; dan (d) Bentuk kolektif selanjutnya adalah berbentuk gabungan dari Pagarekontrak, Persatuan Warga Perumtas I atau Tim-16 dengan nama Koalisi Korban Lumpur (K3L).

- (2) Bentuk-bentuk perlawanan dan negosiasi dalam tindakan kolektif para korban Lumpur Lapindo, meliputi: (a) Bentuk perlawanan dan negosiasi yang pertama adalah melakukan perundingan. Berbagai variasi perlawanan dan negosiasi ini dapat terjadi secara langsung antara para korban lumpur Lapindo dengan pihak korporasi atau Lapindo, namun juga terjadi mediasi-mediasi tertentu yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat agama maupun pejabat pemerintah. Bentuk yang pertama ini tidak jarang berakhir dengan perdebatan sampai dengan timbulnya tindakan kekerasan. Hal ini terjadi baik dilakukan pihak korban dan kadang pula oleh pihak aparat keamanan; (b) Perlawanan dan negosiasi dapat dilakukan juga dalam bentuk demonstrasi. Dalam demonstrasi terkadang dilakukan dengan jalan penghadangan atas pekerja dan alat-alat yang digunakan untuk mengerjakan penanggulangan, kendaraan truk-truk pengangkut sirtu bahkan dilakukan pula terhadap Kereta Api dan kendaraan-kendaraan umum lainnya. Tidak jarang pula terjadi kekerasan yang berupa pelemparan, pemukulan dan lain sebagainya. Hal ini terjadi bisa antara para korban lumpur dengan pihak aparat keamanan dan bisa juga terjadi pada pihak Lapindo; (c) Beberapa bentuk perlawanan dan negosiasi yang lain adalah jebol tanggul, merekayasa surat, memperluas luberan, menjebol tanggul, atau mengambil kesempatan di dalam kesempatan; (d) Sebagai hasil dari negosiasi yang terjadi setiap kali terjadi perubahan formulasi atas ganti rugi atau jual beli pihak korban secara substansial selalu di pihak yang dirugikan atau kalah. Sebaliknya, pihak korporasi Lapindo Jaya dapat dipastikan meraup keuntungan; dan (e) Bentuk perlawanan para korban Lumpur Lapindo secara umum dan yang dominan adalah dilaksanakan secara terang-terang. Mengapa demikian para korban lumpur Lapindo merasa benar dan mereka bermaksud menuntut balik hak-hak yang telah hilang, tenggelam oleh semburan lumpur.
- (3) Produksi identitas oleh kelompok korban Lumpur Lapindo, meliputi: (a) Produksi identitas ini mencakup identitas yang alamiah, diterima (*ascribe*) dan yang diusahakan, diperjuangkan. Identitas mulai dari nama, perasaan senasib, keinginan yang sama, pilihan-pilihan tindakan yang sama dan berbagai pengalaman serta narasi-narasi yang mereka bangun; (b) Pengalaman dalam menyelamatkan diri dari semburan lumpur Lapindo dan pengalaman-

pengalaman dalam perjuangan untuk mendapatkan ganti rugi yang hasilnya dalam bentuk jual beli. Setelah disetujuinya jual beli pada dasarnya status sebagai koban telah hapus dengan sendirinya. Oleh karena itu, segala sesuatu persyaratan menjadi jual beli murni. Identitas-identitas mereka bangun sebagai konstruksi sosial atas gambar diri maupun pihak korporasi dan Negara yang dipandang sebagai lawan; (c) Identitas sebagai produk konstruksi sosial, ia tidak pernah tunggal tetapi selalu majemuk dan selalu berubah menurut konteksnya; (d) Identitas dapat ditemukan, ditetapkan sehingga membentuk suatu konfigurasi yang dibangun sepanjang waktu; (e) Identitas berfungsi sebagai pembela, pengada, meningkatkan solidaritas dan integrasi di antara para anggota kolektivitas; (f) Pengidentifikasian mereka yang dianggap bertanggung jawab atas sebuah situasi negatif menyiratkan adanya “kita” sebagai lawannya. Dalam menetapkan “kita”, komponen identitas kerangka tindakan kolektif ini adalah seperangkat keyakinan kolektif, yaitu keyakinan yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang. Oleh karena itu, ketidakadilan yang dicakup oleh kerangka tersebut juga dirasakan bersama pengungsi, menjadi korban lumpur panas Lapindo, perlakuan pemerintah yang tidak adil terhadap kelompok tertentu atau ancaman terhadap kondisi perekonomian, sebagaimana korban lumpur Lapindo.

Implikasi teoritik dari hasil studi Sukanto ini dinyatakan bahwa secara substansial teori mobilisasi sumberdaya masih dapat dijalankan, dipertahankan dan didukung, namun diperlukan sinergi dengan teori identitas. Ini artinya tindakan kolektif sebagaimana dikembangkan Tilly yang salah satu elemennya adalah mobilisasi sumberdaya akan memberikan sumbangan yang berharga apabila disinergikan dengan teori identitas.

F. Gerakan Sosial Petani Kalibakar

Wahyudi (2005) melakukan studi tentang Formasi dan Struktur Gerakan sosial Petani: Studi Reklamasi/Penjarahan Atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar Malang Selatan. Dalam studinya, Wahyudi (2005: 44) mengajukan pertanyaan besar yakni: Bagaimana Formasi dan Struktur Gerakan sosial Petani Kalibakar?”. Secara lebih khusus lagi, studi ini tertarik untuk melihat; (1) Bagaimana *the important*

determinants perilaku kolektif saling memberikan kontribusi atas masing-masing nilainya dalam proses formasi gerakan sosial petani Kalibakar?; dan (2) Bagaimana proses terjadinya struktur gerakan sosial petani Kalibakar itu?

Menurut Wahyudi (2005: 43), kerangka teori yang tepat untuk menjelaskan fenomena Kalibakar adalah:

- (1) *Theory of collective behavior* dari Neil J. Smelser, khususnya yang terkait dengan konsep gerakan yang berorientasi pada norma akan dapat dapat menjelaskan fenomena gerakan petani di Kalibakar. Beberapa konsep seperti: *structural conduciveness*, *structural strain*, *growth and spread of generalized belief*, *precipitating factors*, *mobilization of participants for action*, dan *operation of social control* akan sangat bermanfaat menjelaskan gerakan sosial petani Kalibakar.
- (2) *The main determinants of collective action* dari Charels Tilly, yang mengintrodusir lima komponen mobilisasi, yakni: kepentingan (*interest*), organisasi, mobilisasi, peluang (*oportunity*), dan tindakan kolektif itu sendiri. Teori Tilly ini berguna untuk menjelaskan aspek interest dalam mobilisasi tindakan kolektif.

Disamping menaruh perhatian pada fenomena gerakan, peneliti juga melengkapinya dengan studi tentang proses terbentuknya struktur jaringan gerakan. Jika berbagai temuan terdahulu, termasuk teori Emerson, lebih memperhatikan bagaimana konsekuensi relasi sosial para aktor di dalam struktur jaringan yang sudah ada, maka studi ini bermaksud untuk melihat proses terjadinya struktur gerakan petani dimaksud. Tepatnya terkait dengan pertimbangan atau motif pada aktor sehingga mereka mau menyatukan diri di dalam jaringan gerakan yang mendukung perjuangan petani. Perhatian pada pertimbangan aktor untuk masuk, berada, dan keluar dari jaringan memang tidak biasanya dilakukan, namun peneliti melihat aspek ini penting untuk mendukung penjelasan formasi gerakan yang selalu berubah-ubah itu.

G. Gerakan Perlawanan Orang-Orang Tertindas

Terkait dengan bagaimana bentuk perlawanan orang-orang atau kelompok yang tidak berdaya (*powerless*) terhadap dominasi pihak yang berkuasa (*powerful*) dapat mengacu kepada pemikiran Scott (2000: 38-64) yang melakukan studi tentang bagaimana petani miskin pedesaan Sedaka, Malaysia, yang tidak memiliki kekuasaan dan tidak berdaya, melakukan perlawanan atas dominasi dan hegemoni dari petani kaya (pemilik modal) dan pihak pemerintah. Hasil studi Scott ini kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance* (Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah: Bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari kaum tani). Selanjutnya, Scott menjelaskan bahwa bentuk perlawanan orang-orang atau kelompok yang tidak berdaya dilakukan secara diam-diam, tidak melalui konfrontasi terbuka, tidak terjadi: huru-hara, demonstrasi, kejahatan sosial terorganisir, dan kekerasan terbuka. Apabila perlawanan dilakukan secara kolektif maka perlawanan dilakukan secara hati-hati, jika dilakukan oleh orang-perorangan atau kelompok kecil, maka perlawanan dilakukan secara anonim dan biasanya dilakukan pada malam hari. Bentuk perlawanan seperti ini oleh Scott disebut sebagai perlawanan primitif, yakni dimaksudkan bahwa bentuk perlawanan demikian merupakan strategi sehari-hari yang terus-menerus dan permanen dari kelas-kelas bawah yang selalu kalah (Scott, 2000: 360-361).

Hasil studi Scott yang lainnya tentang bagaimana perlawanan orang-orang atau kelompok yang tidak berdaya (*powerless*) terhadap dominasi pihak yang berkuasa (*powerful*) dapat dikaji dari buku yang berjudul "*Domination and the Arts of Resistance: Hidden Tracscripts*" (1990). Scott meneliti bagaimana orang-orang yang tidak berdaya, seperti para petani, kaum budak, para buruh, dan para tawanan, yang tidak memiliki kebebasan untuk bicara mengungkapkan pikiran-pikiran mereka di hadapan kekuasaan. Kelompok-kelompok subordinat ini kemudian menciptakan percakapan-percakapan (*discourse*) yang merepresentasikan kritik terhadap kekuasaan, yang diungkapkan secara sembunyi-sembunyi di belakang kelompok penguasa (kelompok dominan). Scott menggambarkan suatu bentuk perlawanan ideologis (*ideological resistance*) dari kelompok subordinat, seperti berupa gosip (*gossip*), cerita rakyat (*folktales*), nyanyian (*songs*), lelucon (*jokes*), dan teater

(*theater*), dimana mereka menggunakannya secara anonim (*anonymity*) dan samar-samar (*ambiguity*).

Berdasarkan hasil studinya, Scott (1990: 198) kemudian menjelaskan bahwa terdapat tiga model dominasi yang memunculkan bentuk-bentuk perlawanan (*resistance*) yang berbeda pula. Ketiga bentuk dominasi tersebut meliputi: (1) Dominasi Material (*Material Domination*); (2) Dominasi Status (*Status Domination*); dan (3) Dominasi Ideologis (*Ideological Domination*). Dalam dominasi material (*Material Domination*), praktek dominasi muncul dalam bentuk seperti perampasan gandum, dominasi atas pajak dan atas tenaga kerja, dan sebagainya. Sementara dalam dominasi status (*status domination*), praktek dominasi muncul dalam bentuk seperti melakukan penghinaan, pelanggaran atas hak istimewa, penghinaan, dan melakukan serangan terhadap martabat seseorang. Sedangkan dalam dominasi ideologi (*ideological domination*), praktek dominasi muncul dalam bentuk seperti justifikasi oleh kelompok penguasa atas perbudakan, penghambaan, kasta, dan hak-hak istimewa.

Menurut Scott, dalam setiap bentuk dominasi, akan muncul perlawanan (resistensi) baik perlawanan secara terbuka maupun secara samar-samar (tertutup). Dalam dominasi material (*material domination*), perlawanan terbuka dilakukan dalam bentuk petisi, demonstrasi, boikot, serangan, invasi tanah, dan pemberontakan terbuka; sedangkan bentuk perlawanan terselubung (samar) dilakukan dalam bentuk perlawanan sehari-hari, seperti melanggar, menduduki, desersi, menghindar, terlambat, atau melakukan perampasan bertopeng dan ancaman anonim. Dalam dominasi status (*status domination*), perlawanan terbuka dilakukan dalam bentuk gestur, model pakaian, ucapan dan perkataan, dan atau penodaan terbuka terhadap simbol status dari kelas dominan, sedangkan bentuk perlawanan terselubung (samar) berupa transkrip tersembunyi dari kemarahan, agresi, dan percakapan samaran, seperti agresi ritual, kisah-kisah balas dendam, penggunaan simbol karnaval, gosip, rumor, menciptakan ruang sosial otonomi untuk menyatakan martabat. Dalam dominasi ideologi (*ideological domination*), perlawanan terbuka dalam bentuk kontra publik dalam menyebarkan ideologi kesetaraan, revolusi, atau meniadakan ideologi kelas berkuasa, sedangkan perlawanan terselubung (samar) melalui bentuk pengembangan subkultur ketidaksepakatan, seperti agama milenium, agama rakyat,

mitos tentang bandit sosial dan pahlawan kelas, mitos tentang raja yang baik, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abercrombie, Nicholas; Hill, Stephen; & Turner, Bryan S. 2010. *Kamus Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alexander, Jeffrey C. 1998. *Real Civil Society: Dilemmas of Institutionalization*. London: SAGE Publikations, Ltd.
- Arnold, Hugh J. ; & Feldman, Daniel C. 1986. *Organizational Behavior*. Singapore: McGraw-Hill Book Co.
- Baker, Gideon. 2002. *Civil Society and Democratic Theory: Alternative Voices*. London: Routledge.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Burrage, Michael. 2008. *Class Formation, Civil Society and The State: A Comparative Analysis of Russia, France, the US and England*. New York: Palgrave Macmillan.
- Carwright, Dorwin; dan Zander, Alvin. 1968. *Group Dynamics: Research and Theory*. New York: Harper & Row Publishers.
- Chaskin, Robert J. ; Brown, Prudence; Venkatesh, Sudhir; dan Vidal Avis. 2002. *Building Community Capacity*. New York: Aldine De Gruyter.
- Chesters, Graeme; & Welsh, Ian. 2006. *Complexity and Social Movement: Multitudes at the Edge Chaos*. Oxon: Routledge.
- Crossley, Nick. 2002. *Making Sense of Social Movements*. Philadelphia: Open University Press.
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Della Porta, Donatella; & Diani, Mario. 2006. *Social Movements an Introduction*. Malden: Blackwell Publishing.
- Diani, Mario; & McAdam, Doug (eds.). 2003. *Social Movements and Networks: Relational Approaches to Collective Action*. Oxford: Oxford University Press.
- Dieter Opp, Karl. 2009. *Theories of Political Protest and Social Movements: A Multidisciplinary Introduction, Critique, and Synthesis*. Oxon: Routledge.
- Drake, Philip. 2012. *Composing Disaster: Nature, Politics and Indonesia's Mud Volcano*. A Dissertation Submitted to the Graduate Division of the University Hawai'i at Manoa in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor Philosophy. University of Hawai'i: Hawai'i.

- Elliott, Jane. 2005. *Using Narrative Research: Qualitative and Quantitative Approaches*. London: SAGE Publikations.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS.
- Fakih, Mansour. 1996. *Analisa Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , 2005. *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press.
- , 2010. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press.
- Febriasih, Happy Budi (peny.). 2009. *Bisnis dan Demokrasi*. Malang: Averroes Press.
- Friedman, Elisabeth Jay; Hochstetler, Kathryn; & Clark, Ann Marie. 2005. *Sovereignty, Democracy, and Global Civil Society: State-Society Relations at UN World Conference*. Albany: State University of New York Press.
- Girling, John. 2004. *Social movements and Symbolic Power: Radicalism, Reform and The Trial of Democracy in France*. New York: Palgrave MacMillan.
- Given, Lisa M. (ed.). 2008. *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods* (Volumes 1& 2). Los Angeles: A SAGE Reference Publikations.
- Goffman, Erving. 1974. *Frame Analysis: An Essay on The Organization of Experience*. London: Harper and Row.
- Greene, Shepard. 2002. *Sociology and You*. Glencoe: McGraw-Hill.
- Haralambos, Michael; & Holborn, Martin. 1994. *Sociology: Themes and Perspectives*. London: Collins Educational.
- Hikam, Muhammad AS. 1996. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES.
- Hollway, W. ; & Jefferson, T. 2000. *Doing Qualitative Research Differently: Free Association, Narrative and The Interview Method*. London: SAGE Publikation.
- Howell, Jude; & Pearce, Jenny. 2002. *Civil Society & Development: A Critical Exploration*. Colorado: Lynne Rienner Publishers, Inc.

- Horton, Paul B. ; & Hunt, Chester L. 1984. *Sociology*. Tokyo: McGraw-Hill Book Company.
- Johnston, Hank.,& Klandermans, Bert (eds.). 1995. *Social Movements and Culture*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Jupp, Victor (ed.). 2006. *The Sage Dictionary of Social Research Methods*. London: SAGE Publikations.
- Kalof, Linda. ; Dan, Amy; & Dietz, Thomas. 2008. *Essentials of Social Research*. Berkshire: Open University Press.
- Kaufman, Michael; & Alfonso, Haroldo Dilla (eds.). 1997. *Community Power and Grassroots democracy: The Transformation of Social Life*. London: Zed Books.
- Klandermans, Bert; & Roggeband, Conny (eds.). 2007. *Handbook of Social Movements Across Disciplines*. New York: Springer Science Business Media, LLC.
- Klandermans, Bert; & Staggenbog, Suzanne (eds.). 2002. *Methods of Social Movement Research*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Larana, Enrique; Johnston, Hank; & Gusfield, Joseph R. 1994. *New Social Movement: From Ideology to Identity*. Philadelphia: Temple University Press.
- Locher, David A. 2002. *Collective Behavior*. New Jersey: Prentice Hall.
- McAdam, Doug; McCarthy, John D.; & Zald, Mayer N (eds). 2004. *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunity, Mobilizing Structures, and Cultural Framing*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Macionis, John J. 1999. *Sociology*. New Jersey: Prentice Hall.
- Manalu, Dimpos. 2009. *Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik: Studi kasus Gerakan Perlawanan Masyarakat Batak vs PT Inti Indorayon Utama di Sumatera Utara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Madjid, Nurcholish. 1999. *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*. Jakarta: Paramadina.
- Marczyk, G. ; DeMatteo, D. ; & Festinger, D. 2005. *Essentials of Research Design and Methodology*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

- Markoff, John. 2002. *Gelombang Demokrasi Dunia: Gerakan Sosial dan Perubahan Sosial* (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marvasti, Amir B. 2004. *Qualitative Research in Sociology: An Introduction*. London: SAGE Publikations.
- Mas`oed, Mohtar. 2003. *Negara, Kapital dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- McAdam, Doug; Tarrow, Sydney; & Tilly, Charles. 2004. *Dynamics of Contention*. Cambridge: Cambirdge University Press.
- McAdam, Doug; McCarthy, John D. ; & Zald, Mayer N. 2004. *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structure, and Cultural Framings*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Miles, Matthew B. ; & Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Milofsky, Carl. 1988. *Community Organizations: Studies in Resource Mobilization and Exchange*. New York: Oxford University Press.
- Mirsel, Robert. 2004. *Teori Pergerakan Sosial : Kilasan Sejarah dan Catatan Bibliografis*. Yogyakarta: Resist Book.
- McNally, Mark; & Schwarzmantel, John (eds.). 2009. *Gramsci and Global Politics: Hegemony and Resistance*. Oxon: Routledge.
- Meyer, David S. ; Whittier, Nancy; & Robnett, Belinda (eds.) 2002. *Social movements: Identity, Culture, and the State*. Oxford: Oxford University Press.
- Moghadam, Valentine M. 2009. *Globalization and Social movements: Islamism, Feminism, and the Global Justice Movement*. Maryland: Rowman& Littlefield Publishers, Inc.
- Neuman, W. Lawrence. 2007. *Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Ngadisah. 2003. *Konflik Pembangunan dan Gerakan sosial Politik di Papua*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Raja.
- Olson, Mancur. 1965. *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups*. Cambiidge: Harvard University Press.

- Owens, Lynn. 2009. *Cracking Under Pressure: Narrating the Decline of the Amsterdam Squatters' Movement*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Perkins, John. 2007. *Membongkar Kejahatan Jaringan Internasional* (Terjemahan: *Confessions of An Economic Hit Man*). Jakarta: UFUK Press.
- Petras, James; & Veltmeyer, Henry. 2005. *Social Movements and State Power: Argentina, Brazil, Bolivia, Ecuador*. London: Pluto Press.
- Pratt, Jeff. 2003. *Class, Nation and Identity: The Anthropology of Political Movements*. London: Pluto Press.
- Price, Jammie; Straus, Roger A. ; & Breese, Jeffrey R. 2009. *Doing Sociology: Case Studies in Sociological Practice*. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publisher, Inc.
- Purdue, Derrick (ed.). 2007. *Civil Societies and Social Movements: Potentials and Problems*. Oxon: Routledge.
- Quah, Stella R., & Sales, Arnaud (eds). 2000. *The International Handbook of Sociology*. London: SAGE Publikation. Ltd.
- Rahardjo, M. Dawam. 1999. *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Rais, Mohammad Amien. 2008. *Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia*. Yogyakarta: PPSK Press.
- Ritzer, George; & Smart, Barry. 2001. *Handbook of Sosial Theory*. London: SAGE Publikations.
- Ritzer, George; & Goodman, Douglas J. 2009. *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Robbins, Stephen P. 1988. *Essentials of Organizational Behavior*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
- Romano, David. 2006. *The Kurdish Nationalist Movement: Opportunity, Mobilization, and Identity*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Scott, James C. 2000. *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah: Bentuk-Bentuk Perlawanan Sehari-Hari Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Scott, James. C. 1990. *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*. New Haven and London: Yale University Press.

- Shigetomi, Shinichi; Makino, Kumiko; & Elgar, Edward (eds.). 2009. *Protest and Social Movements in the Developing World*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
- Silaen, Victor. 2006. *Gerakan Sosial Baru: Perlawanan Komunitas Lokal pada Kasus Indorayon di Toba Samosir*. Yogyakarta: IRE Press.
- Silverman, David; & Marvasti, Amir. 2008. *Doing Qualitative Research: A Comprehensive Guide*. Los Angeles: SAGE Publikations.
- Singh, Rajendra. 2001. *Social Movements, Old and New: A Post-Modernist Critique*. New Delhi: SAGE publikations India, Ltd.
- Singh, Rajendra. 2010. *Gerakan Sosial Baru* (Terj.). Yogyakarta: Resist Book.
- Situmorang, Abdul Wahib. 2007. *Gerakan Sosial : Studi Kasus Beberapa Perlawanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Snow, David A. ; Soule, Sarah A. ; & Kriesi, Hauspeter (eds.). 2004. *The Blackwell Companion to Social Movements*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
- Sobur, Alex. 2002. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis dan Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soenyono. 2008. *Gerakan Sosial Masyarakat Miskin Perkotaan: Political Opportunities, Mobilizing Structure, dan Cultural Framing*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Spencer, Metta. 1982. *Foundations of Modern Sociology*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Stewart, Charles; Smith, Craig Allen; & Denton Jr., Robert E. 2007. *Persuasion and Social movements*. Illionois: Waveland Press, Inc.
- Stolley, Kathy S. 2005. *The Basics of Sociology*. Westport: Greenwood Press.
- Sugiyanto. 2002. *Lembaga Sosial*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama.
- Suharko. 2005. *Merajut Demokrasi: Hubungan NGO, Pemerintah, dan Pengembangan Tata Pemerintahan Demokratis (1966-2001)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendar, E., & Winarni, YB. 1998. *Petani dan Konflik Agraria*. Bandung: AKATIGA.
- Sukmana, Oman. 2003. *Dasar-Dasar Psikologi Lingkungan*. Malang: UMM Press.

- Sukamto. 2012. *Tindakan Kolektif dan Identitas: Studi Gerakan Sosial Korban Lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo*. Ringkasan Disertasi: PPS Unair Surabaya.
- Suwondo, Kutut; Dirdjosanjoto; & Fernandez, Joe. 2010. *Otonomi Daerah: Ada & Untuk Siapa?*. Salatiga: Percik.
- Tandon, Rajesh; & Mohanty, Ranjita. 2002. *Civil Society and Governance*. New Delhi: Samskriti.
- Tarrow, Sidney. 1998. *Power in Movements: Social Movements and Contentious Politics*. New York: Cambridge University Press.
- Tilly, Charles. 1978. *From Mobilization to Revolution*. New York: Newbery Award Records, Inc.
- Triwibowo, Darmawan. 2006. *Gerakan Sosial: Wahana Civil Society bagi Demokratisasi*. Jakarta: LP3ES.
- Turner, Jonathan H. 1998. *The Structure of Sociological Theory*. Belmont, CA.: Wadsworth Publishing Company.
- Varma, S. P. 1987. *Teori Politik Modern*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wahyudi. 2005. *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani: Studi Kasus Reklaiming/Penjarahan Atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar Malang Selatan*. Malang: UMM Press.
- Wasserman, Stanley; & Faust, Katherine. 1994. "Sosial Network Analysis in the Sosial and Behavioral Sciences". *Social Network Analysis: Methods and Applications*. Cambridge University Press. pp. 1–27. ISBN 9780521387071.
- Wiguna, I Putu A.; Citrosiswyo, W., & Widodo, A. (eds.). 2009. *Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo*. Surabaya: PSKB ITS.
- Woodside, Arch G. 2010. *Case Study Research: Theory, Methods, and Practice*. Wagon Lane, Bingley, UK: Emerald Group Publishing Limited.
- Yin, Robert K. 2011. *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: The Guilford Press.
- Zanden, James W. Vander. 1988. *The Social Experience: An Introduction to Sociology*. New York: Random House.

Jurnal:

- Atkinson, Miriam; & Mulrnnan, Monica E. 2009. Lokal Protest and Resistance to the Rupert Diversion Project, Northern Quebec. *Atic*, Vol. 62, No. 4 (Dec. 2009), pp. 468-480.
- Batista, Israel. 1994. *Civil Society: A Paradigm or a new Slogan?*. *Ecumenical Review*. Vol. 46, Issue 1 (Jan., 1994), p. 12-20.
- Bendor, Jonathan; and Mookherjee, Dilip. 1987. Institutional Structure and the Logic of Ongoing Collective Action. *The American Political Science Review*, Vol. 81, No. 1 (Mar., 1987), pp. 129-154.
- Benford, Robert D. ; & Snow, David A. 2000. *Framing Processes and Social movements: An Overview and Assessment*. *Annual Review of Sociology*, Vol. 26 (2000), p. 611-639.
- Bevington, Douglas; & Dixon, Chris. 2005. *Movement-Relevant Theory: Rethinking Social movement Scholarship and Activism*. *Social Moevment Studies*, Vol. 4, No. 3 (December, 2005), p. 185-208.
- Buechler, Steven M. 1995. *New Social Movement Theories*. *The Sociological Quarterly*, Vol. 36, No. 3 (Summer, 1995), p. 441-464.
- Buechler, Steven M. 1993. *Beyond Resource Mobilization?Emerging Trends in Social movement Theory*. *The Sociological Quarterly*, Vol. 34, No. 2 (May, 1993), pp. 217-235.
- Chanddhoke, Neera. 2007. *New Social Movements Theories*. . *The Sociological Quarterly*, Vol. 36, No. 3 (Summer., 1995), p. 441-464.
- Clark, Wiliial Roberts. 1998. Agents and Structure: Two Views of Preferences, Two Views of Institutions. *International Studies Quarterly*, Vol. 42, No. 2 (Jun., 1998), pp. 245-270.
- Cook, Karen S. 1977. Exchange and Power in Networks of Interorganizational Relations. *The Sociological Quarterly*, Vol. 18, No. 1, Special Issue: Organization Analysis: Critique and Innovation (Winter, 1977), pp. 62-82.
- Cook, Karen S. ; and Emerson, Richard M. 1978. Power, Equity and Commitment in Exchange Networks. *American Sociological Review*, Vol. 43, No. 5 (Oct., 1978), pp. 721-739.
- Cook, Karen S. ; Emerson, Richard M. ; Gillmore, Mary R. ; and Yamagishi, Toshio. 1983. The Distribution of Power in Exchange Networks: Theory and Experimental Results. *American Journal of Sociology*, Vol. 89, No. 2 (Sep., 1983), pp. 275-305
- Curtis, Russell L., Jr. ; &Zurcher, Louis A., Jr. 1974. *Social movements: An Analytical Exploration of Organizational Forms*. *Sosial Problems*, Vol. 21, No. 3 (1974), pp. 356-370.

- De Santa Ana, Julio. 1994. *The Concept of Civil Society*. *Ecumenical Review*. Vol. 46, Issue 1 (Jan., 1994), p 3-11.
- Della Porta, Donatella. 2008. *Research on Social Movements and Political Violence*. *Published Online*: 15 July 2008. Springer Science + Business Media, LLC.
- Dvorakova, Vladimira. 2008. *Civil Society and Social Movements in Latin America and Central and Eastern Europe: A Comparative Approach*. *TenMund, Fortaleza*. V. 4, n. 7 (Jul/Dez., 2008), p. 334-351.
- Dweyer, F. Robert; & Walker, Orville C., Jr. 1981. Bargaining in an Asymmetrical Power Structure. *Journal of Marketing*, Vol. 45, No. 1 (Winter, 1981), pp. 104-115.
- Emerson, Richard M. 1976. Social Exchange Theory. *Annual Review of Sociology*, Vol. 2 (1976), pp. 335-362.
- Ethridge, Marcus E. 1987. Collective Action, Public Policy, and Class Conflict . *The Western Political Quarterly*, Vol. 40, No. 4 (Dec., 1987), pp. 575-592.
- Gale, Richard P. 1986. *Social movement and The State: The Environmental Movement, Countermovement, and Government Agencies*. *Sociological Perspectives*, Vol. 29, No. 2 (April, 1986), p. 2002-240.
- Gulati, Ranjay. . 1998. Alliances and Networks. *Strategic Management Journal*, Vol. 19, No. 4, Special Issue: Editor's Choice (Apr., 1998),pp. 293-317.
- Hadiwinata, Bob Sugeng. 2005. Civil Society: Pembangun dan Sekaligus Perusak Demokrasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 9, Nomor 1 (Juli, 2005), h. 1-22.
- Halton, Eugene Rochber. 1982. *Situation, Structure, and the Context of Meaning*. *The Sociological Quarterly*, vol. 23, No. 4, p. 455-457.
- Hannigan, John A. 1985. *Alain Touraine, Manuel Castells and Social movement Theory: A Critical Appraisal*. *The Sociological Quarterly*, Vol. 26, No. 4 (Winter, 1985), p. 435-454.
- Hollander, Jocelyn A. ; & Einwohner, Rachel L. 2004. Conceptualizing Resistance. *Sociological Forum*, Vol 19, No. 4 (Dec., 2004), pp. 533-554.
- Hollinger, David A. 2006. From Identity to Solidarity. *Daedalus*, Vol. 135, No. 4, On Identity (Fall, 2006), pp. 23-31.

- JacekSzmata, Jacek; John Skvoretz, John; Tad Sozanski, Tad; & Mazur, Joanna. 1998. Conflict in Networks. *Sociological Perspectives*, Vol. 41, No. 1 (1998), pp. 49-66.
- Jenkins, J. Craig. 1983. *Resource Mobilization Theory and the Study of Social movements*. *Annual Review of Sociology*, Vol. 9 (1983), pp. 527-553.
- Lawler, Edward J. 1992. Power Processes in Bargaining. *The Sociological Quarterly*. Vol. 33, No. 1 (Spring, 1992), pp. 17-34.
- Lovaglia, Michael, J. ; Skvoretz, John; Willer, David; and Markovsky, Barry. 1995. Negotiated Exchanges in Social Networks. *Social Forces*, Vol. 74, No. 1 (Sep., 1995), pp. 123-155.
- Lovett, Frank . 2009. Domination and Distributive. *The Journal of Politics*, Vol. 71, No. 3 (July 2009), pp. 817-830.
- Lovett, Francis N. 2001. Domination: A Preliminary Analysis. *The Monist*, Vol. 84, No. 1, Civic Republicanism and Political Philosophy (JANUARY 2001), pp. 98-112.
- Lucas, Jeffrey W. ; Younts, C. Wesley; Lovaglia, Michael J. ; and Markovsky, Barry. 2001. Lines of Power in Exchange Networks. *Social Forces*, Vol. 80, No. 1 (Sep., 2001), pp. 185-214.
- Kanter, Rosabeth Moss. 1968. Commitment and Social Organization: A Study of Commitment Mechanisms in Utopian Communities. *American Sociological Review*, Vol. 33, No. 4 (Aug., 1968), pp. 499-517.
- Klandermans, Bert. 1993. *A Theoretical Framework for Comparisons of Social movement Participation*. *Sociological Forum*, Vol. 8, No. 3 (Sept., 1993), p. 383-402.
- Klandermans, Bert. 1984. *Mobilization and Participation: Social-Psychological Expansions of Resource Mobilization Theory*. *American Sociological Review*, Vol. 49, No. 5 (Oct., 1984), pp. 583-600.
- Klandermans, Bert, Jose Manuel Sabucedo, Mauro Rodriguez, danMarga de Weerd. 2002. Identity Processes in Collective Action Participation: Farmers` Identity and Farmers` Protest in the Netherlands and Spain. *Political Psychology*, Vol. 23, No. 2 (Jun., 2002), pp. 235-251.
- Malena, Carmen; & Heinrich, Volkhart Finn. 2007. *Can We Measure Civil Society? A Proposal Methodology for International Comparative Research*. *Development in Practice*, Vol. 17, No. 3 (Jun., 2007), p. 338-352.

- Markovsky, Barry; Willer, David; and Patton, Travis. 1988. Power Relations in Exchange Networks. *American Sociological Review*, Vol. 53, No. 2 (Apr., 1988), pp. 220-236.
- McCarthy, John D., & Zald, Mayer N. 1977. Resource Mobilization and *Social movements*: A Partial Theory. *American Journal of Sociology*, Vol. 82, No. 6 (May, 1977), pp. 1212-1241.
- Meyer, JP., dan Allen, NJ. 2007. A Three Component Conceptualization of Organizational Commitment: Some Methodological Considerations. *Human Resource Management Review*, Vol. 1, pp. 61-98.
- Novenanto, Anton. 2009. "The Lapindo Case" by Mainstream Media. *Indonesian Journal of Sosial Sciencies*, Volume 1 No. 3, July-September 2009.
- Oliver, Pamela E. 1993. *Formal Models of Collective Action*. *Annual Review of Sociology*, Vol. 19 (1993), pp. 271-300.
- Passy, Florence; & Giugni, Marco. 2001. Sosial Network and Individual Perception: Explaining Differential Participation in *Social movements*. *Sociological Forum*, Vol. 15, No. 1 (Mar., 2001), pp.
- Pichardo, Nelson A. 1997. *New Social Movements: A Critical Review*. *Annual Review of Sociology*, vol. 23 Issue 1, p. 411.
- Pichardo, Nelson A. 1988. *Resource Mobilization: An Analysis of Conflicting Theoretical Variations*. *The Sociological Quarterly*, Vol. 29, No. 1 (Spring, 1988), pp. 97-110.
- Polleta, Francesca; and James M. Jasper. 2001. Collective Identity and Sosial movement. *Annual Review of Sociology*, Vol. 27, 283-305.
- Raval, R. K. 1972. An Essay on 'Phenomenology'. *Philosophy and Phenomenological Research*, Vol. 33, No. 2 (Dec., 1972), pp. 216-226.
- Rey, Cheryl; & Raju, Patricia. 1996. *Group Relative Deprivation: Cognitive Affective Components and Protest Orientation Among Indian South Africans*. *Journal of Sosial Psychology*. Vol. 136 Issue 5, p579-588.
- Rogalin, Christabel L. ; Soboroff, Shane D. ; and Lovaglia, Michael J. 2007. Power, Status, and Affect. *Sociological Fokus*, Vol. 40, No. 2 (May 2007), pp. 202-220.
- Quah, Stella R., & Sales, Arnaud (eds). 2000. *The International Handbook of Sociology*. London: SAGE Publikation. Ltd.

- Robinson, Ira E., Balkwell, James W., & Ward, Dawn McNeal. 1980. *Meaning and Behavior: An Empirical Study in Sociolinguistics*. *Social Psychology Quarterly*, Vol. 43, No. 2 (Jun., 1980), p. 253-258.
- Rose, Fred. 1997. *Toward a Class-Cultural Theory of Social movements: Reinterpreting New Social Movements*. *Sociological Forum*, Vol. 12, No. 3 (Sept., 1997), p. 461-494.
- Santoro, Wayne A. ; & McGuire, Gail M. 1997. *Social movement Insiders: The Impact of Institutional Activists on Affirmative Action and Comparable Worth Policies*. *Social Problems*, Vol. 44, No. 4 (Nov., 1997), p. 503-519.
- Schutz, Aaron. 2004. Rethinking Domination and Resistance: Challenging Postmodernism. *Educational Researcher*, Vol. 33, No. 1 (Jan. - Feb., 2004), pp. 15-23.
- Sembiring, Julius. 2011. Tanah Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 2, Juni 2011. Halaman 237-429.
- Sementelli, Arthur J. 2007. Authority, Domination, and the Administrative State. *Administrative Theory & Praxis*, Vol. 29, No. 1 (Mar., 2007), pp. 115-131.
- Simpson, Brent; & Macy, Michael W. 2001. Collective Action and Power Inequality: Coalition in Exchange Networks. *Social Psychology Quarterly*, Vol. 64, No. 1 (Mar., 2001), pp. 88-100.
- Suharko. 2005. Masyarakat Sipil, Modal Sosial dan Tata Pemerintahan yang Demokratis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 8, Nomor 3 (Maret, 2005), h. 263-290.
- Sundar, K. R. Shyam. 2007. *Trade Union and Civil Society: Issues and Strategies*. *Indian Journal of Industrial Relations*, Vol. 42, No. 4 (Apr., 2007), p. 713-734.
- Syahyuti. 2006. Nilai-Nilai Kearifan pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesia. *Forum Penelitian Agro-Ekonomi*. Volume 24 No. 1, Juli 2006: 14-17.
- Tarrow, Sidney. 2008. *Charles Tilly and the Practice of Contentious Politics*. *Social movement Studies*, Vol. 7, No. 3, (December 2008), p. 225-246.
- Thye, Shane R. ; Willer, David; and Markovsky, Barry. From Status to Power: New Models at the Intersection of Two. *Social Forces*, Vol. 84, No. 3 (Mar., 2006), pp. 1471-1495.
- Tilly, Charles. 1991. Domination, Resistance, Compliance. . . Discourse. *Sociological Forum*, Vol. 6, No. 3 (Sep., 1991), pp. 593-602.

- Tindall, D. B. . 2004. Sosial movement ParticipatonOver Time: An Ego-Network Approach to Micro-Mobilization. *Sociological Fokus*, Vol. 37, No. 2, May 2004, pp. 163-184.
- Turner, Scott. 1998. *Global Civil Society, Anarchy and Governance: Assesing an Emerging Paradigm*. *Journal of Pace Research*, Vol. 35, No. 1 (Jan, 1998), p. 25-42.
- Useem, Bert. 1998. Breakdown Theories of Collective Action. *Annual Review of Sociology*, Vol. 24 (1998), pp. 215-238.
- Usman, Sunyoto. 2002. Civil Society di Indonesia: SuatuTantangan. *JurnalIlmuSosialdanIlmuPolitik*. Volume 5, Nomor 3 (Maret, 2002), h. 379-391.
- Wahlstrom, Mattias; & Peterson, Abby. 2006. *Between the State and the Maarket Expanding the Concepts of "Political Opportunity Structure"*. *ActaSociologica*, Vol. 49, No. 4 (Dec., 2006), p. 363-377.
- Whitmeyer, Joseph M. 1999. Interest-Network Structures in Exchange Networks. *Sociological Perspectives*, Vol. 42, No. 1 (Spring, 1999), pp. 23-47.
- Wieviorka, Michel. 2005. *After New Social Movements*. *Social movement Studies*, Vol. 4, No. 1 (May, 2005), p. 1-19.
- Williams, Johnny E. 2002. *Linking Beliefs to Collective Action: Political Religious Beleiefs and the Civil Rights Movement*. *Sociological Forum*, Vol. 17, No. 2 (Jun., 2002), p. 203-222.
- Wright, S. C. &Lubensky, M. 2009. The struggle for sosial equality: Collective action versus prejudice reduction. In S. Demoulin, J. P. Leyens&J. F. Dovidio (Eds.), *Intergroup misunderstandings: Impact of divergent social realities* (pp. 291-310). New York: Psychology Press.
- Yamagishi, Toshio; Gillmore, Mary R. ; and Cook, Karen S. 1988. Network Connections and the Distribution of Power in Exchange. *American Journal of Sociology*, Vol. 93, No. 4 (Jan., 1988), pp. 833-851.
- Zhao, Shanyang. 1996. *The Beginning of the End or the End of the Beginning? The Theory Construction Movement Revisited*. *Sociological Forum*, Vol. 11, No. 2 (Jun., 1996), p. 305-318.
- Zomeren, Martijn Van. 2009. *Journal of Sosial Issues*, Vol. 65, No. 4, 2009, pp. 645-660.

DAFTAR INDEKS

A

Animal instinct,
Acting crowd,
Alternative Social movements,
Assembly perspective,
Assembling Processes,

C

Collective Behavior,
Crowd,
Contagion theory,
Common impulse,
Circular reactions,
Casual crowd,
Conventional crowd,
Cybernetics,
Collective action,
Collective excitement,
Coopting,
Civil society,

E

Established norms,
Expressive crowd,
Emergent Norm Theory,
Emotionality,

I

Irrationality,
Impulse,

B

Blumer,
Behavior,

D

Deviant behavior,
Destructive behavior,
Driving forces,

F

Fashions,
Fads,
Dispersed collectivity,

G

Group outbursts,
Group pathologies,
Group behavior,
Generalized beliefs,
Gossip,
Gustave LeBon,

H

Human history,
Heroic behavior,
Hostile beliefs,

Insecure Individuals,
Immediate action,

K

Ketegangan struktural,
Klasifikasi partisipan,

M

Mob Behavior,
Mass hysteria,
Macionis,
Mackay,
Mobs,
Millings,
Mobilization of participants,

Mental disturbances,
Mass behavior,
Masyarakat sipil,

P

Perilaku kolektif,
Precipitating factors,
Panic,
Public opinion,

R

Rumors,
Riots,
Robert Park,
Redemptive Social movements,
Reformative Social movements,

Hypnotic phenomenon,
Hysterical beliefs,
Herbert Blumer,

J

Jurgen Habermas,

L

Locher,
Lynchings,
LeBon,
Localized collectivity,
Leaders,
LSM,

N

Norm oriented beliefs,
New Social Movements,
Normal group activity,

O

Organized,
Old Social movements,
Outonomy and identity,
Organisasi Masyarakat Sipil,

S

Social movement,
Social Change,
Stolley,
Social unrest,

Revolutionary Social movements,
Ridicule,

Sociocybernetic,
Structural strain,
Symbolic interaction,
Sense of power,
Social control,
Spencer,
Smelser,
Suggestibility,
Sigmund Freud,
Spectators,
Singh,

T

Temporarily insane,
Tension,
Tactics,
The Emergent Norm Perspective,
The Individualist Theories,
The Ego Involve,

U

Unusual Behavior,
Unfamiliar,
Urban legends,
Uncertainty,

V

Vallue added theory,

W

Wish-fulfillment,

Z

Zanden,

Tentang penulis



Oman Sukmana, Lahir di Sumedang pada tanggal 09 Pebruari 1966. Menempuh pendidikan S-1 Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP UNPAD Bandung lulus tahun 1991; S-2 Psikologi Bidang Kajian Utama (BKU) Psikologi Sosial pada Program Pascasarjana UNPAD lulus tahun 1997; dan S3 Sosiologi di Fisipol, UGM. Pada tahun 2013 mengikuti *Sandwich Programs* pada *Departement of Sociology and Anthropology, Faculty of Social and Behavioral Sciences, Leiden University of Netherlands*. Sejak tahun 1991 menjadi dosen Kopertis VII Surabaya dpk pada FISIP UMM, pernah menjadi Sekretaris Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UMM (1998-1999), Pembantu Dekan III FISIP UMM (1999-2009), Anggota PANWASLU Kabupaten Malang (2003-2004), Kaprodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fisip, UMM (2014-2018). Selain aktif menulis buku dan bahan ajar, penelitian baik internal maupun eksternal, juga melaksanakan berbagai pengabdian pada masyarakat.

Sedangkan buku yang telah diterbitkan antara lain: *Etika Profesi Pekerjaan Sosial* (UMM Press, 1999), *Dasar-Dasar Psikologi Lingkungan* (Bayu Media, 2003), *Sosiologi dan Politik Ekonomi* (UMM Press, 2005), *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial* (Intrans Publishing, 2014, Penulis Team), dan *Mozaik Kebijakan Sosial Politik* (FISIP UMM 2015, Penulis Team). Sedangkan bahan ajar yang pernah ditulis antara lain: Psikologi Sosial (2001), Tingkah Laku Manusia dan Lingkungan Sosial (2002), Metode Pekerjaan Sosial (2006), Psikologi Pariwisata (2007), Bimbingan Sosial Perseorangan & Kelompok (2008), Analisa Statistik Sosial (2009), dan Manajemen Bencana (2015). Prestasi yang pernah diraih antara lain sebagai Dosen Berprestasi FISIP UMM tahun 2008.
